



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Halaman

	Daftar Isi	i
	Kata Pengantar	iii
BAB I	PENDAHULUAN	II 1
	A. Dasar Hukum.....	II 1
	B. Gambaran Umum Daerah	II 4
BAB II	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	II 1
	A. Visi dan Misi.....	II 1
	B. Tujuan dan Sasaran.....	II 2
	C. Strategi dan Arah Kebijakan.....	II 6
	D. Prioritas Pembangunan Daerah.....	II 13
	E. Tema Prioritas Pembangunan Daerah.....	II 16
BAB III	KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III 1
	A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III 1
	B. Pengelolaan Belanja/Keluaran Daerah.....	III 9
BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	IV 1
	A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV 1
	1. Pendidikan	IV 1
	2. Kesehatan.....	IV 29
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV 56
	4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV 67
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV 72
	6. Sosial	IV 80
	B. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV 93
	1. Tenaga Kerja	IV 93
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV 97
	3. Pangan	IV 102
	4. Lingkungan Hidup.....	IV 107
	5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	IV 122
	6. Pemerintahan Masyarakat dan Desa.....	IV 127
	7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV 131
	8. Perhubungan.....	IV 133
	9. Komunikasi dan Informatika.....	IV 141
	10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	IV 144
	11. Penanaman Modal.....	IV 149
	12. Kepemudaan dan Olahraga.....	IV 153
	13. Statistik.....	IV 163
	14. Budaya.....	IV 165
	15. Perpustakaan.....	IV 172
	16. Kearsipan	IV 176

C.	Urusan Pilihan	IV 180
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV 180
2.	Urusan Pertanian.....	IV 196
3.	Urusan Kehutanan.....	IV 208
4.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV 217
5.	Urusan Pariwisata	IV 231
6.	Urusan Industri	IV 245
7.	Urusan Perdagangan	IV 250
8.	Urusan Transmigrasi	IV 256
D.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV 258
BAB V	PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN	V 1
A.	Dana Dekonsentrasi	V 2
B.	Tugas Pembantuan	V 27
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	VI 1
A.	Kerjasama Antar Daerah.....	VI 1
B.	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	VI 3
C.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal	VI 27
D.	Pembinaan Batas Wilayah.....	VI 28
E.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	VI 30
F.	Pengelolaan Kawasan Khusus	VI 35
G.	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	VI 27
BAB VII	PENUTUP.....	VII 1
	LAMPIRAN :	
1.	Tabel Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun 2018	
2.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2017	

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun sebagai salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

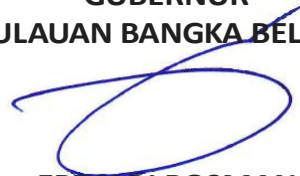
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menggambarkan arah kebijakan umum pemerintah daerah sepanjang tahun 2018, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini juga menggambarkan kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasi ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan yang ditunjang oleh seluruh *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa, selain mendatangkan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2018 masih terdapat hal-hal yang membutuhkan upaya peningkatan dan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu, catatan strategis dan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan masukan penting bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman serta bahan evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada waktu mendatang. Sekian dan terima kasih.

Pangkalpinang, Maret 2018

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



ERZALDI ROSMAN

BAB I



PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta pada Pasal 71 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran tersebut.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dibentuk di era reformasi di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Pada awal terbentuknya, di provinsi ini terdapat 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten, Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, maka wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Sebagai provinsi yang belum lama berdiri, tentu saja provinsi ini masih dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan "*Bumi Serumpun Sebalai*" ini, mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).
 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri A).
 26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

a. Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

b. Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,69 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.126,36 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,69 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 118,80 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2017 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;

- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

c. Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

d. Geologi

Kondisi geologi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (*quartz*) dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

e. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

f. Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 2,40 mm sampai dengan 480,20 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 186,10 mm. pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 26,90C sampai dengan 27,80C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih detailnya dapat diperhatikan Tabel II.9. Dari seluruh luas lahan, 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel I.1.
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
Pertanian Sawah	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771	25.058
Tegalan	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038
Ladang	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435
Perkebunan	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064
Hutan Rakyat	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315
Pengembalaan	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)					2017
	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
diusahakan)						
Lain-Lain (pekarangan)	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810
Permukiman	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.642.414	1.664.018

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 489.080 Ha dan perkebunan sebesar 391.064 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

(1) Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi dilakukan melalui penataan batas kawasan hutan produksi, identifikasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi), peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan produksi (kayu dan bukan kayu), pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 436.647,89 Ha, dengan perincian :

- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan dua) Ha;
- Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 67.083,52 (enam puluh tujuh ribu delapan puluh tiga koma lima dua) Ha;
- Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.497,75 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) Ha;
- Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.451,10 (seratus enam ribu empat ratus lima puluh satu koma satu nol) Ha;

- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 43.595,77 (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima koma tujuh tujuh) Ha; dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 55.650,83 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh koma delapan tiga) Ha.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional, pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah, penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya, meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura, mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala, penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan, penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar, pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dan membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha, meliputi:
 - a.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
 - a.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
 - a.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
 - a.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;

- a.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
- a.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
- a.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.

- b. Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
 - b.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
 - b.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
 - b.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
 - b.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
 - b.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
 - b.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
 - b.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.

- c. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
 - c.1 Perkebunan Besar meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.
 - c.2 Perkebunan rakyat meliputi :
 - (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
 - (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
 - (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
 - (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
 - (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
 - (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.

- d. Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
 - d.1 Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
 - d.2 Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
 - d.3 Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
 - d.4 Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
 - d.5 Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
 - d.6 Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
 - d.7 Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

(3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan, menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap, pengelolaan sumber daya air

secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar, pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar, penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan), pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap, dan pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi untuk pengembangan, meliputi :

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan, dan perikanan tangkap yang telah didukung pelabuhan perikanan (2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan 18 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)).

Dilain pihak pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha, Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

(4) Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, dengan rincian:

- a. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
- b. Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

(5) Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung,

membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri, membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri, penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan, dan mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan adalah:

- a. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan, identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh, penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung, revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada, pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi, dan peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

- a. Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a.1 Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
 - a.2 Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - a.3 Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
 - a.4 Taman wisata laut;
 - a.5 Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - a.6 Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya, wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b.1 Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
 - b.2 Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;

- b.3 Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
- b.4 Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di kabupaten/kota;
- b.5 Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
- b.6 Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.
- c. Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

(7) Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan, penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota, penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan, identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

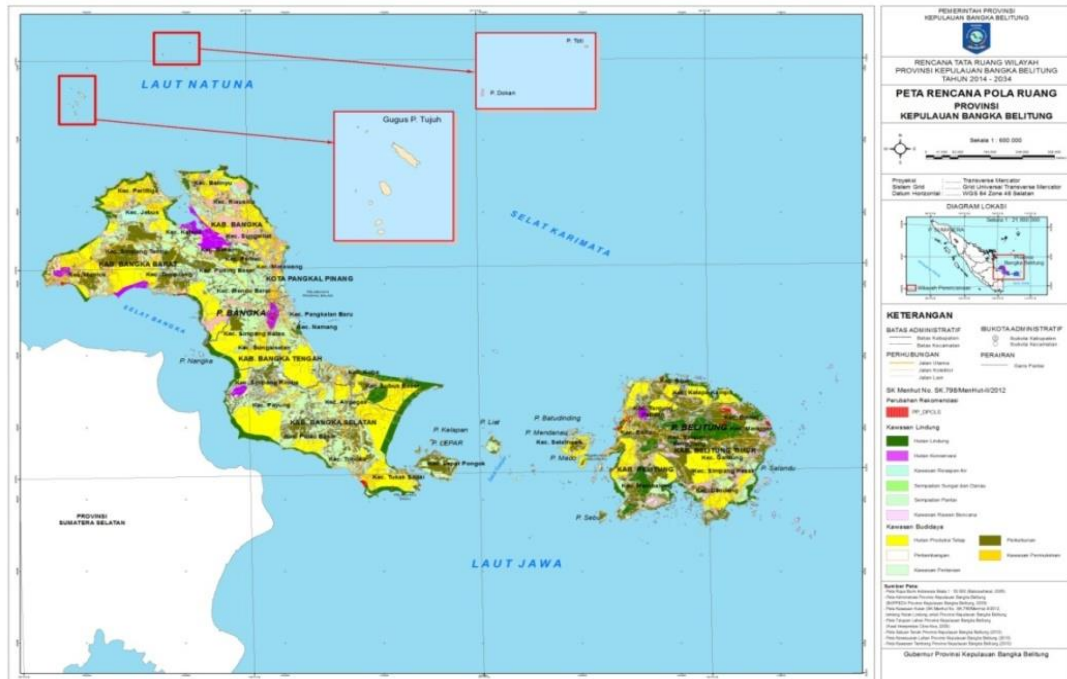
(8) Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

- a. Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
- b. Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
- c. Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
- d. Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

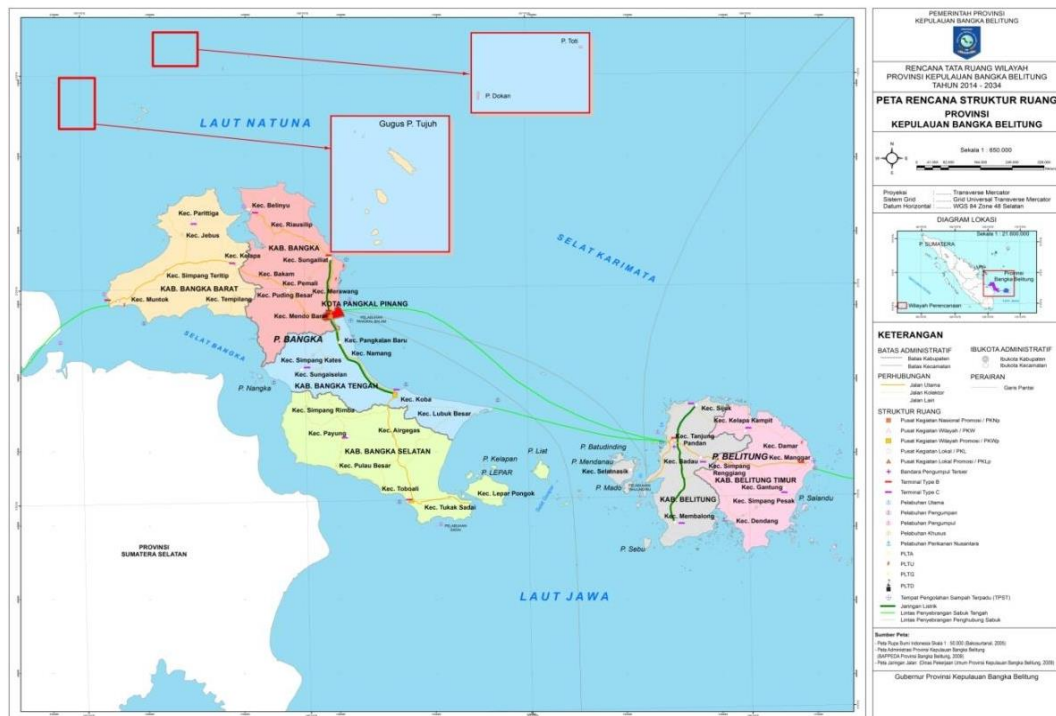
Kesemua peruntukan ini telah dipetakan kedalam pola ruang Gambar I.1 dan Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambar I.2.

Gambar I.1
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar I.2
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

h. Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan 2016-2017 sebesar 2,07 persen. Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah sebesar 115.742 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,80 persen. Selain faktor natalitas dan mortalitas, faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah tingginya angka migrasi. Tingginya migrasi ke Bangka Belitung disebabkan karena berkembangnya sektor pariwisata yang diindikasikan dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor perdagangan, jasa dan restoran.

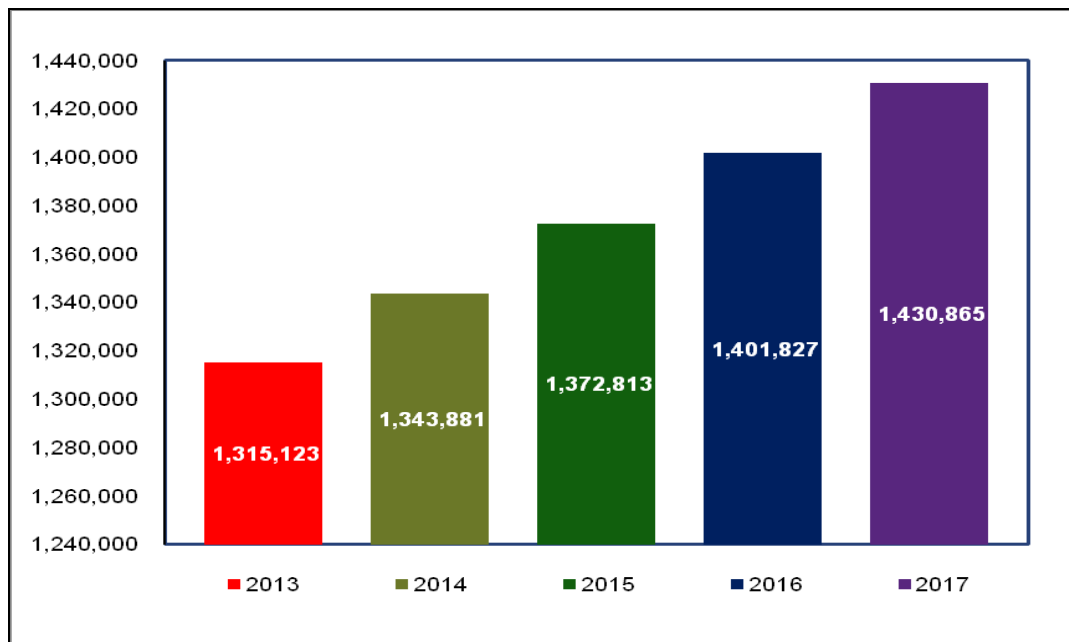
Tabel I.2

Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
Kepulauan Bangka Belitung	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Grafik I.1
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 – 2017



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Pada tahun 2012 penduduk Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.298.186 jiwa dan meningkat menjadi 1.430.865 pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi.

2. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

1. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambután, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel I.3.

Tabel I.3
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
I. LAHAN PERTANIAN		
I.1.	Lahan Sawah	22.771
	a. Irigasi	4.602
	b. Tadah hujan	16.397
	c. Pasang surut	270
	d. Lebak	1.502
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.163.881
	a. Tegal	117.376
	b. Ladang	28.147
	c. Perkebunan	367.848
	d. Hutan rakyat	42.637
	e. Pengembalaan	2.263
	f. Sementara tidak diusahakan	67.415
	g. Lain-lain	538.195
	Jumlah	1.186.652

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

2. Potensi Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 tercatat 657.378,26 Ha yang terdiri dari 436.647,89 Ha Hutan Produksi, 184.276,95 Ha Hutan Lindung, 35.750,84 Ha Hutan Konservasi dan 692,58 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4
Luas Hutan Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	432.882,82	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89
Hutan Lindung	189.965	189.965	189.965	189.965	184.276,95
Hutan Konservasi	35.473	35.473	35.473	35.473	35.750,84
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

3. Potensi Kelautan, Pesisir dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada tabel I.5.

Tabel I.5
Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Potensi Produksi (Ton)					Produksi Tahun (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)
1.	Perikanan Tangkap	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	199.241,40	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7
2.	Perikanan Budidaya	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	2.939,12	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.844,97

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 tercatat sebesar 3.844,97 ton. Produksi ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.618,87 ton. Kenaikan produksi budidaya pada tahun 2016 disumbangkan oleh produksi udang vannamei, rumput laut dan kerang-kerangan.

b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 208.019,7 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 196.704,00 Ton dimana jumlah produksinya 196.704,00 ton. Hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

4. Potensi Pertambangan

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpu pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang

utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel I.9 berikut.

Tabel I.6
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(3)
1	Pasir Kwarsa	1.482.301 ton
2	Pasir Bangunan	666.188,06 ton
3	Kaolin	205.487,50 ton
4	Granit	55.508,29 m3
5	Diabas	89.551,12 m3

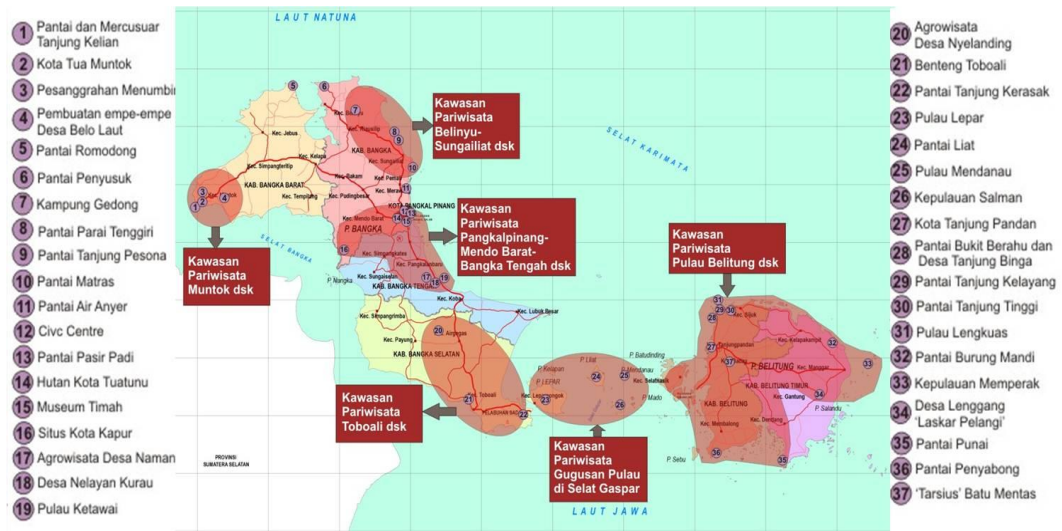
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Potensi Pariwisata

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis juga mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar I.4 berikut.

Gambar I.3
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Tabel I.7
Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279	384.596
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143	7.497
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422	390.465

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 238.405 orang meningkat di tahun 2014 menjadi 372.763 orang dan pada tahun 2017 sebesar 369.422 orang.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan menyusun rencana pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan suatu daerah merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi. Selain pemerintah, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor.

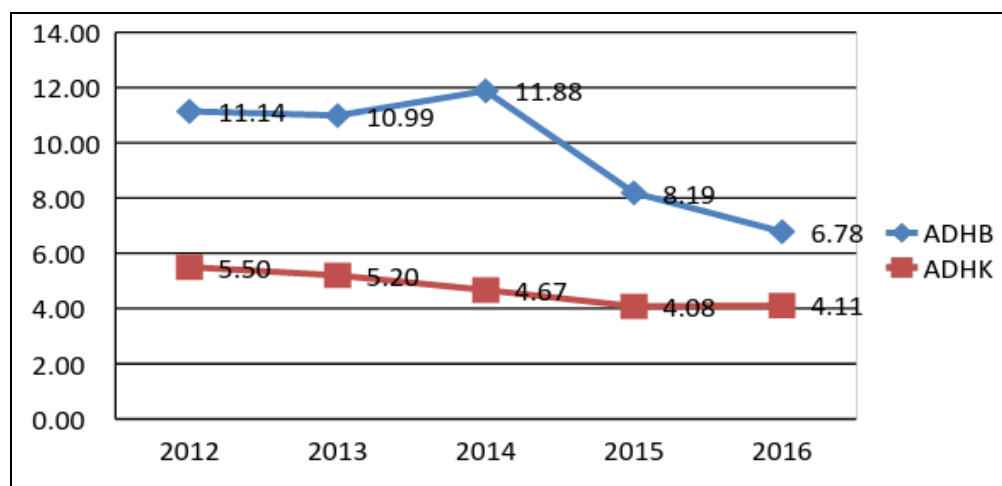
Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja keras yang terarah, sehingga pencapaiannya tepat sasaran dan tepat waktu.

Tabel I.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010=100)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (miliar rupiah), 2014-2018

PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Grafik I.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2016
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan di dalam negeri. Pada periode tahun 2015-2016 lebih dari setengah 17 lapangan usaha ekonomi penyumbang PDRB telah mengalami pertumbuhan, dan laju pertumbuhannya relatif memberikan andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditahun 2016 sehingga tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

1.) Struktur Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi

berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010. Perkembangan sektor-sektor pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel II.13 dan Tabel II.14. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; serta sektor industri pengolahan merupakan 4 (empat) sektor utama yang relatif dominan menggerakkan perekonomian daerah. Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, diikuti oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori pertambangan dan penggalan.

Tabel I.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014 –2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalan	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik, gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7
Pengadaan Air	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estate	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Jasa Lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
Produk Domestik Regional Bruto	56.373,6	60.987,3	65.048,2	69.861,2	73.069,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel I.10

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 – 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557.7	8.254.3	8.743.5	9.116.9	9.083.8
Pertambangan dan Penggalan	6.230.2	6.354.1	6.458.1	6.491.1	6.633.0
Industri Pengolahan	10.143.3	10.270.4	10.400.6	10.688.4	11.363.1
Pengadaan Listrik, gas	31.5	35.6	38.9	43.7	45.9
Pengadaan Air	7.3	7.7	8.1	8.6	9.4
Konstruksi	3.414.7	3.552.4	3.760.1	4.021.6	4.252.1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil	5.846.6	6.139.5	6.402.1	6.727.7	7.259.8
Transportasi dan Pergudangan	1.484.8	1.570.8	1.662.3	1.752.3	1.892.2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931.0	1.000.6	1.034.8	1.086.5	1.136.5
Informasi dan Komunikasi	740.2	790.9	849.0	926.9	1.002.8
Jasa Keuangan	728.3	766.6	807.9	860.0	881.3
Real Estate	1.312.6	1.403.9	1.442.0	1.494.8	1.572.5
Jasa Perusahaan	108.1	115.7	120.3	120.4	127.5
Administrasi Pemerintahan	2.014.4	2.149.8	2.337.1	2.478.7	2.604.2
Jasa Pendidikan	903.7	964.9	1.059.1	1.139.3	1.183.3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475.3	500.6	533.8	559.6	605.4
Jasa Lainnya	261.0	281.7	304.6	334.4	354.9
Produk Domestik Regional Bruto	42.190.9	44.159.4	45.962.3	47.850.8	50.007.8

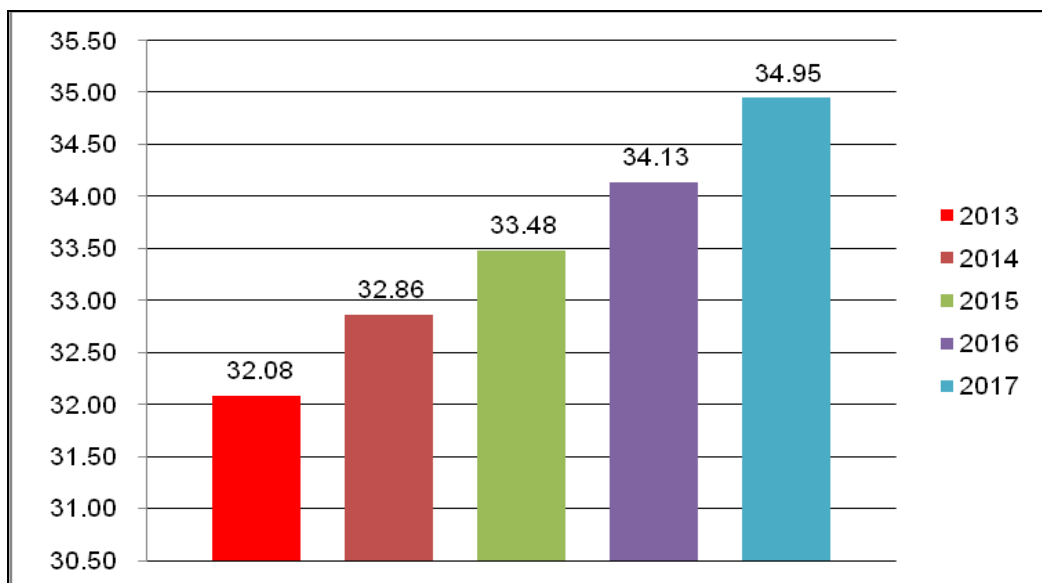
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

2.) PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik I.3.

Grafik I.3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

BAB II



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah..
- 2. **Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;**
Pernyataan misi ini mengandung makna:
 - a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3. **Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- 4. **Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
- 5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
 - b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi
- 6. **Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
 - b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
 - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
 - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
 - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran

- Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
- Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
 - Ketersediaan Air Baku (M3)
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
 - Persentase kawasan permukiman yang tertata
 - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
 - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
 - Persentase armada pengangkutan
 - Persentase jalan kondisi mantap

Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka

Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai rata-rata delapan area perubahan
 - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek hak-hak politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:

- Indeks Air
- Indeks Udara
- Indeks Tutupan Lahan
- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refoemasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan antar lain sebagai berikut :

C.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanani;
 - b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - c. Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
 - e. Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
3. Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung

- c. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
- d. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

C.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan arah kebijakan Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
 - b. Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
 - c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
 - e. Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
 - d. Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
 - f. Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

C.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif , peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata

- b. Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
 - d. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, peningkatan budaya, prestasi kepemudaan serta olah raga dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
 - e. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
 - f. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - g. Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
 - b. Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
 - c. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
 - d. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - e. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
 - f. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
 - g. Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
 - h. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
3. Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
- a. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
 - b. Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

C.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
- b. Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk sumber daya mineral.
- c. Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral.

- d. Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertambangan khususnya sektor sumber daya mineral.
- e. Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis industri dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
- b. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
- c. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
- d. Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
- e. Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
- f. Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya kemandirian energi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah dengan arah kebijakan Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya belanja publik pemerintah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan arah kebijakan Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Pengangguran dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan peluang kesempatan kerja
- b. Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat

harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Menurunnya angka Inflasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
- b. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
2. Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasarmasyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
2. Meningkatkan penataan kawasan permukiman dengan arah kebijakan Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
3. Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan

2. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung jalan dan terminal
3. Meningkatkan aksesibilitas dengan arah kebijakan Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. peningkatan mutu layanan pendidikan.
 - b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
 - c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
- b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
- d. Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
4. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
5. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan

6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang efektif dan efisien dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
 - c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
 - d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
 - e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
 - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)

2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi dengan arah kebijakan Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
 - b. Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur

Strategi dan Arah Kebijakan untuk pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan dilakukan dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air dengan arah kebijakan Pengendalian kualitas air
2. Meningkatkan kualitas Udara dengan arah kebijakan pengendalian kualitas udara
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan tutupan lahan
 - b. Pengembangan Perhutanan Sosial
4. meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan kawasan TPA Regional

D. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka

Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

6. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/entrepreneur bidang pariwisata di Babel

9. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis

bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

E. Tema Prioritas Pembangunan Daerah

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia".
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan "Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas".

3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan tanggap bencana”.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
			2 Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	2 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan
			3 Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	3 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
			4 Meningkatnya produksi sektor pertambangan	4 Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
			5 Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan
			6 Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2	Meningkatkan pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Pengeluaran pemerintah perkapita	1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase Pertumbuhan belanja pemerintah daerah
		2 Pendapatan	1 Menurunnya angka	1 Persentase Angka Pengangguran

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		perkapita masyarakat	Pengangguran	
			2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan
			3 Menurunnya angka Inflasi	3 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			4 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Persentase laju pertumbuhan Penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas				
3	Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	1 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah;	1 Terbangunnya Daerah irigasi (ha) 2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai 2 Persentase kawasan permukiman yang tertata 3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut 2 Persentase armada pengangkutan 3 Persentase jalan kondisi mantap
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
4	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah	1 Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
		gabungan, rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)		
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
6	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan
				2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP
				3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
				4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			2 Birokrasi yang efektif dan efisien	1 Indeks Profesionalitas ASN
			3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
				2 Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatkan pembangunan	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1 Skor aspek kebebasan sipil

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
	demokrasi			1 Skor aspek hak-hak politik 1 Skor aspek lembaga demokrasi
Misi VI . Ppengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup				
8	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tabel 2.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah							
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan peRkebunan	1	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah pertanian berkelanjutan
						2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
						3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan
		2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilyah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
						5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
						7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata
						8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
						9	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
						11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
						12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
						13	Meningkatkan pendapatan asli daerah
6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8	Menurunnya angka Pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat		

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4		
					menciptakan lapangan pekerjaan
		9	Menurunnya angka kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10	Menurunnya angka Inflasi	16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas					
3	Meningkatnya Infrastruktur	7	PENGEMBANGAN	12	Meningkatkan
				18	Meningkatkan ketersediaan

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI
1	2	DAN	3	4	
dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR		pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah		dan keberfungsian infrastruktur pertanian
				19	Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
		13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
				21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman
				22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
				24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
				25	Meningkatkan aksesibilitas
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal					
4 Meningkatkan Pendidikan Masyarakat	8 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
						27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat							
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	PEMBANGUNAN KESEHATAN	16	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	28	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi							
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	10	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
						30	Peningkatan tata kelola pengawasan
						31	Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
						32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
						33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
				18	Birokrasi yang efektif dan efisien	34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi

TUJUAN		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN		STRATEGI	
1		2		3		4	
						35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
				19	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
						37	Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	11	PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	38	Menciptakan iklim berdemokarsi yang kondusif
						39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
						40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup							
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21	Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
						42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya tata kelola	13	PENGENDALIAN	22	Peningkatan Kualitas	43	Meningkatkan kualitas air

TUJUAN	UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
lingkungan hidup	LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan	
			44 Meningkatkan kualitas Udara
			45 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			46 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan

BAB III



KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 11 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan aturan tersebut, setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Dana Perimbangan;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan didalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c) Pajak Air Permukaan (PAP);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
- b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
- c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
- d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang sangat besar sehingga memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi. Oleh karena itu instansi pemungut diharapkan dapat merumuskan dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi berdasarkan potensi dan aturan yang berlaku. Strategi yang dilakukan secara tepat dan dengan kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dari setiap UPTD/Samsat pada kab/kota serta Seksi terkait pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya peningkatan PAD;
- b) Mengupayakan sumber-sumber objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial lainnya melalui pendataan;
- c) Mengusulkan dan menetapkan payung hukum sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber PAD;
- d) Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar pemungutan atas sumber-sumber pendapatan yang telah menjadi obyek PAD;
- e) Mengintensifkan penagihan kepada wajib pajak yang telah terdata sebagai wajib pajak daerah;
- f) Merencanakan kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah kedepan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan pada tahun 2016, meliputi:

- a) Meningkatkan kinerja petugas pendataan dan penagih pajak daerah untuk lebih intensif melakukan pendataan dan penagihan;

- b) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap triwulan untuk membahas permasalahan yang ada serta solusinya dengan seluruh UPTD terhadap upaya pencapaian target pajak daerah;
- c) Melakukan evaluasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan retribusi daerah per triwulan, per semester dan per tahun;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha intensif penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh UPTD BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah;
- f) Melaksanakan rapat koordinasi mengenai PBB, BPHTB dan PPh;
- g) Sosialisasi Perda Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada tahun 2018 upaya-upaya yang dilakukan BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah, antara lain:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah dan
- b) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan/Penerimaan Daerah

Berdasarkan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 setelah perubahan APBD, target penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2.487.065.640.565,87 dengan realisasi sebesar Rp 2.564.417.524.733,35 atau 103,11 %. Adapun rincian penerimaan pendapatan daerah tersebut, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018, berdasarkan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2018 telah direncanakan dengan target sebesar Rp 789.629.819.565,87 dan sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp 850.479.397.331,35 atau sebesar 107,50 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari penerimaan PAD Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Rokok secara keseluruhan ditargetkan Rp 669.996.399.762,00 dengan realisasi sebesar Rp 787.235.420.038,83 atau 117,50 %.

Secara keseluruhan penerimaan dari sektor Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2018, dan semua pajak daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

2) Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 16.438.195.604,87 dengan realisasi sebesar Rp 7.604.027.047,00 atau 46,26%.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta. Pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 8.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.114.092.291,88 atau 60,17 %.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada Tahun Anggaran 2018 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp 94.695.224.199,00 dengan realisasi sebesar Rp 50.525.857.953,64 atau 53,36 %.

b. Dana Perimbangan

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum;
- 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan penerimaannya sebesar Rp 1.685.118.643.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.701.620.949.552,00 atau 99,03 % dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 188.486.286.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 215.555.879.603,00 atau 114,36 %.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.018.673.218.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.018.435.174.809,00 atau 99,98%.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 477.959.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 467.629.895.140,00 atau 102,20 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- 1) Dana Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

- 4) Sumbangan Pihak Ketiga
- 5) Pendapatan Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 12.317.177.850,00 dari Sumbangan Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp 12.317.177.850,00 atau 100,00 %. Adapun secara rinci penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagai berikut:

- 1) Sumbangan Pihak Ketiga , pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp 1.232.468.100,00 atau 4,11 %

Daftar target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Bagian Pendapatan Asli Daerah	7.487.065.640.565,87	710.039.712.453,58	(27.152.380.481,58)	107,71
1.1.1	Pajak daerah	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117.239.020.276,83	117,50
1.1.1.01.12	Pajak Kendaraan Bermotor	197.962.280.200,00	208.756.992.548,00	10.794.712.348,00	105,45
1.1.1.03.12	Bea balik nama Kendaraan Bermotor	174.827.943.800,00	230.410.242.975,00	55.582.299.175,00	131,79
1.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	214.871.445.622,00	265.482.395.526,00	50.610.949.904,00	123,55
1.1.1.01.15	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	7.800.000.000,00	10.091.504.016,83	2.291.504.016,83	129,38
1.1.1.01.16	Pajak rokok	74.534.734.140,00	72.494.284.973,00	2.040.449.167,00	97,26
1.1.2	Retribusi Daerah	16.438.195.604,87	7.604.027.047,00	(8.834.168.557,87)	-46,26
1.1.2.01	Retribusi jasa umum	11.207.807.662,00	2.826.051.500,00	(8.381.756.162,00)	-25,22
1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	660.807.662,00	518.771.500,00	(142.036.162,00)	-78,51
1.1.2.01.04	Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta	9.700.000.000,00	789.000.000,00	(8.911.000.000,00)	-8,13
1.1.1.01.05	Retribusi pelayanan Pendidikan	847.000.000,00	1.518.280.000,00	671.280.000,00	179,25
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	4.040.387.942,87	4.001.086.971,00	(39.300.971,87)	-99,03
1.1.2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.385.387.942,87	3.561.643.471,00	176.255.528,13	105,21
1.1.2.03	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangga	40.000.000,00	78.860.000,00	38.860.000,00	197,15

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	rahan/ Villa				
1.1.2.05	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	65.000.000,00	150.325.000,00	85.325.000,00	231,27
1.1.2.08	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	550.000.000,00	210.258.500,00	(339.741.500,00)	-38,23
1.1.2.03	Retribusi perizinan tertentu	1.190.000.000,00	776.888.576,00	(413.111.424,00)	-65,28
1.1.2.03.01	Retribusi izin trayek	75.000.000,00	40.500.000,00	(34.500.000,00)	-54,00
1.1.2.03.02	Retribusi izin usaha perikanan	115.000.000,00	133.304.576,00	18.304.576,00	115,92
1.1.2.03.04	Retribusi Perpanjangan IMTA	1.000.000.000,00	603.084.000,00	(396.916.000,00)	-60,31
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	(3.385.907.708,12)	-60,17
1.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Swasta	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	(3.385.907.708,12)	-60,17
1.1.3.03.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Swasta	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	(3.385.907.708,12)	-60,17
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	94.692.224.199,00	50.525.857.953,64	(3.385.907.708,12)	-53,36
1.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	660.000.000,00	2.152.873.650,00	1.492.873.650,00	326,19
1.1.4.01.19	Penjualan Aset Daerah	660.000.000,00	2.152.873.650,00	1.492.873.650,00	326,19
1.1.4.02	Jasa Giro	20.087.756.227,00	6.037.597.540,00	(14.050.158.687,00)	30,06
1.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	20.087.756.227,00	6.037.597.540,00	(14.050.158.687,00)	30,06
1.1.4.03	Pendapatan Bunga	37.068.462.068,00	6.747.219.912,00	(30.321.242.156,00)	18,20
1.1.4.03.01	Rekening Deposito PADA Bank BRI	37.068.462.068,00	6.747.219.912,00	(30.321.242.156,00)	18,20
1.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi	316.800.061,00	290.753.635,00	290.753.635,00	91,78
1.1.4.06.01	Kerugian Uang Daerah	316.800.061,00	290.753.635,00	290.753.635,00	91,78
1.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan	2.994.734.797,00	20.385.898,14	(2.714.348.898,86)	9,36

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerjaan				
1.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	2.994.734.797,00	20.385.898,14	(2.714.348.898,86)	9,36
1.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	10.814.131.300,00	13.189.773.842,00	2.375.642.542,00	121,97
1.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	10.299.745.312,50	12.245.470.523,00	1.945.725.210,50	118,89
1.1.4.07.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	514.385.987,50	944.303.319,00	429.917.331,50	183,58
1.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	7.654.947.182,32	3.425.177.196,86	(4.229.769.985,46)	44,74
1.1.4.10.07	Pendapatan Dari Pengembalian Bendahara Pengeluaran	7.654.947.182,32	3.425.177.196,86	(4.229.769.985,46)	44,74
1.1.4.15	Lain-Lain Penerimaan	3.598.392.563,68	1.561.502.322,81	(2.036.890.240,87)	43,39
1.1.4.15.02	Setoran PT. Taspen	825.236.352,68	220.022.608,00	(605.213.744,68)	26,66
1.1.4.15.03	Setoran PT. Jasa Raharja	1.746.332.242,00	960.000.000,00	(786.332.242,00)	54,97
1.1.4.15.04	Setoran KUPEM	1.026.823.969,00	48.799.914,00	(978.024.055,00)	4,75
1.1.4.15.05	Setoran Lainnya	-	332.679.800,81	332.679.800,81	-
1.1.4.16	pendapatan BLUD	11.500.000.000,00	16.840.573.956,83	5.340.573.956,83	146,44
1.1.4.16.01	pendapatan BLUD	11.500.000.000,00	16.840.573.956,83	5.340.573.956,83	146,44
1.2	Dana perimbangan	1.685.118.643.150,00	1.701.620.949.552,00	16.502.306.402,00	100,54
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	(54.991.907.322,00)	114,36
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	55.556.841.299,00	53.519.592.074,00	(2.037.249.225,00)	96,33
1.2.1.01.01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	32.473.644.515,00	19.858.594.883,00	(12.615.049.632,00)	61,15
1.2.1.01.03	Bagi Hasil dari pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasala 21	23.083.196.784,00	3.760.330.472,00	(19.322.866.312,00)	145,82
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA	132.929.444.851,00	162.036.287.529,00	29.106.842.678,00	121,90
1.2.1.02.01	Bagi Hasil Iuran Hak Penguasaan Hutan	-	360.481.907,00	360.481.907,00	-

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.1.02.02	Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	72.013.051,00	110.251.083,00	38.238.032,00	153,10
1.2.1.02.03	Bagi Hasil Reboisasi	726.600.150,00	178.426.800,00	(548.173.350,00)	24,56
1.2.1.02.04	Bagi Hasil luran tetap (Land rent)	37.922.959.339,00	36.256.868.597,00	(1.666.090.742,00)	95,61
1.2.1.02.05	Bagi hasil Dari luran Eksplorasi Dan luran Eksploitasi (Royalti)	88.643.679.263,00	119.467.104.739,00	30.823.425.476,00	134,77
1.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	5.564.193.048,00	5.663.154.403,00	98.961.355,00	101,78
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	(238.043.191,00)	99,98
1.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	(238.043.191,00)	99,98
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	(238.043.191,00)	99,98
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	477.959.139.000,00	467.629.895.140,00	(10.329.243.860,00)	96,29
1.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	477.959.139.000,00	467.629.895.140,00	(10.329.243.860,00)	96,29
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	100,00
1.3.5	Sumbangan Pihak ketiga	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	100,00
1.3.5.01	Sumbangan Pihak ketiga	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	100,00
1.3.5.01.01	Sumbangan Pihak ketiga	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	100,00
JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH					

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. PENGELOLAAN BELANJA/KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	
				KEUANGAN (Rp)	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
1	Belanja Pegawai	705.272.537.397,66	100	659.760.322.587,62	93,55	(45.512.214.810,04)	6,45
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	812.500.000,00	-	0	0	(812.500.000,00)	100
4	Belanja Hibah	281.677.752.950,20	100	268.038.087.969,00	95,16	(13.639.664.981,20)	4,84
5	Belanja Bantuan Sosial	718.910.000,00	100	479.075.000,00	66,64	(239.835.000,00)	33,36
6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	277.927.277.800,00	100	261.064.334.164,64	93,93	(16.862.943.635,36)	6,07
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	192.487.959.172,00	100	170.854.282.754,76	88,76	(21.633.676.417,24)	11,24
8	Belanja Tidak Terduga	2.296.000.000,00	100	59.757.300,00	2,60	(2.236.242.700,00)	97,40
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1.461.192.937.319,86	100	1.360.255.859.776,02	93,09	(100.937.077.543,84)	6,91

a) Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.135.511.218.578,25 dengan realisasi sebesar Rp 1.010.184.299.315,78 atau 88,96 % dengan uraian sebagai berikut :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 42.759.193.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.801.916.350,00 atau 88,41 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.957.277.250,00 atau 11,59 % .

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 747.616.658.181,25 dengan realisasi sebesar Rp 656.285.232.195,14 atau 87,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp 91.331.425.986,11 atau 12,22 %.

(3) Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 345.135.366.797,00 dengan realisasi sebesar Rp 316.097.150.770,64 atau 91,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp 29.038.216.026,36 atau 8,41 %.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Belanja Langsung					
2.1	Belanja Pegawai (belanja honor pegawai)	42.759.193.600,00	37.801.916.350,00	88,41	(4.957.277.250,00)	11,59
2.2	Belanja Barang dan Jasa	747.616.658.181,25	656.285.232.195,14	87,78	(91.331.425.986,11)	12,22
2.3	Belanja Modal	345.135.366.797,00	316.097.150.770,64	91,59	(29.038.216.026,36)	8,41
	Jumlah Belanja langsung	1.135.511.218.578,25	1.010.184.299.315,78	88,96	(125.326.919.262,47)	11,04

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b) Surplus/Defisit

Dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 defisit dianggarkan sebesar Rp 109.638.515.332,24 dengan realisasi surplus sebesar Rp 193.977.365.641,55 atau -2,76%.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 109.638.515.332,24 dengan realisasi sebesar Rp 109.638.515.332,24 atau 100 %, dengan uraian sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Penerimaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu dianggarkan sebesar Rp 109.638.515.332,24 dengan realisasi sebesar Rp 109.638.515.332,24 atau 100%.

(2) Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan Pengeluaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

(3) SiLPA Tahun Berkenaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp 303.615.880.973,79 dimana SiLPA tersebut sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

Jumlah SiLPA tersebut di atas dapat berubah mengingat angka-angka yang disajikan merupakan angka-angka sementara yang belum diperiksa BPK-RI (*unaudited*).

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah, Pengeluaran dan SILPA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	Penerimaan pembiayaan Daerah				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	-	0
1.1					
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 1	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	-	0
2	Pengeluaran pembiayaan Daerah				
2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	-	-	-	
2.3	Pembayaran Pokok Utang				
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah 2	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	-	0
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	303.615.880.973,79	303.615.880.973,79	

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.5
Rekapitulasi Target dan Realisasi APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) :				
1.1.1	Pajak Daerah	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117.239.020.276,83	17,50
1.1.2	Retribusi Daerah	16.438.195.604,87	7.604.027.047,00	(8.834.168.557,87)	-53,74
1.1.3	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	(3.385.907.708,12)	-39,83
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	94.692.224.199,00	50.525.857.953,64	(44.169.366.245,36)	-46,64
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.	789.629.819.565,87	850.479.397.331,35	60.849.577.765,48	7,71
1.2	Dana Perimbangan :				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00	27.069.593.453,00	14,36
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	(238.043.191,00)	-0,02
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	477.959.139.000,00	467.629.895.140,00	(10.329.243.860,00)	-2,16
	Jumlah Dana Perimbangan 2	1.685.118.643.150,00	1.701.620.949.522,00	16.502.306.402,00	0,98
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :				
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	-	0
	Total Pendapatan / Penerimaan Daerah (1+2+3)	2.487.065.640.565,87	2.564.417.524.733,35	77.351.884.167,48	3,11
II	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	705.272.537.397,66	659.760.322.587,62	(45.512.214.810,04)	-6,45
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	812.500.000,00	-	(812.500.000,00)	0
2.1.4	Belanja Hibah	281.677.752.950,20	268.038.087.969,00	(13.639.664.981,20)	-4,84
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	718.910.000,00	479.075.000,00	(239.835.000,00)	-33,36
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	277.927.277.800,00	261.064.334.164,64	(16.862.943.635,36)	-6,07
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota/Desa	192.487.959.172,00	170.854.282.754,76	(21.633.676.417,24)	-11,24
2.1.8	Belanja tak terduga	2.296.000.000,00	59.757.300,00	(2.236.242.700,00)	-97,40
	Jumlah Belanja Tidak Langsung 1	1.461.192.937.319,86	1.360.255.859.776,02	(100.937.077.543,84)	-6,91
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	42.759.193.600,00	37.801.916.350,00	(4.957.277.250,00)	-11,59
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	747.616.658.181,25	656.285.232.195,14	(91.331.425.986,11)	-12,22
2.2.3	Belanja Modal	345.135.366.797,00	316.097.150.770,64	(29.038.216.026,36)	-8,41
	Jumlah Belanja Langsung 2	1.135.511.218.578,25	1.010.184.299.315,78	(125.326.919.262,47)	-11,04

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total Belanja Daerah (1 + 2)	2.596.704.155.898,11	2.370.440.159.091,80	(226.263.996.806,31)	-8,71
	Surplus / (Defisit) (Belanja - Pendapatan)	(109.638.515.332,24)	193.977.365.641,55	303.615.880.973,79	-276,92
III	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Daerah				
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			-	-
3.1.1	Tahun Lalu	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 1	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	-	-
3.2	Pengeluaran pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemda)	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah 2	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	-	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	303.615.880.973,79	303.615.880.973,79	-

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB IV



PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pada urusan pemerintahan konkuren ini yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain : pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah, dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yaitu : Peningkatan Ekonomi, Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik, Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat, Pembangunan Berdemokrasi; dan Penanggulangan Bencana.

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 6 (enam) urusan antara lain : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial. Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2108 adalah sebagai berikut :

1. PENDIDIKAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 480.405.681.506,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 235.860.540.205,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 244.545.141.301,00 terdiri dari 10 Program dan 203 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 444.883.686.878,32 atau sebesar 92,61%. Target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1.1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas

1.1.1. Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.378.456.000 realisasi anggaran sebesar Rp 3.122.378.900 atau 92,42%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Meubelair SMA (16 paket), Pagar Sekolah terbangun (2 Sekolah), Lab SMA Terbangun (1 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru (2 ruang) dan Ruang SMA yang Direhabilitasi (3 Paket).

	
<p>Gambar 4. 1 Pembangunan RKB beserta perabotnya SMAN 3 Pangkalpinang</p>	<p>Gambar 4.2 Pengadaan Laboratorium Biologi beserta perabotnya SMA N 1 Pulau Besar</p>

1.1.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.848.604.000 realisasi anggaran sebesar Rp 6.506.552.257 atau 95,01%. Keluaran kegiatan terlaksananya Lomba – Lomba Kesiswaan SMA dan Latihan Penguatan Pendidikan Karakter bagi Siswa SMA .

	
<p>Gambar 4.3 Kawah Kepemimpinan Pelajar</p>	<p>Gambar 4.4 Pembinaan IMTAQ SMA/MA</p>

1.1.3. Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.634.719.000 realisasi anggaran sebesar

Rp 1.627.614.923 atau 99,57%,-. Keluaran kegiatan adalah Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum (67 Sekolah).

1.1.4 Kegiatan Pemberian Bea Siswa SMA yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.738.430.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.729.644.448 atau 99,49%. Keluaran kegiatan adalah jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa (1437 Siswa).

1.1.5 Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK reguler) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.319.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp 2.262.399.300 atau 97,56%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Peralatan Lab SMA (19 Paket).

➤ **Permasalahan dan solusi**

- Permasalahan
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :
 1. Belum semua Sekolah SMA terakreditasi minimal B
 2. Hasil ujian nasional siswa SMA di peringkat dibawah rata-rata nasional
 3. Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dibawah 95 %
- Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
 1. Memenuhi Sarana Prasarana Sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan
 2. Peningkatan Kompetensi Guru
 3. Try out UN
 4. Memberikan motivasi bagi siswa antara lain penyediaan beasiswa prestasi bagi siswa berprestasi
 5. Penambahan daya tampung (Ruang Kelas Baru atau Unit Sekolah Baru)

1.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan

1.2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.004.843.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.683.739.914 atau 67,01%,- Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Gebyar SMK dan meningkatnya sarana/prasarana SMK.

1.2.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.750.553.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 5.311.806.331 atau 92,37%,- Keluaran kegiatan adalah terlaksananya lomba-lomba kesiswaan SMK yaitu : Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMK, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK, PBB SMK dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK

1.2.3. Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.148.263.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.702.123.926 atau 79,23%,- Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Diklat Calon Asesor (96 orang), Diklat Strategi Pembelajaran bagi guru muatan kewilayahan SMK (100 orang), Diklat Pengembangan Kurikulum (100 orang), Workshop penyusunan Bank Soal Ujian SMK (82 orang), Workshop Penyusunan Dokumen Mutu Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi di SMK (21 orang), Diklat Penyusunan dan Analisis Instrumen Penilaian Pendidikan SMK (76 orang).



1.2.4. Kegiatan Pemberian Beasiswa SMK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.379.490.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.293.268.500 atau 93,75%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Siswa SMK Tidak Mampu terbiayai (1180 Siswa) .

1.2.5. Kegiatan Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.906.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp 7.945.493.793. atau 53,3%,- Keluaran kegiatan adalah tersedianya rumah dinas /asrama (1 Unit), terbangunnya RKB SMK (1 Ruang), tersedianya peralatan Praktik Siswa (7 Paket) dan terbangunnya RPS (4 Unit).

➤ **Permasalahan dan solusi**

• **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah bidang Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan.
2. Belum semua Sekolah SMK terakreditasi minimal B
3. Hasil ujian nasional siswa SMK di peringkat dibawah rata-rata nasional

- Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Pengembangan LSP SMK Bidang Pertanian, perkebunan dan perternakan bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan
2. Pemenuhan Sarana Produktif SMK Bidang pertanian, perkebunan dan Perternakan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan
3. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
4. Penyesuaian Program Keahlian SMK dengan sektor unggulan daerah dan kondisi wilayah
5. Kerjasama dengan DUDI serta Instansi Pemerintah Lainnya dibidang pertanian, perkebunan dan Perternakan, bidang Perikanan dan Kemaritiman, bidang Pariwisata dan bidang kesehatan
6. Peningkatan Kompetensi Guru
7. Try out UN

1.3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus

1.3.1. Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus

yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.122.880.00 realisasi anggaran sebesar Rp 855.504.213 atau 76,19%,-. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya mobil operasional SLB (1 unit), tersedianya meubelair SLB (9 Paket) dan Ruang Praktek Siswa Terbangun (4 ruang)



Gambar 4.7
Mobil Operasional SLB KOba

1.3.2 Peningkatan Kualitas Kesiswaan Pendidikan Khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.173.895.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.072.865.320 atau 91,39%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya lomba-lomba kesiswaan Pendidikan Khusus yaitu : Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus, dan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Pendidikan Khusus.



Gambar 4.8
O2SN Pendidikan Khusus



Gambar 4.9
LKS Pendidikan Khusus

1.3.3 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 723.455.000 realisasi anggaran sebesar Rp 688.726.816 atau 95,2%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga (9 Sekolah).



1.3.4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.279.948.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.230.209.840 atau 96,11%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya biaya operasional PLA.

1.3.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.059.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp 3.999.467.514 atau 79,06%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya peralatan praktek siswa (9 unit), Tersedianya RKB SLB (39 Unit) dan Terlaksananya Rehabilitasi SLB (5 Paket)

➤ **Permasalahan dan solusi**

- Permasalahan
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :
 1. Tingkat keterlayanan pendidikan khusus dibawah 95 %
- Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)
 2. Penambahan Jumlah GTK sesuai dengan analisis kebutuhan GTK.
 3. Pembangunan Asrama Siswa.
 4. Penerapan Pendidikan keluarga di satuan pendidikan.
 5. Revitalisasi Guru BK
 6. Penerapan Pendidikan Inklusi
 7. Optimalisasi Fungsi PLA
 8. Mendeteksi dini siswa berkebutuhan khusus

1.4 Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan

1.4.1. Peningkatan Mutu PTK SMA yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.325.065.000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.259.088.990 atau 95,02%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA (1 dokumen) dan Terlatihnya guru dan Tenaga Kependidikan SMA (358 orang).



1.4.2 Peningkatan Mutu PTK SMK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.421.874.904 realisasi anggaran sebesar Rp 1.271.977.944 atau 89,46%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMK (1 dokumen) dan Terlatihnya guru dan Tenaga Kependidikan SMK (344 orang)



1.4.3 Peningkatan Mutu PTK SLB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 841.032.000 realisasi anggaran sebesar Rp 817.832.900 atau 97,24%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB (1 dokumen), dan Terlatihnya guru dan Tenaga Kependidikan SLB (157 orang).

➤ Permasalahan dan solusi

- Permasalahan
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Kualifikasi guru rendah
2. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
- Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
 1. Meningkatkan kompetensi guru
 2. Pemerataan guru dan tenaga kependidikan
 3. Peningkatan Kesejahteraan guru.
 4. Pemberian penghargaan bagi guru
 5. Pelaksanaan lomba-lomba GTK.

1.5 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1.5.1. Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.969.422.000 realisasi anggaran sebesar Rp 5.044.767.294 atau 84,51%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD dan Jenjang SMP, terlaksananya lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD dan Jenjang SMP, terlaksananya Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD dan Jenjang SMP, Lomba PBB Jenjang SD dan Jenjang SMP, terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS dan terlaksananya Lomba Gala Siswa.

	
<p>Gambar 4.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP/MTs</p>	<p>Gambar 4.17 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP</p>

1.5.2 Pemberian Beasiswa Bagi Siswa/Mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.915.417.000 realisasi anggaran sebesar Rp 7.897.862.251 atau 99,78%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rakor pemberian beasiswa, pemberian beasiswa mahasiswa kurang mampu bagi 934 siswa. Pemberian beasiswa untuk mempersiapkan tenaga pendidik SMK khususnya guru produktif yg tidak ada pada LPTK yaitu IPB 4org, STPB 5 org, UNSRI 3 orang, UNY 6 org, beasiswa bagi mahasiswa STIE TAZKIA dalam rangka mempersiapkan pendamping masyarakat desa untuk pengembangan



Gambar 4.18
Pemberian beasiswa bagi
Hafiz Qur'an

ekonomi berbasis syariah dan mengisi tenaga perbankan syariah. Hafiz Qur'an jenjang SD-S3 sebanyak 118 orang.

- 1.5.3 Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh kab/kota** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 956.734.000 realisasi anggaran sebesar Rp 253.991.499 atau 26,55%. Keluaran kegiatan ini adalah cetak majalah PAUD bagi 7 kab/kota.
- 1.5.4 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 302.189.000 realisasi anggaran sebesar Rp 257.252.700 atau 85,13%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan (2 dokumen)
- 1.5.5 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.843.000 realisasi anggaran sebesar 73.773.200 atau 91,25%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (4 laporan).

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :
 1. Penilaian LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi baru mencapai 76 (BB)
- **Solusi**
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
 1. Sinkronisasi dan koordinasi yang optimal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja

- 1.6. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**
- 1.6.1. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.618.307.149,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.618.307.149,00 atau 100 %. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.2. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.705.336.861,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.179.800.000,00 atau 80,57%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.3. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.198.263.464,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.183.096.464 atau 98,73%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.4. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 847.986.614,00 realisasi anggaran sebesar Rp 767.200.000,00 atau 90,47%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.5. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 567,218,962.00 realisasi anggaran sebesar Rp 468.160.000,00 atau 76,16%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.6. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,721.090.511,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.450.400.000,00 atau 84,27%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.7. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.050.798.019,00 realisasi anggaran sebesar Rp 872.200.000,00 atau 83,00%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.8. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 359,967.424,00 realisasi anggaran sebesar Rp 359,800,000 atau 99,95%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.9. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 703.614.043,00 realisasi anggaran sebesar Rp 532.000.000,00 atau 75,61%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.10. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 504.124.576,00 realisasi anggaran sebesar Rp 485.800.000,00 atau 96,37%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.11. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 764.252.050,00 realisasi anggaran sebesar Rp 691.880.000,00 atau 90,53%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.12. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.486.386.446,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.050.000.000,00 atau 70,64%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.13. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.543.001.420,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.186.640.000,00 atau 76,90%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.14. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.215.447.443,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.040.840.000,00 atau 85,63%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.15. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 351.676.040,00 realisasi anggaran sebesar Rp 330.400.000,00 atau 93,95%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.16. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.240.261.192,00 realisasi anggaran

sebesar Rp 1.002.400.000,00 atau 80,82%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.17. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 803.007.434,00 realisasi anggaran sebesar Rp 766.060.000,00 atau 95,40%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.18. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Parit tiga (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.114.505.677,00 realisasi anggaran sebesar Rp 960.400.000,00 atau 86,17%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.19. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 375.557.138,00 realisasi anggaran sebesar Rp 375.200.000,00 atau 99,90%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.20. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 461.778.061,00 realisasi anggaran sebesar Rp 412.580.000,00 atau 89,35%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.21. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.007.038.369,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.001.000.000,00 atau 99,40%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.22. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Air gegas (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455.078.017,00 realisasi anggaran sebesar Rp 446.074.000,00 atau 98,02%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.23. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 491.256.763,00 realisasi anggaran sebesar Rp 478.800.000,00 atau 97,46%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.24. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 210.000.000,00 atau 98,04%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.25. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.945.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 124.600.000,00 atau 79,90%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.26. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,503,600,000 realisasi anggaran sebesar Rp 1.407.721.655 atau 93,62%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.27. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.489.048.606,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.350.440.000,00 atau 97%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.28. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 852.965.160,00 realisasi anggaran sebesar Rp 692.685.000,00 atau 81,21%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.29. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Badau (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 693.327.638,00 realisasi anggaran sebesar Rp 670.040.000,00 atau 96,64%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.30. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran Rp 255.828.323,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 atau 82,09%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.31. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 863.692.423,00 realisasi anggaran sebesar Rp 859.600.000,00 atau 99,53%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.32. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Dendang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316.381.053,00 realisasi anggaran sebesar Rp 181.440.000,00 atau 57,35%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.33. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.319.666.507,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 669.390.000,00 atau 50,72%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.34. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMK Negeri 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 267.547.488,00 realisasi anggaran sebesar Rp 250.600.000,00 atau 93,67%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.35. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.376.027.586 realisasi anggaran sebesar Rp 1.213.800.000 atau 88,21%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.36. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.090.800.466 realisasi anggaran sebesar Rp 1.073.800.000 atau 98,44%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.37. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.461.202.832 realisasi anggaran sebesar Rp 1.114.230.000 atau 76,25%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.38. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 884.831.521 realisasi anggaran sebesar Rp 880.800.000 atau 99,54%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.39. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.296.610.966 realisasi anggaran

sebesar Rp 1.250.200.000 atau 96,42%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.40. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pemali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.342.207.637 realisasi anggaran sebesar Rp 1.118.600.000 atau 83,34%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.41. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 522.522.905 realisasi anggaran sebesar Rp 450.800.000 atau 86,27%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.42. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Belinyu (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 849.291.152 realisasi anggaran sebesar Rp 677.200.000 atau 79,74%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.43. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 762.658.035 realisasi anggaran sebesar Rp 656.040.000 atau 86,02%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.44. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Bakam (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 367.433.900 realisasi anggaran sebesar Rp 319.200.000 atau 86,87%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.45. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Mendobarat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 729.492.105 realisasi anggaran sebesar Rp 729.400.000 atau 99,99%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.46. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 147.684.959 realisasi anggaran sebesar Rp 134.400.000 atau 91%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.47. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Mendobarat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 344.315.119 realisasi anggaran sebesar Rp 295.400.000 atau 85,79%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.48. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Merawang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 705.333.991 realisasi anggaran sebesar Rp 581.000.000 atau 82,37%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.49. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pangkalanbaru (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.641.363 realisasi anggaran sebesar Rp 645.400.000 atau 95,1%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.50. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Namang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 667.455.641 realisasi anggaran sebesar Rp 569.800.000 atau 85,37%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.51. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.031.243.721 realisasi anggaran sebesar Rp 919.800.000 atau 89.19%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.52. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 419.543.298 realisasi anggaran sebesar Rp 330.400.000 atau 78.75%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.53. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Sungaiselan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 768.691.366 realisasi anggaran sebesar Rp 767.200.000 atau 99.81%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.54. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 728.405.048 realisasi anggaran sebesar Rp 588.000.000 atau 80.72%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.55. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tempilang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 556.476.915 realisasi anggaran sebesar Rp 508.200.000 atau 91.32%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.56. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.220.286.033 realisasi anggaran sebesar Rp 903.000.000 atau 74%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.57. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Jebus (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 874.085.298 realisasi anggaran sebesar Rp 873.600.000 atau 99.94%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.58. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Parittiga (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700.764.621 realisasi anggaran sebesar Rp 567.000.000 atau 80.91%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.59. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.019.551.647 realisasi anggaran sebesar Rp 849.240.000 atau 83.3%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.60. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 803.007.434 realisasi anggaran sebesar Rp 766.060.000 atau 95.4%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.61. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Payung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 871.906.374 realisasi anggaran sebesar Rp 833.000.000 atau 95.54%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.62. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 203.293.727 realisasi anggaran sebesar

Rp 203.000.000 atau 99.86%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.63. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Lepar pongok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333.471.368 realisasi anggaran sebesar Rp 333.200.000 atau 99.92%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.64. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 904.005.610 realisasi anggaran sebesar Rp 817.500.000 atau 90.43%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.65. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 554.843.718 realisasi anggaran sebesar Rp 554.400.000 atau 99.92%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.66. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 768.314.988 realisasi anggaran sebesar Rp 666.400.000 atau 86.74%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.67. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kepulauan pongok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.260.000 realisasi anggaran sebesar Rp 253.991.000 atau 88.73%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.68. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.236.206.241 realisasi anggaran sebesar Rp 1.222.200.000 atau 98.87%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.69. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.047.268.259 realisasi anggaran sebesar Rp 967.400.000 atau 92.37%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.70. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 2 Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.074.441.690 realisasi anggaran sebesar Rp 1.050.280.000 atau 97.75%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.71. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Membalong (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 647.883.045 realisasi anggaran sebesar Rp 641.200.000 atau 98.97%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.72. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Sijuk (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 677.382.793 realisasi anggaran sebesar Rp 663.600.000 atau 97.97%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.73. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 651.004.712 realisasi anggaran sebesar Rp 577.920.000 atau 88.77%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

- 1.6.74. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 929.801.958 realisasi anggaran sebesar Rp 885.192.000 atau 95.2%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.75. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Gantung (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 880.304.148 realisasi anggaran sebesar Rp 873.600.000 atau 99.24%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.76. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Damar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 481.622.917 realisasi anggaran sebesar Rp 453.040.000 atau 94.07%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.77. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SMA Negeri 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 762.801.393 realisasi anggaran sebesar Rp 632.800.000 atau 82.96%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.78. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 483.135.439 realisasi anggaran sebesar Rp 446.000.000 atau 92.31%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.79. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 199.694.000 realisasi anggaran sebesar Rp 198.000.000 atau 99.15%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.80. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 157.567.627 realisasi anggaran sebesar Rp 144.000.000 atau 91.39%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.81. Kegiatan Pengelolaan BOS pada pada SLB Negeri Muntok (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.085.000 realisasi anggaran sebesar Rp 147.600.000 atau 98.34%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.82. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144.132.132 realisasi anggaran sebesar Rp 144.000.000 atau 99.91%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.83. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Tanjungpandan (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 226.735.781 realisasi anggaran sebesar Rp 220.000.000 atau 97.03%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.
- 1.6.84. Kegiatan Pengelolaan BOS pada SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 182.098.499 realisasi anggaran sebesar Rp 182.000.000 atau 99.95%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Biaya Operasional Sekolah.

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan.

1.7. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka

1.7.1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.374.390.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 9.637.445.300 atau 92,90%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya operasional Cabang Dinas Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.

1.7.2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.374.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 842.303.599,00 atau 61,29%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.618.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.834.048.457,00 atau 70,03%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.172.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.009.535.332,00 atau 86,14%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 914.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 850.905.619,00 atau 93,10%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 550.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 395.659.008,00 atau 71,91%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.704.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar

Rp 1.312.908.827,00 atau 77,02%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.7.8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.023.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 854.575.536,00 atau 83,52%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 435.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 400.390.000,00 atau 91,87%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 612.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 520.304.996,00 atau 85,02%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 583.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 575.754.300,00 atau 98,66%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.255.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.182.802.218,00 atau 94,23%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.112.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 804.910.763,00 atau 72,37%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.112.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 804.910.763,00 atau 84,04%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.277.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.238.396.495 atau 96,93%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Pangkalpinang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 924.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 826.962.625,00 atau 89,46%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.7.17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 322.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 321.825.000,00 atau 99,88%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 724.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 655.610.000,00 atau 90,48%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendo Barat**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 748.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 707.501.000,00 atau 94,54%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendo Barat**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 300.755.000,00 atau 99,99%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 598.950.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 517.854.750,00 atau 86,46%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.22. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.153.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.133.799.790,00 atau 98,30%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.23. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 699.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 647.430.000,00 atau 92,62%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.24. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 252.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 252.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.25. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 451.789.000,00 atau 99,12%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.7.26. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 1.290.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.023.655.000,00 atau 79,34%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.7.27. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.367.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.105.000.000 atau 80,83%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus SLBN Pangkalpinang.

1.7.28. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 608.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 602.768.250 atau 99,14%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya pengelolaan fungsi pelayanan pendidikan khusus di SLB Negeri Sungailiat.

➤ **Permasalahan dan solusi**

• **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal.

• **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Dukungan pembiayaan dana BOS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan.

1.8. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat

1.8.1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.637.800.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 4.420.271.200 atau 95,31%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya operasional Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat.

1.8.2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Muntok, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.180.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 826.061.610,00 atau 70,01%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.8.3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 911.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 902.000.000,00 atau 98,95%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.8.4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.121.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp

1.094.351.500,00 atau 97,61%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.8.5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 439.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 437.200.000,00 atau 99,45%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 246.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 29.991.000 atau 12,19%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan
- 1.8.7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 898.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 898.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 907.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 907.400.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 929.420.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 681.554.000 atau 73,3%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parittiga**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 588.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 566.180.000,00 atau 96,29%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 898.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 429.646.000,00 atau 47,82%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 522.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 469.070.000,00 atau 89,83%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.8.13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 456.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 449.960.000 atau 98,68%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLB N Muntok.

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Dukungan pembiayaan dana BOS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan.

1.9. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan

1.9.1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.059.040.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 11.331.655.350 atau 93,97%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya operasional Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

1.9.2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 842.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 826.424.800,00 atau 98,06%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.9.3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.196.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 505.519.860,00 atau 42,24%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.9.4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Katis, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.234.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.141.585.257,00 atau 92,47%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.9.5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.382.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 882.668.843,00 atau 63,85%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

1.9.6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungai Selan, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 384.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 378.882.500,00 atau 98,51%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.9.7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Rimba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 239.000.000,00 atau 95,60%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.188.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.097.405.000,00 atau 92,37%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 552.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 552.200.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 515.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 501.197.964,00 atau 97,21%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Air Gegas**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 525.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 525.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 944.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 814.497.700,00 atau 86,26%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubuk Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 589.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 463.800.000,00 atau 78,69%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 589.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 519.857.000,00 atau 88,14%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 655.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 647.828.250,00 atau 98,81%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.9.17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungai Selan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 345.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 324.047.454,00 atau 93,82%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungai Selan**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 791.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 741.042.756,00 atau 93,66%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 827.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 826.925.000,00 atau 99,92%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 331.000.000,00 atau 99,34%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep.Pongok**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 280.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 270.270.000,00 atau 96,53%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.22. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 834.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 651.092.948,00 atau 78,03%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.23. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 221.920.000,00 atau 88,77%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.24. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 564.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 540.823.800,00 atau 95,75%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.25. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,222.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 950.000.000,00

atau 77,73%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.9.26. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 673.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 673.000.000,00 atau 100,00%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.27. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)**, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.022.070.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 737.522.087 atau 72,16%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.9.28. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 442.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 431.416.650 atau 97,61%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Koba.
- 1.9.29. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Toboali** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 467.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 438.802.570 atau 93,96%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Toboali.

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**
Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :
 1. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai
 2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal.
- **Solusi**
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:
 1. Dukungan pembiayaan dana BOS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
 2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan.

- 1.10. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur**
- 1.10.1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.282.640.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 6.838.552.404 atau 93,9%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya operasional Cabang Dinas Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- 1.10.2. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan**, Belitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.610.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.319.418.775,00 atau 81,93%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.10.3. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan,** Belitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.263.300.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 598.851.050,00 atau 47,40%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.4. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan,** Belitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 821.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 663.958.773,00 atau 80,79%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.5. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau,** Belitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 795.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 700.000.000,00 atau 88,01%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.6. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik,** Belitung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 170.078.509,00 atau 66,44%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.7. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.009.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.007.312.500,00 atau 99,79%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 824.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 681.623.364,00 atau 82,64%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.0.9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 828.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 564.954.500,00 atau 68,23%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.10. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 294.099.500,00 atau 97,84%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.11. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.282.640.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 6.838.552.404,00 atau 93,90%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.12. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 657.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 599.546.050,00 atau 66,54%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.

- 1.10.13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 996.900.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 795.159.270,00 atau 79,76%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.087.200.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 918.263.456,00 atau 84,46%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 464.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 364.814.099,00 atau 78,52%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 873.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 576.753.856,00 atau 66,02%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 629.800.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 473.600.550,00 atau 75,20%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 968.600.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 875.475.739,00 atau 90,39%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Pesak,** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 658.400.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 601.406.577,00 atau 91,34%. Keluaran Kegiatan adalah Tersedianya biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 1.10.20. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjungpandan** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 447.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 428.037.000 atau 95,76%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Tanjung Pandan.
- 1.10.21. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar** oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 578.000.000 Realisasi anggaran sebesar Rp 570.802.500 atau

98,75%. Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Fungsi Pelayanan Pendidikan Khusus di SLBN Manggar.

➤ **Permasalahan dan solusi**

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu diantaranya :

1. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah belum optimal.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah:

1. Dukungan pembiayaan dana BOS melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Perencanaan dan pengelolaan Operasional sekolah berbasis kebutuhan.

2. KESEHATAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 pada ketiga Perangkat Daerah tersebut sebesar Rp. 269.508.195.779,90 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 72.883.104.927,90 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 196.625.090.852,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 239.125.215.104,80 atau sebesar 87,61%. Target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1. Kesehatan Masyarakat

2.1.1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.004.180,- realisasi anggaran sebesar Rp. 263.746.600,- atau 72,06% dan realisasi fisik 90%. Keluaran kegiatan adalah jumlah laporan kegiatan Rakor GMDM dan jumlah Informasi Promosi melalui media KIE.

	
<p>Gambar 4.19 Penyebearluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Koran Radar Pos</p>	<p>Gambar 4.20 Promosi Kesehatan Melalui Media Baliho</p>

2.1.2. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 661.667.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 587.871.204,- atau 88,85% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah petugas yang terorientasi kesehatan lansia dan geriatri sebanyak 135 orang (laki laki 60 orang dan perempuan 75 orang), jumlah laporan hasil pembinaan program kesehatan masyarakat dan persentase peserta didik dilakukan penjarangan tingkat SMU sederajat

	
<p>Gambar 4.21 Orientasi Kesehatan Lansia dan Geriatri</p>	<p>Gambar 4.22 Pembinaan Program Kesehatan Masyarakat di Kota Pangkalpinang</p>

2.1.3 Kegiatan Penurunan Kematian Ibu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 870.825.280,- realisasi anggaran sebesar Rp. 746.652.900 atau 85,74% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 1. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kesehatan reproduksi catin 2. Jumlah kasus kematian ibu/kasus kespro yang terlacak pada kejadian bencana 3. Jumlah peserta yang dievaluasi cakupan program kesehatan keluarga dan gizi dengan peserta sebanyak 156 orang (laki laki 76 orang dan perempuan 80 orang)



2.1.4. Kegiatan Penurunan Angka Kematian Bayi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.v672.472.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.v530.023.000,- atau 78,82% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah petugas kesehatan dalam SDIDTK 2. Jumlah petugas kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya dalam SHK.



2.1.5. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gizi Anak dan Keluarga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.219.679.480,- realisasi anggaran sebesar Rp. 876.170.500,- atau 71,84% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah anak sekolah (SLTP/SMA dan SLB) yang mendapat tablet darah (Fe) dalam rangka menurunkan angka anemia remaja putri, pelacakan kasus gizi buruk, jumlah kader yang diorientasi PMBA di Desa GMDM, jumlah peserta seminar gizi masyarakat, jumlah peserta yang mengikuti peringatan pekan ASI sedunia, jumlah pengelola program gizi dan lintas sektor terkait yang

ditingkatkan pengetahuan melalui bimtek program gizi dalam penurunan stunting, jumlah peserta yang tersosialisasi program balita sehat sejahtera.



2.1.6. Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.758.630,- realisasi anggaran sebesar Rp. 367.018.190,- atau 73,29% dan realisasi fisik 95,24%. Keluaran kegiatan adalah jumlah rekomendasi kesepakatan program Kab/Kota sehat, jumlah saranan fasyankes yang dilakukan survey, jumlah rekomendasi kesepakatan pengelolaan limbah medis fasyankes dengan peserta 30 orang (laki laki 15 orang perempuan) dan jumlah data hasil evaluasi capaian program kesling.

2.1.7. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.297.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 98.425.950,- atau 82,50% dan realisasi fisik 90%. Keluaran kegiatan adalah, jumlah rekomendasi kesepakatan program kesehatan kerja, jumlah petugas yang tersosialisasi program kesehatan olahraga dan jumlah peserta yang dilakukan pemeriksaan kebugaran.

2.1.8. Kegiatan BOK Provinsi (DAK Nn Fisik) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.822.332.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.401.849.075,- atau 76,93% dan realisasi fisik 86,36%. Keluaran kegiatan adalah jumlah dokumen laporan evaluasi BOK provinsi dan Kabupaten, jumlah peserta yang tersosialisasi dana BOK 3, jumlah kabupaten yang terbentuk dalam inovasi program tomat mentah (toko agama dan umat membantu turunkan AKI dan AKB) Babel, jumlah dokumen pencaangan imunisasi MR, jumlah media KIE di desa GMDM 6. Jumlah Media KIE di Model sekolah sehat.

Permasalahan:

1. Belum tercapainya target (100%) cakupan kunjungan ibu hamil K4 (88,65%);
2. Belum tercapainya target (100%) cakupan persalinan yang ditolong di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes (80,56%);
3. Peningkatan kasus kematian ibu 43 kasus/27.364 KH dari tahun sebelumnya (21 kasus/23.294 KH);

4. Meningkatnya kasus kematian neonatus sebesar 126 kasus dari kasus tahun sebelumnya 144 kasus, kematian bayi sebesar 166 kasus 6,06/1000KH menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,20/1000KH;
5. Umur kematian neonatus terbesar terdapat pada usia kurang dari 1 minggu (91 kasus/72,22%);
6. Kasus lahir mati yaitu 176 kasus meningkat dari tahun 2017 sejumlah 153 kasus;
7. Belum tercapainya target program berdasarkan data tahun 2018, persentase balita yang ditimbang berat badanya 67,41% menurun dari tahun 2017 sebesar 71,93%, persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 94%, persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan 95,90%;
8. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai definisi operasional kasus gizi buruk terutama oleh tenaga kesehatan lain dan pimpinan institusi kesehatan;
9. Kabupaten Belitung timur belum terbentuk Kabupaten/Kota Sehat dan Belum semua kabupaten/Kota mempunyai pasar sehat yang memenuhi syarat kesehatan;
10. Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang dilakukan survey belum melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan secara internal;
11. Sistem verifikasi desa/kelurahan STBM masih ada perubahan oleh kementerian kesehatan RI dan sistem pelaporan Penyehatan pangan yang bersifat *online* belum bias digunakan dan dukungan kabupaten terhadap petugas kesehatan lingkungan puskesmas belum maksimal dalam *updating* data.

Solusi:

1. Koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu dan P4K di setiap desa/kelurahan, penguatan manajemen pencatatan dan pelaporan di fasyankes swasta;
2. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang persalinan di fasyankes perlu ditingkatkan termasuk mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Advokasi ke stakeholder terkait koordinasi lintas program dan lintas sektor meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes audit maternal perinatal dan Surveilans kematian Ibu;
4. Advokasi ke stakeholder terkait, koordinasi lintas program dan lintas sektor, meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes, audit Maternal Perinatal;
5. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, Meningkatkan kualitas kunjungan Neonatus dengan penerapan manajemen terpadu bayi muda, mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan kualitas antenatal terpadu, pengenalan tanda bahaya;

7. Intervensi gizi spesifik: pelayanan gizi bagi anak balita;
8. a. meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita (BB/TB/PB) b. merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT, pelayanan gizi bagi ibu hamil, a. meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil, b. pemberian tablet Fe 90 tablet, pelayanan gizi remaja putri, a. meningkatkan pelayanan gizi remaja putri disekolah dengan pemberian tablet tambah darah 52 tablet b. konseling gizi remaja dan PMT AS, untuk intervensi gizi sensitif: melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan masalah gizi, meningkatkan peran serta masyarakat bersama kader dan keluarga, pendekatan dengan Tim RAD pangan Daerah, pendekatan melalui sekolah, pendekatan ke Rumah sakit dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian ASI dan susu formula;
9. Melakukan sinkronisasi atas perbedaan data dan definisi operasional masing – masing kegiatan, melakukan *feed back* data triwulan ke kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan *feed back* hasil koordinasi dengan dinas kesehatan dan Bappeda kabupaten Belitung timur dengan harapan pihak yang berkepentingan (pemerintah daerah) untuk melakukan tindak lanjut pembentukan tim Kabupaten sehat;
11. Menyampaikan *feed back* hasil survey dan mengharapkan pihak yang berkepentingan (pemerintah daerah) untuk melakukan tindak lanjut permasalahan yang ditemukan;
12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian kesehatan terutama Direktorat kesehatan lingkungan Dirjend kesehatan masyarakat berkaitan dengan aplikasi maupun juknis verifikasi desa/kelurahan STBM.

2.2 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.2.1. Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular TB dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.353.800,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.152.200,- atau 80,25% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 1. Jumlah peserta yang tersosialisasi intensifikasi penemuan kasus TB 30 orang (15 laki laki dan 15 perempuan) dan 1 dokumen laporan 2. Jumlah peserta seminar TB day dengan peserta 100 orang 3. Jumlah kasus yang dilakukan tata laksana TB oleh petugas fasyankes.

2.2.2. Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian HIV dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.632.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 391.479.066,- atau 82,31% dan realisasi fisik 98,4%. Keluaran kegiatan adalah jumlah populasi beresiko yang sosialisasi program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS pada populasi beresiko 210 orang (laki laki 110, 100 perempuan), jumlah cetak media promosi pencegahan pengendalian HIV-AIDS dan IMS 3. Jumlah pengadaan rapid test pemeriksaan HIV, jumlah cetak formulir pencatatan dan pelaporan HIV dan IMS di Fasyankes, jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV dan IMS di fasyankes Kabupaten/Kota, jumlah petugas layanan kesehatan yang terlatih konseling test HIV dan IMS dengan peserta 50 orang petugas kesehatan (laki laki 25 orang , perempuan 25 orang), jumlah penduduk usia produktif (15 -49 tahun) yang mengikuti seminar hari AIDS sedunia (HAS) dengan peserta 200 orang (laki laki 100 dan perempuan 100).



Gambar 4.29
Pelatihan Layanan
Komprehensif HIV-AIDS dan
IMS

2.3. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Penyakit Malaria dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.889.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 169.440.520,- atau 90,66% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah cetak media KIE program malaria, jumlah kasus yang dilakukan tatalaksana program malaria, jumlah biolarvasida pengendalian jentik nyamuk vektor penyakit, jumlah kasus yang dilakukan pengendalian vektor malaria dan jumlah RTL pencapaian eliminasi malaria.

2.2.4. Kegiatan Penanganan Penyakit Menular Lainnya (hepatitis, Ispa, diare, kusta, filariasi, DBD, Zoonosis) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.786.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 490.829.650,- atau 83,79% dan realisasi fisik 95 %. Keluaran kegiatan adalah jumlah cetak form RR dan Media KIE, jumlah dokumen kegiatan supervisi monitoring dan evaluasi program arbovirosis dan filariasis, jumlah dokumen pemantauan jentik berkala (PJB) dan angka bebas jentik (ABJ) DBD, jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi pada bimtek pengendalian penyakit zoonosis 5. Jumlah pengadaan rapid test hepatitis, jumlah peralatan penunjang pemeriksaan hepatitis, jumlah dokumen kegiatan monev deteksi dini hepatitis, jumlah dokumen kegiatan monev program P2 ISPA dan kusta, jumlah petugas yang ditingkatkan kompetensi dalam pengendalian hepatitis sebanyak 100 orang (laki laki 20, perempuan 80), jumlah peserta seminar aksi peduli hepatitis dalam rangka HHS sebanyak 100 orang, jumlah petugas yang tersosialisasi tatalaksana pneumonia.

- 2.2.5. Kegiatan Peningkatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kanker** oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.218.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 75.029.600,- atau 93,53% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah agent pencegahan dan pengendalian deteksi dini faktor kanker serviks dan payudara 89 orang dan cakupan peserta IVA test dan sadanis.
- 2.2.6. Kegiatan Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes melitus)** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.199.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 170.772.719,- atau 91,23% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta seminar kesehatan penyakit tidak menular (PTM) dengan peserta 146 orang, jumlah peserta yang melakukan deteksi dini faktor resiko PTM sebanyak 200 orang, jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan penyakit tidak menular (PTM) dan jumlah masyarakat yang melakukan faktor resiko PTM sebanyak 271 orang.
- 2.2.7. Kegiatan Peningkatan Penanganan Pelayanan Kesehatan Jiwa** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.796.100,- realisasi anggaran sebesar Rp. 339.943.371,- atau 81,56% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta advokasi dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dengan peserta 29 orang (laki laki 15, perempuan 14), jumlah nakes yang ditingkatkan keterampilan assesmen dan rencana terapi terkait wajib lapor dengan peserta 34 orang, jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan keswa dan Napza, jumlah nakes yang dilatih deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa dengan peserta 47 orang, jumlah pegawai yang dilakukan deteksi dini (tes urine) napza sebanyak 200 orang (laki laki 100 orang, perempuan 100 orang).
- 2.2.8. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Situasi Khusus** dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.823.233.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.363.544.199,- atau 74,79% dan realisasi fisik 89,68%. Keluaran kegiatan adalah, jumlah penyediaan jarum safety box dan logistik, jumlah dokumen pelaksanaan imunisasi, jumlah petugas kesehatan yang ditingkatkan dalam tatalaksana surveilans PD31 dan penyakit potensial KLB terdiri dari laki laki 30 orang, perempuan 25 orang, persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu provinsi, jumlah pemantauan jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan, jumlah alat dan logistik krisis kesehatan, jumlah kasus yang dilakukan kewaspadaan dini dan respon (SKDR), jumlah pencapaian cakupan desa/kelurahan UCI (381 desa/kelurahan), jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Permasalahan:

1. Kurangnya advokasi Kab/Kota dan Puskesmas terhadap lintas sektor untuk masalah kesehatan masyarakat;
2. Kurangnya SDM terlatih dan sarana prasarana untuk pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS di fasyankes;
3. Pelaporan secara esismal masih belum maksimal sehingga pelaporan masih diimbangi laporan secara manual, disebabkan karena kurangnya SDM dalam pengoperasian komputer dan jumlah alat pengolahan data/komputer dipuskesmas yang terbatas;
4. Pengendalian vektor hanya terfokus pada kegiatan rutin seperti IRS (*indoor residual spraying atau penyemprotan rumah dengan insektisida/racun nyamuk*) dan distribusi kelambu LLIN'S (*long lasting insecticide net's*) sedangkan untuk kegiatan pemetaan tempat perindukan vektor malaria serta kegiatan larvaciding atau kegiatan membunuh jentik nyamuk malaria dengan racun jentik nyamuk/larvasidadilagun-lagun,tambak-tambak belum maksimal;
5. Follow up pengobatan di puskesmas belum maksimal karena terkendala anggaran minim untuk petugas follow up;
6. Muncul kasus positif yang didominasi falsifarum terjadi pada penduduk pendatang dari buton, jawa, sumsel) yang melakukan pencarian timah serta menginap/membuat kamp/rumahsementara di pesisir pantai maupu jauh dari pesisir pantai di wilayah puskesmas;
7. Penyelidikan epidemiologi malaria sudah dilakukan puskesmas sekaligus melaksanakan MBS (*Mass Blood Survei*), PE dilakukan dengan dana BOK Puskesmas, namun belum maksimal di kab. Bangka Barat sehingga belum mampu memutuskan mata rantai penulatan malaria;
8. Semua kasus malaria positif tidak ter-*follow up* lengkap karena pasien positif malaria tidak kembali lagi ke puskesmas untuk pemeriksaan ulang dan *follow up* hasil pengobatan;
9. Munculnya kasus positif malaria di pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai secara ilegal di wilayah kerja puskesmas dikarenakan daerah tersebut masih dikatakan daerah penularan atau bukan lagi daerah reseptif karena masih terjadi transmisi penularan ditandai dengan ditemukannya parasit malaria pada penambang ilegal, adanya lagun bekas kolong yang terdapat jentik nyamuk malaria (*anopheles*)/nyamuk *anopheles* di sekitar kamp penambang timah ilegal di dusun tersebut;
10. Kurangnya fasilitas laboratorium untuk deteksi dini penyakit menular lainnya.
11. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kanker serviks dan payudara;
12. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang belum tersentuh informasi tentang bahaya kanker serviks dan payudara;
13. Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus) dan Kerjasama lintas sektor yang belum maksimal;
14. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi faktor resiko

- penyakit tidak menular;
15. Persediaan alat dan bahan habis pakai yang masih belum continue (terus menerus);
 16. Belum semua Kabupaten/Kota membentuk TPKJM, sehingga koordinasi dengan lintas sektor terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masih belum optimal;
 17. Pengelolaan ketersediaan obat program jiwa belum maksimal;
 18. Masih kurangnya tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan IPWL;
 19. Kurangnya promosi kepada masyarakat tentang layanan IPWL;
 20. Kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk memfokuskan kegiatan dan memperpanjang kampanye imunisasi MR sampai 31 desember 2018 sehingga kegiatan lain yang telah disusun bersamaan waktunya dengan kampanye MR tersebut.

Solusi:

1. Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak swasta;
2. Advokasi ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan IMS;
3. Advokasike Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pemenuhan alat pengolah data dipuskesmas dan pelatihan petugas puskesmas dalam pelaporan malaria secara esismal;
4. Advokasi program dalam memaksimalkan dukungan dana kegiatan program penemuan pengobatan malaria, survei-survei malaria, pengendalian vektor/pengendalian nyamuk malaria dari dukungan-dukungan *stakeholder* terkait baik dana APBD, APBN, BOK maupun dana hibah;
5. Penemuan kasus positif malaria melalui pemeriksaan laboratorium malaria dengan RDT atau Mikroskop tetap dilakukan secara pasif di puskesmas, Rumah Sakit pemerintah/swasta maupun di dokter/klinik swasta serta secara aktif melalui kegiatan *mass blood survey* atau *mass fever survey* terhadap pasien penambang timah;
6. Puskesmas diwajibkan melakukan pengobatan malaria dengan ACT/Sesuai tatalaksana kasus malaria terupdate dengan *follow up* yang lengkap terhadap semua kasus yang positif hasil pemeriksaan laboratorium malaria dengan RDT atau Mikroskop secara pasif di puskesmas, Rumah Sakit pemerintah/swasta maupun di dokter/klinik swasta serta secara aktif melalui kegiatan *mass blood survey* atau *mass fever survey* terhadap pasien;
7. Puskesmas diwajibkan melakukan *follow up* secara lengkap terhadap semua kasus yang positif hasil pemeriksaan laboratorium malaria dengan Mikroskop secara pasif di puskesmas dan aktif dengan dana BOK;
8. Kelambu diberikan kepada setiap penambang timah positif malaria dari daerah kamp2 tambang timah ilegal yang belum punya kelambu baik

penambang dari pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai (tambang darat);

9. Kabupaten bersama puskesmas agar dapat melakukan IRS (*indoor residual spraying*) di kamp-kamp tambang timah ilegal yang terbuat dari kayu/papan daerah pesisir pantai maupun jauh dari pesisir pantai (tambang darat)
10. Mengoptimalkan kegiatan deteksi dini penyakit menular lainnya;
11. Peningkatan KIE kepada masyarakat;
12. Mengoptimalkan kegiatan posbindu PTM;
13. Mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan pihak terkait;
14. Pembentukan TPKJM di semua Kabupaten/Kota;
15. Meningkatkan koordinasi dengan bagian farmasi serta RSJD tentang ketersediaan obat program kesehatan jiwa;
16. mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan IPWL;
17. Mengoptimalkan pengguna dana yang sudah tersedia sekaligus menggalang kemitraan dengan lintas sektor;
18. Menyusun jadwal ulang pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan imunisasi PCV yang di fasilitasi oleh subdit imunisasi kemenkes RI dan clinton health *access initiative* (CHAI) dan kegiatan lainnya sehingga pada kegiatan peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus dapat dilaksanakan.

2.3 Pelayanan Kesehatan

2.3.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 858.387.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 639.982.894,- atau 74,56% dan realisasi fisik 92,26%. Keluaran kegiatan adalah jumlah bantuan pelayanan kesehatan (P3K) yang dilakukan oleh tim kesehatan, jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar puskesmas sebanyak 140 nakes, jumlah FKTP yang dilakukan penilaian berprestasi di 21 FKTP Kab/Kota (dengan 2 kategori FKTP terpilih sebagai pemenang), jumlah puskesmas yang melaksanakan kesepakatan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS PK), jumlah akreditasi puskesmas yang dilakukan evaluasi dan pembinaan 6. DED pembangunan gedung klinik.

2.3.2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.980.928,- realisasi anggaran sebesar Rp. 866.271.914,- atau 86,20% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuan manajemen kalibrasi di fasyankes dengan peserta 49 orang (laki laki 25 dan perempuan 24 orang), jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuan dalam pencegahan pengendalian infeksi tingkat lanjutan dirumah sakit dengan peserta 30 orang (laki laki 15 orang dan

perempuan 15 orang), jumlah laporan pengelolaan SIRS diseluruh rumah sakit se-Provinsi Kep. Bangka Belitung, jumlah petugas kesehatan RS yang ditingkatkan kemampuan dalam pengelolaan ruang kritis (ruang kritis, ruang operasi, ruang gawat darurat), sebanyak 42 orang, (laki laki 21 orang dan perempuan 21 orang), jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuannya dalam sistem rujukan terintegrasi sebanyak 38 orang (19 orang laki laki dan 19 orang perempuan), jumlah rekomendasi kesepakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, jumlah laporan hasil konsultasi dan monev BPRS ke Rumah Sakit Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung, jumlah rekomendasi kesepakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit.

2.3.3. Kegiatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.440.348.260,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.925.978.874,- atau 90,79% dan realisasi fisik 92%. Keluaran kegiatan adalah Persentase Kepesertaan JKN

2.3.4. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan tradisional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.631.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 230.141.790,- atau 62,94% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional.

Permasalahan:

1. Masih rendahnya anggaran yang direncanakan oleh Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
2. Adanya Narasumber dan peserta yang tidak bisa hadir sehingga penyerapan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah rendah;
3. Masih ada kepala daerah yang tidak berkomitmen untuk memenuhi UU No. 44/2009 tentang rumah sakit yang mensyaratkan bahwa Direktur Rumah Sakit adalah seorang tenaga medis, sehingga menghambat survey verifikasi hasil penilaian akreditasi rumah sakit yang dilakukan oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) pada tahap akreditasi tingkat lanjut;
4. Masih rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional KIS menuju UHC yang kurang dari 95% dari sejumlah seluruh penduduk;
5. Masih rendahnya informasi tentang pengelolaan JKN KIS

Solusi:

1. Peningkatan KIE kepada masyarakat;
2. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan serta RSUD Kab/Kota untuk mensinkronisasikan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sehingga kebutuhan Narasumber maupun sasaran peserta terpenuhi sesuai permintaan;

3. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan Pemda Kab/Kota serta sosialisasi UU No 44/2009 tentang rumah sakit;
4. Perlu peningkatan pembiayaan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sosialisasi dalam pembiayaan JKN KIS kepada masyarakat Kabupaten/Kota yang belum tahu, lintas sektor terutama karyawan perusahaan yang mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN KIS melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan;
5. Perlu dilakukan pembinaan terus menerus terhadap petugas Kabupaten/Kota capacity building atau orientasi dalam peningkatan kemampuan terhadap pemahaman pengelolaan JKN.

2.4 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

2.4.1 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan SDMK

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.595.149.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.188.112.600,- atau 74,48% dan realisasi fisik 90%. Keluaran kegiatan adalah jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif), jumlah Nakes yang ditingkat kemampuan pada jabatan fungsional bidan terlatih sebanyak 30 orang, jumlah pelatihan yang terakreditasi, jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan, jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kefarmasian, gizi, kesmas, kesling dan labkes), jumlah tenaga kesehatan khusus diklinik provinsi dan bidan PTT (dokter umum 2 orang, bidan 7, perawat 3 orang, apoteker 2 orang, perawat mahir 3 orang).

2.4.2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 855.494.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 753.365.221,- atau 88,06% dan realisasi fisik 94,44%. Keluaran kegiatan adalah jumlah obat buffer stok provinsi BMHP, jumlah rencana kebutuhan obat (RKO) Kab/Kota dan Provinsi, jumlah pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan, jumlah sarana Kefarmasian yang diberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR) sebanyak 40 orang (laki laki 20 perempuan 20), jumlah sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Provinsi.



Gambar 4.30
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan



Gambar 4.31
Sarana dan Prasarana
Instalasi Farmasi

2.4.3. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Alkes dan PKRT dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.617.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.299.699,- atau 79,58% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta yang yang tersosialisasi penggunaan alkes dan PKRT dalam negeri, jumlah sarana produksi dan penyalur alkes & PKRT yang dilakukan pengawasan, jumlah sarana fasyanke yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan alkes dan PKRT di Puskesmas, persentase produk alkes dan PKRT dalam negeri yang tersedia pada Instalasi Farmasi Kab/Kota.



2.4.4. Kegiatan Kefarmasian Dinkes Provinsi (Dak Fisik) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 659.663.635,- realisasi anggaran sebesar Rp. 624.558.625,- atau 94,68% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Provinsi.

Permasalahan:

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 di Sub Bidang SDM Kesehatan masih terdapat kekurangan dalam masalah koordinasi baik dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun dengan bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri maka untuk itu kami menawarkan beberapa solusi atas permasalahan yang ada selama pelaksanaan kegiatan di 2018;
2. Penyusunan rencana kebutuhan obat belum sepenuhnya berdasarkan data-data yang valid antara lain data ketersediaan obat dan data pemakaian obat, belum optimalnya koordinasi antara pengelola program dengan pengelola farmasi dalam penyusunan rencana kebutuhan obat;
3. Penyedia obat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan;
4. Kegiatan penyuluhan keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP tidak diikuti oleh satu Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kegiatan yang serupa dengan anggaran sendiri, sampel makanan yang akan diuji tergantung dari proses produksi IRTP sehingga ada beberapa IRTP tidak membawa sampel untuk diuji, sampel yang diuji beranekaragam sehingga tidak bisa mematok secara pasti biaya pengajuan untuk sampel tersebut. selain itu kegiatan penyuluhan

keamanan Pangan (PKP) juga dilaksanakan instansi lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan target yang sama;

5. Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan penyalur alkes dan PKRT tidak dilaksanakan karena sudah dianggarkan menggunakan dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DK-07) ;
6. Pembinaan dan Pengawasan ketersediaan Alkes dan PKRT di Fasyankes, pada saat dilaksanakan pembinaan dan pengawasan petugas pengelola alkes dan PKRT tidak ada ditempat.

Solusi:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bidang PPSPDM Kesehatan Republik Indonesia dalam hal pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, perlu adanya rapat Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait pengembangan kompetensi SDM kesehatan mengenai kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, Meningkatkan Koordinasi dengan pihak perencanaan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan kerja anggaran;
2. Adanya penyusunan secara berjenjang mulai tingkat Puskesmas, tingkat Kab/Kota dan Provinsi, mengoptimalkan TPOT (Tim Perencanaan Obat Terpadu) yang terjadi dari pengelola obat dan pengelola obat program;
3. Pemberian sanksi atau mem-*blacklist* penyedia obat yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan;
4. Pemberitahuan terlebih dahulu kepada IRTP yang akan dilakukan penyuluhan keamanan Pangan (PKP) sehingga pemilik usaha dapat menyediakan sampel PIRT untuk diuji, Koordinasi lintas sektor khususnya penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan (PKP) seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Dinas lainnya di Kabupaten/Kota; ;
5. Perencanaan kegiatan APBD dan APBN untuk mensinkronkan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih anggaran;
6. Pada saat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan bimbingan teknis untuk memastikan ada petugas yang dapat bekerja sama untuk proses pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis.

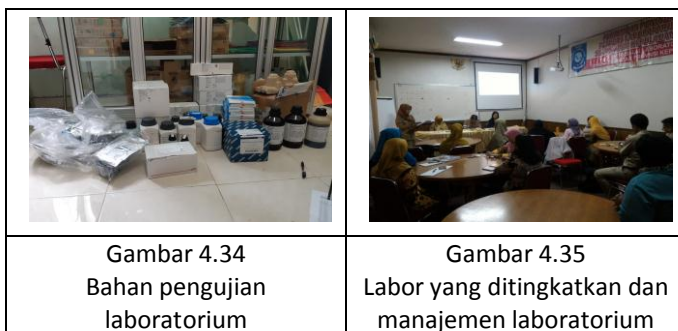
2.5. Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan

2.5.1. Kegiatan dan Pengembangan Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.016.856.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 933.873.180,- atau 91,84% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah tenaga Lab yang ditingkatkan kompetensi teknis laboratorium kesehatan, jumlah bahan pengujian laboratorium, jumlah sertifikat alat laboratorium yang akan ditingkatkan mutu sesuai standar, jumlah tenaga labor yang ditingkatkan kemampuan pengujian dan manajemen lab, jumlah sertifikasi mutu pelayanan labkes, jumlah buku

standarisasi laboratorium yang tersedia, jumlah laporan hasil supervisi dan jumlah alat pengujian laboratorium.

2.5.2. Kegiatan Akreditasi Laboratorium dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.730.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 138.193.461,- atau 85,45% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah tenaga laboratorium yang tersosialisasi akreditasi laboratorium, jumlah tenaga laboratorium yang dilakukan bimbingan teknis akreditasi laboratorium, jumlah dokumen laboratorium yang akan dilakukan standarisasi dan jumlah dokumen hasil survey akreditasi laboratorium.



2.6. Pelayanan Teknis Keperawatan

2.6.1 Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.211.070.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1881.819.816,- atau 58,60%. Keluaran kegiatan ini adalah 8 SOP Medis, terlaksananya pelayanan operasi bedah saraf, kateterisasi jantung dan terlaksananya kemitraan dengan Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang terkait pengembangan pelayanan onkologi terpadu dan intervensi nyeri, tercapainya persiapan pelaksanaan Akreditasi RS sesuai SNARS edisi 1.

Permasalahan

Adanya perbaikan kamar operasi dan ruang cathlab sehingga kegiatan sister hospital mengalami stagnasi cukup lama sampai perbaikan selesai, sehingga kegiatan yang seharusnya terlaksana tiap bulan menjadi berkurang

Solusi

Perbaikan/pemeliharaan kamar operasi dan ruang cathlab sudah dilaksanakan pada Tahun 2018 dan TA.2019 akan dibuat sistem integrasi ruang operasi (SIRO)

2.6.2 Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Keperawatan oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 92.270.000,- atau 92,27%. Keluaran kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan keperawatan profesional.

2.7. Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis

2.7.1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.622.443.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 5.235.803.717,- atau 93,12% Keluaran kegiatan ini adalah obat-obatan generic, obat-obatan non generic, reagen dan perbekalan kesehatan.



2.7.2. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.371.470.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 9.098.716.000,- atau 97,09%. Keluaran kegiatan ini adalah terbayarnya tenaga honorer dan tenaga kontrak.

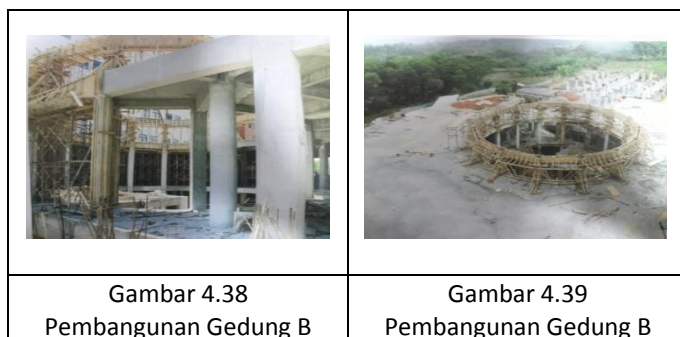
2.8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum

2.8.1 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.145.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 183.163.050,- atau 97,35%. Keluaran kegiatan ini adalah penyebaran informasi melalui media promosi melalui buku profil rumah sakit, baleho dan leaflet.

2.8.2. Kegiatan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 866.110.440,- realisasi anggaran sebesar Rp. 640.170.934,- atau 73,91%. Keluaran kegiatan ini adalah pengadaan sepeda motor roda 3 dan pengadaan alat-alat kedokteran umum RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno.

2.8.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.508.732.714,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.434.197.019,- atau 80,94%. Keluaran kegiatan ini adalah pemeliharaan gedung kantor, laundry dan jasa pengendalian hama RSUD Dr.(H.C.) Ir. Soekarno.

2.8.3. Kegiatan Pembangunan Gedung B Rumah Sakit oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.551.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 30.120.932.450,- atau 89,78%. Keluaran kegiatan ini adalah Gedung B.



2.8.4. Kegiatan Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas III Rumah Sakit oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.468.468.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.347.067.000,- atau 97,28%. Keluaran kegiatan ini adalah gedung kelas III.

2.8.5. Kegiatan Review DED dan Masterplan oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.769.033.500,- atau 98,28%. Keluaran kegiatan ini adalah DED dan Masterplan.

2.8.6. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.959.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 41.689.212.408,06,- atau 94,84%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit.



2.9. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

2.9.1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan oleh RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 3.674.135.220,66,- atau 91,85 %. Keluaran kegiatan ini adalah pertumbuhan pendapatan BLUD Rumah Sakit.

	
Gambar 4.42 Rapat koordinasi bidang keperawatan dengan komite keperawatan dan koordinator kepala ruangan	Gambar 4.43 Pertemuan Direktur, bidang keperawatan dengan seluruh perawat dan bidan

2.10. Peningkatan Pelayanan Pemerintah

2.10.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 3.160.908.284,- realisasi anggaran Rp. 2.708.607.002,- atau 85.69% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pegawai RSJD Prov. Bangka Belitung yang terlayani.

2.10.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 1.765.470.000,- realisasi anggaran Rp. 1.369.811.450,- atau 77.59% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan.

2.10.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 1.104.439.500,- realisasi anggaran Rp. 877.880.147,- atau 79.49% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mendapat pelatihan.

2.10.4 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 53.004.000,- realisasi anggaran Rp. 38.582.550,- atau 72.79% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%.

2.10.5 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran Rp. 59.320.000,- atau 89.93% realisasi anggaran Rp. 53.346.250,- dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah

laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%

2.11. Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA

2.11.1 Kegiatan Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 150.772.585,- realisasi anggaran sebesar Rp. 129.665.657,- atau 86.00% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah diagnosa medis dan kunjungan di ODGJ 7 Kab/Kota.



2.11.2. Kegiatan Penjangkauan Bebas Pasung yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.764.250,- realisasi anggaran sebesar Rp. 93.640.317,- atau 76.90% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kabupaten/kota penjangkauan pasien pasung.



2.11.2 Kegiatan Promosi Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 65.425.700,- atau 58.18% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah promosi yang dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan promosi.

2.11.3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.285.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.003.866.350,- atau 79.61% dan realisasi fisik

sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman pasien, jumlah tenaga penunjang pelayanan dan umlah tenaga dokter dan spesialis mitra.

- 2.11.4. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.918.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 25.050.000,- atau 67.85% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota.

Permasalahan

1. Pada kegiatan Penjangkauan Bebas Pasung yaitu kegiatan dilaksanakan apabila adanya laporan dari Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan terkait dengan adanya orang dengan gangguan jiwa yang terpasung;
2. Kegiatan Promosi Kesehatan yaitu kurangnya permintaan dari Institusi seperti RRI dan Lapas untuk melakukan penyuluhan;
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit yaitu jumlah pasien yang dirawat fluktuatif dan penyelenggaraan makanan dan minuman berdasarkan jumlah pasien yang dirawat pada saat itu.

Solusi

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke dinas terkait serta masyarakat;
2. Melakukan koordinasi ke dinas-dinas terkait.
3. Melakukan Proses Perencanaan Anggaran makanan dan minuman pasien berdasarkan jumlah BOR, bukan berdasarkan jumlah tempat tidur

2.12. Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza

- 2.12.1. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 363.967.500,- realisasi anggaran Rp. 325.821.390,- atau 89.52% dan realisasi fisik sebesar 80%. Keluaran adalah jumlah pelayanan rehabilitasi mental sosial, Napza dan tumbuh kembang anak dan remaja yang terlaksana.



Gambar 4.48
Pelayanan Rehabilitasi
Psikososial

- 2.12.2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas berbasis Kepulauan dan Home Visite** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 133.122.283,- realisasi anggaran Rp. 116.648.076,- atau 87.62% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah petugas Puskesmas dan masyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa.



Gambar 4.49
Penyediaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa Mobilitas
berbasis Kepulauan dan
Home Visite

- 2.12.3. Kegiatan Penyusunan Panduan Praktik Klinis** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 27.462.500,- realisasi anggaran Rp. 25.540.616,- atau 93.00% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis yang terdiri dari 5 dokumen.
- 2.12.4. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 70.535.000,- realisasi anggaran Rp. 58.378.370,- atau 82.77% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis yang terdiri 10 buku.
- 2.12.5. Kegiatan Penilaian Akreditasi** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 171.116.000,- realisasi anggaran Rp. 166.276.000,- atau 97.11% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan jumlah Sertifikat Akreditasi dari Tim KARS.

Permasalahan

- Pada Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial terdapat pagu tambahan pada APBDP untuk belanja modal dan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kenaikan harga pada belanja alat tersebut dari harga perencanaan awal.

Solusi

- Agar lebih akurat dalam membuat harga satuan dengan mempertimbangkan adanya kenaikan harga

2.13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa

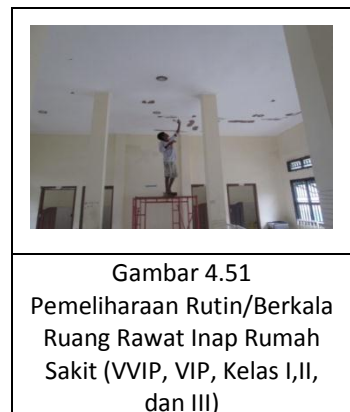
- 2.13.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit** yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 774.256.000,- realisasi anggaran Rp. 770.519.000,- atau 99.52% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah gedung rumah sakit yang terawat.

2.13.2. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.115.000,- realisasi anggran sebesar Rp. 56.679.750,- atau 77.52% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa yang terdiri dari 4 (empat) Promosi.

2.13.3 Kegiatan Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.355.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 13.075.000,- atau 97.90% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan.



2.13.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.800.000,- realisasi anggaran Rp. 193.911.000,- atau 97.54% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah ruang rawat inap yang terawat.



2.13.5 Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.680.000,- realisasi anggaran Rp. 145.930.000,- atau 98.15% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah gedung Rehabilitasi Psikososial yang direhab.



- 2.13.6. Kegiatan Rehabilitasi Dapur Gizi** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 198.680.000,- realisasi anggaran Rp 197.527.000,- atau 99.42% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Jumlah gedung dapur gizi yang direhabilitasi.



- 2.13.7. Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 159.848.000,- realisasi anggaran Rp 155.300.100,- atau 97.15% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit.



Gambar 4.54
Pemeliharaan Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit

- 2.13.8. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Laundry** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.208.000,- realisasi anggaran Rp. 199.256.000,- atau 96.63% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah gedung laundry yang direhabilitasi



Gambar 4.55
Rehabilitasi Gedung Laundry

- 2.13.9. Kegiatan Pembangunan Selasar** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.512.000,- realisasi anggaran Rp. 293.842.582,92,- atau 98.44% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan adalah jumlah salasar yang dibangun.



Gambar 4.56
Pembangunan Selasar

- 2.13.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.160.000,- realisasi anggaran Rp. 78.240.000,- atau 98.84% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan adalah terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit.



Gambar 4.57
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat Kesehatan

- 2.13.11. Kegiatan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 93.880.000,- realisasi anggaran Rp. 91.796.480,- atau 97.78% dan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit.

- 2.13.12. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 923.116.000,- realisasi anggaran Rp. 920.541.000,- atau 99.72% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli.



Gambar 4.58
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan

- 2.13.13. Kegiatan Pengadaan PABX dan Jaringannya** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.400.000,- realisasi anggaran Rp. 147.458.500,- atau 98.70% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah jumlah PABX yang dibeli.



Gambar 4.59
Pengadaan PABX dan
Jaringannya

2.13.14. Kegiatan Pengadaan Genset yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 488.852.000,- realisasi anggaran Rp 480.240.478,- atau 98.24% dan realisasi fisik 100%. keluaran kegiatan Jumlah genset yang dibeli.



Gambar 4.60
Pengadaan PABX dan
Jaringannya

2.13.15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 443.008.000,- realisasi anggaran Rp. 434.722.220,- atau 98.13% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli.

2.13.16. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.080.000,- realisasi anggaran Rp. 175.593.800,- atau 98.60% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli.

2.13.17. Kegiatan Pengembangan SIM RS Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.899.900,- realisasi anggaran Rp. 11.145.080,- atau 11.05% dan realisasi fisik 50%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah SIM RS yang dikembangkan.

2.13.18. Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.494.201.432,- realisasi anggaran Rp 1.477.812.101 atau 98.90% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah jenis obat yang dibeli.



Gambar 4.61
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan

- 2.13.19. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,- realisasi anggaran Rp. 3.709.680.000 atau 97.62% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah gedung rawat inap yang direhabilitasi.



Gambar 4.62
Rehabilitasi Gedung Rawat
Inap Kelas III (DAK)

- 2.13.20. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.035.815.000,- realisasi anggaran Rp. 997.421.975,- atau 96.29% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah alat kesehatan yang dibeli.



Gambar 4.63
Pengadaan Alat Kesehatan
(DAK)

Permasalahan

- Pada Kegiatan Pengembangan SIMRS masalah yang dihadapi adalah perubahan sistem yaitu dari SIMRS Versi 1 ke SIMRS versi 2 sehingga pihak Rumah Sakit harus mengajukan permohonan kembali ke Kemenkes RI untuk mendapatkan Aplikasi SIMRS versi 2.

Solusi

- Untuk segera mengajukan permohonan ke Kemenkes RI untuk memperoleh SIM RS versi 2.

2.14. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

- 2.14.1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan** dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.591.145.272,- realisasi anggaran Rp. 6.272.519.477,- atau 49.82% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana yang dibeli.

Permasalahan

- Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari pendapatan rumah sakit, sehingga pelaksanaan kegiatan berdasarkan jumlah pendapatan yang ada dan masuk ke rekening rumah sakit. Pendapatan rumah sakit 80% bersumber dari klaim BPJS yang masuk ke rekening Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru sampai bulan Juli 2018.

Solusi

- Melakukan koordinasi yang lebih intens ke BPJS terkait klaim yang diajukan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 227.993.857.931,24 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.448.817.681,24 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 210.545.040.250,00 dengan realisasi keuangan Rp. 220.159.305.168,99 atau 96,56 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1 Program Kebinamargaan

3.1.1 Perencanaan Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.426.950.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.305.809.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.264.611.000,- atau 96,85%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan jalan, 2 Dokumen, meliputi:

- Studi Kelayakan Jalan Pangkalpinang - Batu Beriga – Sadai di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- FS Jalan Balunijuk (UBB) – Pelempang di kabupaten Bangka.

3.1.2 Pembangunan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.612.123.878,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.49.630.354.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.49.420.663.900,- atau 99,58%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Jalan yang terbangun, sepanjang 11,584 Km, meliputi:

- Kabupaten Belitung : Peningkatan Jalan Junctionom – Membalong efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Simpang Empat - Pesarikan – Buding efektif 1,5 Km.
- Kabupaten Belitung Timur : Peningkatan Jalan Perawas - KM. 50 – Manggar efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Badau – Gantung efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Gantung - Simpang Padang efektif 1,5 Km.
- Kota Pangkalpinang : Peningkatan Jalan A. Yani efektif 0,48 Km.
- Kabupaten Bangka Selatan : Peningkatan Jalan Sungai Selan - Lampur - Air Bara efektif 1 Km.
- Kabupaten Bangka Tengah : Peningkatan Jalan Koba - Lubuk Besar efektif 1 Km.
- Kabupaten Bangka Barat : Peningkatan Jalan Parit Tiga - Tanjung RU efektif 1 Km; Peningkatan Jalan Sangku - DAM III – Saing efektif 1,104 Km.
- Kabupaten Bangka : Peningkatan Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin efektif 1 Km.



3.1.3 Perencanaan Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.801.690.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.62.860.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- atau 8,40%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan jembatan 0 Dokumen.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

- Kegiatan Pra Studi Kelayakan Jalur Penghubung Bangka Sumatera mengalami Gagal Lelang dalam proses pengadaan

3.1.4 Pembangunan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.539.200.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.3.467.242.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.462.525.500,- atau 99,86%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Jembatan yang terbangun, 1 unit yaitu: Pembangunan Jembatan Air Limau I di Kabupaten Belitung.



3.1.5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.320.442.931,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 45.818.668.931,- realisasi anggaran sebesar Rp. 44.964.694.401,99,- atau 98,14%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Jalan yang terpelihara, sepanjang 871,11 Km, yaitu :

- Kabupaten Bangka Tengah : Pemeliharaan Berkala Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis - Sungai Selan efektif 1,415 Km, Pemeliharaan Berkala Jalan

Lubuk Besar - Tanjung Berikat efektif 1 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkalpinang - Simpang Katis; Simpang Katis - Sungai Selan fungsional 32,64 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Namang - Puput; Puput - Simpang Katis; Puput - Lampur (Simpang Gedong); Sungai Selan – Lampur fungsional 32,55 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Penagan; Penagan - Tanjung Tedung fungsional 16,8 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Koba - Lubuk Besar fungsional 37,4 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Lubuk Besar - Tanjung Berikat fungsional 31 Km.

- Kabupaten Bangka Barat : Pemeliharaan Berkala Jalan Kelapa - Kayu Arang efektif 1,432 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Ibul - Parit Tiga fungsional 29,45 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Parit Tiga - Tanjung RU fungsional 26,28 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kelapa - Kayu Arang; Sangku - DAM III - Saing; Simpang Tempilang – Sangku fungsional 48,344 Km.
- Kabupaten Bangka : Pemeliharaan Berkala Jalan Puding Besar – Sungailiat efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar – Sungailiat fungsional 30,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Timur; Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu fungsional 36,75 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Puding Besar - Saing - Kota Waringin fungsional 22,30 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung fungsional 36,40 Km.
- Kabupaten Bangka Selatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Air Gegas - Bedengung – Payung efektif 1 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Lampur - Air Bara fungsional 64,26 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Air Gegas – Bedengung fungsional 25,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Bedengung - Batu Betumpang; Bedengung – Payung fungsional 37,20 Km.
- Kabupaten Belitung : Pemeliharaan Berkala Jalan Bantan – Pelulusan efektif 1,5 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Tanjung Pandan fungsional 11,74 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Junction - Membalong; Bantan – Pelulusan fungsional 51,74 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Perawas - KM. 50 fungsional 28,70 Km; Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Empat - Pesarakan – Buding fungsional 14,90 Km
- Kabupaten Belitung Timur : Pemeliharaan Rutin Jalan Badau – Gantung fungsional 69,39 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Simpang Renggang - Gantung; Gantung - Simpang Padang fungsional 32,20 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan KM. 50 - Manggar fungsional 44,29 Km.
- Kota Pangkalpinang : Pemeliharaan berkala jalan trem - RE. Martadinata – Sumberejo 2,628 km; Pemeliharaan rutin jalan pangkalpinang - batas kota (simpang katis); A. Yani; Simpang Semabung - Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Ketapang - Pasir Padi; PPI; Alexander fungsional 29,792 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SP. Pulau Bangka – Sampur fungsional 20,50 Km.



3.1.6 Inspeksi Kondisi Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.106.551.000,- atau 84,83%. Keluaran kegiatan adalah Data kondisi jalan, 1 Dokumen.

3.1.7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.320.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.410.050,- atau 88,96%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya Jembatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fungsional 3.050,67 M' terdiri dari:

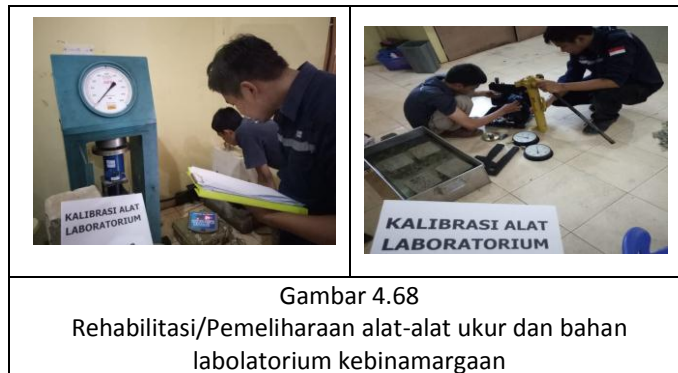
- Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Pulau Bangka, fungsional 1.706,62M'
- Pemeliharaan Jembatan Provinsi di Pulau Belitung, fungsional 1.244,05M'



3.1.8 Inspeksi Kondisi Jembatan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.198.567,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.244.500,- atau 81,46%. Keluaran kegiatan adalah kondisi jembatan Provinsi, 1 Dokumen.

3.1.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.211.220.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.710.263.530,- atau 77,34%. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya jembatan Baturusa II, 1 unit.

3.1.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.845.500,- atau 96,90%. Keluaran kegiatan adalah alat laboratorium dalam kondisi baik, 1 Paket.



3.1.11 Pembangunan Jalan (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.075.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.79.392.502.662,- atau 99,15%. Keluaran kegiatan adalah Memperlancar arus lalu lintas, panjang 18,85 Km terdiri dari:

- Kabupaten Belitung : Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 1) efektif 7,5 Km, Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 2) efektif 6 Km, Peningkatan Dan Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Simpang Empat (Paket 3) efektif 5,35 Km.



3.1.12 Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.937.014,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Pembayaran eskalasi Jembatan Baturusa II, 1 Paket.

- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Belum ada tanggapan Audit Eskalasi dari BPKP

Solusi:

- Menunggu tanggapan Audit Eskalasi dari BPKP

3.1.13 Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1)

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.937.014,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1), 1 Paket.

- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Belum ada tanggapan Audit Retensi dari BPKP

Solusi:

- Menunggu tanggapan Audit Retensi dari BPKP

3.2. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3.2.1 Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali Banjir dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.906.020.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.11.183.437.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.10.334.975.281,- atau 92,41%. Keluaran kegiatan adalah panjang saluran pembuang (banjir) yang terpelihara, sepanjang 18.892 M yaitu:

- Kota Pangkalpinang : Normalisasi Saluran Air Nangka I panjang 200 M
- Kabupaten Bangka : Normalisasi Saluran Banjir Dusun Sigambir Desa Air Duren Kec. Pemali panjang 947 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Sungai Lumut Dusun Parit Kelapa Dusun Gedong panjang 5.000 M
- Kabupaten Bangka Barat : Normalisasi Alur Sungai Plangas Desa Paradong panjang 3.500 M
- Kabupaten Bangka Selatan : Normalisasi Saluran Banjir Dusun Satu Serdang panjang 3.000 M
- Kabupaten Belitung : Normalisasi Saluran Banjir Desa Air Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan panjang 865 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Lassar Kec. Membalong 1.150 M
- Kabupaten Belitung Timur : Normalisasi Saluran Banjir Desa Batu Penyuh Kec. Gantung panjang 3.480 M, Normalisasi Saluran Banjir Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit panjang 750 M



3.2.2 Pemberdayaan Petani Pemakai Air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.460.840.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 455.832.000,- atau 98,91%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Gapoktan yang terbedayakan, 4 kelompok:

- Kabupaten Bangka Selatan: Pemeliharaan jaringan D.I.R Serdang Pergam panjang 4.000 M, Tebasan dan Pembersihan Saluran D.I.R Serdang Pergam panjang 1.800 M, Tebasan dan Pembersihan Saluran D.I. Jerigi panjang 500 M
- Kabupaten Bangka Barat: Pemeliharaan jaringan D.I. Buleng panjang 4.000 M, Tebasan dan Pembersihan saluran D.I. Buleng panjang 800 M



3.2.3 Penyusunan Regulasi Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.326.220.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 288.753.000,- atau 88,51%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA, 1 Regulasi.

3.2.4 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.497.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.420.229.000,- atau 97,78%. Keluaran kegiatan adalah Luas jaringan irigasi ,yaitu:

- Kabupaten Bangka Selatan : Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Serdang Pergam 150 Ha



Gambar 4.72
Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

3.3 Program Penataan Ruang dan Pertanahan

3.3.1 Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.686.190.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.1.735.732.470,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.508.857.336,- atau 86,93%. Keluaran kegiatan adalah dokumen peninjauan kembali perda RTRWP, 1 dokumen.

- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:.

1. Belum optimalnya data kehutanan dikarenakan belum selesai proses DPCLS dan TORA
2. Masih belum ada SK Mendagri Tapal Batas antara Kabupaten dan Kota Pangkalpinang
3. Perlu asistensi komprehensif terkait dengan pemetaan bersama Badan Informasi Geospasial/BIG

Solusi:

1. Melakukan surat tertulis ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait Kawasan Hutan baik program DPCLS maupun TORA
2. Berkoordinasi dengan Pemerintahan terkait dengan Tapal Batas antar Kabupaten dan Kota
3. Perlu adanya penganggaran terkait dengan asistensi ke BIG di Cibinong

3.3.2 Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.413.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.303.149.470,- atau 92,19%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen RDTR/RRTR KSP, 2 dokumen.

- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:.

- Perlu asistensi komprehensif terkait dengan pemetaan bersama Badan Informasi Geospasial/BIG

Solusi:

- Perlu adanya penganggaran terkait dengan asistensi ke BIG di Cibinong

3.3.3 Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.140.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.339.140.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 205.232.650,- atau 60,52%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, 1 laporan.



- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:.

1. Belum optimalnya pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Belum teridentifikasi kawasan-kawasan yang dominan terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang
3. Luasnya daerah yang perlu disurvey
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia serta Teknologi Drone dalam melakukan survey

Solusi:

1. Perlu sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pelibatan masyarakat dalam survey pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Belum optimalnya fungsi PPNS yang ada di Kabupaten/Kota
3. Perlu pengadaan dan Pelatihan pemanfaatan teknologi alat survey

3.3.4 Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 278.780.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.374.380.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.229.231.525,- atau 61,23%. Keluaran kegiatan adalah jumlah advice teknik kesesuaian rencana tata ruang, 1 dokumen.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:.

1. Belum optimalnya perizinan dikarenakan belum terbentuknya TKPRN sehingga untuk berkordinasi kesulitan
2. Belum selesainya Perda RZWP3K sehingga perizinan pemanfaatan pesisir belum bisa diberikan
3. Rapat kordinasi antar TKPRD Prov/Kab/Kota agar lebih diintensifkan

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan segera dibentuknya TKPRN sebagai induk TKPRD
2. Melakukan percepatan penyelesaian Perda RZWP3K sebagai pedoman perizinan di area pesisir

3.3.5 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.724.180.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.0,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Lahan keperluan prasarana pemerintah provinsi kepulauan bangka, 0 hektar.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:.

- Belum jelasnya area TPA Regional yang akan dibangun

Solusi:

- Mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar segera melakukan percepatan penetapan pembangunan TPA Regional

3.3.6 Kegiatan Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.880.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.0,- realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Keluaran kegiatan adalah Dokumen Data Sertifikasi Kepemilikan Lahan untuk Kepentingan umum 0 dokumen.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

- Perlu kajian/telaah program terkait dengan identifikasi sertifikat Asset

Solusi:

- Perlu dilakukan koordinasi dengan Bakuda bidang asset serta Kanwil BPN terkait dengan pemanfaatan lahan

3.4 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

3.4.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.743.785.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 543.785.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.123.492.186,- atau 22,71%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi, 2 layanan tidak terealisasi karena gagal lelang.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

- Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi Gagal dalam hal : (a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Pasal 51 ayat (3) Prakualifikasi Gagal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh pokja pemilihan.

Solusi:

- Telah mengirim surat ke ULP yang berisikan penolakan hasil lelang namun sampai saat ini surat balasan dari ULP belum kami terima dan sebagai ULP atas surat kami dalam aplikasi SPSE LPSE lelang untuk paket tersebut sudah dibatalkan oleh Pokja ULP

3.4.2 Penyelenggaraa Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.975.290.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.567.427.176,- atau 58,18%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikasi, 99 orang.

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

- Kegiatan pelatihan Assesor tidak terlaksana dikarenakan Anggaran tidak mencukupi dan pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan 4 hari dengan alokasi narasumber juga terbatas honorunya. Berdasarkan pedoman BNSP 203-2007 kegiatan tersebut minimal dilaksanakan 5 hari (40 jam @ 45 menit) untuk pembekalan materi dan 1 hari (8jam @45 menit) Assesment peserta pelatihan dan dengan alokasi narasumber yang memadai (jumlah orang & Honorunya).

Solusi:

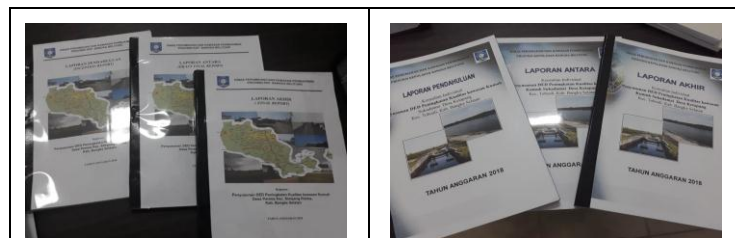
- Relokasi untuk kegiatan tersebut pada Anggaran tahun 2019

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 25.671.005.371,81 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.330.801.101,56 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.340.204.270,25 dengan realisasi keuangan Rp. 25.165.381.059,00 atau 98,03 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

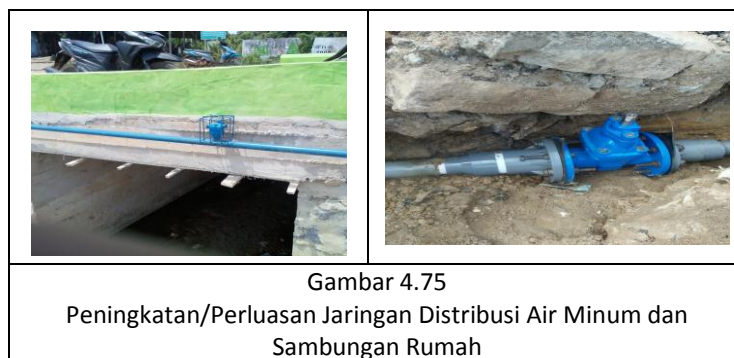
4.1 Program Keciptakarya dan Permukiman

4.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430.682.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 279.450.070,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 230.932.000,- atau 82,64%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang Tersusun.



Gambar 4.74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman

4.1.2 Kegiatan Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.459.570.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.226.940.000,-. Terjadinya perubahan anggaran dikarenakan satu Kegiatan Fisik yang tidak dilaksanakan. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 219.793.900,- atau 96,85%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Jaringan Distribusi Air Minum yang Terpasang



4.1.3 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 455.750.000,- dan mengalami perubahan menjadi 440.750.000,- Adapaun realisasi anggaran sebesar Rp 435.193.000,- atau 98,74 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang terbangun di kawasan Kumuh. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh dilaksanakan di 2 (dua) Lokasi :

- Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Kelurahan Padang Mulia Kabupaten Bangka Tengah)
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat)



4.1.4 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp1.035.500.000,- dan mengalami perubahan menjadi 996.030.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 988.385.500,- atau 99,23% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Panjang Drainase yang Terbangun di Kawasan Kumuh. kegiatan Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh terdiri dari:

- Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba.
- Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa Sukadamai Kecamatan Toboali.
- Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa Permis Kec. Simpang Rimba
- Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Desa Sukadamai Kecamatan Toboali.



Gambar 4.77
Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh

4.1.5 Kegiatan Penyusunan DED Cluster Melayu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.442.896.000,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 438.942.800,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.434.906.000,00 atau 99,98 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Keluaran kegiatan adalah DED Cluster Melayu yang tersusun.

4.1.6 Kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.100.000.000,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 24.520.000,00 Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 23.654.000,00 atau 96,47 % dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yang cukup besar karena mengalami rasionalisasi anggaran. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya.

4.2 Program Pembangunan Perumahan Rakyat

4.2.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.512.950.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 11.183.971.000,-. Hal ini dilakukan perubahan anggaran dikarenakan terdapat kelebihan sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.181.021.100,- atau 99,97%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang

direnovasi. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 7 Kabupaten Kabupaten/Kota yaitu:

- Supervisi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang.
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang.
- Supervisi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat
- Supervisi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan
- Supervisi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur



- 4.2.2 Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana** oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.774.220.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp.4.472.377.000,25. Hal ini dilakukan karena terdapat kelebihan sisa lelang. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.471.187.837,- atau 99,97%, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Rumah yang direkonstruksi dan di Rehabilitasi Akibat Bencana.



- 4.2.3 Kegiatan Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana** dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp.66.600.000,- yang dianggarkan pada anggaran perubahan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.385.700,- atau 100%, sedangkan realisasi fisik

kegiatan sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Kepala Keluarga yang tersosialisasi

4.2.4 Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp 1.025.628.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 657.535.000,00 atau 64,11 %, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %. Realisasi Keuangan Kegiatan Dekonsentrasi ini kecil disebabkan keterlambatan keluarnya DIPA dari pusat dan adanya pergantian Kasatker sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan ini.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 27.450.479.445,11 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.235.213.355,11 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.215.266.090,00 dengan realisasi keuangan Rp. 25.996.555.956,00 15.855.99 atau 94,101 %.

Target dan realisasi belanja untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1 Program Penguatan Kewaspadaan Nasional

5.1.1 Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung anggaran sebesar Rp. 28.402.880,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.189.000,00,- atau 74,60 %. Keluaran kegiatan adalah jumlah Laporan 4 Laporan.



5.1.2 Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.803.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.990.400,00,- atau 88,00%. Keluaran kegiatan adalah jumlah Laporan 4 Laporan.

5.1.3 Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.851.960,00,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 39.748.400,- atau 94,97 %. Keluaran Kegiatan adalah jumlah Laporan 4 Laporan.

5.1.4 Penyelenggaraan penanganan Konflik sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.642.400,00,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 183.121.370,00,- atau 99,18 %. Keluaran kegiatan adalah Peringkat Pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2 Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

5.2.1 Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.346.340,00,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 46.066.800,00,- atau 88,00%. Keluaran kegiatan adalah jumlah Sekolah yang di kunjungi 14 Sekolah.



5.2.2 Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp,1.105.528.400,00,- Relisasi anggaran Sebesar Rp. 1.017.770.350,00,- atau 92,06%. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Partisipasi Acara HUT RI sebanyak 5000 orang.



5.3 Program Pembinaan Politik dalam Negeri.

5.3.1 Monitoring dan Pembantuan Perkembangan Situasi Politik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.950.880,00,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 82.624.100.00,- atau 91,85%. Keluaran kegiatan adalah jumlah laporan 4 Laporan.

5.3.2 Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.121.980,00,- Realisasi anggaran sebesar Rp 159.941.900,00 atau 95,13 %. Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Peserta yang mengerti etika dan budaya politik 200 orang.

5.3.3 Penguatan indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.176.000,00,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 163.274.100,00 ata 92,15%. Keluaran kegiatan

adalah Jumlah Rekomendasi 4 Rekomendasi.



- 5.3.4 Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.168.000,00,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.780.500,00 atau 95,59%.Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan.



- 5.4 Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**
- 5.4.1 Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan narkotika** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.261.960,00,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 43.261.960,00,- atau 100,00%.Keluaran kegiatan adalah Jumlah Peserta yang memahami Bahaya Narkotika.



5.4.2 Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah dengan alokasi anggaran Rp.134.490.000,00,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 130.993.950,00 atau Rp.97,40 % Keluaran Kegiatan adalah Jumlah Dokumen.

5.5 Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja

5.5.1 Kegiatan Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Apartur dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.236.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.59.922.101,- atau 99,48%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya pengiriman peserta bimtek dan diklat anggota polisi pamong sebanyak 9 orang ke luar daerah.



5.5.2 Kegiatan Pembinaan Peningkatkan Personil Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.305.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.181.916.000,- atau 91,74%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek pelatihan dan pembinaan sebanyak 880 orang.



5.6 Program Penegakkan Perda dan Perkada

5.6.1 Kegiatan Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.235.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.747.500,- atau 88,49%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penyidikan, pemeriksaan dan penertiban Satpol PP sebanyak 1 kali kegiatan/rapat.



Gambar 4.88
Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

5.6.2 Kegiatan Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas Tindak Internal) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.907.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.11.692.500,- atau 78,43%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya dokumen pendisiplinan internal anggota satpol pp sebanyak 12 dokumen.



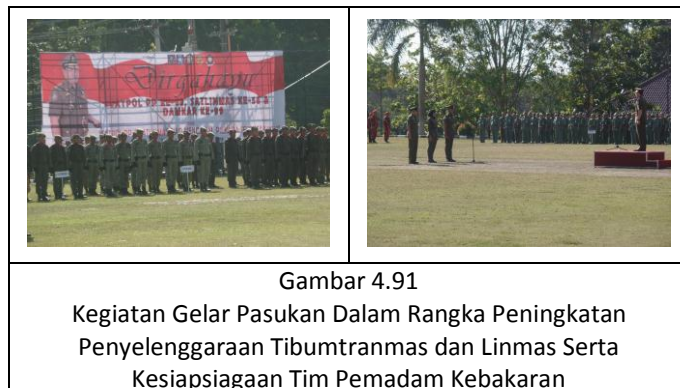
Gambar 4.89
Kegiatan Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas
Tindak Internal)

5.6.3 Kegiatan Penindakan Yustisial Terhadap Pelanggar Perda dan Perkada dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.787.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.27.728.500,- atau 60,56%. Keluaran kegiatan adalah penyelidikan pelanggaran perda/pergub sebanyak 10 penyelidikan dan terlaksananya penyidikan sebanyak 1 kali.



5.6.4 Kegiatan Pembinaan dan Penindakan non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.198.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.111.720.200,- atau 86,47%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penindakan non yustisial kepada warga, aparaturnya dan badan hukum sebanyak 242 orang.

5.7 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5.7.1 Kegiatan Gelar Pasukan Dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas Serta Kesiapsiagaannya Tim Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.404.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.87.627.500,- atau 91,85%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya gelar pasukan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang.



5.7.2 Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.792.679.650,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.657.496.300,- atau 92,46%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelenggaraan tibumtranmas satpol pp (penertiban, pengamanan, pengawasan dan patroli) selama 12 bulan.



5.8 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

5.8.1 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kantrantibnas bagi Satlinmas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.091.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.85.907.220,- atau 97,52%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya peningkatan satlinmas dalam penyelenggaraan kantarntibmas sebanyak 50 orang satlinmas



• Kendala dan Solusi

Kendala

1. Masih kurang maksimalnya fungsi koordinasi dengan instansi terkait (kabupaten dan kota) dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan Diklat serta kurangnya pemahaman tentang Jabatan Fungsional Satpol PP, baik Satpol PP Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya respon SKPD penginisiasi Perda dalam koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kurangnya minat Satlinmas (dari kabupaten/kota) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas Satlinmas yang diadakan oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan masalah anggaran pengirimannya
5. Kurangnya pemahaman tentang keberadaan dan fungsi Satlinmas oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.

6. Kurangnya kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas dalam membantu menyelenggarakan tibuntranmas dan penanganan bencana dan kebakaran.
7. Kurangnya sosialisasi/pelatihan penanggulangan bencana dan kebakaran untuk masyarakat.

Solusi

1. Mengupayakan fungsi koordinasi dengan Satpol PP kabupaten dan kota, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi agar pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat berjalan dengan baik.
2. Mengupayakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar Pol PP, serta mensosialisasikan dan mengupayakan anggota Pol PP menjadi fungsional Pol PP.
3. Selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder terkait dan mengupayakan peran dan kewenangan pejabat lebih tinggi dalam mengkomunikasikan/mengkoordinasikan penegakan perda.
4. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan upaya penegakan perda melalui penindakan non yustisi yang bersifat preventif dan persuasif.
5. Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan pembina Satlinmas di Kabupaten/Kota agar menyiapkan dukungan anggaran perjalanan dinas Satlinmas supaya mereka dapat mengikuti kegiatan Satlinmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu Satpol PP Provinsi mengupayakan penambahan uang saku kegiatan dan uang transport bagi anggota Satlinmas.
6. Memberikan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Satlinmas sesuai Permendagri No. 84 tahun 2014.
7. Satpol PP Provinsi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Satlinmas untuk menunjang kemampuan anggota Satlinmas.
8. Satpol PP Provinsi memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang penanggulangan bencana dan kebakaran untuk masyarakat.

6. URUSAN SOSIAL

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial sebesar Rp 28.759.519.178,00 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 14.786.233.617,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 13.973.285.561,00. Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 26.441.125.324,00 atau 91,34 %, Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

6.1. Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

6.1.1. Kegiatan Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 538.424.000,- atau 98,61 %. Dan Realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial, jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana alam.



6.1.2. Kegiatan Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.520.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.005.370,- atau 80,09 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial, jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial.

	
<p>Gambar 4.96 Pendampingan, Penjemputan Dan Pemulangan Korban Terlantar</p>	<p>Gambar 4.97 Pemberian Bantuan Bahan Baku Bangunan</p>

- 6.1.3 Kegiatan Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 246.146.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 202.736.100,- atau 82,36 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH;

Permasalahan

- Pemberian bantuan tanggap darurat bencana pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial bersifat *on call*, yang berakibat pada banyaknya pagu kegiatan yang tidak terealisasi;
- Karena tidak adanya permintaan pemulangan orang terlantar (pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial);
- Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

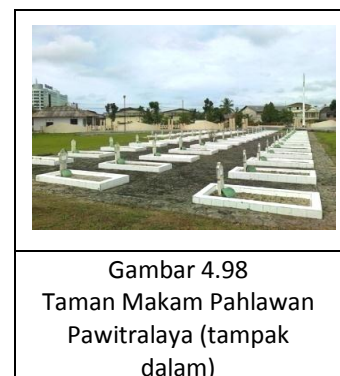
Solusi

- Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.2. Program Pemberdayaan Sosial

- 6.2.1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.432.550,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.336.000,- atau 85,93 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3.

- 6.2.2. Kegiatan Pelestarian dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan (TMP)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.424.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.154.120,- atau 92,30 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan.



- 6.2.3. Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.107.450,- realisasi anggaran sebesar Rp. 239.377.000,- atau 98,87 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peserta dan partisipasi dalam memperingati Hari pahlawan dan HKSAN.



- 6.2.4. Kegiatan Penyuluhan Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.507.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 74.802.000,- atau 92,91 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial.

Permasalahan

Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

Solusi

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.3. Rehabilitasi Sosial

- 6.3.1. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.445.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 74.015.589,- atau 95,57 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial dan optimalisasi/meningkatnya peranan Panti/Yayasan/ Organisasi Sosial dan kader masyarakat dalam pelayanan lanjut usia.

	
Gambar 4.101 Bimbingan Sosial Bagi Penerima Manfaat	Gambar 4.102 Verifikasi/Seleksi Bagi Lanjut Usia Penerima Manfaat, Kader RBM, Bimsosmen, Kegiatan Homecare, Penyaluran Bantuan, Monitoring, Home Visit

6.3.2. Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 49.134.610,- atau 98,27 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

6.3.3. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 108.785.500,- atau 84,86 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan perlindungan, rehabilitasi dan pelayanan sosial dan meningkatnya kinerja dan peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas.

	
Gambar 4.103 Unit Layanan Disabilitas	Gambar 4.104 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penyandang Disabilitas

6.3.4. Kegiatan Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 42.363.700,- atau 98,52 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi.

- 6.3.5. Kegiatan Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 46.945.439,- atau 94,27 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum.

Permasalahan

Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

Solusi

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial

- 6.4.1 Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 517.608.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 455.064.500,- atau 87,92 %. Realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial.

	
Gambar 4.105 Logistik Panti	Gambar 4.106 Pelayanan Psikososial bagi PMKS

- 6.4.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 90.050.117,- atau 92,64 %. Dan realisasi fisik 100,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan.

- 6.4.3. Kegiatan Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 11.490.000,- atau 94,18 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan.



Gambar 4.107
Pendampingan, Pemulangan Klien/warga Binaan Sosial

Permasalahan

Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

Solusi

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.5. Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial

6.5.1. Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.900.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 25.849.200,- atau 99,80 %. dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan.



Gambar 4.108
Pendampingan Klien



Gambar 4.109
Pembinaan Lanjutan Klien

6.5.2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 18.457.000,- atau 37,10 %. Dan realisasi fisik 90,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan



Gambar 4.110
Pendidikan bagi Penerima Manfaat



Gambar 4.111
Pelatihan Keterampilan bagi Penerima Manfaat

- 6.5.3 Kegiatan Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 658.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 552.803.450,- atau 83,96 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti.



Gambar 4.112
Logistik Panti

- 6.5.4. Kegiatan Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar: Rp. 312.620.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 282.747.462,- atau 90,44 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti.
- 6.5.5. Kegiatan Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.880.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.720.000,- atau 99,89 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah prasarana panti yang direhabilitasi.
- 6.5.6. Kegiatan Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar: Rp. 0,- realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 00,00 %. Dan realisasi fisik 00,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP.

Permasalahan

- Adanya Penundaan (Penghapusan Kegiatan) Rasionalisasi Anggaran;
- Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran.

Solusi

- Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.6. Penanganan Fakir Miskin

- 6.6.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.346.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 140.729.000,- atau 89,44 %. Dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Kube fakir miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha kembali dan Bimbingan Teknis Manajemen Usaha



Gambar 4.113
Seleksi Penerima
Manfaat/Bantuan



Gambar 4.114
Bimtek Manajemen Usaha

- 6.6.2. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar: Rp. 24.590.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.781.600,- atau 15,38 %. Dan realisasi fisik 16,00 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakkannya.
- 6.6.3. Kegiatan Pemberian bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis** oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 139.621.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 40.210.000,- atau 28,80 %. Dan realisasi fisik 34,96 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial subsidi beras secara gratis.



Gambar 4.115
Launching Rastra



Gambar 4.116
Monitoring Pelaksanaan
Program Bansos Rastra

Permasalahan

1. Adanya Efisiensi (Pengurang Pagu Anggaran) Rasionalisasi Anggaran;
2. Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) tidak maksimal dikarenakan;
 - a. Adanya rasionalisas;
 - b. Adanya anggaran yang tidak direalisasikan karena tidak efisien dengan output kegiatan;
 - c. Target WTP pada output kegiatan telah tercapai, sehingga dipandang tidak efektif dan efisien lagi utk diteruskan.
3. Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis tidak maksimal dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Administrasi kegiatan, serapan anggaran kecil dikarenakan menyesuaikan dengan petunjuk aturan yang ada dan pertimbangan kesesuaian dengan target kegiatan dan anggaran yang sudah dirasionalisasikan serta meminimalisir terjadinya potensi temuan;
 - b. Rakor Bansos Rastra tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
 - c. Pembayaran Sisa Subsidi Pemerintah Program Rastra dan Kerjasama dengan Bulog Subdivre Wilayah II Bangka tidak bisa dilakukan karena menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.1/9086/SJ tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 pada poin 1 disebutkan bahwa mulai Januari 2018 subsidi beras sejahtera diubah menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan dengan kualitas beras medium tanpa biaya tebus;
 - d. Untuk kegiatan monitoring (perjalanan dinas dalam daerah), serapan anggaran kecil dikarenakan pertimbangan kesesuaian antara target utama kegiatan yaitu subsidi biaya tebus Rastra yang telah dirasionalisasikan sehingga apabila dilaksanakan, dikhawatirkan monitoring yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien lagi;
 - e. Untuk kegiatan koordinasi dan menghadiri undangan rapat pelaksanaan rastra di tingkat pusat (dengan menggunakan dana perjalanan dinas luar daerah), serapan anggaran kecil dikarenakan pertimbangan efektif dan efisiensinya pelaksanaan koordinasi ke pusat/kementerian, mengingat penghematan anggaran yang dihimbau oleh Kepala Daerah serta Tim Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Bansos Rastra, secara rutin dan berkala melaksanakan koordinasi dan monitoring ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Solusi

Penyesuaian kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran.

6.7 Proram Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

6.7.1 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Portable oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.565.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.382.000,00 atau 58,15% dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Unit Jembatan Portable Dalam Tahun 2017 - 2022 yang di pelihara sebanyak 2 unit.



6.7.2 Kegiatan Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.190.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 25.190.500,00 atau 35,89% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah unit Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable sebanyak 1 unit.



6.7.3 Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.170.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.449.550,00 atau 81,97% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah (Laporan) Tersusunnya Data

Sarana Prasarana Pascabencana laporan dalam Tahun 2018. Sebanyak 1 laporan.

Permasalahan dan Solusi.

Masalah

- Masih banyaknya kegiatan program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam prioritas rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terakomodir dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran .

Solusi

- Masalah akibat setelah terjadinya bencana perlu di pikirkan bersama bagaimana caranya kegiatan dapat terakomodir untuk dilaksanakan dan dianggarkan untuk itu Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

6.8. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

6.8.1 Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.531.630,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 190.786.740,00 atau 86,12%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah peserta yang mendapat ilmu pengetahuan tentang Mitigasi penanggulangan bencana sebanyak 100 orang.

	
<p>Gambar 4.120 Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana 2018 Belitung Timur</p>	<p>Gambar 4.121 Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana Bangka Selatan</p>

6.8.2 Kegiatan Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.793.800,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 146.091.300,00 atau 89,74%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah peserta yang mendapat Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Kepada Aparatur

Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat sebanyak 100 orang di 3 Kab/Kota.

	
<p>Gambar 4.122 Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Tahun 2018 Kegiatan di Pangkalpinang</p>	<p>Gambar 4.123 Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Tahun 2018 Kegiatan di Kabupaten Belitung</p>

6.8.3 Kegiatan Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.662.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 239.480.650,00 atau 84,72%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah (Media Cetak/Elektronik) Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana di setiap 7 Kabupaten/kota sebanyak 10 Media.

6.8.4 Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.554.500,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 130.822.973,00 atau 87,48%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebanyak 2 kegiatan.

Permasalahan dan Solusi.

Masalah

- Minimnya Anggaran yang tersedia mengakibatkan kegiatan yang sudah direncanakan tidak terakomodir dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran kegiatan menjadi tidak dilaksanakan.

Solusi

- Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

6.9 Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana.

6.9.1 Kegiatan Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.925.210.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.690.859.600,00 atau 87,83%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Bulan Honor Tim Reaksi Cepat yang terbayarkan. Sebanyak 12 bulan.

6.9.2. Kegiatan Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.160.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 108.525.000,00 atau 63,41%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana (Kabupaten/Kota). Sebanyak 7 Kab/Kota

6.9.3 Kegiatan Pengadaan/Penyediaan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.880.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 430.773.390,00 atau 94,29%dengan realisasi fisik 100% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Item Peralatan ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana.Sebanyak 10 item peralatan

6.9.4. Kegiatan Pemeliharaan/ Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.640.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 164.867.000,00 atau 57,72% dengan realisasi fisik 100% Keluaran Jumlah Jenis Peralatan PB Kualitas Logistik dan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana yang di Pemelihara dan dirawat. Sebanyak 9 jenis barang.

Permasalahan dan Solusi.

Masalah

- Banyaknya kegiatan yang sudah direncanakan tidak terakomodir oleh anggaran yang tersedia dan juga akibat Rasionalisasi Defisit anggaran kegiatan menjadi tidak dilaksanakan.

Solusi

- Perlunya sama-sama antara Tim Anggaran dan SKPD untuk memikirkan Suatu rencana anggaran yang cukup proporsional terhadap belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal agar suatu kegiatan yang prioritas tidak lagi terakomodir oleh akibat belanja pemerintah daerah menjadi defisit.

B. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi 18 (delapan belas) urusan antara lain : urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2108 adalah sebagai berikut :

1. TENAGA KERJA

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja sebesar Rp. 20.588.130.686,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.315.524.068,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.272.606.618,00 dengan realisasi keuangan Rp. 17.860.472.424,00 atau 86,34 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

1.1.1 Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya mengatur pelaksanaan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di semua tempat kerja dimana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja/kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan K3 tidak hanya untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi sehingga dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Kegiatan rapat Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.155.000,-. Realisasi anggaran sebesar 18.239.000,- atau 82,32 %. Keluaran kegiatan adalah perusahaan yang mendapatkan penghargaan pelaksanaan K3 terbaik tingkat Provinsi.



Gambar 4.124

Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.1.2 Kegiatan Peningkatan Fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenaga Kerjaan

Peran dan fungsi LKS Tripartit melalui rapat LKS Trpartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan, agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dapat menciptakan hubungan industrial yang kondusif atau hubungan industrial yang aman dan dinamis serta terlaksananya koordinasi antar Lembaga Kerja Sama Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan. Kegiatan Peningkatan Fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketnaga Kerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 167.643.850,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 159.356.762,- atau 95,06%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya rapat LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenaga kerjaan dengan 7 Kabupaten/Kota atau pun dengan perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota.

1.1.3 Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan Pengupahan (DP), Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP), UMK/UMSK dan Sosialisasi Upah Minimum dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.864.100,- Realisasi anggaran sebesar Rp 138.951.935,- atau 91,50%. Keluaran kegiatan adalah Rapat Dewan pengupahan , pembahasan UMP, UMK/UMSK dan sosialisasi UMP/ UMSK.



Gambar 4.125

Peningkatan Fungsi Dewan Pengupahan (DP), Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP), UMK/UMSK dan Sosialisasi Upah Minimum

1.1.4 Kegiatan Peningkatan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.160.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 18.160.000,- atau 100 %. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Perusahaan dalam Pembuatan, Pendaftaran dan Pengesahan PP/ PKB.

1.1.5 Kegiatan Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Kesehatan Kerja dan Kesehatan (K3) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.652.032,- Realisasi anggaran sebesar Rp 61.652.032,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Perusahaan yang mendapat Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3

1.2 Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

1.2.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.320.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp72.292.660,- atau 93%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna TKA



1.2.2 Kegiatan Bimtek Metologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 101.159.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 94.974.000,- atau 93,89%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Peserta Bimtek Metologi Bagi Instruktur LPKS.

1.3 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusaan dan Kesehatan Kerja

1.3.1 Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja (UPTD Hyperkes) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.823.150,- Realisasi anggaran sebesar Rp 20.288.150,- atau 65,82%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Tenaga kerja yang diperiksa kesehatan kerjanya.



- 1.3.2 Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan perusahaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.506.250,- Realisasi anggaran sebesar Rp 23.709.250,- atau 86,20%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa



- 1.4 Program Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota**
- 1.4.1 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten / Kota** dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 731.692.450,- Realisasi anggaran sebesar Rp 731.412.850,- atau 99,96%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebanyak 192 orang.
- 1.5 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- 1.5.1 Pelayanan dan Peningkatan Produktivitas** Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Produktivitas dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.180.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp 58.813.000,- atau 88,87%. Keluaran kegiatan adalah Terlatihnya Tenaga kerja yang memahami dan menerapkan perilaku dan etos kerja yang produktif dalam lingkungan kerja.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.951.057.350,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.809.855.452,00 atau sebesar 92,76%. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

2.1.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 143.132.000,- realisasi anggaran sebesar 131.512.770,- atau 91,9% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan tentang keorganisasian dengan jumlah peserta sebanyak 230 orang.



Gambar 4.129
Pembinaan Organisasi Perempuan

2.1.2 Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 190.045.500,- realisasi anggaran sebesar 181.900.900,- atau 95.7% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Peserta Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia dengan jumlah 300 orang. dan Pelaksanaan Penilaian dengan Kategori :

- Kab/Kota Pelaksana dan Implementasi PUG.
- Desa/Kelurahan yang sudah mengimplementasikan PUG.
- OPD Provinsi yang sudah melakukan dan Implementasi PUG.
- Lomba menulis dalam rangka peringatan hari ibu ke -90.

2.1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 93.688.000,- realisasi anggaran sebesar 81.912.500,- atau 87,4%

dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah Jumlah peserta penguatan kapasitas PUG dan PPRG sebanyak 120 orang.



Gambar 4.130
Peningkatan Kapasitas Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan PPRG

2.1.4 Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten/Kota oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 36.045.000,- realisasi anggaran sebesar 35.905.300,- atau 99,6% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Kab/Kota yang dibina dan di monev yaitu 7 kabupaten/Kota.

• PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota terdapat permasalahan SDM yang belum memahami Peraturan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kepemilikan Data Sektoral masing-masing urusan terkait kegiatan yang belum tepat dan akurat.

Solusi :

- Pada tahun 2019 akan diadakan sosialisasi, pembinaan secara terus-menerus agar Kabupaten/Kota dapat mempelajari dan mempedomani peraturan yang ada.
- Terkait data sektoral akan diadakan pendataan kembali sehingga data yang dimiliki adalah data yang sesuai dan akurat.

2.2 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

2.2.1 Penguatan Pembinaan dan pelayanan korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 172.840.000,- realisasi anggaran sebesar 144.675.800,- atau 83% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah kelancaran fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, penguatan kelembagaan PPA kabupaten/kota dengan jumlah peserta 175 orang dan sosialisasi mobil perlindungan (molin).

- 2.2.2 Peningkatan Peran serta anak dalam pembangunan** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 222.217.500,- realisasi anggaran sebesar 200.300.196,- atau 90 % dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi dengan 800 peserta dan mengirim peserta HAN di Jawa Timur.



- 2.2.3 Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah Kegiatan (KPAD)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 238.071.5000,- realisasi anggaran sebesar 204.186.000,- atau 86% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah berjalannya fungsi KPAD dengan lancar dan optimal.

- 2.2.4 Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 57.651.750,- realisasi anggaran sebesar 48.091.356,- atau 82,1% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah pelaksanaan advokasi dan KIE forum anak dan terbentuknya kelompok Forum Anak dalam mendukung Kab/Kota Layak Anak.



- 2.2.5 Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 60.340.300,- realisasi anggaran sebesar 50.029.780,- atau 79,04% dan realisasi fisik 100%.

Keluaran kegiatan adalah Jumlah advokasi dan KIE Forum Anak di Kab/Kota Layak Anak.

2.2.6 Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 548.105.100 ,- realisasi anggaran sebesar 547.226.100,- atau 99,84% dan realisasi fisik sebesar 100% Keluaran Kegiatan adalah terlaksanannya Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2.7 Partisipasi anak dalam Pembangunan (Forum Anak) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar 188.921.700,- realisasi anggaran sebesar 183.361.750,- atau 97% dan realisasi fisik sebesar 100% Keluaran Kegiatan adalah peserta Forum Anak daerah tingkat Provinsi sebanyak 70 anak dan peserta forum anak.



- **Permasalahan Dan Solusi**

Permasalahan

- Pelaksanaan Kegiatan di penguatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum ada anggaran untuk pendampingan korban terutama ke Kabupaten/Kota.
- Masih adanya kabupaten/kota yang belum sepenuhnya fokus terhadap upaya mewujudkan KLA untuk menunjang terbentuknya (Provila/Provinsi Layak Anak).
- KPAD telah berjalan namun belum maksimal dan minimnya pembiayaan untuk anggaran fungsi KPAD dan belum adanya sekretariat KPAD yang bekerja untuk memaksimalkan peran KPAD sesuai fungsinya.

Solusi

- Pada tahun 2019 telah anggaran pendampingan untuk korban kekerasan di kabupaten/kota telah dianggarkan.
- Pada tahun 2019 akan diadakan sosialisasi dan advokasi serta pendampingan terhadap kabupaten/kota yang akan mewujudkan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak).

- Terkait data sektoral akan diadakan pendataan kembali sehingga data yang dimiliki adalah data yang sesuai dan akurat.
- Tahun 2019 sudah dianggarkan untuk ada perbaikan honor KPAD meski pun untuk pembentukan Sekretariat KPAD masih belum bisa dilaksanakan mengingat sumberdaya dan biaya yang tidak sedikit.

3. PANGAN

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan sebesar Rp. 9.702.669.318,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.979.422.616,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.723.246.702,00 dengan realisasi keuangan Rp. 8.918.404.418,00 atau 91,92 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Peningkatan Pelayanan Pemerintah

3.1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 965.516.747.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 924.602.020,00 atau 95,76%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran.

3.1.2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 363.282.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 301.312.785,00 atau 82,94%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya sarana dan prasarana aparatur.

3.1.3 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.523.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 54.523.000,00 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur.

3.1.4 Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 58.161.800,00 atau 72,70%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya aparatur.

3.1.5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 214.232.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 170.479.200,00 atau 79,58%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan.

3.1.6 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.040.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.600.000,00 atau 46,45%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan.

3.2. Peningkatan Ketersediaan Pangan

- 3.2.1 Kegiatan Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 585.045.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 569.716.200,00 atau 97,38%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya rencana induk pengembangan perekonomian dan teknologi pangan.
- 3.2.2 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.640.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 32.200.000,00 atau 90,35%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi pelayanan dewan ketahanan pangan.
- 3.2.3 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 137.262.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 134.565.250,00 atau 98,04%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan penumbuhan desa mandiri pangan.
- 3.2.4 Kegiatan Penanganan Desa Rawan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249.960.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 246.627.200,00 atau 98,67%. Keluaran kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat daerah rawan pangan.
- 3.2.5 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 159.080.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 153.418.000,00 atau 96,44%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen neraca bahan makanan.
- 3.2.6 Kegiatan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.050.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 41.130.000,00 atau 91,30%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- 3.2.7 Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.730.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 122.186.800,00 atau 99,56%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen akses pangan masyarakat.

- 3.2.8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.980.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.008.000,00 atau 95,77%. Keluaran kegiatan ini adalah dokumen daerah rawan pangan.
- 3.3. Program Pengembangan Distribusi Pangan**
- 3.3.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.412.854,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 131.614.200,00 atau 92,42%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya usaha pangan masyarakat.
- 3.3.2 Kegiatan Pengendalian Distribusi Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.529.601,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 103.468.900,00 atau 98,99%. Keluaran kegiatan ini adalah terkendalinya distribusi pangan.
- 3.3.3 Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.040.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 30.334.500,00 atau 91,81%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya prognosa neraca pangan.
- 3.3.4 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.240.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 29.822.250,00 atau 98,62%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya usaha pangan masyarakat.
- 3.3.5 Kegiatan Database Harga dan Stok Pangan di Tingkat Distributor** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.545.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 61.517.000,00 atau 96,81%. Keluaran kegiatan ini adalah database harga dan stok pangan di tingkat distributor.
- 3.3.6 Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 218.985.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 210.000.900,00 atau 95,90%. Keluaran kegiatan ini adalah cadangan pangan pemerintah.
- 3.4. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan**
- 3.4.1 Kegiatan Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan Termasuk Gerakan Makan Sayur, Buah, Kacang-kacangan dan Ayam Merawang (GEMA SABUK AMANG)** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 114.100.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 105.037.000,00 atau 92,06%. Keluaran kegiatan ini adalah terpromosinya GEMA SABUK AMANG.

- 3.4.2 Kegiatan Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 82.096.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 72.828.600,00 atau 88,71%. Keluaran kegiatan ini adalah berkembangnya produk pangan lokal hasil pertanian.
- 3.4.3 Kegiatan Penilaian Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Sertifikasi Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2 dan No Registerasi PSAT)** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 173.720.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 170.384.100,00 atau 98,08%. Keluaran kegiatan ini adalah tersertifikasinya produk pertanian.
- 3.4.4 Kegiatan Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 233.518.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 212.320.547,00 atau 90,92%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya gelar pangan daerah dan loba cipta menu B2SA provinsi dan nasional.
- 3.4.5 Kegiatan Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pada Kelompok Masyarakat** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.344.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 41.077.700,00 atau 47,57%. Keluaran kegiatan ini adalah termanfaatkannya lahan pekarangan untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat.
- 3.4.6 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahan dan Siap Saji Yang Beredar** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 170.460.000,00 realisasi dan anggaran sebesar Rp 154.363.000,00 atau 90,56%. Keluaran kegiatan ini adalah terawasinya mutu dan keamanan pangan segar, pangan olahan dan siap saji yang beredar.
- 3.4.7 Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar** oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.669.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 86.070.000,00 atau 98,18%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan segar.

3.4.8 Kegiatan Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan oleh Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.246.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 93.621.800,00 atau 93,64%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya analisis data pola konsumsi pangan penduduk (PPH).

Permasalahan

- Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
- Bobot beban kerja yang besar, sementara sumber daya aparatur yang ada masih dirasakan kurang, baik kualitas maupun kuantitas;
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;
- Adanya pemangkasan anggaran, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak mendapatkan hasil yang optimal.

Solusi

- Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan *Time Schedule*, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas optimal;
- Penambahan sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mengurangi bobot beban kerja;
- Sarana dan prasarana perlu ditambah;
- Kegiatan yang dilaksanakan akan maksimal hasilnya apabila tidak terjadi pemangkasan anggaran.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup sebesar Rp. 14.758.174.576,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.068.944.560,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.689.230.016,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.522.277.977,00 atau sebesar 84,85%. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

5.1.1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 926.425.000 realisasi anggaran sebesar Rp 914.585.500 atau 98,72%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun sebanyak 1.100 sampel.

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Terbatasnya anggaran untuk kegiatan lakukan perawatan peralatan laboratorium sehingga tidak semua peralatan bisa dilakukan perawatan yang mengurangi fungsi unjuk kerja dan tingkat akurasi sehingga peralatan bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hal ini mengakibatkan keraguan terhadap data hasil pengujian yang menyebabkan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap kinerja laboratorium.
- Terbatasnya anggaran makan dan minuman tambahan analisis laboratorium sehingga yang diperoleh analisis perbulannya tidak mencukupi kebutuhan semua analisis.

b. Solusi

- Untuk tahun berikutnya, perlu lebih diperhatikan untuk anggaran perawatan peralatan agar lebih diutamakan sehingga tidak terus dipangkas.
- Untuk makan dan minuman tambahan analisis laboratorium agar dianggarkan sesuai dengan jumlah analisis di laboratorium. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan semua analisis.

5.1.2 Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 187.860.000 realisasi anggaran sebesar Rp 139.623.029 atau 74,32%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah parameter lingkungan yang akreditasi sebanyak 30 parameter.

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

Belum terlaksananya asesmen untuk reakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 terkait masa berlaku akreditasi yang akan berakhir pada Bulan 9 Juni 2019 dikarenakan menunggu penetapan jadwal asesmen beserta asesor dari Komite Akreditasi Nasional yang akhirnya ditetapkan pada awal Tahun 2019, sehingga beberapa anggaran biaya Tahun Anggaran 2018 terkait asesmen tidak dapat diselesaikan atau dikeluarkan tepat waktu

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya, hendaknya untuk pengajuan akreditasi maupun survailen agar dapat di koordinasikan langsung ke KAN di awal tahun kegiatan, sehingga jika terdapat beberapa perubahan terkait dengan akreditasi laboratorium dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin. Sedangkan untuk laboratorium sesegera mungkin untuk mengajukan pendaftaran atau memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh KAN.

5.1.3 Sampling Parameter Kualitas Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.670.000 realisasi anggaran sebesar Rp 74.670.000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah titik sampling parameter kualitas lingkungan sebanyak 25 titik

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Titik sampling parameter kualitas lingkungan bertambah cukup signifikan tetapi dengan belum tersosialisasikan secara optimal ke pelanggan untuk melakukan sampling parameter kualitas lingkungan dan sarana sampling yang belum memadai sehingga masih banyak permintaan sampling pelanggan yang belum terpenuhi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

b. Solusi

- Untuk tahun berikutnya, perlu diperhatikan terhadap penambahan anggaran kegiatan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan karena dapat memberikan kontribusi penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dilakukan sosialisasi tentang kemampuan UPTD Laboratorium Lingkungan saat ini.

5.1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Sampling Parameter Kualitas Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 134.865.000 realisasi anggaran sebesar Rp 134.395.000 atau 99,65%. Keluaran kegiatan ini adalah

jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana laboratorium sebanyak 2 paket

	
<p>Gambar 4.134 Pengadaan Glassware</p>	<p>Gambar 4.135 Pengadaan Autoclave</p>

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

Sebagian besar peralatan untuk mendukung kegiatan analisa di laboratorium berasal dari pengadaan tahun 2007 sehingga berkurangnya fungsi unjuk kerja dan tingkat akurasi sehingga peralatan bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hal ini mengakibatkan keraguan terhadap data hasil pengujian yang menyebabkan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap kinerja laboratorium.

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya, perlu lebih diperhatikan untuk penambahan anggaran pengadaan peralatan laboratorium untuk menunjang kegiatan analisa di laboratorium.

5.2 Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

5.2.1 Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 321.615.500 realisasi anggaran sebesar Rp 260.119.494 atau 80,88%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) sebanyak 1 Dokumen

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Indikator Kualitas Lingkungan Hidup untuk target 30 tahun kedepan sesuai perencanaan RPPLH untuk isu penataan Ruang laut dan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan perlu pendetilan, adanya perubahan metode logi perhitungan khususnya untuk Indeks Kualitas Lahan yang sebelumnya hanya melihat luas tutupan hutan dengan metodologi yang baru terdapat penambahan beberapa variable, selain itu serta Ketersediaan data dan pengembangan metodologi proyeksi masih kurang.
- Peran aktif pokja yang belum maksimal

b. Solusi

- Perlu pendetilan metode proyeksi terhadap indikator-indikator yang terdapat pada RPPLH, dapat menggunakan pemodelan untuk melakukan proyeksi kedepan sehingga dapat mendekati kondisi sebenarnya dengan melihat data-data historis.
- Peningkatan peran aktif pokja dengan pemilihan anggota sesuai dengan kompetensi dan peningkatan kapasitas terhadap tinjauan isu-isu yang ditetapkan didalam RPPLH.

5.2.2 Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.630.000 realisasi anggaran sebesar Rp 104.431.840 atau 97,03%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tersusun sebanyak 1 Dokumen

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Kurangnya SDM terutama yang mempunyai kompetensi pemetaan dan kajian spasial yang diperlukan untuk penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- Pekerjaan pembuatan dokumen telah diselesaikan sebelum bulan juli, namun pada bulan Juli saat evaluasi peta di KLHK, ada perubahan skoring peta bentang alam semula digunakan peta skala 1:500.000 diubah ke skala 1:250.000 sehingga pekerjaan peta dilakukan kembali dengan skoring yang baru dan proses layout serta analisis peta, namun secara umum pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir triwulan empat.
- Kurangnya sarana prasarana penunjang seperti perangkat komputer yang menunjang keperluan pemetaan dari spesifikasi teknis untuk mendukung pekerjaan pemetaan.

b. Solusi

- Melakukan *Coaching* Klinik internal dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kemampuan dalam analisis peta dan pembuatan peta.
- Pengadaan perangkat komputer yang mendukung pekerjaan pemetaan untuk analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Karena data-data Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan digunakan dalam analisis pengaruh lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS dan perizinan lingkungan.

5.2.3 Penyusunan Dokumen KLHS oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 734.150.000 realisasi anggaran sebesar Rp 353.956.899 atau 48,21%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen KLHS yang tersusun sebanyak 2 Jenis Dokumen

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Dari dua Output Kajian hanya satu output yang terlaksana yaitu KLHS RRTR KSP KIPT Sadai, sedangkan KRP Dokumen Teluk Kelabat tidak dilaksanakan karena dari sisi Dokumen dibuat tahun 2015 secara kajian telah banyak perubahan Dinamika pembangunan dikawasan tersebut dan harus dikaji ulang berdasarkan Permen ATR Nomor dan dari teknis pekerjaan KRP Teluk Kelabat diterima Pokja KLHS pada bulan Oktober berdasarkan norma waktu pekerjaan KLH untuk satu dokumen dikerjakan selama 6 bulan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk KLHS Teluk kelabat tidak dilaksanakan.
- Kurangnya SDM terutama yang mempunyai kompetensi pemetaan dan kajian spasial yang diperlukan untuk penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang diperlukan dalam analisis resiko terhadap lingkungan hidup terhadap KRP yang dikaji.
- Kurangnya data-data teknis mendukung kajian seperti data-data kebencanaan, citra satelit resolusi tinggi.

b. Solusi

- Perencanaan Penyusunan KLHS dilakukan di triwulan awal anggaran mengingat norma waktu kegiatan penyusunan KLHS 6 bulan, sehingga menghasilkan Kajian KLHS yang komprehensif, dan melakukan identifikasi dokumen-dokumen yang akan di lakukan pengkajian KLHS terhadap Kebijakan Rencana dan/atau Program dari perangkat daerah.
- Melakukan *Coaching* Klinik internal dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Proses serta Tahapan penyusunan KLHS kepada Pokja dan tim Internal Dinas Lingkungan Hidup.
- Inventarisasi data-data yang dibutuhkan secara detil terhadap KLHS yang akan disusun seperti dukungan data citra, peta penutupan lahan dan data-data teknis lainnya.

5.2.4 Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.563.585 realisasi anggaran sebesar Rp 72.363.585 atau 98,37%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) sebanyak 1 Dokumen

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Tidak semua data pada tabel data yang dibutuhkan pada dokumen IKPLHD bisa terisi karena keterbatasan data dari sektoral
- Minimnya data inovasi daerah serta kedalaman analisis pada Dokumen IKPLHD.

b. Solusi

- Memaksimalkan simpul data terpusat melalui data sektoral daerah, pengumpulan data dimaksimalkan selain data dari perangkat daerah Provinsi, data-data dimaksimalkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta untuk kekurangan data khususnya data pemantauan Kualitas air sumur dan air hujan dilakukan analisis dan pengambilan sampel untuk penyusunan laporan DIKPLHD 2019.
- Memaksimalkan peranan pokja dan akademisi yang terlibat untuk mempertajam analisis terhadap isu yang diangkat dalam Dokumen IKPLHD dari berbagai perspektif interdisiplin sehingga dapat memecahkan isu yang diambil secara komprehensif.
- Memaksimalkan inovasi daerah khususnya inovasi-inovasi bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan litbang daerah.

5.2.5 Kegiatan Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 98.854.000 realisasi anggaran sebesar Rp 96.718.400 atau 97,84%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah usulan/Kegiatan yang dilayani sebanyak 6 usaha/kegiatan

	
<p>Gambar 4.136 Lokasi pengolahan timah di Unmet Muntok (7 tanur bakar)</p>	<p>Gambar 4.137 Lokasi pemurnian bijih timah di Unmet Muntok</p>

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Tidak ada permasalahan untuk realisasi capaian output, namun beberapa usaha dan/ atau kegiatan belum bisa dilanjutkan proses penilaiannya dikarenakan terbentur oleh pengaturan ruang laut dimana Perda RZWP3K belum disyahkan.
- masih belum efisien dalam pemanfaatan waktu dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen serta penerbitan Izin Lingkungan, terutama untuk proses penilaian dan pemeriksaan dokumen yang masuk dalam usaha dan/ atau kegiatan yang wajib OSS.

b. Solusi

- Peninjauan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan perlu dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal apakah sudah ada tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebelum mempunyai dokumen lingkungan.
- Perlu peningkatan jumlah dan kualitas SDM dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen terutama pada pemeriksaan substansi dokumen.
- Percepatan penetapan perda RZWP3K perlu diupayakan lebih intensif lagi agar memperlancar proses perizinan bagi rencana usaha yang berlokasi di perairan/ ruang laut.
- Perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM anggota sekretariat KPA AMDAL dalam hal proses perizinan melalui system OSS.

5.2.6 Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL Serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.985.031 realisasi anggaran sebesar Rp 66.482.031 atau 97,79%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi hasil Evaluasi sebanyak 7 Rekomendasi

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak menemui kendala yang berarti, namun dilihat dari hasil evaluasi masih banyak terdapat ketidaksesuaian dalam proses penilaian pemeriksaan AMDAL/UKL-UPL antara lain:

- advice planning yang diterbitkan instansi yang membidangi tata ruang belum secara tegas menetapkan kesesuaian lokasi tertentu terhadap rencana tata ruang.
- Beberapa rencana usaha/kegiatan tidak dilengkapi dengan persetujuan prinsip dari kepala daerah.
- Masih terdapat sertifikat penyusun yang sudah kadaluarsa sebelum selesainya proses AMDAL/UKL-UPL.

b. Solusi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penilaian AMDAL pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan Izin Lingkungan oleh KPA dan Instansi LH Kabupaten/Kota Tahun 2019 akan melaksanakan rakor KPA di Provinsi dengan narasumber dari KLHK terlebih dahulu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta penyamaan persepsi antara KPA Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam melaksanakan proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungannya.

5.3 Program Peningkatan Pengendalian dan Penuaan Lingkungan Hidup

5.3.1 Pengendalian Beban Pencemaran Air oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.800.000 realisasi anggaran sebesar Rp 121.232.150 atau 98,72%. Keluaran kegiatan ini adalah Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran Air sebanyak 1 Rekomendasi

	
Gambar 4.138 Pengendalian Beban Pencemaran Air, pengambilan sampel untuk data perhitungan	Gambar 4.139 Pengendalian Beban Pencemaran Air, pertemuan narasumber dalam penyampaian hasil analisa

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Data pendukung dari sungai baturusa yang sangat minim, dikarenakan belum adanya studi khusus tentang morfologi sungai baturusa yang dilakukan;
- Menggunakan jasa Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Output Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran Air Sungai Baturusa, dimana penyesuaian jadwal untuk penyampaian hasil yang tidak sesuai jadwal;

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya, perlu lebih diperhatikan dan dilakukan kerjasama dengan BPDAS Cerucuk, Dinas Kehutanan, Bapelitbangda dan Forum DAS Bangka Belitung dalam hal sharing data, narasumber dan penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung Sungai Baturusa.

5.3.2 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.670.000 realisasi anggaran sebesar Rp 111.179.870 atau 97,81%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebanyak 40 Usaha/Kegiatan.



Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Anggaran Pengawasan yang tidak mencukupi untuk melakukan Kegiatan Pengawasan terhadap seluruh izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 126 Izin Lingkungan, akan tetapi anggaran untuk pengawasan penataan lingkungan hidup masih sangat kecil hanya cukup pengawasan sebanyak 50 perusahaan dan/atau usaha pada tahun 2018, padahal kewajiban pengawasan sebagaimana amanah UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
- Belum maksimal dan meratanya kemampuan sumber daya manusia perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, menyebabkan pelaksanaan kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan tidak maksimal dan hasil ketaatan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup belum optimal.

b. Solusi

- Untuk tahun berikutnya, perlu ditingkatkan dan ditambah anggaran untuk kegiatan pengawasan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup mengingat masih banyak jumlah izin yang dikelarkan oleh provinsi sesuai kewenangan akan tetapi belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perlu diadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan bagi sumber daya manusia perusahaan dan perlu dibuatkan ruang informasi dan konsultasi lingkungan serta up grade pengetahuan terkait pengelolaan dan penataan lingkungan hidup.

5.3.3 Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.060.000 realisasi anggaran sebesar Rp 56.776.600 atau 53,53%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 titik pantau.



Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Penganggaran dana uji emisi untuk biaya analisa laboratorium Rp. 46.000.000,- tidak mencukupi dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga laboratorium terakreditasi KAN untuk 3 (tiga) titik di setiap 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dengan total 21 (dua puluh satu titik), sehingga dana tersebut tidak terserap;
- Tidak bisa dilakukan kerjasama dengan UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan untuk uji udara belum terakreditasi KAN;

b. Solusi Dalam pelaksanaan di Tahun berikutnya harus memperhatikan biaya kerjasama dengan pihak ke tiga (Laboratorium terakreditasi KAN). Untuk pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 bekerjasama sama dengan kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga diperoleh data untuk udara ambien dengan metode passive sampler, namun hanya untuk 2 (dua) parameter saja, yaitu parameter SO_2 dan NO_2 .

5.3.4 Pemantauan Kualitas Air Sungai di provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 124.435.000 realisasi anggaran sebesar Rp 124.226.600 atau 99,83%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah titik pantau kualitas air sungai sebanyak 54 titik pantau.

	
Gambar 4.142 kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,	Gambar 4.143 kegiatan Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan dan Solusi :



a. Permasalahan

Periode pemantauan yang terbatas hanya 2 (dua) kali pemantauan, sehingga belum cukup untuk mewakili data sekunder periode puncak musim kemarau, musim kemarau, musim peralihan, musim hujan dan puncak musim hujan;

b. Solusi

Dalam pelaksanaan di Tahun berikutnya diharapkan bisa dilakukan penambahan periode pemantauan.

5.3.5 Penerimaan, Penelaahan, dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.500.000 realisasi anggaran sebesar Rp 66.608.082 atau 98,68%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi sebanyak 14 kasus

	
Gambar 4.144 Verifikasi Pengaduan terhadap Kegiatan Tambang Inkonvensional Tower di Pantai Laut Sampur	Gambar 4.145 Verifikasi Pengaduan dan Pengambilan Sampel Air Laut Bersama Tim Ahli dari KLHK terhadap Pencemaran Teluk Pikat Pantai Matras Sungailiat

Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan :

- Anggaran Kegiatan Pengaduan Kasus Lingkungan yang sangat terbatas hanya cukup untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang diterima akan tetapi untuk meningkatkan sampai pada proses penuntutan dan penegakan hukum belum bisa dilakukan

karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembuktian dan pembayaran tenaga ahli yang akan membantu dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan.

- Belum maksimal peran sumber daya manusia baik PPNSLH maupun PPLH karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan pengaduan sehingga tidak bisa maksimal dan optimal dalam proses penyelesaian pengaduan masalah lingkungan.

b. Solusi

- Perlu ditingkatkan dan ditambah anggaran untuk kegiatan penerimaan, penelaahan dan verifikasi pengaduan masyarakat sehingga penyelesaian pengaduan kasus lingkungan dapat lebih maksimal dan memberikan efek jera.
- Perlu diadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan penyelesaian pengaduan masalah lingkungan serta dapat membangun jaringan yang lebih luas dengan stake holder lainnya dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup.

5.4 Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas

5.4.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.865.00 realisasi anggaran sebesar Rp 16.386.600 atau 47%. Keluaran kegiatan ini adalah Nilai Fisik Adipura sebesar 74 nilai

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada realisasi keuangan terpakai 47%, karena biasanya ada 2 kali penilaian tapi di tahun 2018 ini hanya 1 kali penilaian (penilaian mengikuti aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), jadi anggaran tidak terpakai.

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya mudah-mudahan juknis/aturan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengalami perubahan.

5.4.2 Kegiatan Studi Manajemen dan Produksi Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 332.650.000 realisasi anggaran sebesar Rp 231.305.300 atau 69,53%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen studi manajemen dan produksi persampahan sebanyak 1 dokumen

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun (dalam waktu 2 bulan), sehingga data yang dibutuhkan belum optimal dan kurangnya SDM yang berkualitas.

- b. Solusi
Dibutuhkan SDM yang berkualitas.

5.4.3 Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 186.110.000 realisasi anggaran sebesar Rp 161.007.590 atau 86,51%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan sebanyak 2 laporan

Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
Output kegiatan yaitu kesiapan lahan lokasi TPAST Regional belum tercapai. Hal ini disebabkan karena masyarakat menolak daerah mereka dijadikan lokasi TPAST Regional karena kotor dan bau.
- b. Solusi
Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat yang terkena dampak.

5.4.4 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.608.000 realisasi anggaran sebesar Rp 30.093.100 atau 86,95%. Keluaran kegiatan ini adalah Dokumen inventarisasi emisi gas rumah kaca sebanyak 1 dokumen

Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Sulitnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan baik dari OPD yang terkait maupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.
 - Masih rusaknya sistem online dari KLHK.
 - Aplikasi SIGN SMART (Sistem Informasi Gas Rumah Kaca Nasional – Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan) mengalami gangguan sistem/eror.
- b. Solusi
Intensifikasi pertemuan dengan OPD terkait dari DLH Kabupaten/Kota (Koordinasinya untuk lebih sering dilakukan).

5.4.5 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 219.953.000 realisasi anggaran

sebesar Rp 209.518.500 atau 95,26%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader/kelompok masyarakat yang terlatih sebanyak 33 kader/kelompok

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masyarakat yang diundang tidak dalam 1 kelompok (1 RT diutus 1 orang untuk 1 Desa), sehingga banyak dari mereka tidak memahami cara pengomposan dan sulit untuk koordinasi.

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya kelompok masyarakat yang diundang bergelut di TPS3R dalam satu kelompok, jadi lebih mudah berkoordinasi dan lebih memperdalam cara pengomposan yang baik dan benar.

5.4.6 Implementasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklam) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.044.000 realisasi anggaran sebesar Rp 29.036.500 atau 80,56%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kampung iklim sebanyak 3 kampung

	
<p>Gambar 4.146 Pemanenan air hujan dari rumah warga, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka</p>	<p>Gambar 4.147 Pintu air yang ada di Desa Selingsing, Kabupaten Belitung Timur yang digunakan untuk irigasi</p>

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kampung yang diusulkan untuk menjadi kampung iklim belum memenuhi syarat untuk menjadikan kampung iklim. Anggaran yang disediakan hanya untuk melakukan verifikasi saja, tidak ada untuk pembinaan kampung iklim.

b. Solusi

Perlunya pendampingan kepada masyarakat dalam pembentukan kampung iklim.

5.4.7 Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.044.000 realisasi anggaran sebesar Rp 29.036.500 atau 80,56%.

Keluaran kegiatan ini adalah jumlah sekolah calon adiwiyata nasional sebanyak 14 sekolah.

	
<p>Gambar 4.148 Green House SD Negeri 3 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan</p>	<p>Gambar 4.149 Pemberian penghargaan Adiwiyata Provinsi Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung</p>

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kurangnya pembinaan terhadap sekolah-sekolah untuk menjadikan sekolah Adiwiyata.

b. Solusi

Untuk tahun berikutnya lebih dimaksimalkan lagi proses pembinaan sekolah-sekolah untuk memenuhi kriteria penilaian adiwiyata.

6. ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 9.782.560.907,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.311.010.745,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.471.550.162,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.822.163.609,00 atau sebesar 90,18%. Target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

6.1 Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6.1.1 Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 78.381.500,- kemudian mengalami perubahan menjadi Rp 62.473.562,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.926.084 atau 94,32 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya 1 (satu) kali sosialisasi pemanfaatan data kependudukan pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Hotel Puncak Pangkalpinang, dengan undangan yang berasal dari Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

6.1.2 Kegiatan Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.635.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 35.185.500,- atau 82,53% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 2 kali Rapat Teknis. Rapat Teknis Semester I di selenggarakan di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat, tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah peserta 28 orang dari Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat Teknis Semester II di selenggarakan di Ruang Pertemuan Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat tanggal 26 November 2018 dengan jumlah peserta 18 orang dari Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



6.1.3 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi Aparatur Kabupaten/Kota (DAK) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 485.895.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 422.994.059 atau 87,05 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 6 (enam) kali Bimbingan Teknis, yaitu:

- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, 12-13 Juli 2018 di Hotel Sun Pangkalpinang, peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berjumlah 33 orang.
- Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil, 16-17 Juli 2018 di Hotel Renz Pangkalpinang, peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sejumlah 27 orang.
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, 12-13 Juli 2018 di Hotel Sun Pangkalpinang, peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sejumlah 34 orang.
- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan, 16-17 Juli 2018 di Hotel Renz Pangkalpinang, peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sejumlah 30 orang.
- Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Front Office) pada tanggal 25 s.d 16 April 2018 di Hotel Renz Pangkalpinang peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sejumlah 40 orang.
- Bimbingan Teknis Pencatatan Kelahiran Secara Online dan Konversi Data Akta Kelahiran, 25-26 Oktober 2018 di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan, peserta berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sejumlah 28 orang.

6.1.4 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.462.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 89.703.000,- atau 99,16 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 1 (satu) laporan penilaian penyelenggaraan

administrasi kependudukan dan penilaian Administrator Database SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.1.5 Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.025.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 140.107.173,- atau 93,39% dan realisasi fisik 100 %. Keluaran kegiatan adalah 55 (lima puluh lima) buku profil kependudukan dan 65 (enam puluh lima) buku agregat kependudukan.

6.1.6 Kegiatan Pelaksanaan Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota (DAK) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 239.975.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 193.673.167,- atau 80,71% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 4 (empat) kali Rapat Koordinasi dan fasilitasi blanko, yaitu:

- Tanggal 28 Juni 2018 di Hotel Bangka City Pangkalpinang, dengan peserta berjumlah 30 orang.
- Tanggal 8 Agustus 2018 di Hotel Puncak Pangkalpinang, dengan peserta berjumlah 30 orang.
- Tanggal 3 September 2018 di Hotel BW Suite Tanjungpandan, dengan peserta berjumlah 40 orang.
- Tanggal 26 November di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, dengan peserta berjumlah 21 orang.
- Fasilitasi blanko KTP-elektronik berupa pengambilan blanko KTP-elektronik ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta dan pendistribusian blanko KTP-elektronik ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4.151
Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP Elektronik di
Kabupaten/Kota

6.1.7 Kegiatan Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 360.796.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 344.362.165,- atau 95,451% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah 2 (dua) kali pertemuan dan 1 (satu) kali sosialisasi melalui media yaitu:

- Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 9 Agustus 2018 di Hotel Puncak Pangkalpinang, diikuti 21 orang peserta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Sosialisasi Pelayanan Terpadu Pencatatan Perkawinan Tingkat Provinsi kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018 di Hotel Puncak Pangkalpinang, dihadiri oleh 50 orang peserta yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pembimbing Masyarakat Non Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Sosialisasi melalui media cetak berupa baliho, iklan di surat kabar, video dan booklet.

6.1.8 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 195.590.868,- atau 97,80 % dan realisasi fisik 100% keluaran kegiatan adalah 1 (satu) paket yaitu terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

6.1.9 Kegiatan Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Nasional GISA Tingkat Provinsi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp 186.600.000,-.Realisasi anggaran sebesar Rp 168.290.000,- atau 90,19 % dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya 1 (satu) kali sosialisasi.



Kendala:

1. Kurang tepatnya perencanaan penganggaran terutama dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Administrasi Kependudukan Tahun 2018.

Solusi :

1. Perencanaan penganggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan memperhatikan kondisi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terbaru

7. PEMERINTAHAN MASYARAT DESA

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 12.189.519.538,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.713.509.758,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.476.009.780,00 dengan realisasi keuangan Rp. 11.842.596.251,00 atau 97,15 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

7.7 Program Pembinaan Pemerintah Desa

7.7.1. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.608.400,- realisasi anggaran sebesar Rp.93.502.500,- atau 99,89%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di 6 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



7.7.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.247.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.162.947.100,- atau 98,02%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan revolusi mental untuk perangkat desa sebanyak 40 (empat puluh) orang di Subang.

7.7.3 Kegiatan Penataan Kewenangan Desa dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.047.100,- realisasi anggaran sebesar Rp.557.858.020,- atau 97,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Lomba desa/kelurahan di 6 Kabupaten/ Kota se- Provinsi Kep. Bangka Belitung.



- 7.7.4 Kegiatan Pendampingan Kelembagaan Desa** DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.778.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 723.163.475,- atau 92,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan pokjanal posyandu, Bimtek Bagi Pengurus Bumdes, Lomba Bumdes dan sosialisasi lembaga adat desa.



- 7.7.5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.407.630.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.326.920.724,- atau 94,27%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Rakor PKK, Kegiatan Lomba BBGRM, Kelompok PKK yang dibina dan kegiatan PMTAS.



- 7.7.6 Kegiatan Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa** dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.70.575.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.58.304.100,- atau 82,61%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam system manajemen integrasi BUMDES di Bangka City Hotel Pangkalpinang.



7.7.7 Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.310.292.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 277.950.300,- atau 89,58%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Lomba TeknologitepatanGuna di 6 Kabupaten/ Kota di Provinsi kep. Bangka Belitung.



7.7.8 Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.592.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 222.116.037,- atau 94,28%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di Sun Hotel pangkalpinang.



7.7.9 Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.121.157,-realisasi anggaran sebesar Rp. 832.348.550,- atau 97,91%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Kawasan Perdesaan di Sun Hotel Pangkalpinang.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.230.249.350,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.142.588.330,00 atau sebesar 92,87%. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

8.1 Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

8.1.1 Kegiatan Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.136.850,- realisasi anggaran sebesar Rp. 108.056.000,- atau 96,36% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terpilihnya pemenang lomba Hari Keluarga Tk. Provinsi dari kategori Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Berencana – Kesehatan (PKK KB-KES).



8.1.2 Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 761.537.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 694.683.486,- atau 91,22% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola dan melaksanakan program Genre, dengan jumlah peserta 1500 orang pelajar SMP dan SMA.

8.1.3 Kegiatan Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini Lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.199.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 130.514.000,- atau 92,43% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya komitmen dan kinerja petugas lini lapangan dalam melaksanakan tugas, dengan jumlah peserta kegiatan 70 orang PKB/PLKB.

- 8.1.4 Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK** dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.821.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.744.344,- atau 91,87% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah meningkatkan kepedulian, komitmen dan dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mensukseskan program KKBPK, dengan jumlah peserta kegiatan 50 orang.



- 8.1.5 Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung Keluarga Berencana (KB)** dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.554.150,- realisasi anggaran sebesar Rp. 169.210.500,- atau 95,30% dan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya evaluasi pelaksanaan kampung KB dengan terpilihnya 3 pemenang Kampung Keluarga Berencana (KB).

9. PERHUBUNGAN

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan sebesar Rp. 23.084.289.306,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.485.620.606,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.598.668.700,00 dengan realisasi keuangan Rp. 18.532.198.629,11 atau 80,28 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

9.1 Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat

9.1.1 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.095.244.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.747.290,00 atau 0,4%, dan persentase realisasi fisik adalah 0%.

Keluaran kegiatan adalah Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap kondisi Optimal pada ruas jalan Provinsi di Pulau Bangka dengan target kinerja sebesar 20%. Namun target kinerja tidak dapat tercapai dikarena kegiatan tersebut gagal lelang sebanyak 3 (tiga) kali dan jika dilakukan penunjukan langsung, tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

9.1.2 Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.826.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.096.815,00 atau 87,5%, dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sebanyak 4 (empat) Dokumen.

9.1.3 Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 764.100.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. .664.020.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 498.263.354,00 atau 75%, dan persentase realisasi fisik adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik 75%.



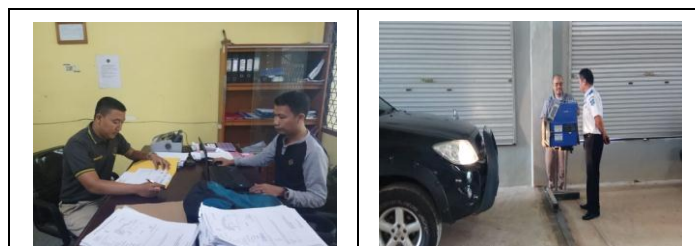
Gambar 4.162
Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas

9.1.4 Pengadaan dan Pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 2.594.696.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.506.475.000,00 atau 96,6%, dan persentase realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan ruas jalan di Pulau Bangka sebanyak 105 unit.



Gambar 4.163
Pengadaan dan Pemasangan LPJU

9.1.5 Inspeksi/ Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 47.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.411.800,00 atau 78,6%, dan persentase realisasi fisik kegiatan adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 (satu) dokumen.



Gambar 4.164
Inspeksi/ Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

9.1.6 Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 94.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.518.900.000,00 atau 38,7%, dan persentase realisasi fisik kegiatan adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha sebanyak 4 kabupaten/kota.

9.1.7 Review Tataan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebelum perubahan sebesar Rp. 947.802.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 919.851.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 908.944.117,00 atau 98,8% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.
Keluaran Review Tataan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1 (satu) Dokumen.

9.1.8 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 87.600.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.311.768,00 atau 91,7% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.
Keluaran kegiatan adalah peningkatan kualitas Awak Kendaraan Umum sebanyak 14 (empat belas) orang sehingga didapatkan pemenang Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan di Tingkat Provinsi untuk dikirim ke Tingkat Nasional.



9.1.9 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.930.000,00 atau 89,1% dan persentase realisasi fisik kegiatan adalah 100%.
Keluaran kegiatan adalah meningkatkan Pengetahuan Pelajar terhadap Keselamatan dan Tata Tertib Berlalu Lintas dengan jumlah Peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan yang terpilih menjadi pemenang di Tingkat Provinsi akan diikutkan ke Tingkat Nasional.



9.1.10 Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana Rp. 136.170.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.620.700,00 atau 98% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Jumlah peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan yaitu 1 (satu) paket.

9.1.11 Pengoperasian Bus Sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 102.813.227,00 atau 20,6% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran kegiatan Pengoperasian Bus Sekolah adalah Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit.



Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Kurangnya penyerapan anggaran pada Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat terutama pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di karenakan kegiatan tersebut telah gagal lelang sebanyak 3 (tiga) kali dan jika tetap dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung tidak cukup waktu penyelesaian pekerjaannya.

- **Solusi**

Sebagai evaluasi terhadap hal tersebut Dinas Perhubungan mempercepat pelaksanaan lelang terutama untuk kegiatan-kegiatan konstruksi sehingga jika terdapat hambatan dalam proses pelelangan hingga pelaksanaan dapat segera di evaluasi dan dapat diselesaikan dengan cepat.

9.2 Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut

9.2.1 Study Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam dengan alokasi dana sebesar Rp. 792.985.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 729.175.604,00 atau 92% dengan realisasi fisik adalah 100%.
Keluaran kegiatan adalah Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Pangkal Balam yaitu 1 (satu) Dokumen.

9.2.2 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dengan alokasi dana sebesar sebelum perubahan Rp. 1.902.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 3.102.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.102.000 atau 100% dan persentase realisasi fisik adalah 0%.
Keluaran dari kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 3 (unit), namun tidak terlaksana, karena kegiatan ini termasuk dalam daftar kegiatan yang di rasionalisasi pada tahun 2018 untuk menutupi defisit APBD Tahun Anggaran 2018.

9.2.3 Kegiatan Studi Kelayakan Dermaga/ pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 299.880.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.152.600,00 atau 92,8% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.
Keluaran dari kegiatan Studi Kelayakan Dermaga/ pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung adalah Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Dermaga/ pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung sebanyak 1 (satu) Dokumen.

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Kurangnya penyerapan anggaran pada Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut terutama pada kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di karenakan kegiatan ini belum didahului oleh Dokumen Perencanaan sehingga pada tahap pelelangan tidak terjadi kendala.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan untuk pembangunan SBNP sehingga pada tahap pelelangan sampai pada pelaksanaannya terdapat suatu acuan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

9.3 Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan

9.3.1 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari Besar Keagamaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 68.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.610.000,00 atau 64% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran kegiatan adalah terciptanya kelancaran lalu lintas dan angkutan pada saat peringatan hari-hari besar keagamaan.

9.3.2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.684.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.023.300,00 atau 93,1% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran kegiatan adalah terwujudnya Peningkatan Disiplin Pengendara Angkutan Penumpang dan Barang dengan realisasi 735 *unit* kendaraan diperiksa di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan 176 *unit* kendaraan mendapat surat tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.



Gambar 4.168
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya

9.3.3 Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.064.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.155.000,00 atau 95,7% dan persentase realisasi fisik adalah 100%.

Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan Road Barrier sebanyak 20 buah dan Traffic Cone sebanyak 33 buah.

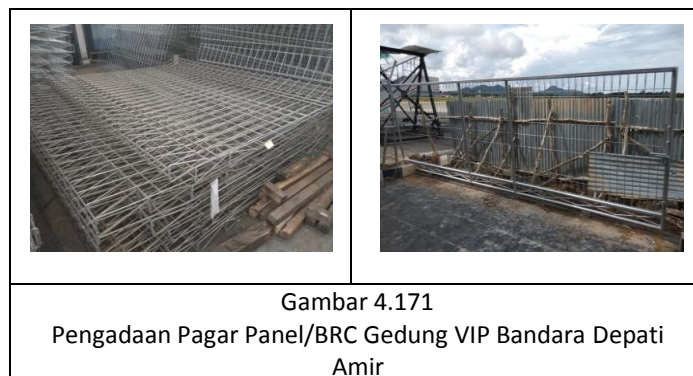


Gambar 4.169
Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone

- 9.3.4 Pengadaan dan Pemasangan Gardu Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 646.150.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 627.892.000,00 atau 97,2% dan persentase realisasi fisik adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 (satu) Paket.



- 9.3.5 Pengadaan Pagar Panel/BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 813.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 800.277.500,00 atau 98,4% dan persentase realisasi fisik adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya Pagar Panel/ BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir sepanjang 900 meter.



- 9.3.6 Pemasangan Saluran Air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir** dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi dana sebesar Rp. 215.635.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.850.000,00 atau 91,8% dan persentase realisasi fisik adalah 100%. Keluaran kegiatan adalah terpasangnya saluran air PDAM ke Gedung VIP Bandara Depati Amir dengan realisasi 1 (satu) paket pekerjaan.



9.3.7 Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (lanjutan) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Rp. 568.380.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 454.704.522,23 atau 80% dan persentase realisasi fisik adalah 100%. Keluaran dari kegiatan Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (lanjutan) yaitu Persentase Pembayaran kekurangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir sebesar 4,56% sebagai lanjutan dari kegiatan Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Pelaksanaan Kegiatan pada Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan dapat terlaksana dengan baik dengan tingkat serapan anggaran yang cukup baik, akan tetapi penyelesaian beberapa kegiatan yang menumpuk di akhir tahun mempengaruhi tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

- **Solusi**

Untuk menantisipasi sebagaimana permasalahan tersebut diatas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan percepatan pelaksanaan di mulai dari tahap pelelangan, hingga tahap pelaksanaan.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 16.887.742.506,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.439.895.345,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.447.847.161,00 dengan realisasi keuangan Rp. 11.545.194.297,00 atau 90,95 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

10.1 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

10.1.1 Kegiatan Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah Alokasi anggaran sebesar Rp1.534.780.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp1.465.305.926,00 atau 95,47%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah saluran komunikasi yang dikelola sebanyak 10 saluran. Yaitu saluran LPPL Info Radio termasuk pengelolaan inradiofm.com, LPP TVRI Bangka Belitung, LPP RRI Sungailiat, LKBN ANTARA, Radio Pratama, Radio HS, Radio Sonora, LPB Pesona TV, Media Cetak (cetak spanduk), Baliho 2 unit (1 unit di jalan Selindung dan 1 unit di jalan Gadung).



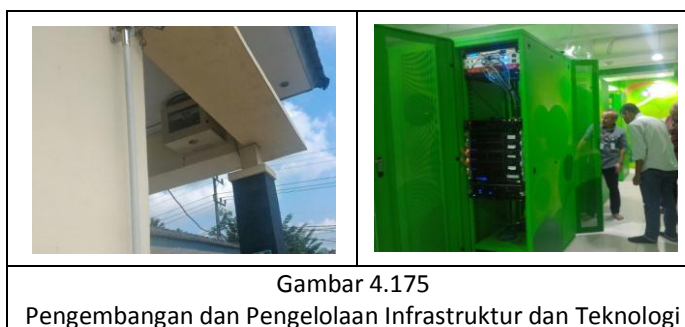
10.1.2 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Alokasi anggaran sebesar Rp1.034.400.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp994.735.794,00 atau 96,17%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah data/informasi pemerintah daerah berupa 840 informasi berupa berita-berita yang disebarkan melalui media cetak maupun elektronik, 1 pameran kegiatan KTNA Expo di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, 2 pertemuan kegiatan rapat di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat.



10.1.3 Kegiatan Pengelolaan Kemitraan Alokasi anggaran sebesar Rp460.025.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp402.304.616,00 atau 87,45%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah mitra yang terfasilitasi sebanyak 50 kemitraan. Kemitraan tersebut seperti TVRI, RRI, Radio swasta, Jasa pengiriman, Loka Monitor, Bandara dan sebagainya.

10.2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi

10.2.1 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Alokasi anggaran sebesar Rp4.680.960.000,00 dan mengalami realisasi anggaran sebesar Rp1.860.960.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.847.313.000,00 atau 99,27%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan infrastruktur dan teknologi berupa 1 paket colocation, 3 paket internet dalam 12 bulan layanan.



10.2.2 Kegiatan Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Government Alokasi anggaran sebesar Rp1.278.690.000,00 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp1.228.690.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.059.308.045,00 atau 86,21%. Keluaran kegiatan ini adalah kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government sejumlah 1 aplikasi layanan mobile/babelprov (Sibabel), 2 lisensi pendukung (WHM dan cPanel, update 40 website (website Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

10.2.3 Kegiatan Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Alokasi anggaran sebesar Rp169.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan

anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp159.400.000,00 atau 94,32%. Keluaran kegiatan ini adalah Kapasitas jaringan komunikasi data sejumlah 8 interkoneksi di bagian Widyaiswara 3 kelas, UMKM 2 ruangan dan Bumi Perkemahan SWBB 3 titik.

10.2.4 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi
Alokasi anggaran sebesar Rp37.600.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp37.109.000,00 atau 98,69%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi adalah 0 insiden.

Permasalahan dan Solusi

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi

Permasalahan :

Adanya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi yang mengalami penundaan pelaksanaan/pengurangan anggaran kegiatan (berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 12 Februari 2018 Nomor: 903/0105/BAKUDA).

Solusi :

Diharapkan rasionalisasi anggaran tidak berpengaruh besar pada pelaksanaan kegiatan.

11. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 17.763.527.460,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.361.904.764,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.401.622.696,00 dengan realisasi keuangan Rp. 16.849.063.196,00 atau 94,85 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

11.1 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

11.1.1 Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 377.705.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 330.639.500,- atau 87.54% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Keluaran kegiatan ini adalah 35 Koperasi yang mengikuti kegiatan Pemahaman Nilai-Nilai dan Prinsip Perkoperasian, 80 Orang yang mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Koperasi, 35 Koperasi yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RAT, 10 Koperasi yang mengikuti pembuatan akta notaris untuk koperasi baru.



11.1.2 Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195.223.970,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 187.090.400,- atau 95.83% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 35 Pengurus Koperasi yang menerapkan ART dan Peraturan Khusus (Persus) dan 35 Pengurus Koperasi yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang penerapan sanksi.



11.1.3 Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.940.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 96.577.940,- atau 99.63% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemberian Penghargaan 2 Koperasi Berprestasi dan 2 Tokoh Penggerak Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11.2 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

11.2.1 Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.651.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 58.094.550,- atau 85.87% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah adanya Koperasi yang melakukan kemitraan antar koperasi (MoU) sebanyak 3 Koperasi.

11.2.2 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195.223.970,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 187.090.400,- atau 95.83% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 12 Pengurus Koperasi Perikanan dari Kab/Kota yang mengikuti Pola Pengembangan Usaha yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang Kecamatan Blanakan Desa Blanakan dan KUD Mina Bahari Fajar Sidik serta 39 Anggota Badan Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern.

11.2.3 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 383.555.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 371.216.950,- atau 96.78% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 2 orang untuk Koperasi lingkup Provinsi dan 35 Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi PPKL dan Pembina sebanyak 3 (tiga) kali.

11.3 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil

11.3.1 Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.319.639.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.284.876.000,- atau 97.37% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 35 Konten Produk UKM yang ada di Website Dinas Koperasi dan UKM, 95 Usaha Kecil yang mendapat sosialisasi Aplikasi Mobile Platform di Kabupaten Belitung, 20 Usaha Kecil yang mengikuti Pameran PRJ di Jakarta, 2 Usaha Kecil yang mengikuti Event Festival Saudagar Nusantara di Jakarta, 2 Usaha Kecil yang mengikuti Event Festival Produk Unggulan Nusantara di Batam dan Bali, 2 Usaha Kecil yang mengikuti Event Gelar Produk Halal di Jakarta, 14 Usaha Kecil yang mengikuti Event Babel Fair di Pangkalpinang, 8 Usaha Kecil yang mengikuti Festival Babel di Jakarta, 2500 Pelaku Usaha di 7 Kabupaten Kota yang mendapatkan Fasilitas Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).



11.3.2 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.848.199.104,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.832.383.300,- atau 99.14% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 400 Usaha Kecil di 7 Kabupaten /Kota yang mendapatkan Sertifikat Halal, terlaksananya Pendataan Usaha Kecil di Kota Pangkalpinang, tersusunnya 1 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil



Gambar 4.179
Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

11.3.3 Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 478.443.941,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 459.594.400,- atau 96.06% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Penghargaan kepada 5 Usaha Mikro dan 5 Usaha Kecil Terbaik se-Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta terlaksananya 50 Wirausaha Pemula yang mengikuti kegiatan Magang selama 27 hari di Kota Pangkalpinang



Gambar 4.180
Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

11.4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

11.4.1 Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 2.500.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.498.762.200,- atau 99.95% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 150 Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan, 60 Pelaku usaha yang mengikuti Pelatihan Studi Kelayakan Usaha, 60 Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Manajemen Desain Produk (Kemasan), 60 Pelaku Usaha yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Teknologi Pemasaran, 120 Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis Komputerisasi, 120

Anggota/Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Kesehatan KSP/USP



Gambar 4.181
Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)

11.5 Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

11.5.1 Peningkatan Layanan Usaha Terpadu

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 71.830.100,- atau 93.04% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah 70 Pelaku Usaha yang didampingi dan Survey yang dilakukan oleh Konsultan PLUT sebanyak 7 Sentra Usaha.

Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

1. Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 belum optimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Hal tersebut menyebabkan output kegiatan juga harus disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran.
2. Peran Kabupaten/Kota dalam menyampaikan peserta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi masih belum optimal. Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadap KUKM yang dikirimkan belum memuaskan.

- **Solusi**

1. Agar Pemerintah Provinsi dapat memprioritaskan urusan KUKM yang menjadi urusan wajib dalam penganggaran sehingga pelayanan dan fasilitasi Pemberdayaan KUKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan lebih baik.
2. Agar Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan sumber-sumber dana lainnya untuk memfasilitasi Pemberdayaan KUKM seperti dana PKBL dan CSR dari Pihak BUMN dan Perbankan.
3. Peningkatan Koordinasi ke Kab/Kota melalui Rapim Gubernur, Walikota dan Bupati.

12. PENANAMAN MODAL

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2018, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 12.059.642.959,- dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.519.940.959,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 6.539.702.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2018, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp 9.290.578.951,- (mengalami pengurangan sebesar Rp 2.769.064.008,-) dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.099.885.951,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.190.693.000,-. Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp8.896.779.083,- atau 95,76 %, yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 5.981.452.313,- (98,06 %) dan Belanja Langsung Rp 2.915.326.770,- atau (91,37 %), dengan sisa anggaran sebesar Rp 393.799.868,- atau 4,24 %.

12.1. Peningkatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD 2018 sebesar Rp 4.748.717.000,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2018 anggaran menjadi Rp 1.695.717.000,- (mengalami penurunan sebesar Rp 3.053.000.000,-), dengan 5 (lima) sub kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 1.553.962,747,- atau 91,64 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini terdiri dari :

- 12.1.1. **Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.** Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pegawai DPMPTSP yang terlayani.
- 12.1.2. **Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.** Keluaran kegiatan ini adalah persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan.
- 12.1.3. **Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur.** Keluaran kegiatan ini adalah Persentase aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya.
- 12.1.4. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.** Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan Jumlah Peserta Rakor.
- 12.1.5. **Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.** Keluaran kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah.

12.2 Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

12.2.1 Kegiatan Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi dilaksanakan



Gambar 4.182
Studi Kelayakan Potensi
Investasi Sektor Potensi

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 264.546.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 247.038.221,- atau 93,38%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kajian potensi investasi sektor pertanian dan perkebunan (1 kajian).

12.3 Peningkatan Promosi Penanaman Modal

12.3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 480.815.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 398.551.160,- atau 82,89%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pameran di dalam negeri sebanyak 4 (empat) Penyelenggaraan Pameran Investasi, diantaranya yaitu:

- a. Pameran Produk Unggulan (BATAM PPI 2018) yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 1 s.d. 4 Maret 2018 bertempat di Atrium Barat Mega Mall Batam.



Gambar 4.183
Stand Prov.Kep.Bangka Belitung

- b. Kegiatan Regional Investment Forum (RIF) 2018 pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2018 bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7 Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta.



Gambar 4.184
RIF

- c. Pameran Surabaya Tourism, Craft and Investment Expo 2018 pada tanggal 26 s.d. 29 April 2018 bertempat di Grand City Exhibition Hall, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.



- d. Kegiatan Pameran 3rd Palembang TTI Expo 2018 pada tanggal 16 s.d. 19 Agustus 2018 bertempat di OPI Mall Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.



12.3.2 Kegiatan Pembuatan Bahan Promosi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 209.920.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 201.256.658,- atau 95,87%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah jenis bahan promosi.

12.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

12.4.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 509.485.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 485.168.384,- atau 95,23%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah izin yang diterbitkan:



12.4.2 Kegiatan Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.210.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 29.349.600,- atau 97,15%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah buku kompilasi berisikan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan.

Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 :

Permasalahan :

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pekerjaan seperti Printer Warna.

Solusi :

- Perlu adanya penambahan pegawai PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Perlu adanya Anggaran yang mencukupi agar pelaksanaan pelayanan perizinan yang memerlukan survey lapangan dapat dilaksanakan semua, serta ketersediaan ATK juga alat kerja terpenuhi.
- Perlu adanya kendaraan operasional yang sesuai dengan medan survey, sehingga tidak adanya kekhawatiran waktu yang terbuang apabila kendaraan mengalami slip ban pada medan tanah merah perkebunan ketika cuaca tidak mendukung.

13. KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 17.035.980.881,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.869.276.248,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.166.704.633,00 dengan realisasi keuangan Rp. 16.096.849.364,00 atau 94,49 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

13.1 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

13.1.1 Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Pemuda Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.113.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.180.001.339,- atau 78,22% dan sisa anggaran Rp.50.111.661,- (27,84%) Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)** Dilaksanakan di Hotel Cordela Kota pangkalpinang tanggal 12 s.d. 15 April 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terpilihnya 3 (tiga) orang peserta hasil seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) terdiri dari : 1 (satu) orang ke India atas nama Taufik Apriansyah utusan Kabupaten Belitung Timur , 1 (satu) orang ke Jepang atas nama Ezelinnata utusan Kabupaten Belitung Timur, 1 (satu) orang ke Australia atas nama Agus Gunadi utusan Kota Pangkalpinang dengan jumlah peserta seleksi 14 (empat belas) orang utusan dari Kabupaten/Kota.



b. Kegiatan Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

Dilaksanakan di Bangka City Hotel Kota Pangkalpinang tanggal 23 s.d. 26 April 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terpilihnya peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 3 (tiga) orang atas nama Saipul Anwar utusan Kabupaten Bangka Selatan, Andrew utusan Kabupaten Belitung dan Wijayanti Eka Lestari utusan Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah peserta seleksi 14 (empat belas) orang utusan dari Kabupaten/Kota.

13.1.2 Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara (AIESEC) dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.244.966.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.173.629.631,- (70,88%) dengan sisa anggaran Rp.71.336.869,- (41,09%) . Lokasi Kegiatan di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung tanggal 14 s.d. 26 Januari 2018 untuk periode pertama dan periode kedua lokasi di Kabupaten Bangka Selatan tanggal 06 Juli s.d. 31 Agustus 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara (AIESEC) dengan jumlah peserta 14 (empat belas) mahasiswa asing perwakilan dari berbagai negara.



- Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Belum selesainya MOU dari Gubernur.
2. Musim libur tiap negara berbeda.

Solusi:

1. Proposal harus lebih rinci dan lebih ke prioritas untuk pembangunan daerah Permasalahan dan Solusi.
2. Perlunya mencari informasi jadwal sekolah dan libur di tiap negara yang akan menjadi peserta.

13.1.3 Kegiatan Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.25.897.900,- (73,99%) dengan sisa anggaran Rp.9.102.100,- (35,15%). Dilaksanakan di Ruang Rapat DISKEPORA GOR Sahabudin tanggal 10 Juli 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah 3 (tiga) orang Pemuda yang berprestasi dan berdedikasi yang menerima bantuan atas nama 1. Wista Zardiyah utusan Kabupaten Belitung dengan bidang usaha Kuliner Olahan Coklat 2. Tomy Azani Salam utusan Kabupaten Bangka dengan bidang usaha Kuliner Cilok 3. Dodi Kurniawan utusan Kabupaten Bangka dengan bidang usaha Kuliner ROPANDA Kue Papan. Bentuk seleksi penerima bantuan berupa presentasi bidang usaha serta pengajuan dalam bentuk proposal dan dinilai

oleh tim juri lomba dengan jumlah peserta 6 (enam) orang utusan Kabupaten/Kota.

13.1.4 Kegiatan Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran Rp.2.547.193.250,- realisasi anggaran sebesar Rp.2.350.841.600,- (92,29%) dengan sisa anggaran Rp. 196.351.650,- (8,35 %) dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Seleksi Paskibraka Tk. Provinsi** Dilaksanakan di Hotel Aksi Resort Desa Kace Kabupaten Bangka tanggal Output/Keluaran kegiatan adalah terpilihnya peserta paskibraka yang akan mewakili di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan Tingkat Nasional 2 (dua) orang atas nama : 1. Pandu Farhan Pangestu SMA N 3 Pangkalpinang utusan Kota Pangkalpinang dan 2. Siti Sabila Anandita SMA N 2 Tanjungpandan utusan Kabupaten Belitung dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 56 (lima puluh enam) orang utusan dari Kabupaten/Kota.



Gambar 4.193
Peserta saat test PBB dan peserta saat apel

- **Permasalahan dan Solusi**
Permasalahan:
Peserta banyak gugur dikarenakan ada penyakit dalam dan hasil tes kesehatan dari Kabupaten/Kota belum tentu benar.
Solusi:
Saat seleksi di tingkat Kabupaten/Kota harus diperketat untuk hasil tes kesehatan
- b. **Kegiatan Pelaksanaan Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi**
Dilaksanakan di Hotel Grand Vella Kabupaten Bangka Tengah tanggal 23 Juli s.d. 21 Agustus 2018 Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pengibaran Sang Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari putra dan putri utusan dari Kabupaten/Kota.
- c. **Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor** Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor untuk tahun 2018 di tunda dikarenakan

adanya pengurangan/pemangkasan anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- d. **Kegiatan Jambore Pemuda Daerah** Dilaksanakan di Muntok tepatnya di Air Terjun Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka Barat tanggal 03 s.d. 07 September 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksanakannya Seleksi Jambore Pemuda Daerah (JPD) dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang dan terpilihnya 14 (empat belas) orang utusan dari Kabupaten/Kota yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pelaksanaan Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia tahun 2018.



- e. **Kegiatan Perekrutan Calon Anggota POLRI** Kegiatan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor untuk tahun 2018 di tunda dikarenakan adanya pengurangan/pemangkasan anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. **Kegiatan Dukungan Jambore Pemuda Indonesia tahun 2018** Dilaksanakan di Kawasan Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka Selatan tepatnya Stadion dan GOR Kabupaten Bangka Selatan tanggal 05 s.d. 11 Oktober 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tuan rumah dengan jumlah peserta sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari putra dan putri utusan dari Kabupaten/Kota.

13.1.5 Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.199.003.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.181.907.194,- (91,41%) dengan sisa anggaran Rp.17.095.806,- (9,40%) Lokasi kegiatan di Hotel Grand Vella Kabupaten Bangka Tengah tanggal 20 s.d. 23 Maret 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dengan jumlah peserta 35 (tiga puluh lima) orang utusan Kabupaten/Kota.

13.2 Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

13.2.1 Kegiatan Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.597.708.300,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.517.164.500,- (86,52%) sisa anggaran Rp.80.543.800,- (15,57%) . Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. **Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Atletik PPLPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Gorontalo tanggal 27 April s.d 2 Mei 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengiriman atlet PPLPD ke Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Atletik untuk bersaing Di Gorontalo dan menjadi calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar dimasa depan yang menjadi atlet andalan Indonesia. Adapun hasil perolehan medali pada Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) cabang olahraga Atletik di Gorontalo Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Perunggu 1 Buah dan Bangka Belitung peringkat 7 Nasional pada Kejurnas Atletik di Gorontalo.

	
Gambar 4.195 Pertandingan Jalan Cepat	Gambar 4.196 Pengalungan Medali

- b. **Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Senam PPLPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Riau tanggal 2 s.d 6 Juli 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengiriman atlet PPLPD ke Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Senam untuk bersaing Di Riau dan menjadi calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar dimasa depan yang menjadi atlet andalan Indonesia. Adapun hasil perolehan medali pada Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) cabang olahraga Senam di Riau Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Perak 1 Buah atas nama Alifa Laisya R nomor perlombaan Meja Lompat, Perunggu 3 Buah atas nama Raini Chintia Safira nomor perlombaan Balok Keseimbangan, Tegar Julianda nomor perlombaan Meja Lompat, Gymnas Ramadhan nomor cabang Kuda Pelana. Bangka Belitung peringkat 10 Nasional pada Kejurnas Senam di Riau.

- c. **Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Karate PPLD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh tanggal 1 s.d 6 Agustus 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengiriman atlet PPLPD ke Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Karate untuk bersaing Di Banda Aceh Provinsi Aceh dan menjadi calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar dimasa depan yang menjadi atlet andalan Indonesia. Dicabang karate atlet PPLPD Provinsi Kepulauan Bangaka Belitung belum bisa memperoleh medali dalam kejuaraan nasional ini



- d. **Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Voli Pasir PPLD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan Di Semarang, Jawa Tengah tanggal 22 s.d 27 November 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengiriman atlet PPLPD ke Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Voli Pasir untuk bersaing Di Semarang, Jawa Tengah dan menjadi calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar dimasa depan yang menjadi atlet andalan Indonesia. Adapun hasil perolehan medali pada Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) cabang olahraga Voli Pasir Di Semarang, Jawa Tengah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



- e. **Pengiriman Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Voli Indoor PPLD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Musi Banyuasin tanggal 1 s.d 6 Agustus 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengiriman atlet PPLPD ke Kejuaraan Nasional

(KEJURNAS) Cabang Voli Indoor untuk bersaing Di Musi Banyuasin dan menjadi calon-calon atlet terbaik di kalangan pelajar dimasa depan yang menjadi atlet andalan Indonesia. Dicabang Voli Indoor provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menempati peringkat 5 Nasional.

13.2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.121.700.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.105.011.990,- (98,51%) dengan sisa anggaran Rp.16.688.010,- (1.51%) , dengan sub Kegiatan sebagai Berikut :

- a. **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Melalui Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Stadion Bina Jaya Muntok tanggal 9 s.d 15 Juli 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Penyelenggaraan kejuaraan olahraga liga sepak bola pelajar (LSP) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mencari bibit-bibit atlet/olahragawan potensial cabang olahraga sepakbola yang berprestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Pemenang Peserta Liga Sepakbola Pelajar (LSP) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :



13.2.3 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.715.159.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.570.319.537,- (79,75%) dengan sisa anggaran Rp.144.839.463,- (25,40%) , dengan sub Kegiatan sebagai Berikut :

- a. **Training camp (TC) Kontingen Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Hotel Puncak Budget, Jalan Abdurrahman Siddik Kota Pangkalpinang tanggal 30 Agustus s.d 2 September 2018, Tempat latihan Di Stadion Depati Amir, Lapangan Sepakbola GOR Sahabudin. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Training camp (TC) kontingen liga sepakbola pelajar (LSP) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terfokus atlet dan pelatih LSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengikuti program latihan.

- b. **Training camp (TC) Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Hotel Grend Vella dan Renz Hotel Pangkalpinang, tanggal 17 s.d 20 Oktober 2018, Tempat latihan Di Stadion Depati Amir, Lapangan Sepakbola GOR Sahabudin, GOR Depati Bahrein (GOR Kota Pangkalpinang), Hall Hotel Grand Vella Pangkalpinang. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Training camp (TC) kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terfokus atlit dan pelatih TC. POPWIL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengikuti program latihan.

13.2.4 Kegiatan Pengiriman Kontingen Yang Berprestasi Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.469.810.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.1.444.863.950,- (98,30%) dengan sisa anggaran Rp.24.946.050,- (1.73%) , dengan sub Kegiatan sebagai Berikut :

- a. **Pengiriman Kontingen Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan Di Provinsi Bali, tanggal 2 s.d 7 September 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman kontingen liga sepakbola pelajar (LSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- b. **Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018** Dilaksanakan di Provinsi Banda Aceh, tanggal 21 s.d 27 Oktober 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pengiriman kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13.2.5 Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus (Seleksi Festival Olahraga Tradisional) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangaka Belitung Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.253.000.-. Realisasi anggaran sebesar Rp.248.148.950,- (85,49%) dengan sisa anggaran Rp.42.104.050,- (16,97%). dengan sub Kegiatan sebagai Berikut :

- a. **Seleksi Festival Olahraga Tradisional (FOT) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, tanggal 7 s.d 9 Mei 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Pembudayaan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus (Seleksi Festival Olahraga Tradisional) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Terpilihnya atlet prestasi olahraga tradisional ke tingkat nasional.



Gambar 4.201
Pembagian piala Penampilan peserta seleksi FOT

- b. **Pengiriman Seleksi Festival Olahraga Tradisional (FOT) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** Dilaksanakan di Jambi, tanggal 6 s.d 9 Juli 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya pengiriman kontingen Festival Olahraga Tradisional (FOT) ke tingkat nasional.

13.3 Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.

13.3.1 Kegiatan Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.658.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.,118.846.400,- (96,89) dengan sisa anggaran Rp. 3.811.600,- (3,21%). Dilaksanakan di Asrama PPLP Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 05 November 2018 s/d 14 Desember 2018, Output/Keluaran kegiatan adalah Tersedianya Sarana Penunjang Lapangan Volly Pasir.

13.3.2 Kegiatan Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.032.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.383.665.550,- (99,65%) dengan sisa anggaran Rp. 1.366.450,- (0,36%). Dilaksanakan di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemeliharaan Gedung Kantor/Gor tanggal 12 Maret 2018 s/d 10 Mei 2018, Pemeliharaan Gedung Asrama PPLP tanggal 21 Maret 2018 s/d 04 Mei 2018, Pemeliharaan Panjat Tebing tanggal 26 Maret 2018 s/d 24 April 2018, Pemeliharaan Gedung Kantor/Gor APBD Perubahan tanggal 05 November 2018 s/d 14 Desember 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah

Terpeliharanya 3 Prasarana Olahraga (Gedung Kantor/GOR, Asrama PPLP dan Panjat Tebing).

13.3.3 Kegiatan Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.225.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.109.203.040,- (97,31%) dengan sisa anggaran Rp. 3.021.960,- (2,77%). Dilaksanakan di 7 Kabupaten/Kota bulan Februari s/d November 2018. Output/Keluaran kegiatan adalah Tersedianya data Prasarana Olahraga yang standar nasional.



14. STATISTIK

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik sebesar Rp. 534.926.107 dengan realisasi keuangan Rp. 497.317.220 atau 92,97 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

14.1 Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

14.1.1 Kegiatan Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral Alokasi anggaran sebesar Rp152.720.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp135.109.000,00 atau 88,47%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah adalah 8(delapan) kelompok parameter data. Yaitu data umum, data ekonomi dan keuangan, data infrastruktur, data politik, hukum dan keamanan, data industri, data SDA, data sosial budaya dan data insidental.

14.1.2 Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Alokasi anggaran sebesar Rp 340.799.622,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp 325.001.500,00 atau 95,36%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten berupa layanan interaktif di Kabupaten Bangka Selatan (Toboali), Kabupaten Bangka (Balunijuk, Pugul, Kenanga, Kemuja), Kabupaten Bangka Tengah (Koba, Teru, Air Pelempang) dan Kabupaten Bangka Barat (Kelumbi dan Tempilang).



14.1.3 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian Alokasi anggaran sebesar Rp 41.406.485,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp 37.206.720,00 atau 89,86%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 3 (tiga) layanan. Yaitu layanan Pengamanan Berita, Pengamanan Informasi dan Operasional Jammer untuk rapat-rapat.



16. BUDAYA

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Budaya sebesar Rp 15.476.396.859,00 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.444.143.859,00 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 4.563.010.000,00. Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 15.045.558.432,00 atau 97,21 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

16.1 Program Pelestarian Budaya

16.1.1 Kajian Tradisi Bangka Belitung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan masyarakat. Pengembangan Kebudayaan merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Tujuan kegiatan kajian tradisi Bangka Belitung adalah :

1. Menggali nilai budaya yang ada dalam masyarakat
2. Memberikan informasi dan wawasan tentang budaya lokal kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah pelaku seni, komunitas budaya, sejarahwan dan budayawan. Lokasi Kajian Tradisi Bangka Belitung dilaksanakan di dua kabupaten yaitu:

1. Kajian Kain Tradisional dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat mengingat sejarah awal berkembangnya Kain Cual/Limar Muntok di Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat, yang mulanya dilakukan oleh perempuan bangsawan di kota Muntok semenjak abad ke 18.
2. Kajian Hutan Adat dilaksanakan di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur mengingat eksistensi aturan-aturan adat masih dijaga oleh dukun-dukun kampung sehingga masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 88.979.000,- realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.840.000,- atau 85,45%. Adapun keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya 2 dokumen kajian yaitu

1. Kajian mengenai kain tradisional dengan fokus kajian pada Kain Cual/Limar Muntok dan
2. Kajian mengenai hutan adat dengan fokus kajian pada Kelekak:

Kendala :

Yang dihadapi adalah tidak terealisasinya pembayaran uang saku peserta seminar yang tidak dapat dicairkan dikarenakan sebagian besar anggaran yang tersedia adalah untuk peserta non PNS sementara itu peserta sebagian

besar adalah PNS yang merupakan pemangku kepentingan terhadap dua karya budaya yang dikaji yaitu kain tradisional cual dan hutan adat kelekak. Solusi : agar dapat menyusun rencana kegiatan lebih baik dan melihat sasaran dan output yang dihasilkan.



Gambar 4.205
Kajian Tradisi Bangka Belitung

16.1.2 Penulisan Sejarah Bangka Belitung

Kegiatan Penulisan Sejarah Bangka Belitung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memajukan kebudayaan dimana tertuang didalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Maksud dan tujuan kegiatan Penulisan Sejarah Bangka Belitung adalah untuk merealisasikan target budaya loklay yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina.

Sedangkan target dan sasaran kegiatan ini adalah pelaku seni, komunitas budaya, sejarawan, dan budayawan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Jakarta sebagai dasar akselerasi budaya local yang dilestarikan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 206.574.000,- realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 193.662.300,- atau 93,75%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku / naskah sejarah Bangka Belitung.

16.1.3 Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya

Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya merupakan kegiatan yang diperuntukan kepada seni tradisi budaya Bangka Belitung seperti upacara adat, sedekah kampung serta acara keagamaan. Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan wawasan tentang sejarah, budaya, kreatifitas dan tradisi kepada masyarakat sedangkan tujuannya adalah mengangkat nilai – nilai sejarah dan tradisi budaya. Target kegiatan ini sebanyak 30 dukungan event sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, pelaku seni dan budaya dan yayasan serta komunitas budaya. Kegiatan ini dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di 7 (tujuh) kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp.1.870.500.000,-

dalam pada APBD-P Tahun 2018 mengalami pengurangan menjadi Rp. 1.743.144.199,- sedangkan fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 965.128.786,- atau (55,37%). Keluaran atau output kegiatan adalah jumlah dukungan penyelenggaraan event yang difasilitasi sebanyak 30 event.

Kendala : Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Proposal yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku seni dan budaya masih belum memahami tata cara pengusulan dana partisipasi event budaya.
- b. Masih banyaknya proposal yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- c. Banyaknya proposal yang diusulkan pada saat menjelang akhir tahun anggaran.

Solusi : Agar proposal yang diajukan dapat disampaikan diawal tahun anggaran dengan melampirkan jadwal kalender penyelenggaraan event.

16.1.4 Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI

Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian seperti yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satunya dengan pengiriman misi kesenian dengan melalui pengiriman perwakilan generasi muda untuk dilatih dan dibina dalam musik terkait lagu-lagu Nasional guna menumbukan semangat patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda yang akan tampil pada saat detik-detik proklamasi pada Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah : untuk menumbukan semangat patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda pada saat detik-detik proklamasi Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Sasaran kegiatan : pelajar sekolah menengah atas (SMA)

Lokasi kegiatan : di Pangkalpinang

Kegiatan Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 378.901.000,- adapun realisasi fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.068.000,- (93,45%).



Gambar 4.206
Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI

16.1.5 Pengelolaan Cagar Budaya

Kota Muntok pernah menjadi ibukota pemerintahan Pulau Bangka di masa lalu dengan perjalanan sejarahnya yang panjang meninggalkan banyak bangunan melayu dan eropa masa penjajahan Belanda. Hal ini terlihat dari gaya arsitektur, yaitu bangunan melayu dan eropa yang banyak terdapat di Muntok.

Bangunan eropa yang terdapat di Kota Muntok salah satunya adalah Wisma Ranggam yang dulu bernama Pesanggrahan Muntok. Pesanggrahan Muntok menjadi bukti sejarah karena pernah digunakan sebagai tempat pengasingan pemimpin Kemerdekaan Indonesia.

Sebagai bentuk pelestarian bangunan Pesanggrahan Muntok yang merupakan benda cagar budaya (BCB) Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melalui program pengelolaan kekayaan budaya dan kegiatan pengelolaan peninggalan purbakala.

Tujuan kegiatan ini adalah : untuk melestarikan benda cagar budaya nasional yaitu Pesanggrahan Muntok (Wisma Ranggam)

Sasaran kegiatan : Pesanggrahan Muntok (Wisma Ranggam)

Lokasi kegiatan : di Muntok Bangka Barat

Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pada Tahun 2018 alokasi anggaran sebesar Rp. 83.885.000,- untuk realisasi fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.840.000,- atau 89,22%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya meubelair di Pesanggrahan Muntok (Wisma Ranggam).



16.1.6 Pendokumentasian dan Publikasi Koleksi Museum Daerah

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sedangkan museum berarti lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya perlindungan dengan cara pendokumentasian dan publikasi sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadi perubahan keasliannya untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya dimasukkan

dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data dan bahan publikasi serta informasi cagar budaya dan permuseuman sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya yang bernilai sejarah dan budaya yang memiliki daya tarik wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran adalah Museum

Kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Koleksi Museum Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki alokasi anggaran pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 140.981.000,- adapun realisasi fisik adalah 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.863.400,- (89,99%).

Keluaran kegiatan adalah Tersedianya data dan informasi berkaitan dengan benda cagar budaya dan museum (Buku, Booklet dan Goodie Bag)

16.1.7 Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya perlindungan dengan cara registrasi atau pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Tujuan kegiatan adalah: teregistrasinya benda cagar budaya dengan tujuan upaya pelestarian cagar budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sasaran : cagar budaya di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur

Kegiatan Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 alokasi anggaran sebesar Rp. 79.829.000,- adapun realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.761.200,- (92,40%). Keluaran atau output kegiatan adalah

Kabupaten Belitung Timur terdapat cagar budaya berupa 22 bangunan, 4 struktur, dan 1 situs. Sedangkan di Kabupaten Belitung terdiri 34 bangunan, 2 struktur dan 2 situs,

16.1.8 Festival Budaya Melayu

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kewenangan Provinsi dalam bidang Kebudayaan adalah pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat dan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku seni dan budaya, masyarakat dan

pemerintah daerah. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk melestarikan budaya local daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut dalam melestarikan kebudayaan daerah dilaksanakan Festival Budaya melayu pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Desa Kemuja, yang melaksanakan bertepatan dengan HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke – 18 dan Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H.

Kegiatan Festival Budaya Melayu dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 914.385.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 694.642.000,- atau 75,97%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terselenggaranya 1 event festival budaya.

Kendala : disebabkan ada efisiensi dimana perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan karena komunikasi dilakukan lewat media elektronik dan sewa hotel tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak ada peserta dari provinsi lain dan luar negeri yang hadir.

Solusi : agar dapat mempersiapkan acara ini semaksimal mungkin



16.1.9 Pentas Seni dan Budaya

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemajuan kebudayaan, untuk memenuhi ketentuan tersebut pemajuan kebudayaan dapat dilakukan melalui asas perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kesenian.

Dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan dan pemberdayaan sanggar kesenian serta untuk mempromosikan tradisi kita kepada tamu atau wisatawan yang datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dilaksanakan kegiatan Pentas seni yang menampilkan tari sambut, bujang dayang dan tarian multi seni.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan dan melestarikan seni dan budaya lokal.

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku seni dan budaya dan event – event resmi.

Lokasi penyelenggaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan Pentas Seni dan Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Tahun 2018

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 265.540.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 565.540.000,- sedangkan pencapaian realisasi fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 541.614.000,- atau 95,77%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terselenggaranya 78 pentas/ event.



16.1.10 Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai

Seni Musik merupakan objek kebudayaan yang harus dibina seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dalam rangka untuk meriahkan dan menghidmatkan pelaksanaan upacara Hari Besar dan kegiatan mingguan serta event – event resmi lainnya, maka dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai dengan menampilkan Korsik dari Drumband Serumpun Sebalai. Sasaran kegiatan ini adalah hari besar kenegaraan / hari besar tertentu. Tujuan kegiatan ini untuk melestarikan budaya daerah melalui penampilan pertunjukan drumband.

Kegiatan Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.422.000,00 adapun realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 339.178.000,00 atau 79,73%. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terbinanya SDM budaya.

17. PERPUSTAKAAN

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan sebesar Rp. 940.903.040,00 dengan realisasi keuangan Rp. 707.309.614,00 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

17.1 Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

17.1.1 Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.527.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 39.504.5100,00 atau 75,21%. Keluaran kegiatan adalah tersediannya 2500 data koleksi antar perpustakaan dalam bentuk katalog induk daerah dan 250 data terbitan daerah dalam bentuk bibliografi induk daerah, Sebanyak 2 Dokument.

17.1.2 Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.580.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 20.584.000,00 atau 72,02%. Keluaran kegiatan adalah terkelolanya dan terpeliharanya bahan pustaka, sebanyak 430 bahan pustaka.

17.1.3 Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.547.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp 72.732.349,00 atau 61,87%. Keluaran kegiatan adalah tersediannya fasilitas layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa di 4 kabupaten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 3.431 pengunjung.



Gambar 4.210
Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling

17.1.4 Kegiatan Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.544.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 32.762.000,00 atau 87,26%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terkumpulnya koleksi hasil terbitan daerah, Sebanyak 140 terbitan.

17.1.5 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 311.441.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 279.450.315,00 atau 89,73%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah, sebanyak 260 orang.



17.1.6 Kegiatan Pengelolaan Layanan Website Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.678.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 27.514.700,00 atau 84,20%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersediannya layanan teknologi informasi website bagi pengguna, sebanyak 80 informasi.

17.2 Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

17.2.1 Kegiatan Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.699.100,00 realisasi anggaran sebesar Rp 37.571.600,00 atau 55,50%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi, sebanyak 15 Orang.



- 17.2.2 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.623.100,00 realisasi anggaran sebesar Rp 19.198.250,00 atau 84,86%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah DUPAK dari hasil penilaian angka kredit pustakawan, sebanyak 20 DUPAK.



- 17.2.3 Kegiatan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov. Kep. Babel** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.827.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 22.360.600,00 atau 66,10%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah perpustakaan sekolah yang memperoleh NPP, 21 Perpustakaan.
- 17.2.4 Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 92.881.540,00 realisasi anggaran sebesar Rp 76.657.000,00 atau 82,53%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah perpustakaan sekolah yang mengikuti lomba, sebanyak 14 perpustakaan.
- 17.2.5 Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah** oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.191.700,00 realisasi anggaran sebesar

Rp 35.239.690,00 atau 74,67%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pendampingan perpustakaan di provinsi kepulauan bangka belitung, sebanyak 21 perpustakaan.

- 17.2.6** Kegiatan Akreditasi Perpustakaan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.362.700,00 realisasi anggaran sebesar Rp 43.734.600,00 atau 45,39%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi, sebanyak 4 program.



Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum adanya Gedung Perpustakaan yang memadai.
2. Kurangnya pemahaman dari bidang-bidang dalam pelaksanaan capaian sasaran dan indikator kinerja program.
3. Kurangnya SDM untuk pengelola perpustakaan.
4. Kurangnya minat masyarakat untuk membaca dan menuntut ilmu di perpustakaan.

Solusi

1. Mengusulkan pembangunan gedung Perpustakaan.
2. Melakukan koordinasi untuk evaluasi untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja.
3. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengadakan lomba-lomba untuk meningkatkan minat baca, bedah buku, pameran buku, dll.

18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan sebesar Rp. 10.818.581.760,44 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.558.426.320,44 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.260.155.440,00 dengan realisasi keuangan Rp. 9.804.531.376 atau 90,63 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

18.1 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

18.1.1 Kegiatan Lomba Pengelolaan Kearsipan Desa/Kel, Perangkat Daerah, LKD Kab/Kota oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.302.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 67.365.800,00 atau 82,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya lomba pengelolaan kearsipan, dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang.

18.1.2 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 41.389.670,00 atau 77,22%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah PAK yang dinilai, sebanyak 80 PAK.



25.1.2 Kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.325.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 99.053.978,00 atau 84,43%. Keluaran kegiatan adalah jumlah perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan, sebanyak 40 perangkat daerah.

25.1.3 Kegiatan Pembinaan Kearsipan di SMA/SMK dan SLB Prov. Kep. Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 113.083.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 106.132.010,00 atau 93,85%. Keluaran kegiatan ini

adalah jumlah SMK/SMA dan SLB yang dibina, sebanyak 28 SMA/SMK dan SLB.



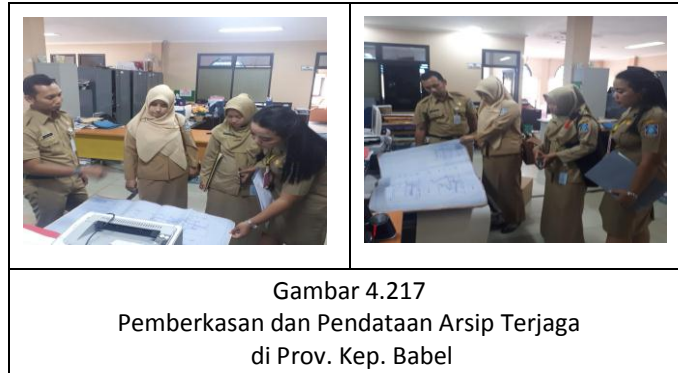
25.1.4 Kegiatan Arsip Masuk Desa oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 121.792.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 107.469.510,00 atau 88,24%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip, sebanyak 35 desa/kelurahan.

25.2 Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

25.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.403.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 9.103.000,00 atau 96,81%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah arsip yang dipelihara provinsi, sebanyak 200 arsip.

25.2.3 Kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Arsip Vital di Kabupaten/Kota Prov. Kep. Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.024.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 59.030.000,00 atau 89,41%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah LKD di Kab/Kota, sebanyak 7 LKD kab/kota, dengan jumlah arsip yang terdata sebanyak 401 arsip.

25.2.4 Kegiatan Pemberkasan dan Pendataan Arsip Terjaga di Prov. Kep. Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.025.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 26.000.000,00 atau 83,80%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah arsip terjaga yang didata, sebanyak 117 arsip.



25.2.5 Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis di Kab/Kota oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.697.400,00 realisasi anggaran sebesar Rp 100.375.000,00 atau 90,68%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah LKD di Kab/Kota, sebanyak 7 LKD Kab/Kota, dengan jumlah arsip dinami yang didata sebanyak 1.161 arsip.



25.2.6 Kegiatan Pendataan Arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Babel oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.322.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 25.092.000,00 atau 77,63%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah arsip inaktif yang didata di OPD, sebanyak 300 arsip inaktif.

25.2.7 Kegiatan Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.416.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 29.259.200,00 atau 70,65%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah arsip statis yang didata di LKD Kab/Kota, sebanyak 12 arsip.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dalam Urusan Kearsipan

1. Belum adanya Gedung Depo Arsip yang memadai.
2. Kurangnya Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan document/arsip daerah.

3. Kurangnya pemahaman dari bidang-bidang dalam pelaksanaan capaian sasaran dan indikator kinerja program.
4. Kurangnya SDM untuk pengelola arsip.

Solusi

1. Mengusulkan pembangunan gedung Depo Arsip.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyelamatan dokumen/arsip daerah.
3. Melakukan koordinasi untuk evaluasi untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja.
4. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penambahan pegawai Dinas Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. PENYELENGARAAN URUSAN PILIHAN

Penyelenggaraan Urusan Pilihan dalam urusan konkuren meliputi 8 (delapan) urusan antara lain urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Urusan Pilihan yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2108 adalah sebagai berikut :

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 34.093.486.989,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.411.739.589,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.681.747.400,00 dengan realisasi keuangan Rp. 24.861.237.818,00 atau 72.92 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1.1. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut

1.1.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 141.506.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.088.700,- atau sebesar 69,32 %. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut ada 2 (dua) kegiatan yaitu sosialisasi peraturan perizinan dan survey lokasi permohonan rekomendasi. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman dan peningkatan pengetahuan petugas OPD terhadap perizinan dalam pemanfaatan ruang laut terutama perizinan dengan proses OSS. Sedangkan kegiatan survey lokasi dilakukan sesuai permohonan masyarakat untuk dilakukan survey/rekomendasi dalam pemanfaatan ruang laut. Keluaran dari survey ini adalah sebelum dikeluarkannya rekomendasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki data profil dan lokasi lingkungan yang diajukan masyarakat dalam memanfaatkan ruang laut sampai 0 - 12 mil.



Gambar 4.218
Sosialisasi Peraturan Perizinan



Gambar 4.219
Survey Lokasi pemanfaatan ruang laut

- 1.1.2. Kegiatan Pendampingan Teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.** Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 1.680.060.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 817.467.134,- atau 48,66%, dengan keluaran kegiatan hasil pendampingan teknis rzwp-3-k berupa 1. rapat di kemenkomaritim untuk pembahasan alokasi ruang; 2. asistensi dokumen RZWP-3-K di KKP, 3. pendampingan DPRD dalam pembahasan dokumen RZWP-3-K; 4. Kegiatan Penandatanganan Berita Acara Perbatasan Antara Babel dan Kepri, Babel dan Sumsel.



- 1.1.3. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.898.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.427.100,- atau 58,08%. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.898.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 100.427.100,- atau 58,08%. Adapun keluaran kegiatan ini diharapkan berupa SK Gubernur terkait pencadangan kawasan konservasi perairan Tuing Kabupaten Bangka dan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi perairan Tuing Kabupaten Bangka.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut

Penyerapan kegiatan survey lokasi terkait permohonan rekomendasi dari masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut terkendala belum adanya Perda RZWP3K Provinsi Kep. Bangka Belitung dimana masih dalam proses penyelesaian sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan belum bisa membuat rekomendasi terhadap permohonan stakeholder dalam berinvestasi untuk pemanfaatan ruang laut.

Solusi

Mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan RZWP3K sehingga segera diterbitkan Peraturan Daerah RZWP3K yang sangat dinantikan oleh masyarakat dalam berinvestasi mengembangkan dan memanfaatkan ruang laut.

1.1.4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Daerah (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.780.350.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan mengingat Izin lokasi pembangunan jetti tidak dapat diperoleh dan amdal tidak bisa dibuat untuk syarat pembangunan, karena Perda RZWP3K belum selesai sebagai dokumen dasar penerbitan izin lokasi pembangunan jetty dan penyusunan amdal dimaksud.

1.2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1.2.1. Kegiatan Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap dengan pagu anggaran dalam APBD Induk sebesar Rp. 1.722.880.000,-. Pada APBD Perubahan kegiatan ini mengalami pertambahan anggaran sehingga menjadi Rp. 1.776.880.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.720.902.197,- atau 96,86%, sedangkan realisasi Fisik sebesar 100%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap berjumlah 8 Unit dengan Pagu Rp. 1.596.804.000,- pengadaan melalui Pelelangan Umum dengan kontrak No. 523/129.a/DKP tanggal 19 September 2018 nilai kontrak Rp. 1.592.233.600 CV. Agrotama Mandiri d.a Jl. Jenderal Sudirman No. 112 Kel Gabek I Pangkalpinang; Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Kapal Perikanan Tangkap Lengkap pagu Rp. 40.000.000 pengadaan Penunjukan Langsung dengan kontrak No. 523/129.a/DKP tanggal 19 September 2018 Nilai Kontrak RP. 39.644.000 dengan CV. Agrotama Mandiri d.a Jl. Jenderal Sudirman No. 112 Kel Gabek I Pangkalpinang PT. Wahana Prakarsa Utama Graha mampang Lt.I Mampang Prapatan Raya Kav. 100 RT. 002 RW.005 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Semua Kapal beserta sarana lainnya tersebut telah diserahkan semuanya kepada 20 Koperasi penerima bantuan tersebut oleh Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan lengkap dan telah dibawa ke masing-masing Kabupaten.

	
<p>Gambar 4.222 Kapal Perikanan Tangkap Lengkap</p>	<p>Gambar 4.223 Sarana dalam Kapal Nelayan</p>

1.2.2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.093.400.000,-. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 952.717.200,- atau sebesar

87,13%. Adapun keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: Pengadaan Mesin Tempel 15 PK berjumlah 20 Unit dengan Pagu Rp. 600.000.000,- pengadaan melalui E-Catalog dengan kontrak No. 523/792/DKP tanggal 30 Mei 2018 nilai kontrak Rp. 483.960.000 dengan PT. Adhi Makmur alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 126 RT.002 RW.012 Kelurahan Siakarya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah; Pengadaan GPS berjumlah 20 Unit dan Jaring Milenium 3,5 Inchi berjumlah 200 Piece dengan pagu Rp. 440.000.000 pengadaan melalui lelang murni dengan kontrak No.523/1300/DKP tanggal 19 September 2018 Nilai Kontrak RP. 423.000.000 dengan CV. Agrotama Mandiri d.a Jl. Jenderal Sudirman No. 112 Kel Gabek I Pangkalpinang dengan keluarannya tersedianya Sarana dan Prasarana berupa Mesin Tempel (Outboard) 15 HP, GPS 20 Unit dan Alat bantu Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan sebanyak 200 Piece lengkap dengan timah pemberat, tali ris atas dan bawah, pelampung sosis. dengan tujuan diantaranya adalah agar dapat meningkatkan produktifitas penangkapan ikan, peningkatan pendapatan nelayan dan meningkatkan daya saing nelayan lokal dalam pemanfaatan perairan nasional dan bertambahnya sarana dan prasarana penangkapan ikan. Semua barang Pengadaan tersebut telah diserahkan semuanya kepada 20 Koperasi penerima bantuan tersebut oleh Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan lengkap dan telah dibawa ke masing-masing Kabupaten.

- 1.2.3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).** Kegiatan ini dianggarkan pada APBD Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsekuensi diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dimana kewenangan PPI yang ada di Kabupaten/Kota beralih ke Provinsi. Adapun anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.899.360.000,-, namun dalam APBD Perubahan mengalami efisiensi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.845.350.000,-. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 667.445.142,- atau 36,17%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan berupa terselenggaranya fungsi pelayanan serta kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan yang beralih kewenangannya ke Provinsi yaitu PPI Muara Sungai Batu Rusa, PPI Kurau, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Manggar dan PPI Selat Nasik. Dalam pelaksanaannya, pagu Anggaran untuk 6 (enam) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terealisasi hanya 5 (lima) Pangkalan Pendaratan Ikan, hal ini dikarenakan PPI Muara Sungai Batu Rusa sampai dengan bulan Desember 2018 belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, sementara itu penyusunan anggaran program kerja (DPA) sudah harus disusun pada bulan Maret 2017 (dalam masa transisi), dimana semula Bidang Perikanan Tangkap memperkirakan biaya diantaranya adalah: untuk pembayaran belanja listrik untuk 6 (enam) PPI disamaratakan, sementara kondisi di lapangan pada masing-masing PPI memiliki karakteristik yang berbeda, dimana PPI Muara Sungai Batu Rusa belum diserahkan.

Terkait dengan belanja Tidak tetap yang mana direncanakan untuk tiap PPI berjumlah 5 (lima) orang dengan total 30 (tiga puluh) orang, terrealisasi 12 (dua belas) orang pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018, sedangkan terjadi penambahan 7 (tujuh) orang THL pada bulan September 2018, sehingga tidak terrealisasi untuk Belanja Pegawai Tidak Tetap dengan Pagu Anggaran Rp. 858.000.000 dengan realisasi Keuangan Rp. 387.200.000 atau sebesar 45.12%, menyebabkan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat dicairkan.



- 1.2.4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan PPI** dengan alokasi anggaran kegiatan ini pada APBD Induk adalah sebesar Rp. 3.158.715.900,-. Pada APBD Perubahan mengalami efisiensi, sehingga alokasi anggaran kegiatan ini menjadi sebesar Rp. 430.000.000,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 339.112.222,- atau sebesar 78,86%. Keluaran dari kegiatan ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Air Bersih.



- 1.2.5. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap** dengan pagu anggaran dalam APBD Induk sebesar Rp. 112.650.000,-, telah dilaksanakan untuk Program Sosialisasi Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dengan memanfaatkan Sertifikat ke Permodalan. Realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 97.699.696,00 atau 86,73%, dengan keluaran kegiatan berupa pendataan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Perikanan Tangkap

1. Jarak rentang kendali jarak cukup jauh dan belum adanya kelembagaan serta tidak adanya ASN sebagai koordinator menyebabkan tidak optimalnya dalam hal pengusulan dan pencairan anggaran.
2. Kurang tersediannya dana untuk Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi ke PPI dan tidak adanya dukungan anggaran Perjalanan Dinas dari rutin ke PPI turut menyebabkan tidak terserapnya anggaran secara optimal.

Solusi

1. Perlunya ditunjuk ASN sebagai Koordinator dalam mengatur kelembagaan di PPI.

1.3. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

- 1.3.1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan.** Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 433.845.000,- dengan realisasi anggaran atas kegiatan tersebut sebesar Rp. 356.323.100,- atau 83% dari total anggaran. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional. Dimana dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti dan kegiatan tersebut terlaksana dengan baik seluruhnya atau realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

	
Gambar 4.227 Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2018	Gambar 4.228 Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2018

- 1.3.2. Kegiatan Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan.** Alokasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 259.175.000,- dimana untuk realisasi anggaran atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 218.607.900,- atau 84,35% dari total anggaran yang tersedia. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pameran-pameran sektor kelautan perikanan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun diluar daerah. Pameran yang diikuti pada tahun 2018 ini adalah Pameran KTNA EXPO 2018, Pameran FISH AND MARINE EXPO 2018, dan BABEL FAIR 2018. Dimana dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat

terlaksana dengan lancar tanpa kendala yang berarti, serta kegiatan dapat terlaksana seluruhnya dengan baik atau realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

	
<p>Gambar 4.229 Pelaksanaan Pameran KTNA EXPO 2018</p>	<p>Gambar 4.230 Pelaksanaan Pameran FISH AND MARINE EXPO 2018</p>

1.3.3. Kegiatan Pembinaan Pra-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini berasal dari APBD sebesar Rp. 75.500.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 65.940.000,- atau 87,33%. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan adanya UMKM sebagai Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mampu mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagai persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan. Realisasi dalam kegiatan ini berupa honor tim kegiatan, panitia pelaksana kegiatan, belanja dokumentasi, belanja penjilidan serta belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan ke UPI/UMKM di Kabupaten Bangka yaitu UMKM Keripik Cumi Nina, UMKM Usaha Pak Umar, UMKM Kemplang Tjokro, UMKM Kerupuk Asli Akho, dan UMKM AMC Star. Kabupaten Bangka Tengah yaitu UMKM Bahek Ewaki, UMKM Gurih Mekar, UMKM Gurih DD, UMKM Karya Leluhur, UMKM Keritcu Shella, UMKM R3. Kabupaten Bangka Barat yaitu UMKM Yuk Las, UMKM Yuk Yen, Poklahsar Sari Laut, dan UMKM Pengukusan Rajungan Bolo. Kabupaten Bangka Selatan yaitu UMKM Getas Salai, UMKM Terasi Fifi dan Mely, UMKM Bakso Ikan Pak Panut, UMKM Rizky Sahr. Kabupaten Belitung yaitu UMKM Durio, UMKM Juve, UMKM Pilus Jaya. Kabupaten Belitung Timur yaitu UMKM Mandiri Usaha Bersama, UMKM Ikan Asin, UMKM Sumarti. Pangkalpinang yaitu UMK Getas Tani, UMKM Ampiang Raisyah, UMKM Keritcu Cindy, UMKM Rusip Nabila, UMKM Getas Piala dan UMKM Topi Mahkota. Jadi total ada sebanyak 32 UMKM yang menjadi sasaran pembinaan untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, namun hanya 10 UMKM yang secara teknis mampu memenuhi syarat GMP dan SSOP.

• Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pra-Sertifikat Kelayakan Pengolahan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI)

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM dalam mengolah dan menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang sesuai dengan persyaratan GMP dan SSOP.

Solusi

1. Terus memberikan bimbingan kepada UPI (UMK) dan Pembina Mutu Daerah dalam rangka penerbitan SKP serta memberikan informasi mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SKP.

1.4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp 770.190.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 404.226.100,- atau 52,48%. Keluaran kegiatan ini adalah operasional kapal Pengawas dan pelaku usaha kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	
<p>Gambar 4.231 Suasana Pengawasan Sumberdaya Kelautan</p>	<p>Gambar 4.232 Suasana Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan</p>

1.4.2 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sebesar Rp 67.109.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 62.319.300,- atau 92,86%. Keluaran kegiatan ini adalah Pelaku usaha perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah POKMASWAS aktif.

	
<p>Gambar 4.233 Koordinasi Kanit Polairud Polres Bangka Tengah</p>	<p>Gambar 4.234 Koordinasi Polairud Polres Belitung Timur</p>

1.4.3 Kegiatan Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.932.000,-. Adapun realisasi untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.101.400,- atau 75,17%. Keluaran kegiatan berupa Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta Data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di Kab/Kota yang akuntabel.

	
<p>Gambar 4.235 Diskusi dengan Gakkum Polairud Polres Bangka Selatan</p>	<p>Gambar 4.236 Diskusi dengan Ka. JAGA Kopolairud Polres Bangka</p>

1.4.4 Kegiatan Peningkatan Fungsi BOOST Center dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp136.488.000,-. Adapun realisasi untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.119.400,- atau 73,35%. Keluaran kegiatan berupa jumlah bulan layanan fungsi Babel Ocean Observation Science & Technologies Center.

	
<p>Gambar 4.237 Kegiatan pemeliharaan Stasiun BOOST Tanjung Tinggi</p>	<p>Gambar 4.238 Kegiatan Pemeliharaan Stasiun BOOST Tanjung Gudang</p>

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1. Untuk pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan terkendala dengan kode rekening untuk logistik dalam pengawasan sumberdaya kelautan dimana penyediaan makanan selama patroli kelautan dianggarkan melalui

belanja makan minum rapat sehingga tidak dapat dilaksanakan dari awal tahun 2018.

2. Penyerapan kegiatan APBD Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak disetujuinya rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Penyidikan, dimana didalamnya terdapat klausul pencairan dana penyidikan, saksi ahli, uang layar harian bagi kru kapal pengawas, serta mobilitas penyidikan dan saksi ahli dari dan ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP).

Solusi

1. Melakukan revisi anggaran terkait penyediaan logistik untuk patroli kelautan melalui anggaran perubahan dari belanja makan minum rapat menjadi belanja bahan makanan sehingga kegiatan patroli pengawasan kelautan baru berjalan efektif setelah Dokumen Perubahan Anggaran APBD telah ditetapkan.
2. Perlunya pengesahan atau persetujuan draft Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur tentang SBK penyidikan sebagai acuan/dasar pelaksanaan dan pencairan dana penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan maupun tindak pidana lainnya di setiap SKPD Teknis;

1.5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

1.5.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu

Hasil Perikanan dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 718.746.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 668.433.000,- atau sebesar 93 %. Output Kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan selain untuk operasional perkantoran UPTD LPPMHP ada beberapa kegiatan rutin yang dijalankan untuk menunjang target capaian indikator program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Monev Keamanan Pangan Hasil Perikanan ke 7 Kab/Kota
- b. Kegiatan sosialisasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan di Kab. Bangka Tengah
- c. Kegiatan sosialisasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan di Kab. Belitung Timur
- d. Kegiatan Inhouse training penyusunan dokumen mutu ISO 17025 versi 2018
- e. Kegiatan inhouse training validasi data pengujian formalin
- f. Kegiatan pengadaan alat laboratorium
- g. Kegiatan surveilen audit KAN

- h. Kegiatan servis mesin genset
- i. Kegiatan kalibrasi alat laboratorium
- j. Kegiatan pembelian bahan kimia

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

1. UPTD LPPMHP sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Pergub Nomor 98 Tahun 2017 diantaranya sebagai Lembaga Pengujian Mutu, Lembaga Pembina Mutu dan Lembaga Sertifikasi Produk masih belum optimal terkait dengan SDM yang terbatas khususnya untuk analisis kimia dan juga kewenangan tugasnya di dalam pengendalian keamanan hasil perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Solusi

1. Menambah pegawai khususnya yang mempunyai kualifikasi pendidikan analisis kimia dan juga bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun peraturan jaminan keamanan hasil perikanan

1.6. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau

- 1.6.1. **Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)** dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan (air Payau) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Kerasak, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 801.986.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 714.710.531,- atau sebesar 89,12 %. Output Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) berupa tersedianya pelayanan teknis yaitu belanja pegawai, belanja ATK, belanja Alat listrik, Belanja peralatan dan bahan pembersih, belanja Listrik kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja BBM, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa pegawai tidak tetap, Jasa konsultan perencanaan, jasa konsultan pengawasan, serta belanja modal. Belanja Pemeliharaan yang dimaksud adalah belanja pemeliharaan dan rehab fasilitas satuan pelaksana perbenihan, produksi dan pembesaran ikan air payau dengan item pekerjaan rehab bak tandon (penampungan air laut), sedangkan belanja modal yang dimaksud yaitu belanja modal pengadaan genset dan belanja modal perlengkapan kantor dengan item pekerjaan Pengadaan Pintu gerbang masuk balai dan portal dan belanja modal pengadaan tangga.

- 1.6.2. Kegiatan Peningkatan Produksi Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)** dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan (air Payau) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Kerasak, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 189.360.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.240.000,- atau sebesar 95,18 %. Output Kegiatan Peningkatan Produksi Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) berupa tersedianya Bibit ternak yaitu induk dan benur udang vanname, pakan ternak, peralatan kerja pembenihan / budidaya udang, dan sarana penunjang UPTD Balai Pemuliaan Ikan Unit Pelaksana Ikan Air Payau yaitu belanja modal alat-alat perikanan budidaya berupa Dynamo kincir dan Coolbox.
- 1.6.3. Kegiatan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan (air Payau)** Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Kerasak, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 84.112.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.734.500,- atau sebesar 93,61 %. Output Kegiatan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau berupa pengadaan Alat-alat Perikanan Budidaya berupa refraktometer, dan Dynamo aerasi serta pengadaan bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Pengadaan refraktometer dengan tujuan untuk pengukuran kadar garam (salinitas) air laut yang digunakan sebelum melakukan produksi baik pembenihan atau pun pembesaran udang. Sedangkan Dynamo aerasi berfungsi sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan dynamo pemutar pompa aerasi sebagai penyuplai oksigen dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran udang
- 1.6.4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) (DAK)** dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan (air Payau) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Kerasak, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, Sebelumnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.936.594.000,- dan setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 pagu anggaran menjadi Rp. 0,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Perubahan nomenklatur dan jumlah UPTD di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan yang awalnya berupa UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) dan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) berubah menjadi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (dari dua UPTD menjadi satu UPTD) pada tanggal 19 Maret 2018, sehingga harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan DAK pada UPTD dimaksud. Namun perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DAK telah melewati batas waktu masa perubahan (revisi) kegiatan DAK sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 2018, pasal 5 ayat (5), yang menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali kepada menteri/pimpinan lembaga paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan” dan perubahan nomenklatur UPTD terjadi pada tanggal 19 Maret 2018 (melewati minggu pertama maret). Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus konsultasi perihal permohonan Dispensasi Perpanjangan waktu untuk diberikan kesempatan Revisi kegiatan DAK, namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut

1. Penyerapan anggaran kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) sudah berjalan dengan baik.akan tetapi UPTD Balai pemuliaan ikan unit pelaksana ikan air payau belum dapat menghasilkan PAD/retribusi dikarenakan kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) dan Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) (DAK) tidak dapat dilaksanakan.Hal tersebut disebabkan perubahan nomenklatur UPTD yang baru yaitu Pergub No. 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbit pada awal april. Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan setelah DPPA Perubahan Tahun 2018 yang terbit pada 30 Oktober 2018.
2. Kurangnya Tenaga Administrasi di UPTD Balai Pemuliaan Ikan Unit Pelaksana Ikan Air Payau. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kendala.
3. Permasalahan Lain yaitu tidak tersedianya anggaran banyaknya Fasilitas seperti bangunan yang sudah rusak dan seharusnya dilaksanakan pemeliharaan/perbaikan. Sarana dan Prasarana yang harus segera diperbaiki antara lain : Bak Larva, Bangunan Larva,Bak Pakan Alami, bak induk, kolam bulat pembesaran. karena pada penjelasan poin pertama kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) (DAK) tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang berhubungan dengan Ikan Air Payau pada tahun 2019 tidak ada tercantum dalam menu DAK, sehingga dalam perbaikan sarana dan Prasarana tidak dapat terlaksana.
4. Jumlah Tenaga Teknis belum berstandar juga menjadi salah satu kendala.pada tahun 2018 tenaga teknis tetap yang ada baru berjumlah 4 orang,sementara dalam kegiatan produksi pembenihan membutuhkan waktu 24 jam setiap hari selama 1 siklus, sedangkan satu siklus minimal 45 hari.

Solusi

1. Peningkatan Produksi melalui Pembenihan dan pembesaran Udang Vannamee untuk pencapaian Target PAD/retribusi pada tahun 2019 dan selanjutnya.
2. Adanya penambahan Tenaga Administasi (Pegawai Negeri Sipil/ tenaga honorer) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan UPTD balai Pemuliaan Ikan unit pelaksana ikan Air Payau.
3. Adanya penambahan Pegawai Honorer (Tenaga Teknis) yang mumpuni dan berpengalaman dengan kualifikasi pendidikan SMK,D3 dan S1 perikanan pada 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	UNIT SATUAN PELAKSANA	KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS	
		FORMASI TENAGA	JUMLAH
1	IKAN AIR PAYAU	TEKNISI INDUK	2 (Orang)
		TEKNISI LARVA	3 (Orang)
		TEKNISI PAKAN ALAMI	2 (Orang)
		TEKNISI LABORATORIUM	1 (Orang)
		TEKNISI PEMBESARAN	2 (Orang)
		JUMLAH	10 (Orang)
2	IKAN AIR LAUT	TEKNISI INDUK	2 (Orang)
		TEKNISI LARVA	2 (Orang)
		TEKNISI PEMBESARAN	2 (Orang)
		JUMLAH	6 (Orang)

4. Dengan tidak tercantumnya kegiatan Ikan Air Payau dalam menu DAK Tahun 2019 maka diharapkan dapat di usulkan kebutuhan pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana dengan Anggaran APBD Provinsi Kep.Bangka Belitung.

1.7. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Laut

- 1.7.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Selatan, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 744.316.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.166.729,- atau sebesar 79,69 %. Dengan Keluaran Kegiatan Berupa kegiatan operasional balai diantaranya Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap, pengadaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik , peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung gas, isi ulang air galon listrik pln, bahan bakar minyak genset dan kendaraan dinas, servis kendaraan bermotor, servis peralatan dan perlengkapan kantor, pergantian suku cadang, belanja makan dan minuman, belanja cetak dan penggandaan dan belanja perjalanan dinas .

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)

Penyerapan kegiatan terkendala perubahan nomenklatur UPTD Balai Pemuliaan Ikan, dari sebelumnya UPTD Balai Benih Ikan Laut Tanjungrua. Perubahan nomenklatur ini menyebabkan anggaran kegiatan tidak dapat dicairkan walaupun secara fisik di lapangan kegiatan sebagian sudah berjalan. Secara efektif kegiatan baru berjalan normal pada bulan Agustus 2018 setelah pelantikan kepala dinas definitif.

Solusi

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan dan proses pencairan anggaran kegiatan yang sudah berjalan dan dipandang urgen.

- 1.7.2. Kegiatan Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)** dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Selatan, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 222.862.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.259.000,- atau sebesar 92,55 %. Keluaran Kegiatan Berupa kegiatan belanja bibit ternak, bahan obat-obatan ikan, bahan kimia, bahan pakan ternak, peralatan kantor /laboratorium, dan peralatan kerja pembenihan dan budidaya.
- 1.7.3 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau) (DAK)** dilaksanakan oleh Balai Pemuliaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung Selatan, Sebelumnya telah dialokasikan anggaran sebesar menjadi sebesar Rp. 809.518.000,- dan setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 pagu anggaran menjadi Rp. 0,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Perubahan nomenklatur dan jumlah UPTD di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan yang awalnya berupa UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) dan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) berubah menjadi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (dari dua UPTD menjadi satu UPTD) pada tanggal 19 Maret 2018, sehingga harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan DAK pada UPTD dimaksud. Namun perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DAK telah melewati batas waktu masa perubahan (revisi) kegiatan DAK sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 2018, pasal 5 ayat (5), yang menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) kali kepada menteri/pimpinan lembaga paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran

berjalan” dan perubahan nomenklatur UPTD terjadi pada tanggal 19 Maret 2018 (melewati minggu pertama maret). Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus konsultasi perihal permohonan Dispensasi Perpanjangan waktu untuk diberikan kesempatan Revisi kegiatan DAK, namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

1.8. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar

- 1.8.1** Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Dusun Tutut, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, setelah dilakukan perubahan DPA Tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 132.504.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.504.000,- atau sebesar 100 %. Output Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) digunakan untuk operasional perkantoran dan Honorarium Pegawai Tidak tetap selama 4 Bulan. Perubahan ini dilakukan akibat perubahan kebijakan sesuai amanah Undang-undang 23 Tahun 2014 dimana Perikanan Budidaya Air Tawar bukan kewenangan Provinsi sehingga secara struktural kelembagaan Balai Benih Ikan Sentral dihapus.

2. PERTANIAN

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Pertanian sebesar Rp. 42.153.536.918,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.379.416.498,50 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.774.120.420,00 dengan realisasi keuangan Rp. 38.565.340.627,00 atau 91,49 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

2.1. Peningkatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Anggaran pelaksanaan program ini pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.552.435.000,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 1.247.245.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.812.438.934,00,- atau 65,14% dan capaian fisik 88,50%.

2.1.1. Kegiatan Pengembangan Komoditi Hortikultura Melalui Penerapan Budidaya Tanaman yang Baik dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 642.670.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 297.137.834,- atau 46,23%, dengan capaian fisik 75%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan saprodi bawang merah dan saprodi cabai, namun untuk pengadaan saprodi cabai gagal dilaksanakan dikarenakan pihak penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

2.1.2. Kegiatan Pengembangan Komoditi Pangan dengan Penerapan GP-PTT (Padi dan jagung) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 549.875.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 470.940.500,- atau 85,65%, dengan capaian fisik 90,50%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan saprodi padi di Desa Rias, Desa Batu Betumpang dan Desa Simpang Yul; dan jagung di Desa Fajar Indah dan Desa Sumber Jaya Permai. Kegiatan GP-PTT dilaksanakan dengan memberikan bantuan benih dan saprodi padi dan jagung kepada kelompok tani yang berada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan. Total bantuan Saprodi dan benih padi adalah 200 Ha, sedangkan jagung 100 Ha.



- 2.1.3. Kegiatan Pelatihan Teknis Budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.44.360.600,- atau 81,10%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya bimtek yang diperuntukkan bagi kelompok tani penerima manfaat.



- 2.2 Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian**
Anggaran pelaksanaan program ini di tahun 2018 sebesar Rp. 4.551.720.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 3.924.447.720,- dengan realisasi anggaran program sebesar Rp. 3.253.533.991,- atau 82,90 % dan capaian fisik 96,67%.
- 2.2.1 Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier** dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 774.890.000,- dan pagu anggaran menjadi Rp. 147.890.000,- ,realisasi anggaran sebesar Rp. 125.602.821,- atau 84,93% dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pembangunan irigasi tersier, namun mengalami rasionalisasi pagu untuk THR dan TPP 14, sehingga kegiatan yang diadakan hanya jasa konsultasi penyusunan DED/SID jaringan irigasi yang dilaksanakan sebagai dasar pembangunan Jaringan Irigasi tersier TA 2019.
- 2.2.2. Kegiatan Pengembangan Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.430.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 424.987.434,- atau 95,63% dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan berupa pelaksanaan rapat koordinasi pupuk tingkat provinsi dan pengawasan peredaran pupuk & pestisida serta rapat kebutuhan pupuk subsidi bagi petani serta Uji Sampel Pupuk.
- 2.2.3. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penyuluhan dan SDM Pertanian** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.157.915.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 732.710.700,- atau 62,50%, dengan capaian fisik 80%. Keluaran kegiatan berupa penyuluhan/temu tani dalam rangka peningkatan kapabilitas petani sebanyak 3.000 petani dan 100 penyuluh telah dilaksanakan d UPTD Balai Benih. Namun demikian, peningkatan kapabilitas

bagi penyuluh dalam rangka diklat belum dapat dilaksanakan karena menunggu undangan diklat bagi penyuluh dari Badan PSDMP Kementan.

2.2.4 Kegiatan Penyusunan Rencana Design Kawasan, DED dan KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 742.800.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 660.070.394,- atau 88,86% dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan penyusunan Dokumen DED Kawasan Pertanian khususnya sawah.

2.2.5 Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.497.720,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 233.033.700,- atau 94,16%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan berupa penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan ke Kabupaten/kota seprovinsi.



2.2.6. Kegiatan Rembug Tani Nasional dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.183.915.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.086.128.942,- atau 91,74%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan berupa pelaksanaan Agenda Nasional Rembug KTNA Nasional yang dilaksanakan di Hotel SwissBel Pangkalpinang dan Ekspo KTNA Nasional berlokasi di Lapangan Merdeka



2.3. Pengembangan Perkebunan

Anggaran pelaksanaan program ini pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.088.978.500,-. dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 3.738.441.500,-. Realisasi program sebesar Rp. 3.613.271.425,- atau 96,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.1. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 2.213.962.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.152.625.425,- atau 97,23%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pengadaan sarana untuk peningkatan produksi lada seluas 724 Ha di 6 Kabupaten.

- 2.3.2. Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Perkebunan** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 376.425.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 363.578.000,- atau 96,57%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pengadaan sarana pasca panen lada berupa bak perendaman lada dalam rangka peningkatan mutu, dan sarana paca panen karet berupa pisau sadap, zat pembeku, mangkok dan lainnya dalam rangka peningkatan mutu karet, pembinaan dan pengawalan.



- 2.3.3. Kegiatan Peningkatan Pemasaran Komoditas Strategi Perkebunan** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 257.584.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 249.248.000,- atau 96,76% dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan Rapat Rutin sebulan sekali dalam rangka penetapan harga TBS yang diikuti oleh pengelola Pabrik Kelapa Sawit, Petani Sawit, Petugas Dinas Kabupaten, Pengawalan, Pengawasan Penetapan Harga TBS, serta sosialisasi peningkatan Mutu TBS pada Petani Sawit.

- 2.3.4 Kegiatan Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.537.000,-. Namun kegiatan ini mengalami Rasionalisasi Anggaran untuk THR dan TPP 14 sehingga tidak dilaksanakan.

- 2.3.5 Kegiatan Ekstensifikasi/perluasan areal tanaman perkebunan** dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 890.420.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 847.820.000,- atau 95,22% dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pengadaan bibit lada dalam rangka perluasan tanaman lada dengan tujuan peningkatan produksi lada Babel sebanyak 75.000 Bibit dan pengadaan Teh Tayu Unggulan Lokal sebanyak 10.000 bibit.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain:

- Belum intensifnya pendampingan oleh petugas penyuluh pertanian kepada petani binaan,
- Belum maksimalnya petani dalam mengolah lahannya dikarenakan keterbatasan modal dan hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah,
- Masih kurangnya pemahaman petani dalam menerima bantuan tentang *Good Agriculture Practice (GAP)*, *Good Handling Practice (GHP)*, dan *Good Manufacturing Practice (GMP)*.
- Karena pengaruh iklim dan cuaca yang tidak menentu, maka terkadang jadwal penanaman lada tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.

Solusi/saran :

- Bantuan yang diberikan ini bersifat stimulan dengan harapan petani dapat lebih optimal dan mandiri, sehingga diperlukan pemberian pemahaman dan pendampingan pada petani penerima
- Petani perlu membuat SOP tata cara Budidaya dan Pascapanen Lada yang baik, sehingga dapat menerapkan aturan standar dalam teknik budidaya,
- Perlu diberikan pelatihan kepada anggota kelompok tani mengenai prinsip GAP/GHP/GMP sehingga mutu lada yang dihasilkan dapat terjamin.

2.4 Program Peningkatan Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Anggaran pelaksanaan program ini pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.649.402.000,-. Realisasi Program Rp. 53.346.114.866,- atau 91,69%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 2.4.1. Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak** dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.308.422.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.097.044.560,- atau 90,84%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran Kegiatan berupa pengadaan bibit sapi yang diserahkan kepada 8 kelompok Peternak sebanyak 104 ekor sapi betina dan 8 ekor sapi jantan, sarana pengolahan pakan dan bahan pakan, pengadaan N2 Cair dan obat-obatan, kegiatan pendampingan dan pengawalan, tercapainya target akseptor upsus siwab dan 1.050 akseptor dengan 750 kebuntingan dan 528 kelahiran, alat pengolah pakan ternak (shredder/alat pencacah pelepah kelapa sawit).

Permasalahan yang timbul di awal pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya perubahan spesifikasi ternak dikarenakan adanya ancaman wabah jembrana, sehingga membutuhkan proses pengajuan kembali untuk mengubah spesifikasi dan satuan harga yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

- 2.4.2. Kegiatan Peningkatan Pengolahan Pemasaran Hasil Produksi Subsektor Peternakan** dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.345.000,- Realisasi

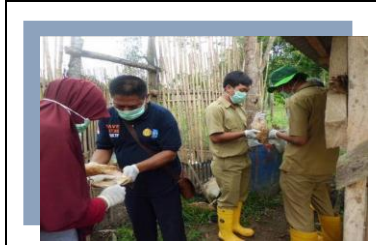
anggaran sebesar Rp. 164.376.463,- atau 94,83% dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan berupa perlombaan Performa Sapi dalam rangka memotivasi kelompok peternak dan peningkatan mutu hasil ternak dan Kegiatan Pelayanan Informasi Pasar yaitu Supply Demand.



- 2.4.3. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan** dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 387.695.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 385.111.978,- atau 99,33%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pengadaan bahan kimia untuk pengujian di Laboratorium Kesehatan Hewan, pengadaan sapras laboratorium guna mendukung pengujian laboratorium dan pelayanan kesehatan hewan, pengadaan alat-alat laboratorium untuk membantu kelancaran pengujian, terlaksananya pengujian di Labkeswan, terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di Dinas Pertanian.



2.4.4.



Gambar 4.245
Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular
Strategis Zoonosis dan
Gangguan Reproduksi

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.920.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 235.932.300,- atau 85,82%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah monitoring Surveilans Brucellosis pada ternak sapi : 307 sampel, monitoring Suveilans Penyakit Jembrana

pada sapi bali : 248 sampel, monitoring Surveilans Avian Influenza (AI) pada unggas : 256 sampel, monitoring Survelains Penyakit Rabies (anjing liar) : 30 sampel, Post Vaksinasi Rabies (hewan kesayangan anjing & Kucing) : 65 Sampel, monitoring & evaluasi penanganan gangguan reproduksi : 199 sapi, pengadaan obat –obatan (obat parasit, antibiotik dan daya tahan tubuh), kesehatan hewan : 259 botol dan 100 sachet, pengadaan bahan kimia ((Desinfektan (Biosekuriti)) : 290 liter, Rapat Koordinasi Keswan yang dihadiri oleh SDM 22 orang dari 7 kabupaten/kota dan provinsi , nara sumber dari pusat 2 orang dan nara sumber lokal 3 orang, Kegiatan Pengadaan Obat – obatan (Pengadaan Obat parasit, antibiotik dan daya tahan tubuh) kesehatan hewan.

2.4.5.

Kegiatan Pemberian Asuransi Peternakan dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.800.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 188.519.197,- atau 96,78%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pemberian insentif bagi kelompok peternak sapi berupa asuransi sebesar 40.000/ekor sebanyak 2.010 ekor sapi



Gambar 4.246
Pemberian Asuransi Ternak

Permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain :

- Pengembangan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangannya perlu dilakukan sosialisasi ketingkat petani;
- Kurangnya petugas kesehatan hewan di kabupaten akan menyebabkan proses pengajuan klaim terhambat hal ini terjadi di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat;
- Dalam Pemeliharaan ternak sapi akan adanya kematian yang terjadi dikarenakan berbagai macam kendala yang disebabkan oleh cuaca, pakan, dan penyakit yang disebabkan oleh manusia atau ternak lainnya maka dari itu selama 2018 ini terjadi 40 ekor klaim sapi dikarenakan sakit dan kelahiran bagi induk sapinya;

- Adanya syarat umur ternak dan penentuan jenis sapi betina produktif yang mengikuti asuransi membatasi pelaksanaan program AUTS sehingga tidak seluruh ternak dapat diikuti dalam AUTS;

Risiko yang mungkin terjadi karena target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai kemungkinan disebabkan oleh: Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau AUTS/K merupakan kegiatan baru sehingga pemahaman masyarakat masih kurang; Peternak/Petani keberatan membayar premi swadaya. Kurang tepat sasaran penerima bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS) kemungkinan disebabkan oleh :

- Tidak tepatnya CPCL
- Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS)

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya resiko :

- Penyusunan pedoman yang detail dan jelas;
- Sosialisasi pedoman keseluruhan *stakeholders*;
- Pendampingan pelaksanaan kegiatan.

2.4.6. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Mutu Hasil Ternak Sapi di RPH dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.010.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 56.111.000,- atau 96,73%, dengan capaian fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah pengawasan dan Sosialisasi Mutu Hasil Olahan Daging asal Hewan dalam rangka ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yaitu di Unit RPH atau Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan.

2.4.7. Kegiatan Pengawasan dan Bimtek Pengolahan Limbah Ternak Sapi/ Pupuk Kompos/ Organik dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.210.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 219.019.368,- atau 86,84% capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah berupa pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi menjadi pupuk/kompos/ organik dalam rangka peningkatan pendapatan melalui nilai tambah hasil limbah ternak.



Gambar 4.247
Pengawasan dan Bimtek
Pengolahan Limbah Ternak
Sapi/Pupuk
Kompos/Organik

2.5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Anggaran tahun 2018 untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 441.573.000,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 415.573.000,- , dengan realisasi anggaran program sebesar Rp. 369.998.363,- atau 89,03% dengan capaian fisik sebesar 100%.

- 2.5.1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan Pembinaan Produsen** dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.425.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 106.373.300,- atau 93,78%, dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan pengawasan peredaran benih/ bibit pertanian, pengawalan dan pembinaan ke penangkar perbenihan dalam menjalankan usaha perbenihan khususnya, dalam rangka memperoleh sertifikasi benih/bibit.



Gambar 4.248
Pengawasan Peredaran
Benih dan Pembinaan
Produsen Pengawasan
Peredaran Benih dan
Pembinaan Produsen

- 2.5.2. Kegiatan Sertifikasi Benih Pertanian/Perkebunan** dilaksanakan oleh BPSMB Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.588.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 76.700.000,- atau 80,24%, dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan sertifikasi benih pertanian/ bibit pertanian ke penangkar dalam rangka memperoleh sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman.
- 2.5.3. Kegiatan Penilaian Kultivar/ Varietas Unggul lokal Daerah** dilaksanakan oleh BPSMB Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.955.000,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 61.955.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 54.677.400,- atau 88,25% dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan kultivar/ varietas/ bibit pertanian, serta penilaian unggul lokal ke varietas yang diakui secara nasional.
- 2.5.4. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD BPSMB** dilaksanakan oleh BPSMB Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.605.000,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 132.247.663,- atau 91,45%, dengan fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Pelaksanaan berupa operasional kegiatan di UPTD Balai Proteksi.

2.6. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman

Anggaran untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2018 sebesar Rp. 368.380.000,- Realisasi Program Rp. 355.521.863,- atau 96,51% dengan capaian fisik 100%.

- 2.6.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman Pertanian** dilaksanakan oleh Balai Proteksi Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.700.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 153.598.000,- atau 99,93%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengawasan, pembinaan

dan sosialisasi penerapan pengendalian hama terpadu ke petani dan/ atau penangkar.

Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman SKPD Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lancarnya kelangsungan kegiatan peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman.

Solusinya antara lain :

- Perlunya penambahan sarana dan prasarana pendukung guna memperlancar kelangsungan peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman sehingga hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat optimal dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman SKPD Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 hendaknya direncanakan secara matang dan terkoordinasi baik dengan berbagai instansi terkait, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
- Perlunya pembinaan, kajian dan fasilitasi secara terus menerus tentang pembangunan pertanian yang berbasis pada perlindungan / proteksi tanaman dengan landasan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan.

2.6.2. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.680.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 201.923.863,- atau 94,06%, dengan capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya operasional kegiatan di UPTD Balai Proteksi.

2.7. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian Anggaran pelaksanaan program ini pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.288.106.200,- dan mengalami perubahan pagu anggaran senilai Rp. 5.286.106.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.984.191.756,- atau 94,29% dengan capaian fisik 100%.

2.7.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.400.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 405.413.422,- atau 90,01%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan operasional UPTD Balai Benih Pertanian, seperti ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana, ketersediaan bibit ayam, ketersediaan anakan sapi, ketersediaan benih sumber padi, ketersediaan bibit lada, ketersediaan bibit karet.

2.7.2. Kegiatan Penyediaan Benih Sumber dan Benih Sebar dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 778.420.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 639.310.396,- atau 82,13%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan pembuatan dan sertifikasi kebun benih/ bibit sumber/ kebun induk untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta sertifikasi benih sumber. Pembuatan Kebun sumber benih khususnya lada bekerja sama dengan UGM.



Gambar 4.249
Pengawalan dan Bimtek
Pengolahan Limbah
Ternak Sapi/Pupuk
Kompos/Organik

2.7.3. Kegiatan Integrasi Jagung dan Sapi dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.296.400,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.195.000,- atau 99,88%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan penanaman jagung seluas 10 Ha dalam rangka penyediaan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak silase.



Gambar 4.250
Kegiatan Integrasi Jagung
dan Sapi

2.7.4. Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan dan Prasarana Penunjang dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.676.100.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.642.269.000,- atau 98,40% capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan Gedung Pertemuan di Balai Benih Pertanian untuk difungsikan sebagai ruang pertemuan terbuka maupun penyelenggaraan penyuluhan.



Gambar 4.251
Gedung Pertemuan dan
Prasarana Penunjang

2.7.5. Kegiatan Pembangunan Gudang Pakan Ternak Silase dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.829.800,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 166.629.800,- atau 99,88%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan pembangunan gudang pakan baik segar maupun pakan olahan/ silase dalam rangka penyediaan pakan berkelanjutan.

2.7.6. Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak Beserta Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.130.060.000,-. Dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.128.060.000,- ,dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.037.374.138,- atau 95,74%, capaian fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan pakan konsentrat bagi ternak sapi Hibah (Sapi Brahman Cross) maupun sapi lainnya, pengadaan penggiling hasil pertanian, timbangan ternak dengan kapasitas 2 ton, pembangunan kandang, Jasa Konsultan Pengawas, Instalasi air, dan pembangunan talud.



3. PILIHAN KEHUTANAN

Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Kehutanan sebesar sebesar Rp. 35.225.716.241,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.866.226.678,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.359.489.563,00 dengan realisasi keuangan Rp. 28.234.837.018,00 atau 80,15 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

3.1. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

3.1.1. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp193.900.150,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.187.496.150,- realisasi anggaran sebesar Rp180.976.190,- atau 96,52% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan hasil kegiatan : Termonitornya kegiatan IUPHHK HTI terhadap 8 pemegang izin (8 Dokumen), 2. Termonitornya kegiatan IUPJLWA terhadap pemohon (7 pemohon) dan pemegang izin (3 pemegang izin).



3.1.2. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp307.321.500,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.404.000,- realisasi anggaran sebesar Rp6.404.000,- atau 100% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun pada tanaman Gaharu dan pelawan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai target dikarenakan ada rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tersebut yang dilaksanakan koordinasi.



3.1.3. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 223.280.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 210.817.000,- atau 94,42% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terkelolanya semua wilayah kawasan hutan di KPHP/KPHL dan tersusunnya RPHJP KPHP/KPH, namun terdapat 8 RPHJP yang belum disahkan pada tahun 2018.

3.1.4. Kegiatan Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp219.990.163,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp189.990.163,- realisasi anggaran sebesar Rp169.836.100,- atau 89,39% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah Pemegang izin, pelaku usaha dibidang hasil hutan mitra kerja dapat memahami dan melaksanakan sistem penatausahaan hasil hutan dan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) serta pelaku usaha bidang kehutanan dapat memahami dan melaksanakan sistem penatausahaan hasil hutan, dengan hasil kegiatan 12 Izin TPKRT 25 Peserta Sosialisasi.



3.1.5. Kegiatan Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 431.280.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 419.149.564,- atau 97,19% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan promosi hasil hutan, dengan hasil kegiatan terpublikasinya promosi produk hasil hutan kayu dan bukan kayu. Promosi berupa produk kayu yang tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung, seperti Nyatoh, Meranti. Sedangkan

produk hasil bukan kayu yang dipromosikan adalah gaharu, madu, rotan, dan produk olahan seperti kopiah resam. Pada promosi tahun 2018, Dinas Kehutanan memperoleh Juara 1 tahun 2018.



Gambar 4.256
Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan

3.1.6. Kegiatan penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp117.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp102.031.300,- atau 86,98% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah Rekomendasi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan seluas 5.341,03 Hektar dengan hasil kegiatan Dokumen penyelesaian penguasaan Dinas dalam Kawasan Hutan.



Gambar 4.257
penyelesaian usulan perubahan status
perubahan kawasan hutan

3.2. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem

3.2.1. Kegiatan Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp212.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp200.553.360,- atau 94,42% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya upaya perlindungan hutan, dengan hasil kegiatan 2 kasus dapat ditindaklanjuti sampai keputusan pengadilan.



3.2.2. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 299.925.000,- realisasi anggaran sebesar Rp165.147.200,- atau 55,06%.



3.2.3. Kegiatan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.570.000,- realisasi anggaran sebesar Rp456.972.050,- atau 95,09%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan, dengan hasil kegiatan meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di daerah.

3.2.4. Kegiatan Tenaga Pendukung Polisi Hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp487.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp478.916.030,- atau 98,26% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan, dengan hasil kegiatan berkurangnya tindak pidana kehutanan.

3.2.5. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp161.957.000,- realisasi anggaran sebesar Rp160.957.000,- atau 98,26% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah ekosistem yang terbentuk dan terjaga dengan hasil kegiatan berupa laporan untuk pembentukan kawasan ekosistem esensial.



3.3. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3.1. Kegiatan Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp199.670.000,- realisasi anggaran sebesar Rp151.959.000,- atau 76,11%, realisasi fisik sebesar 85%. Keluaran kegiatan ini adalah tercapainya luasan penanaman Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH dan masyarakat secara responsif gender, dengan hasil kegiatan terealisasinya DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luas 202,70 Hektar.



3.3.2. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp129.517.500,- realisasi anggaran sebesar Rp126.506.780,- atau 97,68%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS dengan hasil kegiatan Terlaksananya kewajiban bagi para Pemegang IPPKH dalam rangka Pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS.

3.3.3. Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.015.000,- realisasi anggaran sebesar Rp109.838.190,- atau 64,23%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangab kealitas perbenihan tanaman hutan dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan hasil kegiatan dlam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kualitas bibit dari sumber benih yang dipakai adalah bibit dan sumber benih yang berkualitas (20) hektar dan Rencana Pengelolaan RHL Kabupaten Bangka Selatan (1 Dokumen)

3.3.4. Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp334.875.000,- realisasi anggaran sebesar Rp258.608.502,- atau 77,23%, realisasi fisik sebesar 90%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan dan kelestarian lingkungan dengan hasil kegiatan peningkatan Koordinasi teknis penyuluhan Kehutanan sejumlah 26 orang dan terselenggaranya Lomba Wana Lestari tingkat Provinsi dengan prestasi meraih juara 1 Nasional Kelompok HKM

3.3.5. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 850.893.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp 257.275.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 229.703.296,- atau 89,28%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah lahan kritis yang terehabilitasi dengan hasil kegiatan 80 Hektar terealisasi dengan melibatkan stakeholder lainnya selain kegiatan yang bersumber dari Dinas Kehutanan terdiri dari 2 hektar berlokasi di Desa Lenggang Kabupaten Belitung Timur, 25 Hektar berlokasi di Desa Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dan 53 Hektar merupakan penghijauan yang dilakukan oleh Instansi terkait.



Gambar 4.262
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3.3.6. Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp498.712.500,- realisasi anggaran sebesar Rp343.601.722,- atau 68,90%, realisasi fisik sebesar 95%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 6 Kelompok Tani Hutan (KTH, 5 Hutan Kemasyarakatan (HKM), 5 Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 3 Hutan Desa (HD), dan 1 Kelompok Kerja (Pokja) dengan hasil kegiatan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di dalam pemberdayaan 6 KTH, persentase HKM, 5 HTR, dan 3 HD.

3.3.7. Kegiatan Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 241.290.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 158.620.867,- atau 65,74%, realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya dan terlantiknya pengurus SAKA WANABAKTI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hasil

kegiatan terseleksi Sangga Kerja Penegak SAKA WANABAKTI dari 5 sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4.263

Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/
pramuka/siswa sekolah

3.4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan

3.4.1. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp212.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp185.044.003,- atau 87,20% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.2. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp210.568.000,- realisasi anggaran sebesar Rp141.172.198,- atau 67,4% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.3. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp213.708.000,- setelah realisasi anggaran sebesar Rp178.544.550,- atau 83,55% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.4. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp59.520.000,- setelah rasionalisasi menjadi sebesar Rp270.510.000,- realisasi anggaran sebesar Rp253.806.839,- atau 93,83% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.5. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduayung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 211.168.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 153.610.700,- atau 72,74% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.6. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp208.568.000,- realisasi anggaran sebesar Rp170.135.245,- atau 81,57% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4.7. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp270.200.000realisasi anggaran sebesar Rp259.094.060,- atau 95,89% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4.264
Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau

3.4.8. Kegiatan Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp 270.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 243.784.738,- atau 90,22% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala dan Solusi :

Kendala :

1. Adanya efensiensi anggaran disemua kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan target dan strategi pelaksanaannya.
2. Belum terintegrasinya pengelolaan DAS antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta instansi terkait lainnya.

3. Kurangnya kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif pihak terkait dan masyarakat dalam Rehabilitasi di DAS yang kritis.

Solusi :

1. Penyesuaian antara target dan strategi sesuai dengan perubahan anggaran dalam DPA perubahan..
2. Mengupayakan integrasi pengelolaan DAS antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta instansi terkait lainnya.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif pihak terkait dan masyarakat dalam Rehabilitasi di DAS yang kritis

4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp. 29.083.958.045,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.699.547.545,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.384.410.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 25.087.944.937,40 atau 86,26 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

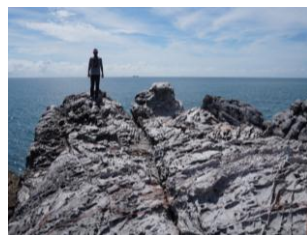
4.1 Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

4.1.1 Kegiatan Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 92.836.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 82.372.742,- atau 88.73% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Data Hasil Penyelidikan Kebumihan. Penyelidikan yang telah dilakukan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Inventarisasi dan Identifikasi Keragaman Geologi (Geodiversity) di Bukit Nenek di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Pantai Batu Bedaun di Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
2. Inventarisasi dan Identifikasi Keragaman Geologi (Geodiversity) di Tanjung Samak di Dusun Pejem Utara Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan Pantai Tuing di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip.
3. Inventarisasi dan Identifikasi Keragaman Geologi (Geodiversity) di Bukit Pading Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.
4. Inventarisasi dan Identifikasi Keragaman Geologi (Geodiversity) di Pantai Penyabong di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, Pantai Arumdalu di Jalan Batu Lubang, Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dan Pulau Lengkuas Letaknya di sebelah Utara Pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
5. Inventarisasi dan Identifikasi Keragaman Geologi (Geodiversity) di Open Pit Nam Salu di Gunong Kik Karak di Desa Senyubuk kecamatan Kelapa Kampit di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
6. Observasi Awal terkait Kegempaan di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Gempa yang pernah terjadi di Bangka Barat merupakan Gempa Tektonik. Gempa Tektonik adalah Gempa yang di sebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Lempeng tektonik bumi terus bergerak, ada yang saling mendekat di bagi menjadi:
 - a. Penunjaman antara kedua lempeng samudra dan lempeng benua.
 - b. Tumbukan antara kedua lempeng benua saling menjauh, atau saling menggelangsar. Karena tepian lempeng yang tidak rata, jika

bergesekan maka, timbullah friksi. Friksi inilah yang kemudian melepaskan energi guncangan.

7. Survei Awal terkait potensi Batu Besi di Desa Riding Panjang dan Potensi emas Sekunder di Desa Air anyir Kabupaten Bangka.
8. Survei Geofisika Aplikasi Geolistrik untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu :
 - a. Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, titik koordinat S 01° 57' 34,3" E 105° 32' 18,5" dan S 01° 55' 25,1" E 105° 32' 24,9".
 - b. Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, titik koordinat S 01° 57' 40,32" E 105° 32' 16,8" dan S 01° 55' 17,508" E 105° 32' 14,65".
 - c. Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, titik koordinat S 01° 55' 47,38" E 105° 33' 26,52" dan S 01° 55' 48,56" E 105° 33' 10,46.
 - d. Yayasan Nurul Huda di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang, titik koordinat S 02° 06' 16,6" E 105° 40' 07,14" dan S 02° 06' 14,13" E 105° 40' 06,94".
 - e. Desa Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, titik koordinat S 02° 04'.102" E 105° 08'.208" dan S 02° 04'.097" E 105° 08'.207".



Gambar 4.265
Inventarisasi dan
Identifikasi Keragaman
Geologi (Geodiversity) di
Pantai Tanjung Samak
Dusun Pejem Utara Desa
Gunung Pelawan Kecamatan
Belinyu Kabupaten Bangka



Gambar 4.266
Survei Geofisika Aplikasi
Geolistrik untuk Pendugaan
Keberadaan Lapisan Akuifer
Bawah Permukaan di Desa
Pangkal Beras Kecamatan
Kelapa
Kabupaten Bangka Barat

4.1.2 Kegiatan DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.669.344.000,-. Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 0,- realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Keluaran Kegiatan ini adalah Persentase Aparatur dalam pengelolaan Air Tanah.

4.1.3 Kegiatan Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar

Rp. 781.540.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 740.024.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 673.612.253,- atau 91.03% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya data Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Provinsi sebagai dasar penentuan pajak air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil Kegiatan terdapat Peta Indikasi Informasi Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Peta Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Besaran harga Air Baku sebagai dasar besaran harga Air Baku sebagai peraturan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), Peta Indikasi Informasi Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan File digital/database digital simulasi perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).

4.1.4 Kegiatan Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 288.890.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 287.882.500,- atau 99.65% Keluaran Kegiatan ini adalah Penyusunan dokumen potensi mineral ikutan Timah. Dari Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah adalah Mengetahui Karakteristik Unsur-unsur pada Mineral ikutan di Bangka Belitung, Mengetahui titik di Pulau Bangka yang berpotensi Mineral Ikutan, Mengetahui Potensi Mineral Ikutan di Alam.

	
<p>Gambar 4.267 Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah Dalam Pengambilan sample Mineral Ikutan di Desa Cambai Kabupaten Bangka Tengah</p>	<p>Gambar 4.268 Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah di Peleburan Timah (PELTIM) Muntok Kabupaten Bangka Barat</p>

Permasalahan dan Solusi Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah

a. Permasalahan

1. Permasalahan Air Tanah masih dianggap sebagai isu yang tidak strategis.
2. Instrumen pendukung masih kurang dalam kegiatan Penyelidikan Kebumihan.
3. Tidak ada Sarana dan Prasarana untuk analisis Laboratorium Kebumihan.
4. Kekurangan Anggaran pada Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.

5. Rasionalisasi dan Efisiensi Anggaran pada Kegiatan DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah.

b. Solusi

1. Membuat kegiatan berkaitan dengan pengelolaan air tanah untuk menunjang konservasi Air Tanah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan turunannya dari bidang Air Tanah.
2. Pengadaan instrumen pendukung Penyelidikan Kebumihan.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk analisis Laboratorium Kebumihan.
4. Menambahkan Anggaran pada Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.
5. Tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat bantuan dari Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) Paket/Titik Sarana dan Prasarana Air Bersih melalui Sumur Bor dalam sehingga anggaran Belanja Pendapat Daerah (APBD) pada Kegiatan DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah di kembalikan ke Kas Daerah.

4.2 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

4.2.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 214.240.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 212.105.821,- atau 99.00% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan, Pengusahaan dan Pengawasan Kegiatan usaha pertambangan mineral logam oleh aparatur dinas dan inspektur tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2018 sebanyak 752 (tujuh ratus lima puluh dua) yang di bina pada tahun 2018 sebanyak 120 (seratus dua puluh) Izin usaha pertambangan (Perusahaan) atau 16.02% dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP).

	
<p>Gambar 4.269 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam di PT. Tomy Utama, Kabupaten Belitung</p>	<p>Gambar 4.270 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam di PT. Chesta Adabi Mulya, Kabupaten Bangka</p>

4.2.2 Kegiatan Optimilasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 67.844.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 67.072.745,- atau 98.86% Keluaran Kegiatan ini adalah Memastikan Perusahaan melaksanakan kewajiban pembayaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara. Dalam Kegiatan Optimilasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara terdapat beberapa kali Rapat yaitu :

1. Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Triwulan I Nasional di Bogor, tanggal 18 s.d 19 April 2018.
2. Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Triwulan II Nasional di Bekasi, tanggal 25 s.d 26 Juli 2018.
3. Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Triwulan III Nasional di Bekasi, tanggal 25 s.d 26 Oktober 2018.
4. Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Triwulan IV Nasional di Yogyakarta, tanggal 5 s.d 6 Desember 2018.
5. Rekonsiliasi Piutang Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara di Palembang.
6. Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Triwulan IV Bangka Belitung di Pangkalpinang, tanggal 26 s.d 27 November 2018.
7. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Mineral dan Batubara pada tahun 2018, Bagian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp. 155.723.973.336,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Terdiri dari luaran Tetap/ Landrent Rp. 36.256.868.597,-, (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), Iuran Produksi/Royalti Rp. 119.467.104.739,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

4.2.3 Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 64.297.000,-.realisasi anggaran sebesar Rp. 63.648.400,- atau 98.99% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Realisasi Rencana Reklamasi (RR) terverifikasi 16 (enam belas) Dokumen, Luas lahan yang sudah terganggu 128.7 Ha dari 16 (enam belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada

tahun 2018. Rekapitulasi Jaminan Reklamasi Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 169.315.243.452,76,- (seratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh enam rupiah) dari 752 (tujuh ratus lima puluh dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari :

1. 740 (tujuh ratus empat puluh) Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2017 sebesar Rp. 158.648.924.904,76,- (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat koma tujuh puluh enam rupiah).
2. 17 (tujuh belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahun 2018 sebesar Rp. 10.666.318.548,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Rekapitulasi Jaminan Pascatambang Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 Jaminan Reklamasi Pascatambang sebesar Rp. 4.853.417.263,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri dari:



1. 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 306.448.849,- (tiga ratus enam juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) pada tahun 2017.
2. 34 (tiga puluh empat) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 4.546.968.414,- (empat milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah) pada tahun 2018

Sedangkan Rekapitulasi Jaminan Reklamasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 6.474.320.683,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dari 29 (dua puluh sembilan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari :

1. 15 (lima belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 4.267.401.787,- (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada tahun 2017.
2. 14 (empat belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 6.474.320.683,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) pada tahun 2018.

Rekapitulasi Jaminan Pascatambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 102.920.148,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh juta seratus empat puluh delapan rupiah) dari 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rekapitulasi Jaminan Kesungguhan Mineral

Bukan Logam dan Batuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 207.042.000,- (dua ratus tujuh juta empat puluh dua rupiah) dari 10 (sepuluh) Izin Usaha Pertambangan (IUP).

	
<p>Gambar 4.271 Verifikasi dan Evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Reklamasi Pada PT. Bukit Timah, di Kabupaten Bangka</p>	<p>Gambar 4.272 Verifikasi dan Evaluasi terhadap Dokumen Laporan Reklamasi PT. Refined Bangka Tin, di Kabupaten Bangka</p>

4.2.4 Kegiatan dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu Oleh Aktifitas Pertambangan di dalam dan Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 916.060.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 0,-realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Keluaran Kegiatan ini adalah Penyusunan Peta dan dokumen kawasan lahan terganggu oleh aktifitas pertambangan di Pulau Belitung.

Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam

a. Permasalahan

1. Kurangnya Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mengingat banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam yang belum diawasi.
2. Kurangnya Inspektur Tambang (IT) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pengembalian anggran pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu Oleh Aktifitas Pertambangan di dalam dan Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan pada proses lelang pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak sependapat dengan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lelang kedua waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

b. Solusi

1. Anggaran dalam Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam perlu ditambah.
2. Tenaga Inspektur Tambang (IT) perlu ditambah .

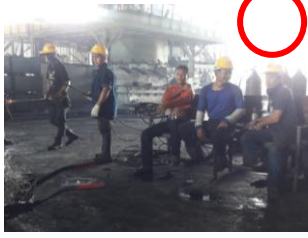

3. Dalam melaksanakan Pekerjaan Lelang agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lebih cermat, teliti dalam pelaksanaan Lelang Kegiatan dan melaksanakan Pekerjaan Lelang di awal tahun.

4.3 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

4.3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 138.956.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 288.956.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 283.368.527,- atau 98.07% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan, Pengusahaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan oleh Aparatur Dinas dan Inspektur Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2018 sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan), Pembinaan dan Pengawasan pada tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) Izin Usaha Pertambangan (Perusahaan) atau 19.37% dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan.

	
<p>Gambar 4.273 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Pada PT. Belitung Sand Mining (BSM), di Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur</p>	<p>Gambar 4.274 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam pada PT. Bina Usaha Cipta Pratama, di Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur</p>

4.3.2 Kegiatan Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 50.120.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 42.920.000,- atau 85.63% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Penilaian pengelolaan keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6 (enam) Perusahaan di Bidang Pertambangan yang dapat dinilai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	
<p>Gambar 4.275 Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang di PT. Bangka Tin Industry Bangka Induk Desa Jelitik Kabupaten Bangka</p>	<p>Gambar 4.276 Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang di PT. Prima Timah Utama (PTU) JL Ketapang, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang</p>

4.3.3 Kegiatan Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Pembinaan Usaha Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 98.350.000, atau 77.16% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pertemuan Tahunan Kepala Teknik Tambang dan Pembina Usaha. Kegiatan Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Pembinaan Usaha Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan di Hotel Puncak Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah peserta 160 (seratus enam puluh) peserta.

4.3.4 Kegiatan Penyusunan Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 0,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 347.650.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 334.600.396,- atau 96.25% Keluaran Kegiatan ini adalah Blueprint Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Bangka Belitung bertumpu pada 5 (lima) aspek penting yakni upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kesejahteraan ekonomi alternatif, penguatan nilai-nilai sosial budaya dan kepedulian lingkungan, pelembagaan komunitas, dan peningkatan infrastruktur.

➤ **Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan**

a. Permasalahan

1. Kekurangan Anggaran dalam Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan terutama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan.

b. Solusi

1. Anggaran dalam Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditambah terutama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

4.4 Program Pengembangan Sumber Daya Energi

4.4.1 Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.981.988.000,- Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 3.981.988.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.308.395.011,- atau 83.08% Keluaran Kegiatan ini adalah Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpasang 100 (seratus) unit terdiri dari 50 (lima puluh) unit di Kabupaten Belitung terdiri dari 9 Unit/Titik di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong, 22 Unit/Titik Desa Membalong Kecamatan Membalong, 2 Unit/Titik Desa Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan, 5 Unit/Titik Desa Air Saga Kecamatan Tanjung Pandan, 7 Unit/Titik Desa Sungai Padang Kecamatan Sijuk, 5 Unit/Titik di Desa Pulau Seliu Kecamatan Membalong dan 50 (lima puluh) unit Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 Unit/Titik di Desa Gantung Kecamatan Gantung, 1 Unit/Titik di Desa Bentaian Jaya Kecamatan Manggar, 5 Unit/Titik di Desa Padang Kecamatan Manggar, 9 Unit/Titik di Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar, 5 Unit/Titik di Desa Sukamandi Kecamatan Damar, 7 Unit/Titik di Desa Mempaya Kecamatan Damar, 3 Unit/Titik di Desa Burung Mandi Kecamatan Damar, 2 Unit/Titik di Desa Pulau Memperak Kecamatan Manggar, 4 Unit/Titik di Desa Kelubi Kecamatan Manggar, 2 Unit/Titik di Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang.

	
<p>Gambar 4.277 Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung</p>	<p>Gambar 4.278 Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan di Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur</p>

4.4.2 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 94.108.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 89.991.600,- atau 95.63% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan bidang ketenagalistrikan. Jumlah Perusahaan sampai Tahun 2018 terdapat 215 (dua ratus lima belas), Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Listrik 106 (seratus enam) Perusahaan pada tahun 2018 atau 221 (dua ratus dua puluh satu) Pembangkit.

4.4.3 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 93.510.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 87.692.280,- atau 93.78% Keluaran Kegiatan ini adalah Pembinaan Lifting dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Partisipasi dalam kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan Koordinasi Sektor Hilir dan Hulu Migas. Partisipasi dalam Kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dan Koordinasi Sektor Hilir dan Hulu Migas. 3 (tiga) kali Pertemuan Lifting Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Solo, Banten dan Lampung sedangkan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) 2 (dua) kali pertemuan di Yogyakarta dan Batam. Dari hasil Pertemuan Triwulan ke III (tiga) Tahun 2018 Provinsi Bangka Belitung memperoleh 112.000 (seratus dua belas ribu) Barel.

	
<p>Gambar 4.279 Rapat Kerja Evaluasi Penghitungan Realisasi Lifting Migas Pusat dan Daerah Penghasil di Solo, tanggal 7 s.d 9 Maret 2018</p>	<p>Gambar 4.280 Rapat kerja Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) di Batam, tanggal 24 sd 26 oktober 2018</p>

4.4.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 92.760.000,-.realisasi anggaran sebesar Rp. 88.982.000,- atau 95.93% Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Usaha LPG dan BBM. Telah melakukan Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sebanyak 66 (enam puluh enam) Lembaga/Penyalur Sub Penyalur dengan rincian, 23 di SPBU, 4 SPBE, 23 Agen Gas, 16 Pangkal Gas. Untuk Realisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (Premium) sebanyak 175.218 KL dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (Solar/Bio Solar) sebanyak 190.574 KL serta Kerosene sebanyak 10.556 KL.



4.4.5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 233.184.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp. 224.672.450,- atau 96.35% Keluaran Kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat hasil Pemodelan Long-range Energy Alternatives Planning system (LEAP) dalam Dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUEDP) Kepulauan Bangka Belitung (Bauran Energi Primer).

Jenis Energi	2015	2025	2050
Batubara	8.63%	23.76%	29.00%
Gas Bumi	7.04%	16.87%	16.10%
Minyak Bumi	81.46%	42.15%	23.93%
Energi Baru terbarukan	2.87%	17.21%	30.97%

4.4.6 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 289.050.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 234.482.900,- atau 81.12% Keluaran Kegiatan ini adalah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berkelanjutan. Hasil dari kegiatan tersebut terdapat Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 10 (sepuluh) titik di Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Unit

Pergantian Lampu, 10 (sepuluh) Unit Modul Surya dan 10 (sepuluh) Unit dan 10 (sepuluh) Unit Baterai Lithium.



4.4.7 Kegiatan Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.576.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.415.584.460,- atau 89.79% Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga bagi Masyarakat. 45 (empat puluh lima) Unit Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 10 Unit di Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, 5 Unit di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, 10 Unit di Dusun Air Jangkak Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dan 20 unit Dusun Nadi Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.



➤ **Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Sumber Daya Energi**

a. Permasalahan

1. Produksi minyak mentah menurun mengingat mayoritas sumur Minyak dan Gas di Indonesia sudah tua sehingga bila tidak ada aksi eksplorasi yang tinggi akan sulit mendapatkan kenaikan lifting.

Ketika harga minyak sudah kembali tinggi, lifting tidak bisa langsung naik.

2. Kekurangan Anggaran dalam Program Pengembangan Sumber Daya Energi.
3. Dalam Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sulit dalam memperoleh data-data dan Asumsi yang diperlukan untuk Perhitungan Proyek Energi di masa mendatang.
4. Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dikarenakan adanya Rasionilisasi Anggaran pada tahun 2018, Keterlambatan pada pengiriman barang karena kesalahan pada ekspedisi barang dan cuaca tidak mendukung karena hujan terus menerus.
5. Waktu Pelaksana Kegiatan tidak sesuai Schedule karena menunggu Juklak dan Juknis dari Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
6. Masyarakat Kurang Pro Aktif dalam Pengisian Kotoran Sapi yang mana Kotoran Sapi sebagai Bahan Bakar Utama pada Kegiatan Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Solusi

1. Eksplorasi Sumur Minyak dan Gas yang baru agar produksi minyak peta tidak menurun.
2. Anggaran dalam Program Pengembangan Sumber Daya Energi harus di tambah karena dalam Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Energi tidak efektif dan efisien.
3. Dalam Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu Koordinasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN)
4. Tidak Adanya Rasionilisasi Anggaran pada tahun 2018, tidak menggunakan ekspedisi barang yang sama untuk tahun-tahun berikutnya pada Pembangunan dan Pemasangan Jalan umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru terbarukan (BET) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Meningkatkan Koordinasi dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar Juklak dan Juknis pelaksanaan Kegiatan tepat waktu.
6. Masyarakat Harus Pro Aktif dalam Pengisian Kotoran Sapi yang mana Kotoran Sapi sebagai Bahan Bakar Utama pada Kegiatan Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. PARIWISATA

Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Pariwisata sebesar Rp 6.777.115.000 dengan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 5.520.614.243 atau 81,46 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

5.1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.1.1. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk 1) menyelaraskan dan menyepakati perencanaan pengembangan destinasi pariwisata di Bangka Belitung antara OPD di pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholders terkait; 2) berbagi informasi perkembangan pembangunan kepariwisataan antara pemangku kepentingan pengembangan destinasi pariwisata.

Forum Koordinasi Pengembangan Pariwisata dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Maret 2018 di Hotel Bangka City Pangkalpinang dan pada tanggal 23 November 2018 bertempat di Hotel Sahid Pangkalpinang.

Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.92.118.000,- sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.66.747.200,- atau 72,46%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terselenggaranya forum koordinasi yang menghasilkan dokumen kesepakatan.

Kendala : Kegiatan ini tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan :

1. Honorarium narasumber tidak dapat dibayarkan secara maksimal dikarenakan narasumber pusat pada Rapat Koordinasi pertama berhalangan hadir dikarenakan alasan kesehatan dan memberikan konfirmasi kurang dari 24 jam acara di mulai;
2. Narasumber Daerah berhalangan hadir dan tidak mendelegasikan kepada bawahannya;
3. Stakholder Pariwisata tidak menghadiri kegiatan, sehingga kesepakatan yang dibuat tidak melibatkan stakholder pariwisata.



Gambar 4.287
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata

5.1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasana di daya tarik wisata Mangrove Kurau Barat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.877.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.155.450.500,00 atau 90,4% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Target capaian kegiatan ini adalah tertatanya satu kawasan ekowisata mangrove di Kurau Barat dengan sasaran program kegiatan peningkatan presentase daya tarik wisata provinsi dan kawasan pendukung pariwisata provinsi yang terkelola. Keluaran kegiatan ini adalah dukungan sarana dan prasarana yang terdiri dari: pembuatan trek santai, pengadaan kayak/kano sebanyak 4 unit, penerangan lampu solar cell pondok 2 unit dan lampu jalan 1 unit serta mesin speed boat 25 PK 1 unit yang diserahkan kepada Kelompok masyarakat Gempa 01 sebagai pemilik ijin pengelolaan Hutan Kemasyaratan (HKM) Mangrove Munjang (Kurau Barat) tersebut.



Gambar 4.288
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata
Mangrove Kurau Barat

5.1.3. Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya

Dalam Ripparprov ini telah ditetapkan perwilayahan pariwisata provinsi menjadi 2 (dua) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), yang didalamnya terdapat 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), dan 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP). DPP Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari DPP Wilayah Utara, dan DPP Wilayah Selatan. Sedangkan KSPP terdiri dari KSPP Muntok dan sekitarnya, KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya. Adapun 2 (dua) KPPP di provinsi ini adalah KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar dan sekitarnya, serta KPPP Toboali dan sekitarnya. KSPP Muntok dan sekitarnya yang berada di Kabupaten Bangka Barat memiliki kedudukan penting dalam sejarah nasional bahkan internasional, sehingga menjadi prioritas pengembangan pariwisata provinsi. Potensi daya tarik wisata sejarah dan warisan budaya serta wisata kuliner di kawasan ini menjadi unggulan provinsi maupun kabupaten, sehingga perlu direncanakan dengan lebih detail dan terintegrasi antarsektor antarwilayah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen rencana induk dan rencana detail pengembangan pariwisata yang terintegrasi, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendalian kepariwisataan KSPP Muntok dan sekitarnya, dalam rangka menjalankan fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepariwisataan Kabupaten Bangka Barat.

Sasaran yang harus dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Terkajinya berbagai kebijakan dan rencana terkait pengembangan kepariwisataan di KSPP Muntok dan sekitarnya, khususnya kebijakan yang terkait dengan tema utama pengembangan KSPP Muntok dan sekitarnya, yaitu pariwisata warisan budaya dan wisata kuliner;
2. Teranalisisnya potensi dan permasalahan kondisi wilayah, masyarakat, dan perkembangan kepariwisataan di KSPP Muntok dan sekitarnya;
3. Teridentifikasinya isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan KSPP Muntok dan sekitarnya;
4. Terumuskannya konsep, visi, tujuan, dan sasaran pengembangan kepariwisataan KSPP Muntok dan sekitarnya.
5. Terumuskannya kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata KSPP Muntok dan sekitarnya berdasarkan isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan kawasan untuk aspek pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, yang mencakup :
 - a. Rencana struktur kawasan, yang meliputi rencana pusat pelayanan pariwisata kawasan dan jaringan penghubung antar pusat pelayanan dan kawasan;
 - b. Rencana sistem jaringan pergerakan, untuk mendukung pengelolaan pengunjung dan keterpaduan produk pariwisata;
 - c. Rencana pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung pariwisata.

6. Terumuskannya rencana detail area prioritas yang meliputi :
 - a. Rencana Fisik : standar pembangunan dan kualitas pariwisata, serta standar kualitas fasilitas umum dan prasarana umum pendukung pariwisata;
 - b. Rencana Non-fisik, meliputi pengembangan program dan jalur wisata tematik, perencanaan informasi pariwisata, pengembangan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan pengunjung.
7. Terumuskannya program prioritas pengembangan kepariwisataan di area prioritas;

Terumuskannya sistem pengendalian pelaksanaan rencana pengembangan kepariwisataan KSPP Muntok dan sekitarnya.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Bangka Barat yang telah diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2018, Kawasan Muntok dan sekitarnya juga termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). Ripparkab Bangka Barat telah membagi wilayah kabupaten menjadi 2 KSPK dan 4 KPPK. Kota Tua Muntok dan sekitarnya merupakan salah satu KSPK yang diprioritaskan pembangunannya.

Kegiatan Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.310.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 457.680.744,- (65,35%).

Keluaran kegiatan adalah dokumen RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya serta draft Rancangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya.

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari survey dan seminar, yaitu sebagai berikut :

1. Seminar Awal di Pangkalpinang, tanggal 14 Agustus 2018
2. Seminar Awal di Muntok, tanggal 15 Agustus 2018
3. Seminar Antara di Pangkalpinang, 18 Oktober 2018
4. Seminar Akhir di Pangkalpinang, tanggal 28 November 2018
5. FGD Rancangan Peraturan Gubernur di Pangkalpinang, tanggal 6 Desember 2018



Gambar 4.289

Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya

5.1.4. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata adalah kegiatan pembinaan kepada masyarakat yang terdiri dari Kelompok Sadar Wisata, Masyarakat Desa Wisata, pelaku usaha dan Jasa pariwisata, komunitas yang mendukung pariwisata, serta masyarakat di sekitar destinasi pariwisata di empat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sadar wisata dan sapta pesona dalam mengelola daya tarik wisata.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117.885.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.277.600,- (95,24%). Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat di desa wisata.

5.1.5. Penyusunan Geopark Bangka dan Belitung

Penyusunan Kajian Geopark Pulau Bangka Dan Belitung adalah kegiatan pembuatan kajian tentang potensi pariwisata berbasis alam (geowisata) sebagai penambahan khasanah daya tarik baru (geopark) di Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam upaya pembangunan kepariwisataan di Bangka Belitung.

Bentuk kegiatan terdiri Survei lokasi potensi yang, penelitian oleh para ahli dan pemaparan hasil penelitian dan hasil kajian. Dalam kegiatan ini, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Pusat Perencanaan Dan Pengembangan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung (P2Par ITB) yang melibatkan tenaga Ahli Perencanaan Pariwisata, Ahli Manajemen Destinasi, Ahli Transportasi, Ahli Sosial Budaya, Ahli Geologi, Ahli Biologi dan Ahli Perencanaan Kota.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah (1) terlaksananya pengembangan daya tarik wisata baru sebagai upaya pengembangan destinasi untuk menunjang pembangunan kepariwisataan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan (2) tersedianya dokumen kajian geowisata yang memuat informasi dan rekomendasi rencana yang menunjang dikembangkannya potensi geopark di Bangka Belitung.

Kegiatan Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.406.140.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 314.883.798,- (77,53%).

Keluaran kegiatan adalah dokumen kajian geowisata yang berisi potensi geosite yang ada di pulau Bangka.

Kendala : Untuk kajian Pulau Belitung tidak dilaksanakan dikarenakan pada tahun anggaran yang sama dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata

sehingga pada target pencapaian tidak tercapai maksimal dan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga ada beberapa kode rekening yang tidak dimaksimalkan pemanfaatannya.



Gambar 4.290
Penyusunan Geopark Bangka dan Belitung

5.2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5.2.1. Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung ini bermaksud untuk memberikan informasi pariwisata dan mempromosikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih luas lagi ke pasar wisatawan nusantara dan mancanegara, agar Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah destinasi prioritas dan unggulan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung kepada para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara melalui media cetak dan elektronik seperti leaflet, booklet, peta dan video.

Sasaran kegiatan ini adalah calon wisatawan dalam negeri dan luar negeri, yang berpotensi untuk datang dan mengunjungi Bangka Belitung

Kegiatan Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.485.899.000,- sedangkan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 481.489.000,- atau 99,09%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersedianya bahan promosi, publikasi dan souvenir yaitu video pariwisata, souvenir, cetak leaflet dan booklet, peta pariwisata, dan *goodie bag*.

5.2.2. Pelayanan Informasi Pariwisata

Kegiatan Pelayanan Informasi Pariwisata ini bermaksud untuk memberikan informasi pariwisata dan mempromosikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih luas lagi ke pasar wisatawan nusantara dan mancanegara, untuk menjadikan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah destinasi prioritas dan unggulan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung kepada para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Sasaran kegiatan ini adalah calon wisatawan dalam negeri dan luar negeri, yang berpotensi untuk datang dan mengunjungi Bangka Belitung.

Lokasi kegiatan pelayanan informasi pariwisata di Pangkalpinang (Bandara Depati Amir) dan Tanjung Pandan (Bandara H.AS Hanandjoeddin)

Kegiatan Pelayanan Informasi Pariwisata dalam APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.120.990.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.856.120,- atau 86,67%. Keluaran atau output kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi *TIC (Tourist Information Center)* di Bandara Depati Amir, Pangkalpinang dan Bandara Hanandjoedin, Tanjung Pandan yang meliputi 4 orang petugas jaga, penataan serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan materi *TIC (Tourist Information Center)*.



Gambar 4.291

Pelayanan Informasi Pariwisata

5.2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata merupakan kegiatan yang mempromosikan pariwisata Bangka Belitung melalui media daring dengan nama alamat website : visitbangkabelitung.com.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memnginformasikan dan mempromosikan destinasi – destinasi pariwisata yang ada di Bangka Belitung dengan melalui media online.

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Lokasi kegiatan ada di Pangkalpinang.

Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata dalam APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.118.920.000,- untuk capaian fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 50.528.260,- atau 42,49%. Keluaran atau output kegiatan adalah ketersediaan website untuk informasi kebudayaan dan pariwisata daerah.

Kendala : Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dicairkan seperti honorarium tim dan perjalanan dinas hal tersebut dikarenakan perlunya efisiensi anggaran tetapi fisik kegiatan berjalan maksimal sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan media yang digunakan untuk mengumpulkan materi atau pengisian konten melalui media surat elektronik atau email.

5.2.4. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri ini bermaksud untuk memberikan informasi pariwisata dan mempromosikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih luas lagi ke pasar wisatawan nusantara dan mancanegara, untuk menjadikan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah destinasi prioritas dan unggulan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung kepada para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan cara mengikuti expo yang dihadiri dan dikunjungi oleh media, travel agent, hotel, pelaku usaha kecil dan menengah, pengrajin souvenir, pihak swasta serta ribuan masyarakat yang ingin mengetahui tentang potensi dan keindahan alam di Bangka Belitung. Diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dalam jumlah kunjungan maupun lama tinggal wisatawan.

Sasaran kegiatan ini adalah calon wisatawan dalam negeri dan luar negeri, travel agent, media nasional dan internasional, hotel, pelaku usaha kecil dan menengah, pengrajin souvenir, BUMN, BUMD, perusahaan swasta serta masyarakat luas yang berpotensi untuk datang dan mengunjungi Bangka Belitung.

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, yakni 2 even promosi luar daerah dan 2 kali even promosi dalam daerah, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Gebyar Wisata & Budaya Nusantara Expo 2018, pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta.
2. Sumatera Selatan Expo 2018, pada tanggal 16 s.d. 25 Agustus 2018 di Kompleks Dekranasda Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.
3. Bangka Expo 2018 pada tanggal 26 s.d. 29 April 2018 di Stadion Bina Satria Sungailiat, Kabupaten Bangka.
4. Belitung Expo 2018, pada tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2018 di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pendam Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri dalam APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 245.630.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.242.157.500,- atau 98,59%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terlaksananya event promosi pariwisata didalam dan luar daerah.



5.2.5. Partisipasi Event Promosi Pariwisata

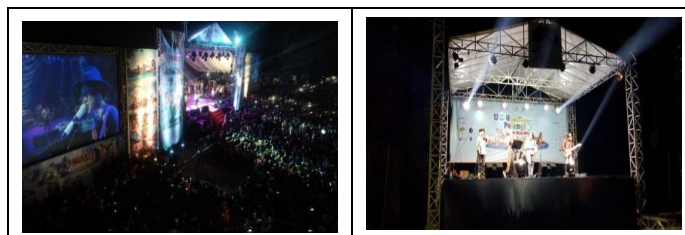
Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata merupakan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah, Akademisi, organisasi Masyarakat atau pihak ketiga yang mengadakan kegiatan expo event promosi dan Even Budaya di dalam daerah. Lokasi kegiatan diselenggarakan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang diperuntukan untuk mendukung penyelenggaraan event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Komunitas dan Kelompok serta Desa Wisata.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan event pariwisata.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Komunitas dan Kelompok serta Desa Wisata.

Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.436.415.000,- dalam Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp 2.321.415.000,-. Untuk realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.955.258.623,- atau 84,23%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah mendukung terlaksananya penyelenggaraan event event promosi pariwisata sebanyak 40 event dari target sebanyak 15 event yang ada di 7 Kabupaten / Kota.

Kendala : Kegiatan ini tidak dapat terealisasi dengan maksimal dikarenakan banyaknya proposal permohonan bantuan yang tidak ada pada mata anggaran Kegiatan Partisipasi Event Promosi Pariwisata 2018.



Gambar Gambar 4.293
Partisipasi Event Promosi Pariwisata

5.2.6. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Melalui Media

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Melalui Media ini bermaksud untuk memberikan informasi pariwisata dan mempromosikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih luas lagi ke pasar wisatawan nusantara dan mancanegara, agar Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah destinasi prioritas dan unggulan di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata Kepulauan Bangka Belitung kepada para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara melalui media cetak dan elektronik baik majalah maupun di maskapai penerbangan.

Sasaran kegiatan ini adalah calon wisatawan dalam negeri dan luar negeri, yang berpotensi untuk datang dan mengunjungi Bangka Belitung.

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Melalui Media dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.286.670.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 274.795.800,- atau 95,86%. Keluaran atau output kegiatan ini adalah terinformasinya dan terbupbilkasinya destinasi wisata melalui media promosi berupa media cetak, elektronik, online dan media sosial.



Gambar Gambar 4.294
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Melalui Media

5.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata

5.3.1. Partisipasi Event Festival Nusantara

Festival merupakan sebagai salah satu upaya untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Dalam festival tersebut dalam mempublikasinya dapat berupa atraksi budaya, adat istiadat, kuliner dan kesenian. Sehingga perlunya partisipasi dalam sebuah event yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat, komunitas, pelaku ekonomi kreatif dan pelaku pariwisata yang ada di Bangka Belitung.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas serta partisipasi masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam suatu event festival. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan dalam suatu event bagi para pelaku ekonomi kreatif, masyarakat, komunitas dan pelaku pariwisata sehingga memperoleh informasi dan wawasan tentang sejarah, budaya, tradisi dan destinasi pariwisata Bangka Belitung.

Kegiatan Partisipasi Event Festival Nusantara dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.407.396.000,- dan pada APBD-P Tahun 2018 mengalami pengurangan menjadi Rp. 287.396.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.370.345,- (43,27%).

Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya event festival nusantara melalui pemberian dukungan sebanyak 9 event dari 15 event.

Kendala :

- a. Proposal yang diajukan tidak sesuai peruntukannya.

- b. Banyaknya proposal yang diajukan pada saat akhir tahun anggaran.



5.3.2. Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata

Untuk menghadapi tuntutan globalisasi yang membawa implikasi pada peningkatan SDM pariwisata untuk lebih profesional dan mempunyai daya saing diharapkan agar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri dalam menghadapi MEA. Sehingga untuk mendukung persaingan bebas diperlukan tenaga kerja yang profesional dan memiliki sertifikasi kompetensi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Meningkatkan kualitas SDM khususnya bidang pariwisata.
- Meningkatkan jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM terdidik dan memiliki kualifikasi dalam memberikan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Sedangkan sasarannya adalah para tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha jasa pariwisata.

Kegiatan Penyelenggaraan sertifikat bagi Sumber Daya Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.645.090.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 499.531.111,- (77,44%).

Keluaran kegiatan adalah tersertifikasinya tenaga kerja bidang pariwisata sebanyak 154 org.



5.3.3. Penyelenggaraan pemilihan putra – putri kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Salah satu bentuk promosi pariwisata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun selalu mengadakan seleksi Pemilihan Putri Indonesia, Pemilihan Putri Pariwisata dan Pemilihan Duta Wisata, untuk mencari para duta wisata dari kalangan kawula muda dan diharapkan memiliki intelektual tinggi, berintegritas baik, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta dapat menjadi teladan sekaligus duta wisata. Dengan terpilihnya para putra-putri itu merupakan salah satu cara pemberdayaan dan aktulisasi diri mereka sehingga kesadaran dan perilaku mereka diharapkan benar-benar mewakili masyarakat berbudaya melayu yang santun dan ramah. Dan mereka yang telah terpilih di tingkat Provinsi adalah duta yang mewakili dari daerahnya masing-masing sehingga mereka adalah ikon daerah asal dalam mewujudkan teladan bagi remaja putra-putri yang cinta daerah.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Putra-Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai maksud untuk memilih putra-putri terbaik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai duta wisata yang akan mewakili dalam ajang pemilihan duta wisata tingkat nasional. Seleksi Pemilihan Putra-Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tujuan :

1. Pagelaran ajang bakat yang mengedepankan karakter 3 b yaitu *brain* yang mempunyai maksud adalah otak yang cerdas, *beauty* yang mempunyai maksud kecantikan (untuk putri) dan *behaviour* yang mempunyai maksud tingkah laku yang baik;
2. Menggali dan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan daerah;
Membuka jalur pengembangan bakat ke tingkat nasional dan internasional bagi remaja putra-putri Bangka Belitung.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Putra-Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp.464.010.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 421.177.246,- (90,77%).

Keluaran kegiatan adalah terpilihnya putra-putri terbaik yang akan mewakili Bangka Belitung ke ajang nasional sebanyak 13 duta wisata.



5.3.4. Penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner

Kegiatan penyelenggaraan ini merupakan promosi pariwisata yang perlu dikembangkan dalam rangka pemberdayaan SDM khususnya di bidang kuliner. Hal ini agar para pelaku kuliner memiliki kesadaran bahwa kuliner memiliki nilai jual wisata unggulan selain wisata alam dan budaya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya berpartisipasi aktif dalam mempromosikan wisata kuliner yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar.

Kegiatan Penyelenggaraan Wisata Kuliner dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 159.065.000,- dengan capaian realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.123.611.360,- (77,71%).

Keluaran kegiatan adalah terlatihnya pelaku ekonomi kreatif bidang kuliner. Kendala : Masih banyak calon peserta yang tidak hadir khususnya dari Kabupaten Belitung dan Belitung Timur hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk transportasi bagi para peserta.



5.2.1. Forum Komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan daerah

Kegiatan ini dalam pembangunan kepariwisataan daerah merupakan wadah komunikasi antar pemangku kepentingan bidang kepariwisataan yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kelembagaan pariwisata, sumber daya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Forum komunikasi ini dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan tema pembahasan yang berbeda yang melibatkan 25 orang pada setiap pelaksanaan. adapun peserta berasal dari lembaga kepariwisataan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (asosiasi, organisasi)

Kegiatan Forum Komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 153.700.000,- sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.135.799.036,- atau 88,35%. Keluaran atau output kegiatan adalah tersusunnya 10 kesepakatan tentang kelembagaan kepariwisataan.

Kendala : tidak sepenuhnya peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota hadir terutama peserta yang berasal dari pelaku usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan tenaga kerja pariwisata hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya alokasi anggaran transportasi bagi peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota.

6. INDUSTRI

Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Industri sebesar Rp. 19.197.362.540,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.296.620.830,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.900.741.710,00 dengan realisasi keuangan Rp. 18.041.673.730,00 atau 93,98 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

6.1. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri

6.1.1. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.419.960 ,- realisasi anggaran sebesar Rp. 48.748.960,- atau 98,64%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya 1 dokumen kawasan industri / kawasan peruntukan industri yang ada di Bangka Belitung.



6.1.2. Kegiatan Finalisasi RPIP (Rencana Pengembangan Industri Provinsi) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 216.234.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 177.133.901,- atau 81,92 %. Keluaran kegiatan adalah tersusun Dokumen RPIP yaitu NA dan Raperda.

6.1.3. Kegiatan Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.235.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 80.761.700,- atau 64,49%. Keluaran kegiatan adalah 3 (tiga) unit Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi.

6.1.4. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri di oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 33.336.342,- atau 73,59%. Keluaran kegiatan adalah 1 (satu) lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri yaitu Sentra Olahan Ikan di Kecamatan Toboali Bangka Selatan.



6.1.5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.262.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.715.717,- atau 99,23%. Keluaran kegiatan adalah 58 Industri yang diawasi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.



6.2. Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitas dan Akses Industri

6.2.1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan , oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 576.344.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 532.369.310,- atau 92,37%. Keluaran kegiatan adalah terbinanya 125 (seratus dua puluh lima) IKM/Masyarakat di 7 kabupaten/kota melalui Pelatihan.



6.2.2. Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 669.109.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 585.721.580,- atau 87,54%. Keluaran kegiatan adalah terbinanya 610 (enam ratus sepuluh) IKM di 7 kabupaten/kota dengan rincian 500 (lima ratus) IKM untuk Penyuluhan Keamanan Pangan, 100 (seratus) IKM untuk Fasilitas Uji Nutrisi dan 10 (sepuluh) IKM untuk Fasilitas HKI.



6.2.3. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 739.785.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 711.829.081,- atau 96,22%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 500 Perajin IKM/ masyarakat dalam bidang kerajinan.



6.2.4. Kegiatan Rumah Pengembangan Produk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.124.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 188.563.800,- atau 99,18%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 400 ikm/masyarakat dalam desain kemasan dan peningkatan kemampuan kerajinan rajutan.

6.2.5. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.165.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 136.521.100,- atau 95,36%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan 210 (dua ratus sepuluh) pelaku industri di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



6.2.6. Kegiatan Seminar Halal Internasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.595.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 115.072.454,- atau 73,48%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Seminar Halal Internasional dengan peserta sebanyak 100 (seratus) orang.



6.2.7. Kegiatan Lomba Industri Kreatif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.633.500- realisasi anggaran sebesar Rp. 54.743.200,- atau 67,06%. Keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya 21(dua puluh satu) produk industri kreatif dari 7 Kabupaten/Kota.



6.2.8. Kegiatan Promosi/Gelar Produk Industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.389.264.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.292.815.845,- atau 93,06%. Keluaran kegiatan adalah 20 event Promosi /Gelar Produk Industri di Daerah, Nasional dan Internasional.



6.2.9. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan OVOP oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.141.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 52.441.000,- atau 95,10%. Keluaran kegiatan adalah terbinanya 3 (tiga) Produk OVOP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

7. PERDAGANGAN

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Perdagangan sebesar Rp. 2.282.875.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 2.047.403.519,00 atau 89,68 %.

Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut

7.1. Program Pengembangan Perdagangan

7.1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.192.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 282.206.600,- atau 94,01%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 30 Kali di 7 Kabupaten/Kota



7.1.2. Kegiatan Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.539.500,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 147.969.122,- atau 71,30%. Keluaran kegiatan adalah 22 Pelaku usaha Perdagangan Sumber Daya Mineral yang Diverifikasi dan Diawasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.1.3. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.165.770.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.102.121.827,- atau 94,54%. Keluaran kegiatan adalah Terbangunnya 2 Bangunan Gudang dan 2 Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah.



7.1.4. Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.260.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 58.353.000,- atau 72,70 %. Keluaran kegiatan adalah Terbinanya 40 Pelaku Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



7.1.5. Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.778.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 120.834.700,- atau 93,11 %. Keluaran kegiatan adalah 170 orang yang meningkat kemampuan dalam SDM Perdagangan dan Produk.



- 7.1.6. Kegiatan Partisipasi Pepper Day oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.526.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 294.802.870,- atau 85,07 %. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Partisipasi Pepper Day yang diikuti 200 orang di Kota Pangkalpinang.



- 7.1.7. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Sektor Perikanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.810.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 41.115.000,- atau 77,86 %. Keluaran kegiatan adalah Meningkatnya Kompetensi 30 Pelaku Usaha di Sektor Perikanan.



7.2. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

- 7.2.1. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.193.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 249.095.740,- atau 96,48 %. Keluaran kegiatan adalah 10 (sepuluh) Barang dan Jasa yang diawasi di 7 Kabupaten /Kota .

- 7.2.2. Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 640.072.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 621.867.658,- atau 97,16%. Keluaran kegiatan adalah 500 orang peserta yang paham dan sama persepsinya tentang hak dan kewajiban konsumen di Kota Pangkalpinang .
- 7.2.3. Kegiatan Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.588.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 84.333.690,- atau 99,70%. Keluaran kegiatan adalah 7 Kab/kota yang teridentifikasi permasalahannya tentang pembentukan BPSK. .
- 7.2.4. Kegiatan Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.571,000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 57.393.000,- atau 99,69%. Keluaran kegiatan adalah 400 Konsumen di 7 Kab/Kota yang tingkat kesadaran dan pemahamannya akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
- 7.3. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk**
- 7.3.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM oleh UPTD BSPM** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 593.259.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 490.692.038,- atau 82,71%. Keluaran kegiatan adalah 23 Jumlah Pegawai di UPT. Balai Sertifikasi Pengendalian Mutu.
- 7.3.2. Kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.580.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 66.654.410,- atau 89,37%. Keluaran kegiatan adalah 2 Ruang Lingkup Akreditasi.
- 7.3.3. Kegiatan Monitoring Mutu Pengujian UPTD BSPM** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.803.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.672.720,- atau 92,48%. Keluaran kegiatan adalah 2 Laporan Mutu Komoditi.



7.3.4. Kegiatan Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.870.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 47.138.400,- atau 96,46%. Keluaran kegiatan adalah Terlatihnya 8 Personil UPTD BSPM.



8. TRANSMIGRASI

Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja Langsung pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Urusan Pilihan Transmigrasi sebesar Rp. 97.920.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 93.836.400,00 atau 95,83 %. Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

8.1. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

8.1.1. Kegiatan Peningkatan Fungsi Pokja KTM Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.808.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.808.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Pokja Tk. Provinsi Tahun 2018.



➤ Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Rasionalisasi anggaran didalam kegiatan KTM menyebabkan tidak terlalisasi secara optimal dan anggota tim pokja sering tidak hadir dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga rapat diwakili oleh staf dari SKPD tim pokja, sehingga tidak dapat mengambil keputusan.

- Solusi

mengharapkan peran aktif dari anggota tim pokja KTM untuk bisa hadir dalam setiap rapat tim pokja KTM sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat.

8.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.114.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.82.030.400,- atau 89,05%. Keluaran kegiatan adalah meningkatnya pola sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi .



Gambar 4.318
Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penghubung dan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alokasi Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 392,237,130,046.65 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 145,155,697,640.65 sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp 247,081,432,406.00.

Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 344,787,575,820.62 atau 87,90 %, Target dan realisasi belanja dapat dilihat pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1.1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 1.684.032.030,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 1.550.212.493,- atau 92,05%. Keluaran kegiatan ini adalah Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 (duabelas) bulan.

1.1.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 321.372.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 310.828.025,- atau 96,72%. Keluaran kegiatan ini adalah Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 (duabelas) bulan.

1.1.3 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 123.540.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 102.029.600,- atau 82,59%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya.

1.1.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 380.813.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 347.935.150,- atau 91,37%. Keluaran kegiatan ini adalah Prosentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya.

1.1.5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 19.462.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 13.625.000,- atau 70,01%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85%.

1.1.6 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 44.523.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 37.173.050,- atau 83,49%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target di atas 90%.

1.2 Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur

1.2.1 Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 153.860.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 140.542.230,- atau 91,34%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1.3 Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

1.3.1 Kegiatan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 315.304.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 284.954.000,- atau 90,37%. Keluaran kegiatan ini adalah Prosentase pengembalian uang yang disetor ke Kas Daerah.



Gambar 4.319
Sidang Pembebanan
Tuntutan Ganti Rugi dan
Keputusan Gubernur

1.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 2.579.720.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 2.357.875.050,- atau 91,40%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja.

- 1.3.3 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 172.919.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 161.953.178,- atau 93,66%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- 1.3.4 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 506.624.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 503.761.184,- atau 99,43%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK.
- 1.3.5 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 161.226.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 140.510.000,- atau 87,15%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah.
- 1.3.6 Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 26.240.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 25.456.459,- atau 87,15%. Keluaran kegiatan ini adalah Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas pemeriksaan APIP dan BPK.
- 1.3.7 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 145.375.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 132.839.900,- atau 91,38%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti atau keuangan dan barang negara/daerah.
- 1.4 Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya**
- 1.4.1 Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran, sebesar Rp 193.780.000,- dan realisasi anggaran, sebesar Rp 153.329.110,- atau 79,13%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani dalam Sisatgas SPIP.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kebijakan Rasionalisasi anggaran berdampak pada beberapa kegiatan pokok *corebusiness* Perangkat Daerah agak terkendala, seperti :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
3. Kegiatan Konsultasi Audit.

Sehingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia APIP tidak bisa dilakukan secara optimal.

Solusi

Agar kiranya kegiatan prioritas yang menjadi *core* Perangkat Daerah tidak dilakukan Rasionalisasi secara signifikan.

1.5 Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan

1.5.1 Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan

ASN dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 684.440.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 571.804.759,00 atau 83,54% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan, Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN, Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian.



Gambar 4.320
Test Seleksi
Kompetensi Bidang
Seleksi CASN/ASN

1.5.2 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.829.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp 140.216.382,00 atau 95,50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun.

1.5.3 Kegiatan Promosi dan Mutasi ASN

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.274.141.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp

961.966.018,00 atau 75,50% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Keluaran

kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi, Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi.



Gambar 4.321
Pembacaan Sumpah Jabatan
Pelantikan Pejabat Eselon II

1.6. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN

1.6.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 317.146.680,00 realisasi anggaran sebesar Rp 254.575.610,00 atau 80,27% dengan realisasi fisik sebesar 99,33%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang di monev SKP-nya, Jumlah Dokumen.

1.6.2 Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin



Gambar 4.322
Pelaksanaan Pembinaan
Disiplin ASN

ASN dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 519.266.920,00 realisasi anggaran sebesar Rp 391.656.964,00 atau 75,42% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti

Sakit / Kejiwaan, Jumlah ASN yang diverifikasi/divalidasi, Jumlah Regulasi Kepegawaian, Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya, Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani.

1.6.3 Kegiatan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 452.876.650,00 realisasi anggaran sebesar Rp 426.956.506,00 atau 94,28% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Arsip Kepegawaian, Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, Bulan

dan Tahun Lahir, Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate, Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK, Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan (Artikel/terjemahan/konten), Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dibangun/dikembangkan, Jumlah ID Card .

1.6.4 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.254.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp 642.220.990,00 atau 97,27% dengan realisasi fisik sebesar 89,45%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang menerima KGB, Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG, Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi, Jumlah ASN yang dibina rohaninya, Jumlah ASN penerima Satya Lencana, Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran, Jumlah ASN berprestasi.

1.7 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

1.7.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.643.939.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.585.118.850,00 atau 96,42% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar.

1.7.2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.442.488.660,00 realisasi anggaran sebesar Rp 2.318.086.479,00 atau 94,91% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional, Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi.



Gambar 4.323
. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan II

1.7.3 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Formal dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.068.929.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp 1.958.782.677,00

atau 94,68% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing.

1.7.4 Kegiatan Peningkatan Mutu Kediklatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 191.432.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 186.962.146,00 atau 97,66% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen.



Gambar 4.324
Sertifikat Akreditasi
LAN RI

1.8 Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi ASN

1.8.1 Kegiatan Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur



Gambar 4.325
Pelaksanaan Assesment
Jabatan Pengawas

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 856.571.320,00 realisasi anggaran sebesar Rp 520.003.212,00 atau 60,71% dengan realisasi fisik sebesar 30,68%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scouting, Jumlah ASN yang

Mengikuti Assesment.

Kendala dan Solusi

➤ Kendala

1. Kedisiplinan pegawai belum maksimal
2. Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi
3. Perencanaan ASN belum optimal
4. Pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun belum optimal
5. Assesment, perencanaan pengembangan karir, pro,osi dan mutasi belum optimal
6. Pengembangan kompetensi SDM belum optimal

➤ Solusi

1. Implementasi program Tukin
2. Mengintegrasikan aplikasi kepegawaian
3. Rencana kebutuhan pegawai disusun sesuai dengan rencana strategis organisasi, analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan berbasis IT

4. Mengoptimalkan pemberdayaan KORPRI
5. Penyusunan pola karir
6. Percepatan pembentukan lembaga kediklatan yang mandiri, terpisah dengan urusan administrasi kepegawaian

1.9 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

1.9.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.912.650.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.393.500.396,- atau 94,18%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.9.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.649.207.958,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.097.151.780,- atau 88,13%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.9.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.720.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.352.489,- atau 80,80%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1.9.4 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.395.242,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.036.400,- atau 95,38%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan.

1.9.5 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.832.742,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.359.000,- atau 81,65%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1.9.6 Pengelolaan Humas pada Bakuda dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.697.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.754.000,- atau 91,58%. Keluaran kegiatan adalah terkelolanya Humas pada Bakuda.

1.9.7 Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.328.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

444.279.700,- atau 93,67%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Aparatur.

1.10 Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah

1.10.1 Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.799.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 269.054.969,- atau 47,30%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah.

1.10.2 Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.799.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 269.054.969,- atau 47,30%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah.

1.10.3 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 376.106.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 259.549.800,- atau 69,01%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG).



Gambar 4.326
Peningkatan Fungsi
Pelayanan Samsat Keliling
(PPRG)

1.10.4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.965.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.64.573.336,- atau 75,12%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Fungsi Pelayanan Samsat Corner.

1.10.5 Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.v59.803.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.v39.281.210,- atau 65,68%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.

1.10.6 Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 567.936.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 544.921.815,- atau 95,95%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan

Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang.

- 1.10.7 Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 532.959.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 497.060.943,- atau 93,26%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka.
- 1.10.8 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.686.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 579.397.066,- atau 94,88%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung.
- 1.10.9 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 390.753.264,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 369.603.221,- atau 94,59%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- 1.10.10 Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Wilayah Bangka Barat** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.916.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 421.809.555,- atau 79,45%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Kabupaten Wilayah Bangka Barat.
- 1.10.11 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.812.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 346.181.104,- atau 84,27%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan.
- 1.10.12 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.350.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.395.498.527,- atau 86,48%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur.

1.11 Program Penganggaran Pembangunan Daerah

1.11.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.626.982.000,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.521.500.454,- atau 93,52%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya Raperda dan Rapergub tentang APBD T.A. 2019.

1.11.2 Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.480.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.432.652,- atau 92,12%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

1.11.3 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (PPRG) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.587.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.612.785 atau 90,25%. Keluaran kegiatan adalah jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek.

1.11.4 Penyusunan Analisa Standar Belanja dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.769.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.218.600,- atau 91,40%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya keputusan tentang Analisa Standar Belanja.

1.11.5 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 445.596.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 320.610.800,- atau 71,95%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APB.



Gambar 4.327
Evaluasi Raperda Kab/Kota
tentang APBD

1.11.6 Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.715.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.182.690,- atau 68,89%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.11.7 Penyusunan Pedoman Tentang Penyusunan RKA-PD/PPKD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.615.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.199.795,- atau 93,44%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Pedoman tentang Penyusunan RKA-PD/PPKD.

1.11.8 Penyusunan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 513.985.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 304.380.797,- atau 59,22%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya KUA dan PPAS sesuai peraturan perundang-undangan.

1.12 Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan

1.12.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.286.076.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.264.434.417,- atau 92,44%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1.12.2 Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.499.075.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.429.965.048,- atau 86,15%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA.

1.12.3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.920.000- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.517.100,- atau 41,97%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018.

1.12.4 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.500.000- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.436.000,- atau 71,37%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.

1.12.5 Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.626.642,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.844.000,- atau 46,03%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.13 Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah

1.13.1 Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.898.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.734.200,- atau 80,87%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.13.2 Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.998.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.883.000,- atau 54,87%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola.

1.13.3 Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.960.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.058.875,- atau 92,04%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah.

1.13.4 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.118.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.839.200,- atau 94,77%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya dokumen Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) Tahun 2019.

1.13.5 Penghapusan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.108.166,- atau 99,04%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.13.6 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 119.180.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.979.300,- atau 78,02%. Keluaran kegiatan adalah Kartu inventaris barang (KIB), buku inventaris (BI) dan daftar mutasi barang tahun 2017 serta laporan barang semester pertama tahun 2018 .

1.13.7 Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.380.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.255.500,- atau 41,38%. Keluaran kegiatan adalah tersertifikasinya lahan milik pemerintah daerah.

1.13.8 Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.010.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.200.000,- atau 51,42%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

1.13.9 Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.592.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.275.600,- atau 65,94%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD.

1.13.10 Peningkatan Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah



Gambar 4.328
Peningkatan
Penilaian/Appraisal Barang
Milik Daerah/Asset Daerah

dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.592.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.197.027,- atau 83,38%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah.

1.13.11 Penyusunan Pedoman Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.840.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.945.400,- atau 50,02%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Pedoman Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 1.14 Program Peningkatan Tata Kelolah Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah**
- 1.14.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.167.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 170.603.505,- atau 93,65%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah.
- 1.14.2 Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.400.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.908.729,- atau 82,07%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Rapat terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- 1.14.3 Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.943.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.102.250,- atau 79,89%. Keluaran kegiatan adalah Tersusunnya Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah.
- 1.14.4 Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.302.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.267.150,- atau 88,29%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya pengawasan peningkatan pendapatan daerah.
- 1.15 Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan**
- 1.15.1 Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.074.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.911.900,- atau 73,53%. Keluaran kegiatan adalah jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG).
- 1.15.2 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.720.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.902.370,- atau 72,74%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- 1.15.3 Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 83.907.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.167.840,- atau 74,09%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1. Dalam kegiatan-kegiatan untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dengan telah dipergunakannya sistem aplikasi SIMDA, masih terdapat kendala-kendala dalam menjalankan aplikasi tersebut.
2. Adanya perubahan dalam penganggaran tahun berjalan, sehingga berdampak pada capaian aktifitas pelaksanaan kegiatan yang harus disesuaikan kembali.
3. Dalam kegiatan-kegiatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah ini yakni kurangnya SDM dan kerjasama antar OPD dalam mengelola barang/asset, terutama yang berkaitan dengan asset tetap.
4. Dalam kegiatan-kegiatan Program Penerimaan Pajak Daerah ini untuk memaksimalkan penerimaan daerah ada kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan kurangnya gairah masyarakat dalam membayar pajak.

b. Solusi

1. Dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dengan menggunakan sistem keuangan SIMDA, maka diperlukan kerjasama dari semua stakeholder yang terlibat agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Mengurangi/meminimalisir perencanaan kegiatan yang sekiranya tidak akan terserap maksimal.
3. Adapun solusi yang harus diambil yaitu dengan menambah SDM serta perlunya koordinasi dan kerja sama antar SKPD.
4. Peningkatkan terhadap sarana dan prasarana yang dapat menunjang aparatur pelaksana di masing-masing UPTB Bakuda Prov. Kep. Bangka Belitung dan sering nya dilakukan sosialisasi terhadap pajak daerah secara terus menerus kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat sadar pajak.

1.16 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1.16.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.800.021.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.530.980.692,- atau 90.39%. Keluaran kegiatan ini adalah 100 (Orang) Pegawai ASN.

1.16.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.842.121.650,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.567.256.500,- atau 85,08%. Keluaran kegiatan ini adalah 13 (Paket) Sarana dan Prasarana.

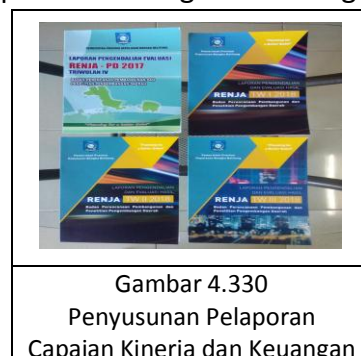
1.16.3 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.480.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 115.167.800,- atau 99,73%. Keluaran kegiatan ini adalah 100 (Orang) Seragam ASN.

1.16.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 314.336.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp 240.521.883,00,- atau 76,52%. Keluaran kegiatan ini adalah 60 (Orang) mengikuti Pendidikan.

1.16.5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.740.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 99.698.942,00,- atau 83,26%. Keluaran kegiatan ini adalah 2 (Dokumen) Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah.



1.16.6 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 68.666.992,- atau 69,19%. Keluaran kegiatan ini adalah 7 (Laporan) Capaian Kinerja dan Keuangan.



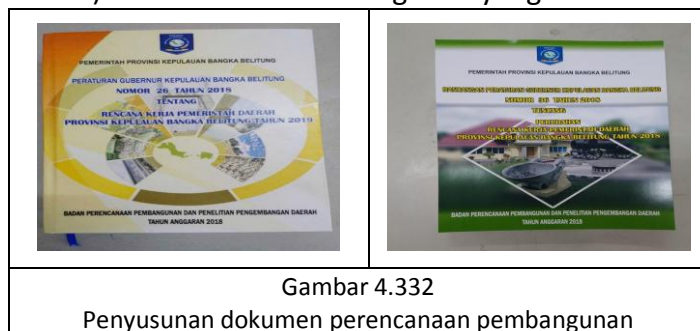
1.16.7 Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan oleh Badan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 638.847.609,- realisasi anggaran sebesar Rp 587.883.410,- atau 92,02%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 (Satu) Rakornas.



Gambar 4.331
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Bappeda se-Indonesia

1.17 Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah

1.17.1 Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 844.649.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 821.562.024,- atau 97.27%. Keluaran kegiatan ini adalah 2 (Dokumen) Perencanaan Pembangunan yang Tersusun.



Gambar 4.332
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

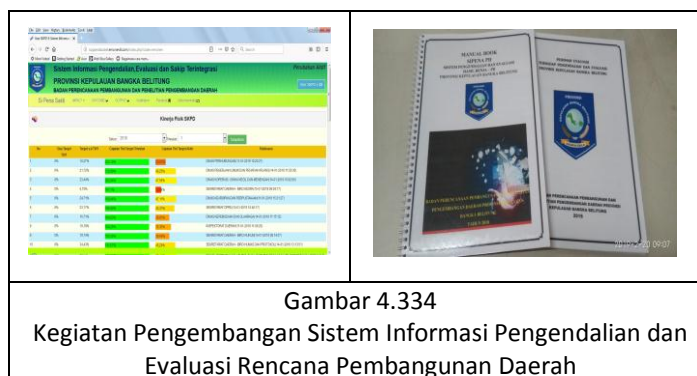
1.17.2 Kegiatan Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 160.993.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 132.750.060,- atau 82.46%. Keluaran kegiatan ini adalah 2 (aplikasi) bidang perencanaan yaitu aplikasi e-planning dan SIMCAN.



Gambar 4.333
Aplikasi e-planning dan SIMCAN Bidang Perencanaan

1.17.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 346.361.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 216.287.265,- atau 62,45%. Keluaran kegiatan ini adalah 15 (laporan) Pengendalian dan Evaluasi.

1.17.4 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.310.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 68.382.344,- atau 63,72%. Keluaran kegiatan ini 2 (instrumen) pengendalian dan evaluasi dalam sistem.



Gambar 4.334
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

1.17.5 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 324.195.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 236.607.163,- atau 72,98%. Keluaran kegiatan ini 500 (elemen) Data Perencanaan.



1.17.6 Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 829.503.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 302.950.097,- atau 36,52%. Keluaran kegiatan ini 6 (laporan) Rumusan Kebijakan .

1.18 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

1.18.1 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp274.342.000,- realisasi anggaran sebesar Rp224.159.954,- atau 81,71%. Keluaran kegiatan ini adalah 4 (rekomendasi) hasil koordinasi perencanaan.



1.18.2 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 138.714.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 116.892.433,- atau 84,27%. Keluaran kegiatan ini adalah 4 (laporan) koordinasi perencanaan.



1.19 Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1.19.1 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.570.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 96.162.207,- atau 81,79%. Keluaran kegiatan ini 4 (laporan) Koordinasi perencanaan.

1.19.2 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 189.879.000,- realisasi anggaran sebesar Rp170.396.888,- atau 89,74%. Keluaran kegiatan ini 4 (laporan) Koordinasi perencanaan.

1.20 Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

1.20.1 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 178.145.750,- realisasi anggaran sebesar Rp 152.175.335,- atau 85.42%. Keluaran kegiatan ini adalah 4 (laporan) koordinasi perencanaan mitra PD.



1.20.2 Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.940.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 86.714.167,- atau 77.46%. Keluaran kegiatan ini adalah 3 (laporan) koordinasi perencanaan mitra PD.

1.20.3 Kegiatan Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 167.222.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 130.129.516,- atau 77.82%. Keluaran kegiatan ini adalah 1 (dokumen) perencanaan bidang social budaya dan pemerintahan.

1.21 Program Penelitian dan Pengembangan

1.21.1 Kegiatan Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 266.498.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 197.399.900,- atau 74.07%. Keluaran kegiatan ini 3 (penelitian) prioritas pembangunan daerah.



Gambar 4.339

Kegiatan Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah

1.21.2 Kegiatan Penguatan Jaringan Kelitbangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 201.164.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 167.147.800,- atau 83.09%. Keluaran kegiatan ini adalah tersusunya 3 (laporan) penunjang penelitian yang dilaksanakan.



Gambar 4.340

Kegiatan Penguatan Jaringan Kelitbangan

1.21.3 Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 182.844.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 167.581.438,- atau 91.65%. Keluaran kegiatan ini 1 (dokumen) pengembangan inovasi daerah.

1.21.4 Kegiatan Kajian Science Technology Park oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 223.932.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 195.083.677,- atau 87.12%. Keluaran kegiatan ini 1 (dokumen) rumusan pengembangan STP yang disusun .

1.21.5 Kegiatan Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 319.565.000,- realisasi anggaran sebesar Rp126.432.394,- atau 39.56%. Keluaran kegiatan ini 3 (rekomen-dasi) kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh Dewan Riset Daerah.



Gambar 4.341

Kegiatan Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

1. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan.
3. Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan kinerja.
4. Belum optimalnya kualitas SDM Bappeda.

5. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (*feed back*) untuk perencanaan selanjutnya.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan forum-forum perencanaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif.
7. Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan dominasi pejabat struktural lebih besar daripada pejabat fungsional tertentu (Perencana, Peneliti, Statistisi) dalam proses perencanaan

Solusi

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan. Antara lain melalui penguatan Forum Data Provinsi dan pengembangan aplikasi Babel Satu Data.
2. Mengembangkan aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan aplikasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi perencanaan.
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjuruan
5. Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dengan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta review terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
6. Peningkatan kualitas forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Focus Group Discussion dan Konsultasi publik yang menjadi sarana penyelerasan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan
7. Memberi peran dan akses yang lebih kepada para pejabat fungsional tertentu untuk terlibat dalam berbagai kesempatan yang akan memperkaya wawasan dan pengalaman yang diperlukan dalam perencanaan.

1.22 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

1.22.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.042.740.497,- realisasi anggaran sebesar Rp 8.314.212.770,- atau 91,94%.

1.22.2 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 738.420.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 713.370.000,- atau 96,61%.

1.22.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 355.780.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 330.009.169,- atau 92,76%.

1.22.4 Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.450.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.14.842.800,- atau 69,20%.

1.22.5 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.16.350.000,- atau 88,86%.

1.23 Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan



1.23.1 Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 351.870.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 313.192.704,- atau 89,01%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna selama tahun 2018.

	
<p>Gambar 4.342 Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA. 2017</p>	<p>Gambar 4.343 Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penanggulangan HIV, Aids dan Penyakit IMS</p>

1.23.2 Kegiatan Pembahasan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 230.252.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 190.316.904,- atau 82,66%. Keluaran kegiatan

ini adalah dihasilkannya Perdatentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.23.3 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Lainnya oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.232.806.250,- realisasi anggaran sebesar Rp 11.414.823.530,- atau 66,24%. Keluaran kegiatan ini adalah disahkannya 14 (empatbelas) Raperda menjadi Perda untuk tahun 2018.

	
<p>Gambar 4.344 Pembahasan Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual</p>	<p>Gambar 4.345 Pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup dan Raperda Pengelolaan IT</p>

1.23.4 Kegiatan Reses oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.889.259.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 3.483.119.800,- atau 71,24%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat dari setiap daerah pemilihan (dapil) sebanyak 2 kali masa reses di 6 (enam) Dapil.

	
<p>Gambar 4.346 Kegiatan Reses I Dapil VI Kabupaten Bangka</p>	<p>Gambar 4.347 Kegiatan Reses II Dapil III Kabupaten Bangka Selatan</p>

Kendala :

Pelaksanaan kegiatan reses di agendakan dan dianggarkan sebanyak 3 kali dalam tahun 2018 namun pelaksanaannya

tergantung pada penjadwalan kegiatan DPRD. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Prov. Kep. Babel pada tahun 2018 sebanyak 2 kali pada tanggal 22 s.d 26 Januari 2018 dan 07 s.d 13 November 2018.

1.23.5 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 824.304.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 617.164.101,- atau 74,87%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD.

	
<p>Gambar 4.348 Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Santika TMII</p>	<p>Gambar 4.349 Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Ambhara Jakarta Selatan</p>

1.23.6 Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 380.258.000,- realisasi anggaran sebesar Rp186.633.700,- atau 49,08%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi asosiasi Pimpinan DPRD DPRD Provinsi Seluruh Indonesia selama tahun 2018 yang dipimpin oleh DPRD Provinsi Banten.

	
<p>Gambar 4.350 Kegiatan ADPSI yang dihadiri DPRD se-Indonesia di Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<p>Gambar 4.351 Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri ADPSI yang diselenggarakan di Jakarta</p>

Kendala :

Penyerapan anggaran Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia rendah dikarenakan mengikuti jadwal pelaksanaan ADPSI yang ditetapkan oleh Sekretariat ADPSI.

- 1.23.7 Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 728.970.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 576.777.100,- atau 79,12%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga ahli dan kegiatan akademik untuk 7 (tujuh) Fraksi, serta terhimpunnya laporan Tenaga Ahli Fraksi semester I dan II Tahun 2018.



Gambar 4.352
Rapat Intern Fraksi Madani
dengan Tenaga Ahli terkait
Laporan Fraksi Madani

- 1.23.8 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.448.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 800.000,- atau 0,54%. Keluaran kegiatan ini adalah penyelesaian masalah hukum dan administrasi kesekretariatan pada Anggota DPRD selama tahun 2018.

Kendala :

Penyerapan anggaran Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan rendah dikarenakan tidak adanya permasalahan hukum maupun administrasi kesekretariatan yang terjadi pada Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung selama tahun 2018.

- 1.23.9 Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi** oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.822.470.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.41.901.132.810,- atau 85,82%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerjakomisi dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD selama 12 bulan.

	
<p>Gambar 4.353 KunkeR komisi III DPRD Prov. Kep. Babel ke BAPETEN di Jakarta</p>	<p>Gambar 4.354 KunkeR Komisi II DPRD DPRD Prov. Kep. Babel ke PT. Bank Sumsel Babel di Palembang</p>

1.23.10 Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.072.320.000,-,- realisasi anggaran sebesar Rp 836.981.017,- atau 78,05%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja Badan Musyawarah sebanyak 6 kali dalam tahun 2018, dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD.

1.23.11 Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Anggaran oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.461.184.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.375.754.634,- atau 94,16%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja Badan Anggaran sebanyak 6 kali dalam tahun 2018, dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD.

	
<p>Gambar 4.355 KunkeR Badan Anggaran DPRD Prov. Kep. Babel ke Kemendagri dan Kemenkeu di Jakarta</p>	<p>Gambar 4.356 KunkeR Badan Anggaran DPRD Prov. Kep. Babel ke Kementerian KKP di Jakarta</p>

1.23.12 Kegiatan Kunjungan Kerja Badan legislasi/pembentukan perda oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.351.924.560,- realisasi anggaran sebesar Rp. 759.719.416,- atau 56,20%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja Badan legislasi/pembentukan perda sebanyak 6 kali dalam tahun 2018, dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD.

	
<p>Gambar 4.357 Kunker Badan Legislasi/Pembentukan Perda ke Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad dan Ke Disnakertrans Prov. Jabar</p>	<p>Gambar 4.358 Kunker Badan Legislasi/Pembentukan Perda ke Museum Geologi Provinsi Jawa Barat</p>

1.23.13 Kegiatan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 552.618.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 419.909.030,- atau 75,99%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja Badan kehormatan sebanyak 6 kali dalam tahun 2018,dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi DPRD.

	
<p>Gambar 4.359 Kunker Badan Badan Kehormatan ke Mahkamah Kehormatan DPR RI</p>	<p>Gambar 4.360 Kunker Badan Legislasi/Pembentukan Perda ke Kementerian Dalam Negeri</p>

1.23.14 Kegiatan Fit and profer Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.488.203,- realisasi anggaran sebesar Rp 38.488.203,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Fit and profer Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.



1.24 Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan

1.24.1 Kegiatan Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.202.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.975.235.490,- atau 89,68%. Keluaran kegiatan ini adalah publikasi kelembagaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018.

1.24.2 Kegiatan Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 459.777.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 459.777.400,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia tahun 2018.

1.24.3 Peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.380.886.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 3.984.766.950,- atau 90,96%.



1.25 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1.25.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Perkantoran dengan indikator Jumlah Pegawai Badan Penghubung yang terlayani, secara fisik terealisasi 63 pegawai dari target 66 pegawai dan realisasi keuangan Rp 4.032.726.027,00 atau 81,69% dari Rp 4.936.774.800,00.

1.25.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor, secara fisik terealisasi 100% atau terealisasi sebesar 100%. Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara, secara fisik terealisasi 90%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.439.219.000,00 atau 79,73% dari target Rp. 550.909.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan.

1.25.2 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kegiatan Jumlah Pegawai Badan Penghubung yang meningkat disiplinnya, secara fisik terealisasi 61 pegawai dari target sebesar 66 pegawai atau sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 62.123.930,00 atau 85,30% dari target Rp 72.830.000,00. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya setelan PDH coklat, baju batik tradisional bercorak Bangka Belitung, baju stelan warna putih untuk ASN dan baju stelan untuk tenaga honorer serta 5 buah pas kartu bandara.

1.25.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kegiatan Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya, secara fisik terealisasi 26 pegawai dari target sebesar 28 pegawai atau sebesar 92,86%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 196.798.279,00 atau 73,51% dari target Rp. 267.710.000,00. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur, berupa kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

1.25.4 Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, secara fisik terealisasi 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen atau sebesar 100%. Pada indikator kegiatan jumlah dokumen perencanaan terealisasi sebesar 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen atau sebesar 100% Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.360.500,00 atau 75,33% dari target Rp 23.045.000,00.

1.25.5 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan jumlah laporan perencanaan terealisasi sebesar 5 dokumen dari target sebesar 5 dokumen atau sebesar 100% Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 30.079.500,00 atau 78,69% dari target Rp 38.225.000,00.

1.26 Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi

1.26.1 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah dengan indikator kegiatan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah terealisasi sebesar 80 kali dari target 20 kali atau sebesar 400%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 599.913.700,00 atau 73,04% dari target Rp 821.376.000,00.

1.26.2 Kegiatan Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan dengan indikator Terlaksananya kegiatan Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan terealisasi sebesar 1 kali dari target 1 kali atau sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 121.320.140,00 atau 100% dari target Rp 121.320.140,00.

1.26.3 Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan indikator Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 5 kali dari target 8 kali atau sebesar 62,5%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 134.866.183,00 atau 65,30% dari target Rp. 206.524.000,00.

1.26.4 Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat



Gambar 4.364
Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat dengan indikator Terlaksananya kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat terealisasi sebesar 2 acara dari target 3 acara atau sebesar 66,67%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 601.980.200,00 atau 51,79% dari target Rp. 1.162.277.000,00.

1.26.5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan



Gambar 4.365
Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan dengan indikator Terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan terealisasi sebesar 2 paket dari target 2 paket atau sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 40.810.000,00 atau 95,05% dari target Rp 42.935.000,00.

1.26.6 Kegiatan Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan kegiatan Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar 1 paket dari target 1 paket atau sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 201.050.000,00 atau 96,13% dari target Rp. 209.141.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah terpublikasinya tayangan jadwal kalender promosi wisata promosi kepulauan Bangka Belitung.

1.26.7 Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dengan indikator Terlaksananya kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya

Daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 414.385.909,00 atau 63,09% dari target Rp 656.841.000,00. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan event seni budaya dan kegiatan penyusunan informasi dan promosi.



Gambar 4.366
Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

1.26.8 Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai

Pelaksanaan kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai dengan indikator terlaksananya kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai terealisasi sebesar 1 kali dari target 1 kali atau sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 266.837.000,00 atau 100% dari target Rp 266.837.000,00. Keluaran hasil dari kegiatan ini adalah jumlah kegiatan expo dan forum serumpun sebalai.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Perkantoran dengan indikator Jumlah Pegawai Badan Penghubung yang terlayani, secara khusus tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya terdapat kekurangan anggaran pada beberapa rincian belanja seperti belanja bahan bakar minyak, perjalanan dinas, makan dan minum tamu; dan ada juga kelebihan belanja seperti belanja premi asuransi barang milik daerah, dll sehingga perlu dilakukan pergeseran dan penambahan pagu tanpa mengubah pagu total belanja APBD Badan Penghubung.
2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur secara umum terlaksana dengan baik meskipun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain terkait pembelian AC, pagu anggaran untuk pembelian standing AC yang terdapat dalam DPA terlalu kecil, sehingga kurang untuk dibelanjakan, pada saat pengajuan Perubahan APBD lupa untuk dirubah.
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, hanya terdapat beberapa jadwal bimbingan teknis yang akan diikuti pada akhir tahun akan tetapi pagu anggarannya telah habis
4. Pembelian Lahan untuk Asrama Mahasiswa Bangka Belitung.

Pelaksanaan kegiatan ini juga tidak mengalami kendala, namun pagu kegiatan ini dirasionalisasi, karena untuk menutupi defisit provinsi.

5. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Kendala dalam kegiatan ini adalah kurangnya pendampingan kepada pemimpin atau wakil pemimpin daerah pada pemerintah daerah lainnya.

1.27 Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan

1.27.1 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.400.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 107.444.000,- atau 99,12% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya proses sertifikat tanah sebanyak 30 bidang. Dari target sebanyak 30 bidang yang disertifikatkan dapat dilakukan pengukuran sebanyak 31 bidang tanah dan yang sudah terselesaikan sebanyak 23 bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan sisanya sebanyak 8 bidang masih berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka sebanyak 2 bidang dan Bangka Tengah sebanyak 6 bidang.

1.27.2. Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.213.700,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 38.275.950,- atau 97,61% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya proses penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota di 5 Kabupaten/Kota. Fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten/kota tahun 2018 fokus pada penyelesaian sengketa batas daerah antara Kota Pangkalpinang-Kab. Bangka, Kota Pangkalpinang-Kab. Batang (sudah ada kesepakatan dan menunggu terbitnya Permendagri) kemudian pada akhir tahun 2018 telah terbit Permendagri No. 32 tahun 2018 yang merupakan hasil revisi permendagri 16 tahun 2008 tentang batas daerah Kab. Belitung – Belitung Timur.



Gambar 4.367
Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota

1.27.3. Inventarisasi Pendataan, Penamaan, dan Pembakuan Unsur Rupabumi (Unsur Buatan) oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.341.100,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 96.380.086,- atau 96,05% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya inventarisasi dan penamaan pulau-pulau di 6 Kabupaten (pada akhir tahun 2018 tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menginventarisir jumlah pulau kecil di Provinsi Kepulauan berdasarkan hasil pemutakhiran data secara berjenjang sesuai aspek administrasi kewilayahan sejumlah 555 Pulau terdiri atas 468 data verifikasi tahun 2008 dan 87 pulau hasil verifikasi tahun 2017).



1.27.4 Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.587.175,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 36.596.475,- atau 97,36% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya inventarisasi dan pemeliharaan pilar batas daerah di 6 (enam) segmen batas antar daerah di Kabupaten/Kota sebanyak 6 segmen batas daerah. Secara keuangan anggaran tersebut terserap cukup optimal, akan tetapi secara fisik belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak pilar batas daerah yang belum terinventarisir dengan baik.



1.27.5. Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.762,475;. Dikarenakan terbitnya permendagri 141 tahun 2017 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan

karena Permendagri ini mengatur pembagian urusan kewenangan teknis terkait pedoman penegasan batas daerah khusus pilar batas kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi hanya memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dan pekerjaan fisiknya dilakukan oleh Kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi tersebut anggaran kegiatan ini kemudian dirasionalisasi pada ABT 2018.

- 1.27.6. Pengadaan Lahan** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.940.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan berkenaan dengan belum adanya permintaan tertulis dari dinas/instansi yang membutuhkan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan. Dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penilaian tanah termasuk dalam proses tahapan pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan lokasi tanah berada bukan sebagai bagian yang terpisahkan.

1.28 Program Pengembangan Otonomi Daerah

- 1.28.1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.384.945,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 140.541.200,- atau 96,67% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini tersedianya LKPJ Akhir Tahun Anggaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 dokumen.



Gambar 4.370
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

- 1.28.2. Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.614.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 214.756.170,- atau 94,77% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersusunnya LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tersosialisasinya IKK LPPD sebanyak 1 Dokumen dan Tersosialisasinya Tata Cara Penyusunan IKK LPPD sebanyak 50 orang peserta yang berasal dari Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Januar 2018 di Hotel Green Tropical Kabupaten Belitung.



Gambar 4.371
Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah

1.28.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276.971.408,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 270.029.102,- atau 97,49% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.28.4. Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.257.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 139.929.889,- atau 97,68% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 3 Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.



Gambar 4.372
Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.28.5. Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penangkatan KDH dan WKDH oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.545.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 160.113.700,- atau 99,73% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penangkatan KDH dan WKDH di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung



1.28.6. Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov.Kep. Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.545.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 160.113.700,- atau 99,73% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlayannya perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov.Kep. Bangka Belitung sebanyak 6 surat izin.

1.28.7. Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.015.704,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 115.537.239,- atau 99,59% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rapat optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah dengan Target 40 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Bangka City Pangkalpinang pada tanggal 13 Mei 2018 dengan peserta sebanyak 40 orang dari Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.



1.28.8. Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.165.704,- Realisasi anggaran sebesar Rp.

99.056.702,- atau 97,92% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPK sebanyak 1 kali. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Cordela Pangkalpinang tanggal pada tanggal 14 November 2018 dengan peserta sebanyak 40 orang dari Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 4.375
Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPK

- 1.28.9. Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.310.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 101.583.356,- atau 99,92% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Workshop Permasalahan dan Tindaklanjutan Penataan Otonomi Daerah dengan peserta 50 orang yang dilaksanakan di Hotel Santika Pangkalpinang pada tanggal 26 April 2018 dengan peserta 50 orang dari Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 4.376
Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

- 1.29 Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah**
1.29.1 Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.249.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 108.146.940,- atau 99,91% dengan realisasi fisik 100%.. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pertemuan Gubernur dengan Bupati dan

Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2 pertemuan.



1.29.2. Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.320.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 115.197.110,- atau 99,03% dengan realisasi fisik 100%.. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Iuran Keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam APPSI dan Jumlah Keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam Rapat Kerja APPSI sebanyak 1 Kali Iuran dan 4 Kali Rakor.



1.29.3. Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Iuran Keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam BKS dan Jumlah Keikutsertaan Pemerintah Provinsi dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan dengan 1 Kali Iuran dan 4 Kali Pertemuan BKS.

1.29.4. Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 197.400.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 196.445.495,- atau 99,52% dengan

realisasi fisik 100%.. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pembahasan Dokumen Kerjasama dengan target 8 Rekomendasi Kerjasama/Perjanjian.

1.29.5. Kegiatan Inventarisasi Potensi Kerjasama oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.150.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 90.986.722,- atau 97,68% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Database Kerjasama dengan target 1 database.

1.29.6. Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 888.700.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 809.805.068,- atau 91,12% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pertemuan Gubernur dengan Instansi Vertikal dengan target 2 kali pertemuan.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan

1. Mengatur kesesuaian jadwal pengukuran dengan petugas ukur dari masing-masing kantor Pertanahan,
2. Masalah batas lokasi bidang tanah yang diukur terkait patok batas ada yang hilang.
3. Lamanya proses penandatanganan blanko ukur dengan pihak-pihak yang berbatasan antara lain dikarenakan pemilik tanah tidak berada di tempat.
4. Kabupaten/Kota belum menyepakati dan cenderung mempertahankan kepentingan masing-masing terkait batas wilayah administrasinya terutama yang belum ada penetapan Permendagri batas daerahnya;
5. Permendagri batas daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan beberapa kabupaten/kota cenderung ingin menggugat/menghendaki dilakukan revisi permendagri batas daerahnya;
6. Keterbatasan sumber daya peralatan dan perlengkapan, aparatur teknis serta minimnya dukungan penganggaran kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, batas daerah dan pembakuan nama unsur rupabumi;
7. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan dasar dari beberapa OPD masih rendah sehingga mempengaruhi hasil EKPPD terhadap LPPD tahun 2018.
8. Masih rendahnya kualitas pengelolaan data dan informasi pendukung kinerja dalam LPPD, yang mencakup kelengkapan dokumentasi, updating dan keterkaitan serta konsistensi data antar OPD.

9. APBD yang kurang memadai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pendukung kinerja LPPD melalui sistem perencanaan dan pengendalian terpadu.
10. Belum dilakukan serah terima P3D Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) Muara Batu Rusa Kota Pangkalpinang, dikarenakan belum adanya kesepakatan dan persamaan persepsi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait asset lahan PPI Muara Batu Rusa yang sebagian telah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (swasta) oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak memasukkan asset yang dikerjasamakan tersebut dalam rencana serah terima PPI Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Jeti/dermaga di luar PPI yang telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak yang terlantar karena keterbatasan anggaran dan SDM Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu perlu kejelasan terkait kewenangan jeti /dermaga tersebut. Pemerintah Kabupaten mengharapkan agar jeti/dermaga diserahkan kembali sebagai sentra nelayan.

Solusi

1. Berupaya memantapkan jadwal pengukuran yang tepat waktu.
2. Memastikan terpasangnya patok tanda batas pada lokasi bidang tanah sebelum dilakukan pengukuran.
3. Berupaya menghadirkan pemilik tanah berbatasan pada saat dilakukan pengukuran dengan harapan dapat langsung menandatangani blanko ukur.
4. Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya-upaya fasilitatif dengan pendekatan yang bersifat partisipatif dan akomodatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mengoptimalkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para stakeholder terkait agar tercipta suatu pemahaman persepsi dan meminimalisir sifat ego sektoral daerah dalam mengurus batas daerah dan pembakuan nama unsur rupabumi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal administrasi kewilayahan;
6. Meningkatkan kompetensi aparatur teknis yang mengurus administrasi kewilayahan melalui pengiriman peserta diklat ke luar daerah (diklat Sistem informasi Geografis di Badan Informasi Geospasial Bogor) dan mengusulkan agar program kegiatan tersebut dapat berlanjut di tahun mendatang;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait dalam hal penguatan dukungan peralatan dan perlengkapan teknis operasional, dukungan dalam hal pembiayaan peningkatan

kompetensi aparatur teknis kewilayahan dan pengusulan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tertib administrasi kewilayahan agar dapat diterima oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

8. Perlu ditingkatkan lagi capaian kinerja yang masih rendah, agar dapat mengejar ketertinggalan dari Provinsi lain, Capaian kinerja yang sudah baik agar dipertahankan dan didorong hingga capaian kinerja maksimal.
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pendukung kinerja dalam LPPD, yang mencakup kelengkapan dokumentasi, updating dan keterkaitan serta konsistensi data antar OPD.
10. Perlu dukungan APBD yang memadai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pendukung kinerja LPPD melalui sistem perencanaan dan pengendalian terpadu.
11. Perlunya saling koordinasi dan kajian secara hukum antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, sehingga adanya persamaan persepsi dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai asset apa saja yang akan diserahterimakan dan tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota.
12. Perlunya kajian dan petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian terkait, mengenai kewenangan Jeti/ dermaga di luar PPI, karena wilayah antara 0 s.d. 12 mil adalah kewenangan pemerintah provinsi.

1.30 Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.30.1 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 564.660.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.255.384,- atau 93,20%.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perumusan dan penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebanyak 66 Peraturan Gubernur dan 1.451 Keputusan Gubernur dari target sebanyak 70 Peraturan Gubernur dan 900 Keputusan Gubernur.

1.30.2 Kegiatan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.753.457,- atau 99,72% Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perumusan dan penyusunan naskah hukum lainnya sebanyak 331 Naskah Hukum Lainnya dari target sebanyak 100 Naskah Hukum Lainnya.

1.30.3 Kegiatan Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.686.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.223.470.429,- atau 84,11%.

Keluaran kegiatan adalah terlaksananya evaluasi raperda pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten/kota sebanyak 9 Raperda dari target sebanyak 10 Produk Hukum Daerah.



Gambar 4.379
Kegiatan Evaluasi Raperda
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota

1.30.4 Kegiatan Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah

dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.913.243.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.896.008.774,- atau 98,11%. Keluaran kegiatan adalah terselenggaranya perumusan dan penyusunan propemperda dan rancangan peraturan daerah sebanyak 1 Usulan Propemperda dan 11 Rancangan Peraturan Daerah dari target sebanyak 1 Usulan Propemperda dan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.

1.31 Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah

1.31.1 Kegiatan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi

dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155.570.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.126.469.039,- atau 81,29%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelesaian perselisihan/ sengketa perdata antara pemda dengan orang/masyarakat secara litigasi atau non litigasi sebanyak 2 kasus sengketa yang melalui tahap proses penyelesaian dari target sebanyak 1 kasus sengketa yang melalui tahap proses penyelesaian.

1.31.2 Kegiatan Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda

dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.185.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.125.137.088,- atau 60,40%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyelesaian sengketa TUN akibat pelaksanaan produk hukum dan kebijakan Pemda yang telah melalui tahapan proses penyelesaian sebanyak 2 kasus, dari target sebanyak 1 kasus yang telah melalui tahapan proses penyelesaian.

1.31.3 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh



Gambar 4.380
Kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa akibat Pelaksanaan
Produk Hukum Daerah dan
Kebijakan Pemda di Kab/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.865.626,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.266.600,- atau 90,84%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya laporan pembinaan pelaksanaan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan pemda di kab/kota provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum

daerah dan kebijakan pemda di kab/kota provinsi kepulauan bangka Belitung

1.31.4 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Ranham di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.444.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.621.400,- atau 91,72%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan ranham di kab/kota provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan ranham di kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.31.5 Kegiatan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.966.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.676.700,- atau 72,59%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum provinsi kepulauan bangka Belitung sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dari target 40 (empat puluh) orang.

1.31.6 Kegiatan Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi alokasi anggaran sebesar

Rp.238.633.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.197.966.900,- atau 82,96%. Keluaran kegiatan adalah tercapainya jumlah orang yang diberikan penyuluhan hukum sebanyak 200 orang dari target sebanyak 200 orang.

1.32 Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum

1.32.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 382.138.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.364.166.560,- atau 95,30%. Keluaran kegiatan adalah publikasi konten melalui website sebanyak 107 (seratus tujuh) Peraturan Perundang-Undangan dan 50 (lima puluh) Artikel dari target 75 (tujuh puluh lima) Peraturan Perundang-Undangan dan 50 (lima puluh) Artikel.

1.32.2 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.001.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.978.890,- atau 99,94%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengadaan penyediaan buku bagi perpustakaan hukum sebanyak 80 buku dari target sebanyak 50 buku.

1.32.3 Kegiatan Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 - 2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017 dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 69.125.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.179.113,- atau 97,18%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya katalog perda dan pergub tahun 2001 – 2017 dan kompilasi perda dan pergub tahun 2017 sebanyak 120 buku dari target sebanyak 120 buku.

1.32.4 Kegiatan Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.470.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.120.967.425,-) atau 88%. Keluaran kegiatan adalah tersusunnya rekomendasi pembangunan di bidang hukum sebanyak 1 (satu) rekomendasi dari target sebanyak 1 (satu) rekomendasi.

**Permasalahan dan solusi
Permasalahan**

1. Lambannya hasil evaluasi Raperda tentang Pajak daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kabupaten/Kota dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menghambat proses evaluasi Raperda Kabupaten/Kota.
2. Terhambatnya proses pengharmonisasian Produk Hukum Daerah dalam hal ini Perda dan Pergub dikarenakan Perangkat Daerah pemrakarsa tidak menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan proses penyusunan Raperda dan Rapergub sehingga rancangan produk hukum daerah yang masuk ke Biro Hukum masih perlu untuk dilakukan penyusunan ulang.
3. Kurangnya tenaga legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.
4. Kurangnya pemahaman beberapa Perangkat Daerah akan proses legal drafting.
5. Masih kurangnya kuota Pejabat Fungsional tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk mengikuti Diklat Legal Drafting di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
6. Kurangnya SDM yang berkompeten di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani atau menyelesaikan sengketa pemerintah daerah baik sengketa Tata Usaha Negara maupun sengketa perdata.
7. Lemahnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan hasil penyelesaian sengketa Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih dalam proses maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga terhambatnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan laporan dan koordinasi kepada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Kurangnya tenaga arsiparis, pengadministrasi umum, analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan jabatan fungsional umum lainnya dalam rangka melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
9. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
10. Kurangnya kuota diklat jabatan untuk kompetensi tertentu dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas di Biro Hukum.

Solusi

1. Biro Hukum selalu proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh hasil evaluasi Raperda sehingga tidak menghambat pelaksanaan Perda di Kabupaten/Kota
2. Biro Hukum terus berupaya melaksanakan peningkatan terhadap proses penyusunan produk hukum daerah kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga legal drafter khususnya tenaga Penyusun Produk Hukum Daerah dan Analis Hukum.
4. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar berperan aktif dalam proses penyusunan produk hukum daerah
5. Biro hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penambahan jumlah kuota peserta Diklat Legal Drafting bagi Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai pemangku jabatan fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Biro Hukum terus berkoordinasi agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menambah SDM yang berkompeten dalam menangani penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata.
7. Biro Hukum terus meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelesaikan sengketa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan / melalui Bagian Hukum sehingga Bagian Hukum Kabupaten/Kota memiliki dokumen penyelesaian sengketa.
8. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar dapat menambah tenaga arsiparis, pengadministrasi umum, analis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan jabatan fungsional umum lainnya untuk melaksanakan tupoksi pada Biro Hukum.
9. Biro Hukum terus berkoordinasi dengan Biro Umum, Biro Humas dan Protokol dan Dinas Kominfo untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan hukum.
10. Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar menyiapkan diklat kompetensi untuk jabatan tertentu dan biaya kontribusinya.

1.33. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1.33.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Biro Umum di laksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.409.020.191,00,- realisasi anggaran sebesar Rp 27.231.925.246,00,- atau 95,86%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis Kantor, tersedianya Peralatan kebersihan, tersedianya belanja tabung gas dangalon air minum, tersedianya Pembayaran PBB, tersedianya Makan dan minum untuk Tamu, Kegiatan dan Rapat, terlaksananya perjalanan

dinas oleh aparaturnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 1.33.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.923.954.109,00 ,- realisasi anggaran sebesar Rp 14.122.244.847,00,- atau 83,45% Keluaran kegiatan ini adalah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di kantor gubernur kepulauan Bangka Belitung, dan Belanja Modal untuk kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya di lingkungan setda provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	
<p>Gambar 4.381 Perbaikan Rumah Jabatan</p>	<p>Gambar 4.382 Pemeliharaan WC di Kantor Gubernur Lantai III</p>

- 1.33.3 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.052.044.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp 998.064.000,00,- atau 94,87%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Makan dan minum untuk senam rutin, tersedianya pakaian dinas KDH dan WKDH, dan tersedianya Honor Untuk Instruktur senam.

- 1.33.4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah** dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.681.488.000,00,- realisasi anggaran sebesar Rp 2.505.401.370,00,- atau 93,43%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Belanja sewa kamar hotel, makan dan minum untuk tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah, tersedianya pembayaran honorarium tenaga ahli untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

	
<p>Gambar 4.383 Tamu Gubernur dengan Menteri RI</p>	<p>Gambar 4.384 Tamu Wakil Gubernur dengan Menteri RI</p>

1.34 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT

1.34.1 Kegiatan Publikasi Media Massa dan Cetak dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.412.757.900,- realisasi anggaran sebesar Rp 1.409.825.139,- atau 99,79%, sedangkan untuk realisasi kegiatan sebesar 99,86%. Keluaran kegiatan tersebut adalah publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di media massa lokal dan nasional.

1.34.2 Kegiatan Publikasi Media Elektronik/IT dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 289.532.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 184.990.000,- atau 63,89%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 64,46%. Keluaran kegiatan adalah publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di media elektronik dan IT.

1.34.3 Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/ Baleho dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.012.914,- realisasi anggaran sebesar Rp 123.760.750,- atau 81,95%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 82,52%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya dokumentasi kegiatan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah serta pemasangan publikasi media luar berupa spanduk dan baleh.



Gambar 4.385
Pendokumentasian dan
Belanja
Spanduk/Baleho

1.34.4 Penerbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 176.273.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 159.952.500,- atau 90,74%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 96,51%. Keluaran kegiatan adalah penerbitan majalah/buletin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerbitan majalah/buletin sebanyak 9 edisi dengan jumlah 3.150 eksemplar.



Gambar 4.386
Penerbitan Majalah / Buletin
Pemerintah Provinsi

1.34.4 Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan anggaran sebesar Rp 11.031.000,- realisasi

anggaran sebesar Rp 11.031.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah jumlah SDM yang mengikuti kegiatan Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT sebanyak 10 orang.

1.35 Program Peningkatan Pelayanan Protokoler

1.36.1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.612.500,- realisasi anggaran sebesar Rp 48.870.000,- atau 74,48%. Keluaran kegiatan adalah barang cetak dan penggandaan dukungan kegiatan protokol.

1.37 Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi

1.37.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 183.042.200,- realisasi anggaran sebesar Rp 171.205.000,- atau 93,53% sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran kegiatan adalah bahan bacaan berupa koran dan majalah untuk aparatur di sekretariat daerah.

1.37.2 Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 157.952.650,- realisasi anggaran sebesar Rp 156.625.159,- atau 97,46% dengan realisasi fisik 99,66%. Keluaran kegiatan adalah pendampingan layanan publikasi dan keprotokolan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1.37.3 Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 148.493.960,- realisasi anggaran sebesar Rp 144.718.910,- atau 99,66%, dengan realisasi fisik 99,90%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan rakor dan sosialisasi PPID.

1.38.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 578.749.375,- realisasi anggaran sebesar Rp 578.155.000,- atau 99,90%, dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung layanan kehumasan dan keprotokolan.



Gambar 4.387

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

1.38.5 Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan dilaksanakan oleh Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.784.700,- realisasi anggaran sebesar Rp 8.784.700,- atau 100%, dengan realisasi fisik 100%. Keluaran kegiatan adalah Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah.

Permasalahan dan Solusi

Kendala :

1. Adanya pengurangan anggaran di pertengahan tahun untuk pembayaran tunjangan hari raya sehingga terjadi penghapusan dan pengurangan kegiatan sehingga mengganggu rencana kerja Biro Humas dan Protokol.
2. Beberapa kegiatan realisasinya tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal, yaitu :
 - Adanya mutasi ASN dilingkungan Biro Humas dan Protokol menyebabkan terjadinya pergantian panitia pelaksana kegiatan.
 - Kurangnya kemampuan SDM yang ada dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan publikasi dan siaran, sehingga kurang maksimalnya kegiatan publikasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Solusi :

1. Perlunya meningkatkan anggaran
2. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat melalui media massa/cetak elektronik dan IT maka perlu meningkatkan anggaran kegiatan publikasi dan siaran.
3. Meningkatkan realisasi kegiatan yang belum tercapai dengan mempercayakan kegiatan yang ada kepada SDM yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut.
4. PPID memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi mengenai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

untuk itu perlu diperkuat selain SDMnya, perlu adanya peningkatan untuk anggaran kegiatannya.

1.39 Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan

- 1.39.1 Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.855.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp 51.978.830,00 atau 85,41 %.dan realisasi fisiknya 82,91 % Keluaran kegiatan ini adalah analisa evaluasi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terkompilasinya referensi atau acuan dalam pemetaan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak satu laporan.



- 1.39.2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58.084.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp 49.076.700,00 atau 84,49 % dan realisasi fisiknya 81,92 % Keluaran kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghasilkan laporan tentang pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak satu laporan.

- 1.39.3 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 73.230.000,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.582.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 11.582.000 atau 100% dan realisasi fisiknya 64,00 % Keluaran kegiatan ini tidak sepenuhnya terlaksanakan dengan baik dikarenakan terkendala rasionalisasi anggaran.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan kegiatan tidak sepenuhnya terlaksanakan dengan baik dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sedangkan dana yang telah terealisasi merupakan anggaran yang telah terealisasi sebelum adanya rasionalisasi. Solusinya mengingat pentingnya kegiatan ini sebagai pembinaan kelembagaan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota jangan sampai adanya rasionalisasi pada tahun 2019.

- 1.39.4 Kegiatan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.122.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 72.772.468,00 atau 72,68% dan realisasi fisiknya 80,16 % Keluaran kegiatan mengkompilasi hasil penetapan evaluasi jabatan pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian hasil kompilasi tersebut disampaikan ke Kemenpan dan RB untuk dilakukan verifikasi dan validasinya.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 masih dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Kemenpan RB dan solusinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat penetapan hasil evaluasi jabatan tersebut.

- 1.39.5 Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106.063.145,00 realisasi anggaran sebesar Rp 81.816.000,00 atau 77,14 % dan realisasi fisiknya 82,41 % Keluaran kegiatan Terlaksananya Standarisasi kompetensi Teknis PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Tersusunnya kamus kompetensi teknis PNS pada OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak satu dokumen.

- 1.39.6 Kegiatan Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 171.907.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 121.608.030,00 atau 70,74 % dan realisasi fisiknya 72,84 % Keluaran kegiatan efektivitas, efisiensi jabatan dan prestasi kerja jabatan sebagai instrumen penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta pengawasan dan akuntabilitas pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung dengan menghasilkan dokumen anjab dan ABK serta laporan pembinaan UPT.

1.40 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah

- 1.40.1 Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.995.997,00 realisasi anggaran sebesar Rp 29.347.500 atau 75,26% dan realisasi fisiknya 75,33 % Keluaran kegiatan adalah Dokumen Laporan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pembahasan isu strategis yang berkaitan dengan 8 (delapan) area perubahan untuk menjalin kerja sama se Provinsi, dengan dilaksanakan Rapat Koordinasi /pembahasan iuran Foserdasi beumada payung hukum sehingga belum ada keputusandan Solusinya Masih menunggu Peraturan dari Mendagri sebagai pembina Foserdasi.

- 1.40.2 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.303.375,00 realisasi anggaran sebesar Rp 22.764.000,00 atau 97,69 % dan realisasi fisiknya 97,63 % Keluaran kegiatan adalah tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Penempatan yang tidak sesuai dengan kopetensi dan beberapa UPT masih kurang SDM, sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh honorer. Solusinya melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 1.40.3 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.776.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 62.002.677,00 atau 92,85 % dan realisasi fisiknya 83,09 % Keluaran kegiatan adalah adanya data Laporan Kinerja dan PK

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Kesulitan mengumpulkan data kinerja dari Perangkat Daerah terkait indikator kinerja sasaran RPJMD dand ata yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak lengkap Solusinya Perangkat harus dapat menyampaikan data capaian kinerja secara valid dan tepat waktu.

- 1.40.4 Kegiatan Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp

50.663.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 47.065.785,00 atau 92,90 % dan 95,38 % Keluaran kegiatan 1 (satu) laporan kegiatan.



Permasalahan SAKIP di beberapa Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik, bisa dilihat dari capaian nilai (predikat nilai) masing-masing Kabupaten/kota antara lain: Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang dan Solusinya perlu dilaksanakan peningkatan pembinaan ke Kabupaten/Kota dan terus dilakukan evaluasi serta monitoring terhadap pelaksanaan SAKIP di masing-masing kabupaten/Kota.

1.40.5 Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan rencana aksi kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.802.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 46.092.540,00 atau 69,00% dan realisasi fisiknya 69,57 % Keluaran kegiatan Terlaksananya kegiatan bintek penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.



Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis tidak sepenuhnya memahami isi Bimtek itu sendiri dan Solusinya Perlu dilakukan Bimbingan Teknis secara rutin dengan narasumber yang berkompeten

1.40.6 Kegiatan Bimbingan Teknis E-LHKPN

dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.041.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 87.578.650,00 atau 87,54% dan 84,33%. Keluaran kegiatan dengan adanya bimbingan teknis E-LHKPN pejabat dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung yang merupakan wajib lapor mempunyai kesadaran sangat baik melaporkan hartanya secara mandiri.



Gambar 4.391
Bimbingan Teknis E-LHKPN
dilaksanakan oleh Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adanya wajib lapor yang kurang memahami maksud, tujuan dan fungsi dari E-LHKPN dan Solusinya perlu dilaksanakan evaluasi berkelanjutan sampai sejauh mana penerapan E-LHKPN.

- 1.40.7** Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.118.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 80.799.330 atau 77,60 % dan realisasi fisiknya 96,84 % Keluaran kegiatan 1 (satu) laporan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Capaian Kinerja tidak dievaluasi setiap Triwulan dan Solusinya Capaian Kinerja harus dievaluasi setiap Triwulan.

1.41 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintahan

- 1.41.1** Kegiatan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.115.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 66.988.810,00 atau 90,38 % dan realisasi fisiknya 91,76 %. Keluaran kegiatan terlaksananya Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahannya dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurangnya partisipasi aktif dari Perangkat Daerah untuk memverifikasi dan memvalidasi SOP yang ada di Perangkat Daerah nya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku SOP harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dan solusi di masa yang akan datang lebih ditekankan kepada Perangkat Daerah untuk lebih aktif memverifikasi dan

memvalidasi SOP Perangkat daerahnya.

1.41.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Biro/bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62.449.325,00 realisasi anggaran sebesar Rp 61.050.090,00 atau 97,76% dan realisasi fisik 95,97 %. Keluaran kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi Biro/bagian organisasi se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.41.3 Kegiatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.354.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp 50.659.480,00 atau 85,35% dan realisasi fisiknya 85,49 %. Keluaran Dokumen laporan.

Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di dasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 65 Tahun 2009, sampai dengan dilaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang SPM yang baru belum ada kepastian format (bentuk) laporan yang akan disampaikan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi begitu pula bentuk laporan dari Pemerintah Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan solusinya terus melakukan koordinasi ke Dirjen Bangda selaku leading sektor pelaksanaan SPM.

1.41.4 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.402.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp 28.105.100,00 atau 92,44% dan realisasi fisiknya 92,79 %. Keluaran kegiatan Terlaksananya Pembinaan Unit Layanan Publik

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Masih kurangnya kesadaran unit layanan publik dalam membebani dokumen-dokumen terkait layanan publik seperti standar layanan, maklumat, layout dan menciptakan inovasi layanan publik dan Solusinya pada saat melaksanakan pembinaan ke unit layanan, Biro Organisasi memberikan masukan berupa materi kisi-kisi evaluasi layanan publik, interview langsung dengan kepala unit layanan dan kedepannya akan melakukan pengundangan unit layanan untuk pembimbingan penyusunan standar layanan dan maklumat layanan.

1.41.5 Kegiatan Bintek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 91.831.775,00 realisasi anggaran sebesar Rp 79.743.279,00 atau 87,27% dan realisasi fisiknya 88,15 %. Keluaran kegiatan Meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang inovasi pelayanan publik.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Masih belum banyaknya inovasi di perangkat daerah yang belum digali dan untuk diikuti sertakan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018, tahun 2018 terdapat 1 (satu) inovasi yang diikuti sertakan dalam KIPP dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Solusinya Selaku pembina pelayanan publik di tahun 2019 Biro Organisasi menggali inovasi-inovasi perangkat daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan, memberikan arahan kepada Perangkat Daerah terkait inovasi dan menyeleksi inovasi, merekapitulasi inovasi-inovasi yang masuk kategori KIPP tahun 2019, menyelenggarakan BinteK penyusunan proposal dan pelatihan admin inovasi pelayanan publik dan mengikutsertakan inovasi-inovasi tersebut dalam KIPP Kemenpan dan RB Tahun 2019.

1.41.6 Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 88.035.365,00 realisasi anggaran sebesar Rp 77.883.764,00 atau 88,47%. dan realisasi fisiknya 96,88 %. Keluaran kegiatan Dokumen laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pengaturan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi (berbenturan dengan kegiatan lainnya dan solusinya Penjadwalan ulang dengan Sub Bagian lainnya.

1.41.7 Kegiatan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104.047.825,00 realisasi anggaran sebesar Rp 77.026.700,00 atau 74,03% dan realisasi fisiknya 76,16 %. Keluaran kegiatan adanya Dokumen Roadmap



Gambar 4.392
Roadmap Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga

mempengaruhi penyusunan roadmap karena harus menunggu perubahan anggaran dan solusinya mesti mengikuti prosedur yang ditetapkan.

1.41.8 Kegiatan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71.023.525,00 realisasi anggaran sebesar Rp 57.779.900,00 atau 81,35% dan realisasi fisiknya 80,93 % Keluaran kegiatan Terlaksananya survey kepuasan masyarakat Unit Layanan Publik.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan baru 9 (sembilan) Unit Layanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyusun laporan SKM (7 samsat wilayah kab/kota, RSJD dan DMPTSP), Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada yang melaksanakan SKM, tahun 2018 nilai SKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menggunakan nilai IKM 9 (sembilan) unit layanan publik dan solusinya di tahun 2019 Biro Organisasi akan mengeluarkan edaeran ke semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Kemenpan dan RB.

1.42 Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN

1.42.1. Koordinasi Kebijakan APBN oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.387.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 30.608.784,- atau 75,79 %. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi guna meningkatkan Tata Kelola Koordinasi Kebijakan APBN di 2 Wilayah (Wilayah I meliputi urusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Wilayah II meliputi urusan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi).



Gambar 4.393
Koordinasi Kebijakan APBN

1.42.2. Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monev APBN oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.590.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 173.158.600,- atau 94,83 %. Keluaran kegiatan adalah

terlaksananya pengelolaan pengembangan aplikasi guna meningkatnya tata kelola monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN melalui pengembangan aplikasi sistem e_monev APBN di 2 wilayah (wilayah I meliputi urusan dana alokasi khusus (dak) provinsi dan kabupaten/kota dan wilayah II meliputi urusan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) provinsi)

- 1.42.2. Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.340.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 99.698.458,- atau 94,64 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi sebagai bentuk pembinaan dan pengendalian pembangunan APBN di 2 wilayah (wilayah I meliputi urusan dana alokasi khusus (dak) provinsi dan kabupaten/kota dan wilayah II meliputi urusan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (TP) provinsi)

1.43 Program Perencanaan Sekretariat Daerah

- 1.43.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.094.950,- realisasi anggaran sebesar Rp. 70.064.930,- atau 80,45 %. Keluaran kegiatan adalah buku dokumen perencanaan sebanyak 4 dokumen terdiri dari Dokumen Perubahan Renja Tahun 2018, Dokumen Renja Tahun 2019, Dokumen Laporan Penyusunan Anggaran dan Dokumen Laporan Revisi Renstra 2017-2023 di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 1.43.2. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah** oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.848.080,- realisasi anggaran sebesar Rp. 90.442.699,- atau 89,68 %. Keluaran kegiatan adalah buku Renja, Evaluasi Renja LAKIP, LPPD dan LKPJ Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.44. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

- 1.44.1. Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi**



Gambar 4.394
Koordinasi Sistem Monitoring
Teptra (sismontep) Provinsi
Kab/Kota

Kabupaten/Kota oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.288.493,- realisasi anggaran sebesar Rp. 381.482.888,- atau 95,30 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemantauan realisasi fisik dan keuangan dana APBD di Provinsi Kabupaten/Kota

1.44.2 Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 4.395
Koordinasi Sinkronisasi
Pengendalian Percepatan
Pembangunan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.779.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.992.073,- atau 97,81%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pertemuan guna sinkronisasi percepatan pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota

1.44.3. Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.390.220,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.380.420,- atau 98,86 %. Keluaran kegiatan adalah terbentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota

1.45.4. Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 56.795.500,- atau 95,78 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi untuk pengendalian guna upaya penyelesaian terhadap hambatan/ masalah dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.46. Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD

1.46.1. Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monev APBD oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.396.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 94.341.990,- atau 63,15 %. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya koordinasi sebagai upaya penyempurnaan aplikasi e-monev APBD

1.46.2.



Gambar 4.396
Kebijakan Monitoring Evaluasi
APBD

Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD oleh Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.617.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 40.385.500,- atau 86,63 %. Keluaran kegiatan adalah penetapan Target dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Permasalahan :

Adanya kegiatan yang belum tercapai target secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada belum bisa mengakomodir dan waktu pelaksanaan kegiatan secara maksimal

Solusi :

Diharapkan untuk tahun depan adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang potensial serta dapat menyusul pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tepat.

1.47. Peningkatan kehidupan Beragama Terhadap Kehidupan Beragama
1.47.1. Kegiatan Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan

dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 580.456.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 524.025.500,00 atau 90,28 % dan Fisik 98,32%. Keluaran terselenggaranya safari ramadhan di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



1.47.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.645.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 703.356.171,00 atau 78,09 % dan Fisik 99,81% .Keluaran Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Embarkasi Palembang.



1.47.3. Kegiatan Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/ MTQ



Gambar 4.399
Pembinaan dan
Pemberangkatan Kafialh STQ
/MTQ
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.364.060.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.155.004.436,00 atau 84,67% dan Fisik 97,07. Keluaran Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan di Medan Sumatera Utara.

1.47.4. Kegiatan Pendampingan Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.680.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 477.761.010 atau 93,99 % dan Fisik 99,84. Keluaran Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.47.5. Kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar 4.400
Pembinaan Mental dan
Spiritual Masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.204.880.800 dilakukan perubahan Anggaran untuk menunjang terlaksananya Kegiatan sebesar Rp. 1.374.880.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

1.292.205.446,00 atau 93,99 % dan Fisik 96,01%. Keluaran Terselenggaranya Kualitas Spiritual Beragama Bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.47.6 Kegiatan Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.168.736.000,00 dilakukan perubahan Anggaran untuk rasionalisasi anggaran t Kegiatan sebesar Rp. 3.149.236.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.912.188.990,00 atau 92,47 % dan Fisik 100,00%. Keluaran terfasilitasinya Bantuan biaya Transportasi Domestik Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 1.47.7. Kegiatan Musabaqoh Hafis Qur'an** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.637.600,00 dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 400.137.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 354.597.266,00 atau 88,62 % dan Fisik 91,38% . Keluaran Terseleksinya Hafis/Hafizoh terbaik Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4.401
Musabaqoh Hafis Qur'an

1.48 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan , KB dan Pemuda

- 1.48.1. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.120.500,00 dilaksanakan rasionalisasi Anggaran sebesar Rp. 220.120.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 220.120.500,00 atau 100,00% . Keluaran Meningkatnya Jumlah Sekolah Yang dibina Untuk Meningkatkan Layanan UKS di Sekolah-Sekolah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1.48.2. Kegiatan Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 965.734.000,00 dilakukan rasionalisasi Anggaran Sebesar Rp. 845.734.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 748.678.100,00 atau 88,52% dan Fisik 96,00. Keluaran Kegiatan Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kecintaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.49. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1.49.1. Kegiatan Evaluasi dan Analisis Proposal Bantuan Sosial dan Hibah** dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 138.172.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 128.611.050,00 atau 93,08% dan Fisik 100,00%.Keluaran Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Prosal Calon Penerima Bantuan Sosial dan Hibah.

1.49.2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah



Gambar 4.402
Monitoring dan Evaluasi Dana
Bansos dan Hibah Kep. Babel

dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.495.000,00 dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 192.495.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 188.585.600,00 atau 97,97% dan Fisik 99,36%.Keluaran Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi Penerima Bantuan Sosial dan Hibah.

Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2018 :

Permasalahan :

- Masih kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat
- Minimnya dana yang tersedia.
- Terjadinya Perubahan Harga Yang Signifikan Ketika Tahun Anggaran Sudah Berjalan (Harga Tiket, Harga Barang, Dll)
- Sering Terjadi Perubahan Jadwal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Yang Sudah disusun (jadwal Tentatif)

Solusi :

- Adanya upaya penambahan sumber daya manusia
- Adanya penambahan dana
- Adanya Sinkronisasi Terhadap Jadwal Kegiatan dengan Pengelola Kegiatan Agar tidak terjadi Kesalahan Dalam Penentuan jadwal Kegiatan sehingga sesuai dengan yang diharapkan
- Perlu Adanya Penyesuaian Harga Satuan Belanja Paket Kiriman Jemaah dan Transportasi Darat Mengingat Kondisi Perubahan-Perubahan Harga Setiap Tahun

- 1.50 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian.**
- 1.50.1 Kegiatan Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.095.800,-. Realisasi anggaran sebesar Rp112.151.410,- atau 82,41%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 1.50.2 Kegiatan Koordinasi, Monev Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.71.679.384,-, Realisasi anggaran sebesar Rp.65.843.612,- atau 91,86%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi, Monev Koperasi dan UMKM.
- 1.50.3 Kegiatan Monev Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.73.095.630,-, Realisasi anggaran sebesar Rp.62.321.600,- atau 85,26%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monev Analisis Makro Ekonomi.
- 1.50.4 Kegiatan Monev Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.357.800,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.248.920,- atau 83,28%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monev Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 1.50.5 Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.73.981.500,-, Realisasi anggaran sebesar Rp.65.430.698,- atau 88,44%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Forum Pengembangan Ekonomi.



- 1.51 Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya.**
- 1.51.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.814.100,-, Pada APBD Perubahan Tahun 2018 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp. 43.014.100,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.645.741,- atau 94,49%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyertaan modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 1.51.2 Kegiatan Koordinasi Program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.66.794.482,-. Realisasi anggaran sebesar Rp61.594.482,- atau 92,21%, keluaran kegiatan ini Terkoordinasi Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



1.51.3 Kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 702.700.840,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2017 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp. 582.700.840,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 267.932.428,- atau 45,98%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Proses pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung.



1.51.4 Kegiatan Kajian Strategis Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.206.000,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 57.730.235,- atau 97,51%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Kajian Strategis Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 1.51.5 Kegiatan Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.554.940,-, Realisasi anggaran sebesar Rp. 53.529.940,- atau 89,88%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Rakor Teknis Tata Kelola BUMD.



- 1.52 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam.**
- 1.52.1 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 91.208.400,-, Realisasi anggaran sebesar Rp.87.750.221,- atau 96,21%. keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring BBM dan Gas di 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- 1.52.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 81.466.478,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.77.557.075,- atau 95,20%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring, evaluasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



1.52.3 Kegiatan Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 142.715.045,-. Pada APBD Perubahan Tahun 2018 kegiatan ini mengalami perubahan yaitu menjadi Rp - .

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan

1. Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana peralatan kerja yang memadai.
2. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Belum selarasnya perencanaan dan pelaksanaan program dengan SKPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
4. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung program dan kegiatan pada Biro Perekonomian.
5. Pengendalian, pengawasan dan koordinasi Biro Perekonomian belum optimal.

Solusi

1. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana peralatan kerja pada tahun anggaran berikutnya.
2. Mengusulkan penambahan SDM
3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/kota secara berkala dan proaktif.
4. Mengusulkan kembali alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung tupoksi Biro Perekonomian.
5. Meningkatkan pengawasan, koordinasi dan pengendalian pada Biro Perekonomian.

1.53 Program Pengembangan Data Informasi Layanan

1.53.1 Peningkatan Penerapan Data dan Informasi Layanan dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 188.306.000,- menjadi sebesar Rp.132.306.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.594.454,- atau 90,93 %. Keluaran Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan informasi Barang/Jasa.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan bisa diselesaikan oleh bagian data dan Informasi.

1.53.2 Peningkatan Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.036.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.71.708.770,- atau 85,33 %. Keluaran kegiatan adalah Jumlah 21 dokumen SOP dan Penerapannya.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan. Dokumen SOP perlu penyesuaian dengan kepres nomor 16 tahun 2018.

1.53.3 Pengelola Data dan Informasi dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.413.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.85.209.220,- atau 77,17 % . Keluaran kegiatan adalah Jumlah OPD yang menginput RPP melalui sistem pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa.



Gambar 4.412
Sosialisai aplikasi e-review

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Dalam DPA induk berisi kegiatan sosialisai terhadap aplikasi yang sudah dibuat pada saat ULP masih berada di Biro Pembangunan, ternyata aplikasi tersebut hasil kerjasama dengan pemerintah Gorontalo tidak diteruskan, akhirnya direncanakan pembuatan aplikasi sendiri menunggu anggaran perubahan termasuk kegiatan sosialisasi.

Disamping itu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

1.53.4 Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula Rp. 86.344.200,- menjadi sebesar Rp. 57.564.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.860.950,- atau 81,41 %. Keluaran kegiatan adalah Jumlah dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Bagian Tata Usaha.

1.54 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa



1.54.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp.64.028.000,- menjadi sebesar Rp. 56.828.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.669.800,- atau sebesar 80,36 %. Keluaran kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam rangka peningkatan kompetensi ASN OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

Disarankan untuk dapat dilaksanakan pendampingan penyusunan RUP dimulai dari Perencanaan dan Anggaran pada OPD pada waktu yang telah ditentukan.

1.54.2 Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula Rp. 1.792.430.000,- sebesar Rp.1.646.930.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.602.033.069,00 atau 97,27 %. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah waktu layanan pengadaan oleh ULP.

	
<p>Gambar 4.413 Klarifikasi Lapangan</p>	<p>Gambar 4.414 Registrasi dan Verifikasi</p>

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan.

- 1.54.3 Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.678.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.98.654.959,- atau 77,27 %. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan ULP dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) perlu pemahaman lebih lanjut terhadap peraturan terutama peraturan kepala LKPP oleh PPK dari OPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- 1.54.4 Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pengaduan** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.795.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.633.383,- atau sebesar 83,29%. Keluaran kegiatan ini adalah terbiayainya kegiatan pencegahan dan penanganan pengaduan dan terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Pencegahan Permasalahan Hukum bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan

1.55 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- 1.55.1 Kegiatan Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 1.193.217.000,- menjadi sebesar Rp. 1.109.319.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.058.917.331,- atau 95,46 %. Keluaran kegiatan adalah lancarnya pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pengelola pengadaan dan penyedia barang/jasa pemerintah selama 12 bulan.

	
<p>Gambar 4.415 Rapat Koordinasi Daerah LPSE</p>	<p>Gambar 4.416 Pelatihan dan Pengenalan Aplikasi SPSE kepada Pengguna LPSE</p>

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.

- 1.55.2 Kegiatan Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 306.943.000,- menjadi sebesar Rp. 280.843.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.749.433,- atau 91,42 %. Keluaran kegiatan adalah lancarnya proses pengadaan melalui aplikasi pendukung SPSE SIRUP dan e-Purchasing selama 12 bulan.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.

- 1.55.3 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Registrasi dan Verifikasi** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 161.179.000,- menjadi sebesar Rp. 103.517.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.816.455,- atau 91,59 %. Keluaran kegiatan adalah lancarnya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik oleh pengguna aplikasi PBJ selama 12 bulan.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.

- 1.55.4 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik** dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 488.200.500,- menjadi sebesar Rp. 463.200.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 404.332.811,- atau 87,29 %. Keluaran kegiatan adalah terpeliharanya jaringan dan perangkat SPSE selama 12 bulan.

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dan dapat diselesaikan oleh Personil LPSE.

BAB V



PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

Dasar hukum penyelenggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 42286);
2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

A. Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah).

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan.

1. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Alokasi dana Dekonsentrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018, yaitu berasal dari 19 Kementerian dengan 20 Perangkat Daerah Pelaksana. Total Dana Dekonsentrasi yang diterima yaitu sebesar Rp. 98.237.067.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.899.458.756,00 atau sebesar 93,55%.

Rincian Instansi pemberi, Perangkat Daerah pelaksana, program/kegiatan, indikator kinerja kegiatan, pagu dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
REKAPITULASI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan				1.032.500.000,00	1.028.989.192,00	99,66%	
			- Dukungan Perlindungan Perkebunan	Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	12 Bulan	99.72%	460.350.000,00	458.649.575,00	99,63%	
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Bulan	99.76%	572.150.000,00	570.339.617,00	99,68%	
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				14.649.385.000,00	14.460.758.087,00	98,71%	
			- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jaringan Irigasi Tersier	0 Ha	10,00%	836.200.000,00	828.430.000,00	99,07%	
				Pengembangan Sumber Air	3 Unit	100,00%				
				Pembangunan Embung Pertanian	4 Unit	100,00%				
			- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	1100 Ha	100,00%	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00%	
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen_x000D_[Base Line]	290 Unit	100,00%	6.231.705.000,00	6.143.272.748,00	98,58%	
				Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	24 Bulan Layanan	100,00%	2.583.680.000,00	2.521.003.339,00	97,57%	
			- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani_x000D_[Base Line]	7 Layanan	100,00%	597.800.000,00	568.052.000,00	95,02%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian				2.581.982.000,00	2.487.344.935,00	96,33%	
			- Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh_x000D_[Base Line]	240 Orang	100,00%	2.581.982.000,00	2.487.344.935,00	96,33%	
				Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian_x000D_[Base Line]	1 Unit	100,00%				
				Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi_x000D_[Base Line]	31 BPP	100,00%				
				Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian_x000D_[Base Line]	2 Unit	100,00%				
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan				1.566.411.000,00	1.422.722.837,00	90,83%	
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan_x000D_[Base Line]	80 hektar	90,00%	622.295.000,00	560.724.874,00	90,11%	
				Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Padi_x000D_[Base Line]	0 hektar	93,00%				
				Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Jagung_x000D_[Base Line]	2 hektar	99,00%				
				Fasilitas Desa Mandiri Benih_x000D_[Base Line]	0 unit	100,00%				
			- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI_x000D_[Base Line]	175 Hektar	91,00%	603.116.000,00	553.974.979,00	91,85%	
			- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	90,00%	341.000.000,00	308.022.984,00	90,33%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura				1.911.600.000,00	1.529.132.152,00	79,99%	
			- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Benih Buah Lainnya_x000D_[Base Line]	15000 Batang	0,00%	750.000.000,00	508.375.000,00	67,78%	
				Sertifikasi Benih Hortikultura_x000D_[Base Line]	40 Unit	70,00%				
				Sarana Prasarana Benih Hortikultura_x000D_[Base Line]	1 Unit	100,00%				
			- Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah_x000D_[Base Line]	35 Ha	100,00%	812.500.000,00	687.945.890,00	84,67%	
				Desa Pertanian Organik_x000D_[Base Line]	4 Desa	100,00%				
			- Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	1 Bulan	100,00%	337.000.000,00	320.771.662,00	95,18%	
				Layanan Perkantoran_x000D_[Base Line]	12 Bulan layanan	100,00%				
			- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura_x000D_[Base Line]	0.01 Unit	100,00%	12.100.000,00	12.039.600,00	99,50%	
			JUMLAH							
2	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Keolahragaan				3.965.184.000,00	3.944.409.901,00	99,48%	
			- Pengembangan Kreativitas Pemuda	Fasilitasi Komunitas pemuda kreatif [Base Line]	1.000 Orang / Lembaga / Komunitas	100,00%	800.000.000,00	799.069.273,00	99,88%	
			- Peningkatan Wawasan Pemuda	Jambore Pemuda Indonesia [Base Line]	1 provinsi	100,00%	1.619.762.000,00	1.610.199.878,00	99,41%	
			- Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	PPLP/PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan di Daerah [Base Line]	19 orang	100,00%	1.395.422.000,00	1.385.140.750,00	99,26%	
			- Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Tenaga Keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan di daerah [Base Line]	80 orang	100,00%	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%	
			JUMLAH							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
3	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	Bina Administrasi Kewilayahan				254.694.000,00	251.432.633,00	98,72%	
			- Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Layanan pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	254.694.000,00	251.432.633,00	98,72%	
JUMLAH							254.694.000,00	251.432.633,00	98,72%	
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pendidikan Dasar dan Menengah				3.277.608.000,00	3.254.844.330,00	99,31%	
			- Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	19 siswa	100,00%	632.722.000,00	616.225.900,00	97,39%	
				Layanan Dukungan Manajemen	3 layanan	100,00%				
			- Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	50 siswa	100,00%	1.244.578.000,00	1.238.753.500,00	99,53%	
				Siswa yang mengikuti Lomba, festival dan Olimpiade	144 Siswa	100,00%				
				Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	67 Sekolah	100,00%				
			- Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan	Siswa yang mendapatkan Pendidikan karakter bangsa	67 Siswa	100,00%	1.400.308.000,00	1.399.864.930,00	99,97%	
				Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	217 Siswa	100,00%				
				Sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013	38 Sekolah	100,00%				
				Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	100,00%				
			Guru dan Tenaga Kependidikan				875.167.000,00	856.632.474,00	97,88%	
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	100,00%	875.167.000,00	856.632.474,00	97,88%	
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				275.708.000,00	250.345.444,00	90,80%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			- Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan daerah Terpadu	1 layanan	100,00%	275.708.000,00	250.345.444,00	90,80%	
JUMLAH							4.428.483.000,00	4.361.822.248,00	98,49%	
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK				766.074.000,00	754.088.000,00	98,44%	
			- Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK_x000D_[Base Line]	93%	100,00%	766.074.000,00	754.088.000,00	98,44%	
JUMLAH							766.074.000,00	754.088.000,00	98,44%	
6	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan jaminan Sosial Tenaga Kerja				929.740.000,00	923.688.581,00	99,35%	
			- Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi	100 orang	100,00%	212.940.000,00	212.421.600,00	99,76%	
			Peningkatan Penerapan Pengupahan	Anggota Dewan Pengupahan Yang diberdayakan [Base Line]	5 orang	99,00%	13.725.000,00	13.588.200,00	99,00%	
			- Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perjanjian bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam penyelesaian Perselisihan HI [base line]	38 Perjanjian bersama	98,00%	133.000.000,00	129.500.000,00	97,37%	
			- Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja bersama [base line]	100 orang	100,00%	218.900.000,00	218.468.800,00	99,80%	
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen PHI dan Jamsos	12 bulan layanan	100,00%	177.323.000,00	176.921.172,00	99,77%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			- Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial [base Line]	100 orang	99,00%	173.852.000,00	172.788.809,00	99,39%	
			Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				819.005.000,00	806.509.483,00	98,47%	
			- Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	1 Perusahaan	100,00%	316.160.000,00	305.534.383,00	96,64%	
				Pembinaan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	32 Tenaga Pengawas	100,00%				
			- Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapus Pekerja Anak	Penarikan Pekerja Anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	50 Pekerja Anak	100,00%	61.950.000,00	61.950.000,00	100,00%	
				Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Bidang Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	20 Perusahaan	100,00%				
			- Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pembinaan NormaKetenagakerjaan Bidang Kontruksi Bangunan,Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	50 Perusahaan	100,00%	111.350.000,00	111.160.000,00	99,83%	
				Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Ergonomi ,Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	50 Perusahaan	100,00%				
				Pencegahan HIV/AIDS di tempat Kerja	30 Perusahaan	100,00%				
			- Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Waktu Kerja ,Waktu Istirahat dan Pengupahan	40 Perusahaan	100,00%	132.600.000,00	132.600.000,00	100,00%	
				Pembinaan Norma Ketenagakerjaan di Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja	50 Perusahaan	100,00%				
				Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	80 Perusahaan	100,00%				

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN	
								Rp	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Peningkatan Akuttabilitasbdan Kinerja Ditjen Binwasnaker dan K3	76 Nilai	100,00%	196.945.000,00	195.265.100,00	99,15%		
				Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	100 Persen	100,00%					
				Layanan Perkantoran	12 Layanan	100,00%					
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas				1.123.270.000,00	1.089.166.100,00	96,96%		
			- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi_x000D_[Base Line]	1 LPK	92,20%	332.000.000,00	298.033.000,00	89,77%		
			- Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Bertambahnya Jejaring Pemagangan_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	99,85%	603.660.000,00	603.584.100,00	99,99%		
				Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri_x000D_[Base Line]	90 orang	99,93%					
			- Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Perusahaan yang dinilai tingkat kinerjanya_x000D_[Base Line]	15 Perusahaan	100,00%	187.610.000,00	187.549.000,00	99,97%		
JUMLAH							2.872.015.000,00	2.819.364.164,00	98,17%		
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P3ACSKB	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				1.700.000.000,00	1.639.619.955,00	96,45%		
			- Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA di Kab/Kota (Dekon)	Penguatan Kelembagaan PUG di Kab/Kota	7 Kab/Kota	100,00%	1.700.000.000,00	1.639.619.955,00	96,45%		
				Penguatan Kelembagaan PUHA di Kab/Kota	7 Kab/Kota	100,00%					
				Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Layanan Korban KtP/A	7 Kab/Kota	100,00%					
JUMLAH							1.700.000.000,00	1.639.619.955,00	96,45%		
8	Kementerian Pertanian	Dinas Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				3.384.800.000,00	3.242.235.759,00	95,79%		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Masyarakat							
			- Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Lumbung Pangan Masyarakat_x000D_[Base Line]	5 Unit	100,00%	160.500.000,00	154.599.800,00	96,32%	
				Hasil pemantauan pasokan dan harga pangan_x000D_[Base Line]	1 Lokasi	100,00%				
			- Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan_x000D_[Base Line]	1 Rekomendasi	100,00%	170.000.000,00	167.697.000,00	98,65%	
			- Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemberdayaan Pekarangan Pangan_x000D_[Base Line]	34 Kelompok	100,00%	2.633.300.000,00	2.523.578.709,00	95,83%	
				Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar_x000D_[Base Line]	3 Rekomendasi	100,00%				
				Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan_x000D_[Base Line]	1 Lokasi	100,00%				
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	100,00%	421.000.000,00	396.360.250,00	94,15%	
JUMLAH						3.384.800.000,00	3.242.235.759,00	95,79%		
9	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial				1.544.136.000,00	1.528.593.400,00	98,99%	
-	Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang atau Pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	520 Orang	100,00%	309.347.000,00	308.507.000,00	99,73%			
		TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara	1 Unit	100,00%						
	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	PSKS Perorangan Yang Mendapatkan Pemberdayaan	92 Orang	98,00%	1.009.789.000,00	995.823.100,00	98,62%			
		PSKS Lembaga Yang Mendapatkan Pemberdayaan	111 Lembaga	100,00%						
		Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan	1 Layanan	100,00%						

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Kelembagaan Masyarakat						
				Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga Yang Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	10 Lembaga	100,00%				
			- Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah lembaga penyelenggaraan UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dan Resiko Sosial	1 Lembaga	100,00%	225.000.000,00	224.263.300,00	99,67%	
			Penanganan Fakir Miskin			3.050.281.000,00	2.995.620.900,00	98,21%		
			- Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	KPM Yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	1 KK	100,00%	1.392.040.000,00	1.365.158.000,00	98,07%	
				Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	500 KK	100,00%				
			- Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	KPM Yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	500 KK	100,00%	1.598.230.000,00	1.572.291.900,00	98,38%	
			- Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Wiayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	2 Layanan	100,00%	60.011.000,00	58.171.000,00	96,93%	
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial				216.649.000,00	205.835.286,00	95,01%	
			- Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Pelayanan	4 Layanan	100,00%	216.649.000,00	205.835.286,00	95,01%	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial				3.727.716.000,00	3.520.474.240,00	94,44%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN	
								Rp	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
			- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar_x000D_[Base Line]	10000 Orang	99,16%	2.550.090.000,00	2.507.177.650,00	98,32%		
			- Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Korban Bencana Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar_x000D_[Base Line]	2 Jiwa	96,82%	190.866.000,00	183.322.500,00	96,05%		
			- Jaminan Sosial Keluarga	Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	986.760.000,00	829.974.090,00	84,11%		
			Rehabilitasi Sosial				2.796.371.000,00	2.580.932.667,00	92,30%		
			- Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	25 Orang	90,00%	339.416.000,00	298.302.600,00	87,89%		
			- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	180 orang	93,05%	632.080.000,00	564.509.804,00	89,31%		
				Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual Yang Mendapatkan Alat Bantu	60 orang	85,03%					
			- Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	25 orang	65,00%	190.000.000,00	115.536.463,00	60,81%		
			- Rehabilitasi Sosial Anak	Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	930 orang	100,00%	915.675.000,00	908.935.500,00	99,26%		
- Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Lanjut Usia Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	290 Orang	100,00%	719.200.000,00	693.648.300,00	96,45%					

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan Home Care	50 orang	100,00%				
JUMLAH							11.335.153.000,00	10.831.456.493,00	95,56%	
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK				586.982.000,00	557.797.066,00	95,03%	
			- Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK_x000D_[Base Line]	93%	100,00%	586.982.000,00	557.797.066,00	95,03%	
JUMLAH							586.982.000,00	557.797.066,00	95,03%	
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				513.738.000,00	505.165.100,00	98,33%	
			- Pemantauan dan Operasi Armada	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	40 Hari Operasi	100,00%	435.774.000,00	428.455.700,00	98,32%	
				Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	27 Kelompok	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2 Layanan	100,00%	77.964.000,00	76.709.400,00	98,39%	
			Pengelolaan Perikanan Budidaya				336.850.000,00	323.551.000,00	96,05%	
			- Pengelolaan Perbenihan Ikan	Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)_x000D_[Base Line]	7 UNIT	100,00%	17.480.000,00	16.702.800,00	95,55%	
			- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Lokasi Budidaya yang dilakukan survailan dan/atau monitoring penyakit ikannya_x000D_[Base Line]	3 kab/kota	100,00%	34.080.000,00	32.442.500,00	95,20%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			- <div>Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan</div>	Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar_x000D_[Base Line]	20 unit	100,00%	16.700.000,00	16.401.200,00	98,21%	
			- <div>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</div>	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 layanan	100,00%	268.590.000,00	258.004.500,00	96,06%	
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP				750.000.000,00	716.563.517,00	95,54%	
			- <div>Pengelolaan Keuangan KKP</div>	Layanan Manajemen Keuangan_x000D_[Base Line]	1 layanan	100,00%	135.820.000,00	116.855.000,00	86,04%	
			- <div>Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP</div>	Layanan Perencanaan_x000D_[Base Line]	6 Layanan	100,00%	570.095.000,00	556.610.117,00	97,63%	
			- <div>Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP</div>	Layanan Data dan Informasi_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	44.085.000,00	43.098.400,00	97,76%	
			Pengelolaan Ruang Laut				507.500.000,00	476.415.100,00	93,87%	
			- <div>Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut</div>	Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif_x000D_[Base Line]	1 Kawasan	100,00%	400.000.000,00	371.964.300,00	92,99%	
				Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan_x000D_[Base Line]	1 Kawasan	100,00%				
		- <div>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</div>	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%	107.500.000,00	104.450.800,00	97,16%		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				329.910.000,00	300.714.800,00	91,15%	
			- Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Pemetaan dan pemantauan logistik ikan_x000D_[Base Line]	1 dokumen	100,00%	78.210.000,00	60.163.800,00	76,93%	
			- Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan)_x000D_[Base Line]	1 mitra	100,00%	90.700.000,00	87.737.800,00	96,73%	
			- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan_x000D_[Base Line]	12 Sertifikat	100,00%	86.000.000,00	82.996.900,00	96,51%	
			- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun_x000D_[Base Line]	1 dokumen	100,00%	40.000.000,00	34.824.300,00	87,06%	
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP pada Satker Daerah_x000D_[Base Line]	12%	100,00%	35.000.000,00	34.992.000,00	99,98%	
			Pengelolaan Perikanan Tangkap				426.970.000,00	373.216.625,00	87,41%	
			- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan yang dikelola Provinsi yang dilakukan pembinaan_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	100,00%	121.536.000,00	111.883.800,00	92,06%	
			- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	100,00%	161.610.000,00	146.785.674,00	90,83%	
				Nelayan yang terlindungi_x000D_[Base Line]	13400 Orang	100,00%				
				Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha_x000D_[Base Line]	7 Unit	100,00%				
				Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1)_x000D_[Base Line]	300 Bidang	100,00%				

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi_x000D_[Base Line]	7 Koperasi	100,00%	60.589.000,00	36.035.605,00	59,48%	
			-	Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya_x000D_[Base Line]	1 WPP	100,00%				
				Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya_x000D_[Base Line]	1 WPP	100,00%				
				Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan_x000D_[Base Line]	10 Unit	100,00%				
				Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang terbentuk_x000D_[Base Line]	1 WPP	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Layanan	100,00%	83.235.000,00	78.511.546,00	94,33%	
JUMLAH							2.864.968.000,00	2.695.626.142,00	94,09%	
12	Kementerian Dalam Negeri	BKPSDMD	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri				312.462.000,00	290.749.400,00	93,05%	
			- Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi Melalui Dekonsentrasi_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	100,00%	312.462.000,00	290.749.400,00	93,05%	
JUMLAH							312.462.000,00	290.749.400,00	93,05%	
13	Perpustakaan Nasional RI	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan				820.007.000,00	762.812.880,00	93,03%	
			- Pengembangan Perpustakaan dan	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	6 Perpustakaan	93,03%	820.007.000,00	762.812.880,00	93,03%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Pembudayaan Gemar Membaca							
	Arsip Nasional RI		Penyelenggraan Kearsipan Nasional				96.492.000,00	89.611.000,00	92,87%	
			- Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	Pencipta Arsip Kabupaten/Kota yang diawasi pada Provinsi Penerimaan Dana Dekonsentrasi	7 Instansi	92,87%	96.492.000,00	89.611.000,00	92,87%	
JUMLAH							916.499.000,00	852.423.880,00	93,01%	
14	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata				92.830.000,00	92.462.000,00	99,60%	
			- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Layanan Perencanaan_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	92.830.000,00	92.462.000,00	99,60%	
			Pengembangan Kepariwisata				2.284.200.000,00	2.114.568.205,00	92,57%	
			- Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand dan Indochina	PROMOSI PARIWISATA DAERAH (DEKONSENTRASI)_x000D_[Base Line]	1 DAERAH	100,00%	850.000.000,00	835.930.205,00	98,34%	
				PROMOSI PARIWISATA MANCANEGERA (DEKONSENTRASI)_x000D_[Base Line]	1 DAERAH	100,00%				
			- Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga	SDM Tersertifikasi dan Memperoleh Pembekalan Bidang Pariwisata_x000D_[Base Line]	1000 Orang	100,00%	1.284.200.000,00	1.141.761.349,00	88,91%	
				Lokasi yang memperoleh Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Kemitraan usaha Masyarakat_x000D_[Base Line]	1 Lokasi	100,00%				
			- Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pasifik	Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata wilayah II_x000D_[Base Line]	1 event	100,00%	150.000.000,00	136.876.651,00	91,25%	
JUMLAH							2.377.030.000,00	2.207.030.205,00	92,85%	
15	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan	Dinas Koperasi dan UKM	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi				2.986.018.000,00	2.749.975.000,00	92,10%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Menengah		- Dukungan Pemberdayaan KUMKM di daerah	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan strategis	11 Dokumen	100,00%	2.986.018.000,00	2.749.975.000,00	92,10%	
				Satuan Tugas Pengawasan Koperasi	26 Orang	100,00%				
				Operasional PLUT di Daerah	2 unit	100,00%				
				Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah	1 Event	100,00%				
				Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	26 Orang	100,00%				
JUMLAH							2.986.018.000,00	2.749.975.000,00	92,10%	
16	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1.961.000.000,00	1.816.525.282,00	92,63%	
			- Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DAERAH YANG IKMNYA TUMBUH, BERKEMBANG DAN TERSEBAR_x000D_[Base Line]	1 DAERAH	100,00%	1.961.000.000,00	1.816.525.282,00	92,63%	
	Kementerian Perdagangan		Peningkatan Perdagangan Luar Negeri				535.782.000,00	495.375.083,00	92,46%	
			- Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	2 kegiatan	100,00%	535.782.000,00	495.375.083,00	92,46%	
				Dokumen/Surat terkait ekspor-impor di daerah yang diterbitkan	2 Dokumen	100,00%				
				Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada UKM	2 kegiatan	100,00%				
				Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	100,00%				
			Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				993.787.000,00	872.559.924,00	87,80%	
			- Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah_x000D_[Base Line]	2 Daerah	100,00%	993.787.000,00	872.559.924,00	87,80%	
				Kegiatan Pangan Nusa_x000D_[Base Line]	2 Daerah	100,00%				
	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdaaanaan Dalam	1 Daerah		100,00%						

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Negeri_x000D_[Base Line]						
				Pemberdayaan Konsumen di Daerah_x000D_[Base Line]	1 Daerah	100,00%				
				Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah_x000D_[Base Line]	1 BPSMB	100,00%				
				Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta kegiatan perdagangan di Daerah_x000D_[Base Line]	2 Produk	100,00%				
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%				
JUMLAH							3.490.569.000,00	3.184.460.289,00	91,23%	
17	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				17.685.186.000,00	16.289.693.393,00	92,11%	
			- Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pendampingan pada 74.910 Desa [Base Line]	215 Orang	30,57%	17.685.186.000,00	16.289.693.393,00	92,11%	
				Program Inovasi Desa [Base Line]	1 provinsi	10,02%				
JUMLAH							17.685.186.000,00	16.289.693.393,00	92,11%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
18	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan				1.409.651.000,00	1.294.668.209,00	91,84%	
			- Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar_x000D_[Base Line]	62 Puskesmas	100,00%	470.575.000,00	441.244.800,00	93,77%	
				Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standar dengan Kriteria Khusus_x000D_[Base Line]	7 RSUD	100,00%				
				Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center_x000D_[Base Line]	1 Unit RMC	0,00%				
			- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil_x000D_[Base Line]	2 Kabupaten/Kota	100,00%	172.755.000,00	138.644.600,00	80,26%	
				Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga_x000D_[Base Line]	28 Puskesmas	100,00%				
			- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas)_x000D_[Base Line]	1 rumah sakit pengampu	100,00%	355.000.000,00	342.834.446,00	96,57%	
				Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar_x000D_[Base Line]	1 rumah sakit	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%	241.946.000,00	226.717.255,00	93,71%	
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%				
			- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas_x000D_[Base Line]	1 Puskesmas	100,00%	62.980.000,00	40.311.500,00	64,01%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN	
								Rp	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
			- Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi_x000D_[Base Line]	7 Kabupaten/Kota	100,00%	106.395.000,00	104.915.608,00	98,61%		
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan				805.675.000,00	764.700.554,00	94,91%		
			- Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	51.504.000,00	45.774.317,00	88,88%		
			- Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	411.616.000,00	388.674.645,00	94,43%		
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%					
			- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Layanan Data dan Informasi_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	205.235.000,00	201.159.808,00	98,01%		
			- Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Pelayanan Kesehatan Haji_x000D_[Base Line]	1069 Jemaah haji	100,00%	137.320.000,00	129.091.784,00	94,01%		
			Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional				454.000.000,00	384.113.791,00	84,61%		
			- Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)_x000D_[Base Line]	1 Dokumen	100,00%	454.000.000,00	384.113.791,00	84,61%		
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				2.761.131.000,00	2.514.459.366,00	91,07%		
			- Surveilans dan Karantina Kesehatan	Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%	517.685.000,00	445.709.490,00	86,10%		
					Layanan Respon KLB dan Wabah_x000D_[Base Line]	7 Layanan					100,00%
					Layanan Imunisasi_x000D_[Base Line]	8 Layanan					97,00%
			- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Capaian Eliminasi Malaria_x000D_[Base Line]	5 Layanan	100,00%	508.471.000,00	452.340.367,00	88,96%		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Tular Vektor dan Zoonotik	Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%				
			- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS_x000D_[Base Line]	1 layanan	97,00%	578.800.000,00	515.158.096,00	89,00%	
				Layanan Pengendalian Penyakit TB_x000D_[Base Line]	7 layanan	100,00%				
				Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%				
			- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular_x000D_[Base Line]	20 Layanan	100,00%	654.000.000,00	633.324.176,00	96,84%	
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan internal (over head)_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	370.500.000,00	352.134.630,00	95,04%	
			- Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sumber Daya Manusia yang berkualitas bidang Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA_x000D_[Base Line]	27 Orang	92,00%	131.675.000,00	115.792.607,00	87,94%	
			Kefarmasian dan Alat Kesehatan				1.803.826.000,00	1.594.996.200,00	88,42%	
			- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Tenaga Kefarmasian yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar_x000D_[Base Line]	349 Tenaga Kefarmasian	100,00%	401.910.000,00	355.397.100,00	88,43%	
			- Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	100,00%	386.320.000,00	340.328.600,00	88,09%	
			- Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina_x000D_[Base Line]	12 Sarana	100,00%	189.299.000,00	171.557.500,00	90,63%	
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada	Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan	8 Layanan	100,00%	465.651.000,00	407.686.350,00	87,55%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	pelaksanaan tugas teknis lainnya_x000D_[Base Line]						
			- Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Guna_x000D_[Base Line]	80 Tenaga	100,00%	207.414.000,00	189.519.000,00	91,37%	
			- Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji_x000D_[Base Line]	30 PRODUK	100,00%	153.232.000,00	130.507.650,00	85,17%	
			Pembinaan Kesehatan Masyarakat				7.750.029.000,00	6.749.625.133,00	87,09%	
			- Pembinaan Gizi Masyarakat	Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTD) pada Ibu Hamil dan Balita_x000D_[Base Line]	7 Kabupaten/Kota	100,00%	1.380.964.000,00	1.342.126.187,00	97,19%	
				Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	100,00%				
				Peningkatan Surveilans Gizi_x000D_[Base Line]	7 Kabupaten/Kota	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%	674.415.000,00	603.182.851,00	89,44%	
			- Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji_x000D_[Base Line]	425 Jemaah Haji	100,00%	735.071.000,00	691.518.500,00	94,08%	
				Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)_x000D_[Base Line]	33 Unit	100,00%				
			- Pembinaan Kesehatan Keluarga	Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal_x000D_[Base Line]	6 Kabupaten/Kota	100,00%	1.218.180.000,00	1.016.220.698,00	83,42%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN	
								Rp	%		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
				Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan_x000D_[Base Line]	2 Kabupaten/Kota	100,00%					
				Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama_x000D_[Base Line]	5 Kabupaten/Kota	100,00%					
				Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjangkaran Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10_x000D_[Base Line]	6 Kabupaten/Kota	100,00%					
				Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia_x000D_[Base Line]	4 Kabupaten/Kota	100,00%					
			- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat_x000D_[Base Line]	1 Layanan	85,00%	2.725.402.000,00	2.211.668.547,00	81,15%		
				Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media_x000D_[Base Line]	1 Layanan	85,00%					
				Dukungan Sektoral dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%					
				Pemberdayaan Masyarakat_x000D_[Base Line]	1 Layanan	80,00%					
			- Penyehatan Lingkungan	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat_x000D_[Base Line]	377 TPM	100,00%	1.015.997.000,00	884.908.350,00	87,10%		
				Pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi Syarat Kesehatan_x000D_[Base Line]	667 TTU	100,00%					

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengawasan terhadap Sarana Air Minum_x000D_[Base Line]	867 Sarana Air Minum (SA)	100,00%				
				Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)_x000D_[Base Line]	54 Desa/Kelurahan	87,50%				
			Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				2.605.045.000,00	2.149.568.850,00	82,52%	
			- Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah_x000D_[Base Line]	1 Dokumen	100,00%	292.888.000,00	237.041.500,00	80,93%	
			- Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah_x000D_[Base Line]	1 Dokumen	100,00%	1.392.470.000,00	1.172.247.400,00	84,18%	
			- Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan_x000D_[Base Line]	1 Dokumen	100,00%	251.712.000,00	200.040.700,00	79,47%	
			- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi_x000D_[Base Line]	1 Dokumen	100,00%	667.975.000,00	540.239.250,00	80,88%	
				Dukungan Manajemen Program PPSDM Kesehatan_x000D_[Base Line]	3 Dokumen	100,00%				
JUMLAH							17.589.357.000,00	15.452.132.103,00	87,85%	
19	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappeda	Perencanaan Pembangunan Nasional				913.291.000,00	781.953.186,00	85,62%	
			- Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen	90,00%	913.291.000,00	781.953.186,00	85,62%	
JUMLAH							913.291.000,00	781.953.186,00	85,62%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
20	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal				602.105.000,00	520.015.178,00	86,37%	
			- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	115 Perusahaan	100,00%	602.105.000,00	520.015.178,00	86,37%	
	Kementerian Dalam Negeri		Bina Administrasi Kewilayahan				329.287.000,00	239.852.700,00	72,84%	
	- Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		Layanan PTSP Prima	16 Kabupaten/Kota	100,00%	329.287.000,00	239.852.700,00	72,84%		
JUMLAH							931.392.000,00	759.867.878,00	81,58%	
TOTAL DEKONSENTRASI							98.237.067.000,00	91.899.458.756,00	93,55%	

Sumber : Laporan Monev APBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

B. Dana Tugas Pembantuan

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Tugas Pembantuan itu sendiri merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

1. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana

Alokasi dana Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018, yaitu berasal dari 3 Kementerian dengan 3 Perangkat Daerah Pelaksana. Total Dana Tugas Pembantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 76.881.644.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.572.028.611,00 atau sebesar 83,99%.

Rincian Instansi pemberi, Perangkat Daerah pelaksana, program/kegiatan, indikator kinerja kegiatan, pagu dana dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

.

Tabel 5.2.
REKAPITULASI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				14.649.385.000,00	14.460.758.087,00	98,71%	
			- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jaringan Irigasi Tersier	0 Ha	10,00%	836.200.000,00	828.430.000,00	99,07%	
				Pengembangan Sumber Air	3 Unit	100,00%				
				Pembangunan Embung Pertanian	4 Unit	100,00%				
			- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	1100 Ha	100,00%	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00%	
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen_x000D_[Base Line]	290 Unit	100,00%	6.231.705.000,00	6.143.272.748,00	98,58%	
				Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	24 Bulan Layanan	100,00%	2.583.680.000,00	2.521.003.339,00	97,57%	
			- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani_x000D_[Base Line]	7 Layanan	100,00%	597.800.000,00	568.052.000,00	95,02%	
			Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat				1.164.285.000,00	1.112.043.505,00	95,51%	
			- Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Mutu dan keamanan pakan_x000D_[Base Line]	50 Sampel	100,00%	50.000.000,00	46.931.000,00	93,86%	
			- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan_x000D_[Base Line]	2500 Dosis	100,00%	67.500.000,00	39.170.000,00	58,03%	
			- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Optimalisasi Reproduksi_x000D_[Base Line]	1050 Akseptor	100,00%	770.635.000,00	753.109.697,00	97,73%	
			- Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH_x000D_[Base Line]	0.01 Sertifikat	100,00%	109.150.000,00	106.806.308,00	97,85%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			Halal)	Pengendalian Pemotongan Betina produktif_x000D_[Base Line]	0.01 Lokasi	100,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%	167.000.000,00	166.026.500,00	99,42%	
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan				12.034.250.000,00	10.013.521.006,00	83,21%	
			- Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi_x000D_[Base Line]	10.150 Hektar	8,00%	9.759.060.000,00	7.838.345.126,00	80,32%	
				Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Sereal Lainnya_x000D_[Base Line]	7500 Hektar	61,00%				
				Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal_x000D_[Base Line]	12 Bulan	87,00%				
				Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	Hektar	99,00%				
			- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bulan Layanan	99,00%	208.000.000,00	207.240.600,00	99,63%	
			- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan_x000D_[Base Line]	30 Unit	95,00%	1.600.940.000,00	1.532.040.480,00	95,70%	
				Fasilitas RMU / Revitalisasi RMu	4,00 Unit	96,00%				
			- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	1500.00 Hektar	93,00%	466.250.000,00	435.894.800,00	93,49%	
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan				31.791.976.000,00	23.173.501.755,00	72,89%	
			- Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar_x000D_[Base Line]	12 Bulan	95,24%	46.125.000,00	43.200.000,00	93,66%	
			- Dukungan Perlindungan Perkebunan	Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan_x000D_[Base Line]	250 Ha	99,37%	838.800.000,00	832.537.162,00	99,25%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN			
								Rp	%				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10			
				Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan_x000D_[Base Line]	12 Bln	100,00%							
				Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan_x000D_[Base Line]	1 Provinsi	99,65%							
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	12 Bln	98,29%	378.200.000,00	369.565.337,00	97,72%				
			- Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya_x000D_[Base Line]	2150 Ha	76,33%	24.803.000.000,00	17.073.832.210,00	68,84%				
				Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah_x000D_[Base Line]	12 Bln	91,35%							
			- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan_x000D_[Base Line]	2 KT	93,27%	924.460.000,00	819.534.504,00	88,65%				
				Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan[Base Line]	2 Kegiatan	84,92%							
				Pengembangan Pemasaran Hasil PerkebunanBase Line]	2 Kegiatan	95,45%							
			- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan[Base Line]	58 Ha	90,72%	4.801.391.000,00	4.034.832.542,00	84,03%				
				Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan_x000D_[Base Line]	12 Bln	73,69%							
			Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura								3.265.000.000,00	2.104.573.790,00	64,46%
			- Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Bawang Merah_x000D_[Base Line]	25 Ha	100,00%	2.487.500.000,00	1.271.345.000,00	51,11%				
				Kawasan Aneka	50 Ha	20,00%							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Cabai_x000D_[Base Line]						
			- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	Benih buah lainnya	20000 Batang	0,00%	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67%	
				Benih Cabai_x000D_[Base Line]	20000 Batang	100,00%				
			- Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I_x000D_[Base Line]	4 Layanan	100,00%	160.000.000,00	159.841.000,00	99,90%	
				Layanan Perkantoran_x000D_[Base Line]	12 Layanan	100,00%				
			- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Kawasan Jeruk_x000D_[Base Line]	25 Ha	100,00%	337.500.000,00	334.632.500,00	99,15%	
			- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah_x000D_[Base Line]	2 Unit	100,00%	220.000.000,00	219.155.290,00	99,62%	
JUMLAH							62.904.896.000,00	50.864.398.143,00	80,86%	
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				969.922.000,00	945.199.772,00	97,45%	
			- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Ditjen. Pengembangan Kawasan Transmigrasi_x000D_[Base Line]	1 LAYANAN	99,11%	188.640.000,00	186.964.500,00	99,11%	
			- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Laporan/ Kesepakatan Koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi_x000D_[Base Line]	1 Laporan	99,62%	33.312.000,00	33.185.000,00	99,62%	
			- Pengembangan Usaha Transmigrasi	Kawasan Perkotaan Baru yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustrinya_x000D_[Base Line]	1 KPB	99,78%	45.000.000,00	44.900.000,00	99,78%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
								Rp	%	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			- Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya_x000D_[Base Line]	1 Kawasan	92,80%	486.970.000,00	466.105.000,00	95,72%	
				Kawasan Perkotaan Baru yang terpenuhi layanan sosial budayanya_x000D_[Base Line]	1 KPB	99,95%				
			- Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Bidang Tanah yang Difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigran_x000D_[Base Line]	733 Bidang	99,10%	216.000.000,00	214.045.272,00	99,10%	
JUMLAH							969.922.000,00	945.199.772,00	97,45%	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan				10.875.040.000,00	10.738.078.446,00	98,74%	
			- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pemeliharaan Rutin Jalan_x000D_[Base Line]	74.31 km	100,00%	10.875.040.000,00	10.738.078.446,00	98,74%	
				Pemeliharaan Preventif Jalan_x000D_[Base Line]	1.6 km	100,00%				
				Rekonstruksi Jalan_x000D_[Base Line]	0.5 km	100,00%				
				Layanan Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional_x000D_[Base Line]	1 Layanan	100,00%				
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%				
			Pengelolaan Sumber Daya Air				2.131.786.000,00	2.024.352.250,00	94,96%	
			- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara_x000D_[Base Line]	80 Km	100,00%	2.131.786.000,00	2.024.352.250,00	94,96%	
				Layanan Internal (Overhead)_x000D_[Base Line]	2 Layanan	100,00%				
JUMLAH							13.006.826.000,00	12.762.430.696,00	98,12%	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	PAGU	REALISASI		REVISI - REVISI / KENDALA & PERMASALAHAN
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN						76.881.644.000,00	64.572.028.611,00	83,99%	

Sumber : Laporan Monev APBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

BAB VI



PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan public, sinergi dan saling menguntungkan. Keberadaan kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak lain menempati posisi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi suatu kebutuhan bagi Pemerintah dalam upaya mewujudkan program-program pembangunan daerah.

Kerja Sama Daerah menurut PP Nomor 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Tujuan kerjasama adalah memfasilitasi kerjasama berbagai bidang serta memperkuat dan meningkatkan peranan dari pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan standar pelayanan umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah daerah.

Manfaat kerjasama ini adalah mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi daerah.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan berbagai jenis tugas umum pemerintahan, tugas umum pemerintahan tersebut meliputi :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. Adapun rincian kerja sama tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1

TABEL 6.1
KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAIN

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kerja sama Pembangunan Daerah	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Nomor : 011 PKS-BAPPEDA/I/2018 Nomor : 120.23/30/I/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1 tahun		

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pada prinsipnya pengertian kerja sama daerah dengan pihak ketiga merupakan kerjasama antara kepala daerah dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 pihak ketiga yang dapat menjadi mitra Kerjasama Dengan Pihak Ketiga terdiri atas :

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga meliputi :

- a. Kerja sama dalam pelayanan publik;
- b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. Kerja sama investasi; dan
- d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga dapat berupa:

- a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
- b. Kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri), secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 telah melakukan beberapa Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. Beberapa kerja sama tersebut antara lain tertuang pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

TABEL 6.2
KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PIHAK KETIGA

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sinergi Informasi Investasi dan Kemudahan Mendapatkan Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama antara PT.PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kep.Babel	Nomor :014.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2018 Nomor : 415.4/7/DPMPTSP/2018	Untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Prov.Kep.Babel	5 Tahun		
2	Jejaring Pelayanan dan Rujukan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Jantung dan Pembuluh Darah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov.Kep.Babel	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov.Kep.Babel dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita	Nomor : 415.42/10/PKS/RSUD P/2018 Nomor : HK. 03.01/XX.4/0023/2018	Untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK baik tenaga medik, Keperawatan dan tenaga lainnya serta sarana alat kesehatan, prasarana dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM bagi kepentingan masyarakat dalam rangka	2 Tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.			
3.	Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Pada Transaksi Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Nomor : 900/5.a/BAKUDA/2018 Nomor : 08.4/DIR/P/2018	Untuk mewujudkan terlaksannya Sistem Pembayaran Non Tunai pada Pengeluaran dan Belanja Daerah terkait Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA yang berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	1 Tahun		
4.	Layanan Kas Daerah	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perjanjian Kerjasama antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Nomor : 900/5.b/BAKUDA/2018 Nomor : 08.3/DIR/P/2018	Sebagai Kesepakatan PARA PIHAK dalam meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perbankan kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Penyusunan <i>DETAILED ENGINEERING DESIGN</i> Bangunan Pengendali Sedimentasi Pada Muara Sungai Jelitik Sungailiat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Nomor : 415.43/464/DKP Nomor : 13/PKS/BPPT-PEM PROV.BABEL/03/2018	-	1 tahun		
6.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Bagi Aparatur Pemerintah Desa Prov.Kep.Babel Tahun 2018	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Kep.Babel	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Kep.Babel dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Nomor : 420/20/SEKJEN-YAH/2018 Nomor : 074/311.a/DPMD/2018	Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas Jabatan secara profesional, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikan dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						masyarakat, membantu para lulusan diklat untuk meraih sukses di tempat kerja dan lingkungan masyarakat.			
7.	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018	Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Universitas Bangka Belitung (UBB)	Perjanjian Kerjasama antara Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Bangka Belitung (UBB)	Nomor : 420/001/VII/2018 Nomor : 28/UN50.1.1/KS/2018	Sebagai pedoman bersama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018	6 Bulan		
8.	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. TAZKIA FINANSIAL SEJAHTERA	Perjanjian Kerjasama antara Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. TAZKIA FINANSIAL SEJAHTERA	Nomor : 500/521/IV/2018 Nomor : 088/TF5/VII/07/2018	-	5 Bulan		
9.	Pemberdayaan dan Pelatihan Bagi Warga Binaan Lembaga	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi	Lembaga Masyarakat an Narkotika	Perjanjian Kerjasama antara Dewan Kerajinan Nasional	Nomor : 88/DekranasdaProv.K ep.Babel/XII/2018	Untuk memberikan pelatihan, ketrampilan dan	3 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	Kelas III Pangkalpinang	Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang	Nomor : W.7.PAS.PAS.4.PK.01.05.II-3665	bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Pangkalpinang			
10.	Pemberdayaan dan Pelatihan Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	Nomor : 89/DekranasdaProv.K ep.Babel/XII/2018 Nomor : W7.PAS.1-PK.01.08.03-991	Untuk memberikan pelatihan, ketrampilan dan bimbingan teknis bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang	3 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DPMPTSP	PT. PLN (Persero)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT.PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung	Nomor : 415.4/1/DPMPTSP/2018 Nomor : 001.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2018	Tujuannya untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kep. Babel	1 tahun		
12	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Asuransi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	BKPSDM	PT. Asuransi Jiwa Taspen	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen	Nomor : 415.4/2/BKPSDM/2018 Nomor : MoU.001/TL/012018	Memberikan perlindungan dan jaminan kepada peserta Asuransi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Provinsi Kep.Babel	1 tahun		
13.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	BAPPEDA	Institut Pertanian Bogor	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Pertanian Bogor	Nomor : 415.42/6/BAPPEDA/2018 Nomor : 011/IT3/KsM/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pola kemitraan di Prov.Kep.Babel 2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK			
14.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen Keuangan serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel	Bakuda	Universitas Pendidikan Indonesia	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kep.Babel dengan Universitas Pendidikan Indonesia	Nomor : 074 / 2.a/l/2018 Nomor : 0654/UN40/HK/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, manajemen keuangan serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di prov.kep.babel 2. terciptanya hubungan profesional,	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan2 berlaku pada PARA PIHAK.			
15.	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	DINKES	Rumah Sehat Baznas – Timah Pangkalpinang	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Rumah Sehat Baznas-Timah Pangkalpinang	Nomor : 415.4/4/DINKES/2018 Nomor : 18/050/MGT/RSB-PKP/II/2018	Untuk mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Kep. Babel	1 tahun		
16.	Rehabilitasi, Bangun dan Pemanfaatan Gapura Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	DISHUB	PT. Cinda Karya Media	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Cinda Karya Media	Nomor : 415.4/3/DISHUB/2018 Nomor : 01/CDA/MoU/02/2018	1. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan 2. menggunakan barang milik daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dishub Prov.Kep.Babel 3. Merekondisi barang milik daerah	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan memperindah wajah kota 4. meningkatkan pendapatan asli daerah Prov.Kep.Babel			
17.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Portal Berita LKBN Antara	Diskominfo	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Nomor : 483/8/Diskominfo/2018 Nomor : 024/MOU/DIR-AP/II/2018	Agar masyarakat Provinsi Kep. Babel mendapatkan informasi dan edukasi berkelanjutan tentang program dan kebijakan pembangunan serta kinerja Pemerintah Prov.Kep.Babel sehingga memperoleh pemahaman dan dukungan publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu kerangka pendapat umum pisitif tentang kinerja Pemprov Babel.	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kep. Babel dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Nomor : 415.42/9/MOU/RSUD P/2018 Nomor : HK.03.01/XX.4/0022/2018	Untuk Mendorong terciptanya sinergitas dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan akses serta kesadaran masyarakat di Prov.Kep.Babel	1 tahun		
19.	Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Diskominfo	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi Atma Luhur	Kesepakatan Bersama Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi Atma Luhur	Nomor : 074/8.a/Kominfo/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraandi Prov.Kep.Babel 2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan dengan	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						menghormati dan mengindahan Peraturan-Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.			
20.	Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kesepakatan Bersama Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Nomor : 415.43/13/I/2018 Nomor : 16/MOU/BPPT-PEM PROV BABEL/03/2018	Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Pengembangan Pembangunan dan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Indonesia Research Institute Japan – Jakarta	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Indonesia Research Institute Japan – Jakarta	Nomor : 415.42/II/MOU/I/2018 Nomor : 001/SKK/IRIJ/III/2018	Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah 1. Mempromosikan pariwisata guna menarik wisatawan Jepang langsung ke Babel 2. Mendatangkan inventasi di Provinsi Kep.Bangka Belitung 3. Menyalurkan bantuan hibah, corporate social responsibility dan program lainnya dari Jepang dengan beban Nol Rupiah kepada Bangka Belitung	1 tahun		
22.	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Universitas Terbuka	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Universitas Terbuka	Nomor : 420/16/BKPSDMD/2018 Nomor : 2874/UN31/DN/2018	1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Prov.Kep.Babel 2. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, Saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan2 yang berlaku pada PARA PIHAK.			
23.	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Jaringan Perbankan di Provinsi Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep. Babel	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Nomor : 580/14/2018 Nomor : B.475-DIR/DJS/04/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Prov.Kep.Babel melalui pemanfaatan jasa dan layanan jaringan perbankan yang dimiliki oleh	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PIHAK KEDUA.			
24	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Serta Pembangunan Daerah di Prov.Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas	Nomor : 420/21/SEKJEN-YAH/2018 Nomor : 074/16.a/DPMD/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama Ini adalah : 1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Prov.Kep.babel 2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, saling menguntungkan	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK			
25.	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Bank BRI Syariah	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Bank BRI Syariah	Nomor : 580/15/IV/2018 Nomor : B.006-BRIS/04-2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan jasa dan layanan perbankan syariah yang dimiliki oleh Pihak Kedua.	1 tahun		
26.	Kerjasama dalam bidang Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kep.Babel	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Nomor : 415.4/16.b/I/2018 Nomor : KS.302/MoU.15/KB/I V/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di	5 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melalui kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika			
27.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah, Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Univeristas Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Univeristas Bangka Belitung	Nomor : 415.4/16.d/VII/2018 Nomor : 1792/UN50/KS/2018	Tujaun Kesepakatan Bersama ini adalah : 1. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Pola Kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Terciptanya hubungan profesional,	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan-Peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.			
28.	Pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi Cerdas	Pemerintah Prov.Kep.Babel	PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni)	Nomor : 586/16.c/BAKUDA/2018 Nomor : 004/Treni/LGL-MOU/V/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : 1. meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki PARA PIHAK 2. meningkatkan pengabdian PARA PIHAK kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 3. mendorong peningkatan kinerja PIHAK KESATU dalam mengemban tugas	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan misalnya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial.			
29.	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 415.4/16.e/l/2018 Nomor : 19513/001/BPS/1900/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan data dan/atau informasi statistik guna mendukung perencanaan, pengembangan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	Nomor : 415.42/18/DISDIK/2018 Nomor : 85.MoU/ITS/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini : 1. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA, dan pengembangan potensi daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Terciptanya hubungan profesional, sinergi, dan saling memberi manfaat antara PARA PIHAK dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Nomor : 41.5/19/DISDIK/2018 Nomor : 1416/PL28/MOU/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini : 1. Memberikan kesempatan yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan pengembangan SDM 2. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma POLMAN Babel di Provinsi Kep. Bangka Belitung 3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						daya daerah di Pro.Kep.Babel.			
32.	Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 415.4/27/KUKM/2018 Nomor : 522/HK.02.02/JI/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 tahun		
33.	Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung	Nomor : 180/29/III/2018 Nomor : W7.PP.01.02-4182	Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama PARA PIHAK dalam Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di	1 tahun		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
35.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Prov.Kep.Babel	Universitas Tarumanegara	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Prov.Kep.Babel dengan Universitas Tarumanegara	Nomor : 074/33/I/2018 Nomor : 2803-R/9281/UNTAR/XI/2018	Tujuan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan SDM serta pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 Tahun		
36.	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan	Malindo Business & Cultural Center	UKM Karya Leluhur	Memorandum Of Understanding Between Malindo	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal	-		

NO.	BIDANG YANG DIKERJA SAMAKAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG DIAJAK KERJA SAMA	NAMA PERJANJIAN KERJASAMA/NAMA BADAN KERJASAMA	DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA	HASIL/TUJUAN	JANGKA WAKTU	KENDALA/ MASALAH	
								MASALAH	SOLUSI PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan			Business & Cultural Center and UKM Karya Leluhur		balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.			
37.	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan	Malindo Business & Cultural Center	UKM Sinyo'E	Memorandum Of Understanding Between Malindo Business & Cultural Center and UKM Sinyo'E	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.	-		
38.	Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan	Malindo Business & Cultural Center	CV. Media 46	Memorandum Of Understanding Between Malindo Business & Cultural Center and CV. Media 46	-	Tujuan MoU adalah untuk memperkuat kerjasama timbal balik serta berusaha untuk mempromosikan pertukaran timbal balik.	-		

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

1. Koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting untuk dilaksanakan mengingat peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah.
2. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi khususnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain, koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor DJPb) dalam hal koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Program/kegiatan bersumber dari dana APBN di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Forum Komunikasi dalam hal Pertukaran Data, Peraturan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Narasumber dan Informasi lainnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Analisis/Kajian Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung. Kerjasama dengan Kantor DJPb juga dalam hal penyerahan DIPA untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Pembentukan Forum Koordinasi Instansi Vertikal.
3. Kerjasama dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban serta diadakannya Rapat Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan meningkatkan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan oleh pemerintah, kabupaten/kota, serta meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana-dana APBN yang ada di wilayah Provinsi, dengan koordinasi dengan pejabat pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di instansi vertikal se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dalam rangka percepatan pembangunan, Instansi Vertikal serta Forkopimda telah melakukan sinergitas melalui dana hibah bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah, belum didukung dengan batas daerah yang kongkrit. Penetapan batas daerah tersebut secara garis besar belum sampai pada titik koordinat dan masih bersifat indikatif.

Dalam rangka kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi timbulnya permasalahan perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan pemerataan pertumbuhan. Kebijakan di bidang batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 4 (empat) diantaranya sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah dianggap selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota masih terjadi sengketa, ada kabupaten yang belum menerima keberadaan Permendagri ini karena garis imajiner (garis batas) yang menghubungkan Pilar Batas Utama (PBU)/ Pilar Acuan Batas Utama (PABU) antara satu dengan yang lainnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dikehendaki untuk dilakukan penegasan kembali sesuai kondisi saat ini.

Segmen batas daerah yang belum ditetapkan Permendagri adalah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2018 telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian terhadap 2 (dua) segmen batas daerah dimaksud sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian pada tahun 2017 yang lalu.

Kendala yang dihadapi adalah pada saat verifikasi di lapangan bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Oknum perangkat kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka mengklaim bahwa pada daerah tertentu yang menjadi wilayah perbatasan dengan kecamatan di Kota Pangkalpinang merupakan sepenuhnya masuk kewilayah kecamatan Mendo Barat. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan

kesepakatan yang telah dibuat oleh Tim PBD Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini cukup mengganggu proses verifikasi lapangan pada saat itu.

Setelah difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat bersama dengan Tim PBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akhirnya penyelesaian sudah pada tahap penyusunan draft Permendagri yang telah dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD. Dan direncanakan Permendagri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan terbit pada tahun 2019.

Upaya penyelesaian revisi Permendagri batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur yang telah dilakukan pada tahun 2017 telah menuai hasil dengan terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pengganti Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Upaya lain yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan, letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten yang berselisih, dan untuk mengetahui potensi apa yang terkandung di dalamnya;
3. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah di Wilayah I yang dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara;
5. Rapat koordinasi penyelesaian daerah bersama Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota membahas batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
6. Koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta arahan dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Verifikasi lapangan meninjau lokasi PBU dan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota serta didampingi perangkat kecamatan setempat.

Hasil dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan survei dan pengumpulan data di lapangan terkait batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 17 dan 18 Januari 2018 di Kabupaten Bangka Tengah;

2. Telah dilaksanakan Rapat Penandatanganan Hasil Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang mengundang Pimpinan Daerah Kota Pangkalpinang, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Tengah pada tanggal 22 Maret 2018;
3. Telah dilaksanakan Rapat Tertutup dalam rangka penyelesaian batas daerah yang mengundang pimpinan daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 Mei 2018;
4. Telah dilaksanakan Rapat Tertutup dalam rangka tindak lanjut hasil rapat tertutup pada tanggal 14 Mei 2018 tentang penyelesaian batas daerah yang mengundang pimpinan daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Mei 2018;
5. Telah disampaikan usulan rancangan Permendagri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Gubernur Kep. Bangka Belitung ke Dirjen BAK Kemendagri pada tanggal 27 Agustus 2018;
6. Telah menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rencana dan Agenda Utama Penyelenggaraan Penegasan Batas pada tanggal 5 s.d. 7 September 2018 di Sumatera Utara;
7. Telah menghadiri undangan Rapat Identifikasi Masalah Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok BAD 1 ke Ditjen BAK Kemendagri RI pada tanggal 18 s.d. 19 September 2018;
8. Telah dilakukan Verifikasi Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Oktober 2018 bersama Tim PBD Pusat ditandai dengan Berita Acara No: 07/BA-VER/BAD.1/X2018;
9. Telah dilakukan Verifikasi Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Oktober 2018 Tim PBD Pusat ditandai dengan Berita Acara No: 06/BA-VER/BAD.1/X2018;
10. Telah disampaikan hasil koreksi Draft Rancangan Permendagri Batas Daerah melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Dirjen BAK Kemendagri pada tanggal 30 November 2018;
11. Telah dilaksanakan penelusuran dan survei di lapangan terkait batas daerah antara Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah pada tanggal 11 Desember 2018 di Kabupaten Bangka Tengah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai Ancaman bencana alam yang sering terjadi seperti bencana Bencana Kebakaran, Bencana Banjir, Bencana Puting beliung, Bencana Kekeringan, Bencana Tanah Longsor, Bencana Konflik, Bencana Kegagalan Teknologi, Bencana Kebakaran, Bencana Pasang Air Laut, Bencana Epidemi/Kejadian Luar Biasa

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah bergerak mengikuti penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan

terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditingkat masyarakat juga sudah banyak terbentuk kelompok-kelompok siaga bencana, dari kondisi tersebut maka disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu merumuskan dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2012 s.d. 2017, yang mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia yang dipadukan dengan data dari catatan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data DIBI, BNPB tahun 2011, dan BPBD Bangka Belitung, 2011), terdapat 10 jenis bencana yang mengancam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ancaman bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, konflik sosial serta gagal teknologi. Penentuan tingkat ancaman bencana menggunakan matriks tingkat ancaman, dengan memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam tiga kategori yaitu : rendah (0,0 –0,3), sedang (> 0,3 –0,6), dan tinggi (> 0,6 –1,0).

Skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam tigakategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut :

- a) Rendah : 0,0 - 0,3, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/ Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20 persen
- b) Sedang: >0,3 - 0,6, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500 – 1000 jiwa/Km², dan jumlah penduduk kelompok rentan 20 persen –40 persen
- c) Tinggi : >0,6 – 1,0, apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/Km² , dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40 persen.

Tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada skala ancaman masing-masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Berdasarkan matriks di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman masing-masing jenis bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a) Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar rendah adalah banjir.
- b) Tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman rendah dan indeks penduduk terpapar tinggi adalah epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi.
- c) Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain : cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, konflik sosial dan tanah longsor.
- d) Tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain: Kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, dan kekeringan.

Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi tersebut. Dapat dikatakan bahwa indeks ini disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Beberapa jenis ancaman (peta ancaman) telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, Jenis ancaman yang telah memilikistandar SNI tersebut meliputi :Gempa bumi (tim sembilan revisi gempa), Longsor (ES DM), Gunung api (PVMBG), Banjir (PU).

Sedangkan ancaman non SNI merupakanpetaancaman yang belum diperoleh dari Kementrian/Lembaga terkait. Zonasi ancaman ini harus ditentukan menggunakan metodologi yang telah ditentukan. Jenis ancaman non SNI meliputi:Tsunami, Konflik Sosial, Kegagalan teknologi, Epidemi danWabah Penyakit, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Kebakaran Hutan dan Lahan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Dari kejadian bencana yang tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana antara lain:

- a. Dilakukan penyeleksian terhadap korban yang terkena bencana.
- b. Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban bencana yang telah diseleksi.
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap bantuan yang diberikan.
- d. Menyusunan peta rawan bencan untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Turun langsung kelapangan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana saat tanggap darurat
- g. Melakukan rekonstruksi terhadap semua sektor pasca bencana

2. Status Bencana

Kejadian-kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dikategorikan dalam status bencana yang sifatnya regional ataupun lokal. Ancaman bencana yang dapat terjadi di wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitungyang dapat ditentukan statusnya dalam katagori Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal(Kabupaten/Kota) tergantung dari besar skala kejadiannya, antara lain :

- a) Banjir
Dari hasil kajian risiko maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman banjir tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar rendah. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir sedang.
- b) Cuaca Ekstrim
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman cuaca ekstrim sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- c) Tanah Longsor
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman tanah longsor sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman banjir tinggi.
- d) Gempa Bumi
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gempa bumi rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gempa bumi sedang.
- e) Epidemik dan Wabah Penyakit
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman epidemik dan wabah penyakit rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman epidemik dan wabah penyakit sedang.
- f) Kebakaran Lahan dan Hutan
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kebakaran lahan dan hutan tinggi.
- g) Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman gelombang ekstrim dan abrasi sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi tinggi.
- h) Kekeringan
Dari hasil kajian risiko, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kekeringan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman kekeringan tinggi.
- i) Konflik Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman konflik sosial sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Maka tingkat ancaman konflik sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tinggi.

j) **Gagal Teknologi**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. Dengan demikian maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat ancaman gagal teknologi tinggi.

Selama ini dalam praktek penanggulangan bencana masih ditekankan pada “saat” serta “setelah (pasca)” terjadinya bencana. Sementara itu pada tahap “sebelum (pra)” terjadinya bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang “rawan bencana” untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Setiap ancaman atau bahaya yang terdapat di suatu daerah memiliki risiko yang berbeda dari masing-masing jenis bencana. Tetapi pada umumnya ancaman ini merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah dan diatasi, misalnya “daerah gunung api, daerah gempa, daerah longsor dan sebagainya. Sedangkan yang masih mungkin untuk dilakukan perubahan dan perbaikan adalah kerentanan. Untuk meningkatkan kapasitas, harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan/pengetahuan masyarakat di suatu daerah dengan misalnya tidak berdiam pada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana tersebut.

3. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Urusan Wajib Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan Anggaran di APBD Induk sebesar Rp 11.976.831.141,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.203.466.361,-, sedangkan belanja langsung sebesar Rp 7.773.364.780,-.

Pada tahun 2018 urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 17 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.305.986.490,- Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10.009.035.636,- atau 88,53%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.296.950.854,- atau 11,47%, dengan komposisi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 4.128.782.289,- atau 94,76% dengan sisa anggaran Rp 228.192.271,- atau 5,24% dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.949.011.930,- atau 84,62% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.068.758.583,- atau 15,38% dari total Pagu anggaran.

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Keterbatasan kewenangan provinsi sebagai koordinator, motivator dan katalisator percepatan upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten/kota membutuhkan kebijakan dan strategi khusus dalam menyusun rencana penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah provinsi terbatas hanya pada aset provinsi yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah provinsi perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam mengantisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana. Penguatan kelembagaan dan partisipasi segala pihak dengan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya menjadi salah satu fokus pencapaian yang perlu diperhitungkan. Selain itu mekanisme dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan darurat bencana pada status darurat bencana provinsi juga perlu diperkuat. Keseluruhan komponen ini perluditunjang dengan strategi signifikan untuk pengurangan risiko bencana dalam wilayah kewenangan provinsi. Oleh karenanya kegiatan bencana dan daerah yang berpotensi menjadi kewenangan provinsi perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Proses identifikasi ini telah melahirkan zona prioritas penanggulangan bencana provinsi. Secara umum Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana adalah :

- a. Mengsiagakan personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
- b. Mengadakan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- c. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan Penanggulangan bencana
- d. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu
- e. Penelitian, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana
- f. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
- g. Perlindungan masyarakat dari bencana
- h. Sarana dan Prasarana antara lain Peralatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana berupa peralatan penyelamatan (perahu dolpin, Kapal LCT, Alat komunikasi, tenda darurat, kendaraan untuk penanggulangan bencana.
- i. Bantuan untuk masyarakat terdiri dari :
 - Tanggap darurat bencana yang meliputi bahan pangan, bahan sandang, peralatan dapur keluarga, peralatan dapur umum.
 - Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) bagi korban bencana.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya.

- a. Bencana Angin Puting beliung
- b. Bencana Banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut
- c. Bencana Kebakaran.
- d. Bencana Tanah Longsor (kecelakaan kerja penambang TI)
- e. Bencana Tersambar petir

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai

dengan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Ada empat kriteria pemilihan lokasi KEK. Pertama, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Kedua, didukung oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ketiga, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak di wilayah yang memiliki sumberdaya unggulan. Keempat, mempunyai batas yang jelas. Pembentukan KEK dapat diusulkan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun badan usaha. Usulan pemerintah provinsi langsung disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha disampaikan melalui pemerintah provinsi. Baik usulan provinsi maupun badan usaha, harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memfokuskan pada peningkatan ekspor dan investasi pada beberapa kawasan khusus yang memang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki provinsi ini yang dapat menjadi peluang dalam menarik investasi, diantaranya letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat ideal bagi pengembangan pusat logistik dan distribusi karena dilewati oleh jalur maritim internasional dan posisi Indonesia terletak di tengah pasar yang sangat besar, yaitu pasar ASEAN.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, terdapat dua kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung dan Kawasan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah. Kedua kawasan ekonomi khusus tersebut telah diusulkan kepada yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Bangka Belitung.

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi

dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah (Ayu Prima Yesuari, 2011).

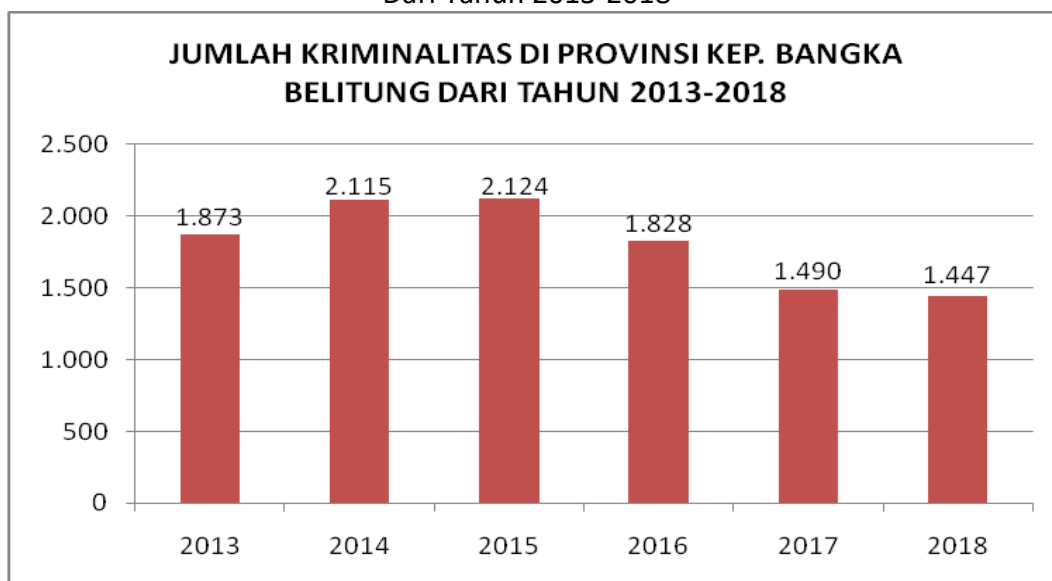
Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme, Atau Lainnya)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2018 tidak terjadi konflik berbasis SARA dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator keamanan menunjukan jumlah kriminalitas konvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 1.447 kasus, namun demikian jika dilihat dari tahun 2013 sd 2018 trennya atau perkembangannya menurun.

Tabel 6.3
Jumlah Kriminalitas di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Dari Tahun 2013-2018



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Secara umum jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2018 sebanyak 83 orang, yang terdiri 77 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jika dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IVc), dan terendah adalah Pengatur Muda (IIa). Sementara itu pangkat dan golongan yang paling banyak adalah Penata Muda (IIIb) sebanyak 22 orang, kemudian diikuti Pengatur Tingkat I (IId) sebanyak 12 orang dan Pengatur Muda (IIIa) sebanyak 12 orang.

Berdasarkan eselonering, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, eselonering tertinggi adalah IIa yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian eselon IIIa yang merupakan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) orang, eselon IVa yang merupakan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, sebanyak 11 (sebelas) orang, dan selebihnya non eselon.

Berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, tingkat pendidikan tertinggi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pasca Sarjana/S-2 sebanyak 6 orang, sedangkan terendah

adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 35 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana S1 sebanyak 40 orang.

Tabel 6.4
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Pangkat Golongan, serta Jenis Kelamin Per Desember 2018

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	0	1
2	Pembina Tk. I/IVb	2	0	2
3	Pembina/IVa	2	1	3
4	Penata Tk. I/ IIIId	6	1	7
5	Penata/IIIc	5	2	7
6	Penata Muda Tk. I/IIIb	22	-	22
7	Penata Muda/ IIIa	7	-	7
8	Pengatur Tk. I/IIId	12	-	12
9	Pengatur/ IIc	8	1	9
10	Pengatur Muda Tk. I/IIb	-	-	-
11	Pengatur Muda/IIa	12	1	13
	Jumlah	77	6	83

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 6.5
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2018

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IIa	1	0	1
2	IIIa	4	1	5
3	IVa	10	1	11
4	JFU	18	2	20
5	JFT	44	2	46
	Jumlah	77	6	83

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 6.6
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/S2	6	1	7
2	Sarjana/S-1	37	3	40
3	Diploma-III	1	1	2
4	SLTA	33	1	34
	Jumlah	77	6	83

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2018, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibiayai melalui APBD. Total anggaran APBD sebesar Rp 18.055.895.385,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 9.926.861.495,- dan belanja langsung sebesar Rp.8.129.033.890,-.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Salah satu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan masing-masing. Secara umum kendala yang dihadapi adalah jumlah Linmas yang masih kurang dan alokasi anggaran pembinaan Linmas yang masih minim.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Keikutsertaan aparat keamanan terutama Polri dalam rangka pengurangan gangguan keamanan sangat diperlukan, terutama terhadap kejadian-kejadian yang menjurus anarkis. Selain pada saat kejadian, Polri juga dapat meminimalkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan juga melakukan patroli dan mengoptimalkan fungsi intelegennya serta penguasaan wilayah oleh anggota.

BAB VII



PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2018 yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pengendalian dan pengawasan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif (Pemerintah Daerah), legislatif (DPRD), masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Selanjutnya perlu dilakukan peningkatan terhadap pencapaian target pembangunan agar target dan sasaran pembangunan dalam tahun berikutnya seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 dapat tercapai.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Segala kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 akan menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah masyarakat bumi serumpun sebalai, dengan harapan semoga kinerja pembangunan akan semakin baik dan segala upaya yang kita lakukan demi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

LAMPIRAN



REALISASI KEUANGAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		475.321.592.205,00	480.405.681.506,00	98,07	444.883.686.878,32	92,61	35.521.994.627,68	7,39
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	232.683.220.205,00	235.860.540.205,00	100,00	234.610.199.635,00	99,47	1.250.340.570,00	0,53
a	Gaji dan Tunjangan	166.257.672.205,00	165.112.700.205,00	103,68	171.192.039.945,00	103,68	-6.079.339.740,00	-3,68
b	Tambahan Penghasilan PNS	66.425.548.000,00	70.747.840.000,00	89,64	63.418.159.690,00	89,64	7.329.680.310,00	10,36
II	BELANJA LANGSUNG	242.638.372.000,00	244.545.141.301,00	96,15	210.273.487.243,32	85,99	34.271.654.057,68	14,01
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	21.068.276.000,00	19.577.236.000,00	83,33	17.505.777.253,32	89,42	2.071.458.746,68	10,58
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.960.585.000,00	1.805.185.000,00	100,00	1.693.073.370,00	93,79	112.111.630,00	6,21
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.516.000,00	379.876.000,00	100,00	261.930.639,00	68,95	117.945.361,00	31,05
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	198.800.000,00	198.800.000,00	100,00	189.410.000,00	95,28	9.390.000,00	4,72
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	427.555.000,00	177.555.000,00	100,00	175.821.800,00	99,02	1.733.200,00	0,98
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	302.189.000,00	302.189.000,00	100,00	257.252.700,00	85,13	44.936.300,00	14,87
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.843.000,00	80.843.000,00	100,00	73.773.200,00	91,25	7.069.800,00	8,75
7	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	986.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.969.422.000,00	5.969.422.000,00	100,00	5.044.767.294	84,51	924.654.705,68	15,49
9	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi	7.915.417.000,00	7.915.417.000,00	100,00	7.897.862.251,00	99,78	17.554.749,00	0,22
10	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	1.791.215.000,00	1.791.215.000,00	100,00	1.657.894.500,00	92,56	133.320.500,00	7,44
11	Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	956.734.000,00	956.734.000,00	100,00	253.991.499	26,55	702.742.501,00	73,45
12	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	64.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	19.523.659.000,00	15.919.209.000,00	100,00	15.248.589.828,00	95,79	670.619.172,00	4,21
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	6.982.906.000,00	3.378.456.000,00	100,00	3.122.378.900,00	92,42	256.077.100,00	7,58
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	6.848.604.000,00	6.848.604.000,00	100,00	6.506.552.257,00	95,01	342.051.743,00	4,99
3	Pengembangan Kurikulum SMA	1.634.719.000,00	1.634.719.000,00	100,00	1.627.614.923,00	99,57	7.104.077,00	0,43
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	1.738.430.000,00	1.738.430.000,00	100,00	1.729.644.448,00	99,49	8.785.552,00	0,51
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	100,00	2.262.399.300,00	97,56	56.600.700,00	2,44

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	30.227.149.000,00	28.189.149.000,00	90,00	18.936.432.464,00	67,18	9.252.716.536,00	32,82
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	5.979.643.000,00	4.004.843.000,00	75,00	2.683.739.914,00	67,01	1.321.103.086,00	32,99
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	5.750.553.000,00	5.750.553.000,00	100,00	5.311.806.331,00	92,37	438.746.669,00	7,63
3	Pengembangan Kurikulum SMK	2.211.463.000,00	2.148.263.000,00	100,00	1.702.123.926,00	79,23	446.139.074,00	20,77
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	1.379.490.000,00	1.379.490.000,00	100,00	1.293.268.500,00	93,75	86.221.500,00	6,25
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	14.906.000.000,00	14.906.000.000,00	75,00	7.945.493.793,00	53,30	6.960.506.207,00	46,70
D	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	9.588.890.000,00	9.359.178.000,00	92,00	7.846.773.703,00	83,84	1.512.404.297,00	16,16
1	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	1.122.880.000,00	1.122.880.000,00	80,00	855.504.213,00	76,19	267.375.787,00	23,81
2	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.403.607.000,00	1.173.895.000,00	100,00	1.072.865.320,00	91,39	101.029.680,00	8,61
3	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	723.455.000,00	723.455.000,00	100,00	688.726.816,00	95,20	34.728.184,00	4,80
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.279.948.000,00	1.279.948.000,00	100,00	1.230.209.840,00	96,11	49.738.160,00	3,89
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)	5.059.000.000,00	5.059.000.000,00	80,00	3.999.467.514,00	79,06	1.059.532.486,00	20,94
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	4.123.508.000,00	3.587.971.904,00	100,00	3.348.899.834,00	93,34	239.072.070,00	6,66
1	Peningkatan Mutu PTK SMA	1.391.144.000,00	1.325.065.000,00	100,00	1.259.088.990,00	95,02	65.976.010,00	4,98
2	Peningkatan Mutu PTK SMK	1.630.747.000,00	1.421.874.904,00	100,00	1.271.977.944,00	89,46	149.896.960,00	10,54
3	Peningkatan Mutu PTK SLB	1.101.617.000,00	841.032.000,00	100,00	817.832.900,00	97,24	23.199.100,00	2,76
F	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	34.532.950.000,00	34.452.540.000,00	100,00	30.006.890.865,00	87,10	4.445.649.135,00	12,90
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	11.200.000.000,00	10.374.390.000,00	100,00	9.637.445.300,00	92,90	736.944.700,00	7,10
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	1.210.200.000,00	1.255.200.000,00	100,00	1.182.802.218,00	94,23	72.397.782,00	5,77
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.070.200.000,00	1.112.200.000,00	100,00	804.910.763,00	72,37	307.289.237,00	27,63
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.232.600.000,00	1.277.600.000,00	100,00	1.238.396.495,00	96,93	39.203.505,00	3,07
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	883.400.000,00	924.400.000,00	100,00	826.962.625,00	89,46	97.437.375,00	10,54
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.355.000.000,00	1.374.200.000,00	100,00	842.303.599,00	61,29	531.896.401,00	38,71
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.516.800.000,00	2.618.800.000,00	100,00	1.834.048.457,00	70,03	784.751.543,00	29,97
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.123.000.000,00	1.172.000.000,00	100,00	1.009.535.332,00	86,14	162.464.668,00	13,86
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	880.000.000,00	914.000.000,00	100,00	850.905.619,00	93,10	63.094.381,00	6,90
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	534.200.000,00	550.200.000,00	100,00	395.659.008,00	71,91	154.540.992,00	28,09
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	314.200.000,00	322.200.000,00	100,00	321.825.000,00	99,88	375.000,00	0,12
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	724.400.000,00	748.400.000,00	100,00	707.501.000,00	94,54	40.899.000,00	5,46
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	296.800.000,00	300.800.000,00	100,00	300.755.000,00	99,99	45.000,00	0,01

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	679.000.000,00	699.000.000,00	100,00	647.430.000,00	92,62	51.570.000,00	7,38
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	250.000.000,00	252.000.000,00	100,00	252.000.000,00	100,00	0,00	0,00
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	700.600.000,00	724.600.000,00	100,00	655.610.000,00	90,48	68.990.000,00	9,52
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	576.950.000,00	598.950.000,00	100,00	517.854.750,00	86,46	81.095.250,00	13,54
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.116.400.000,00	1.153.400.000,00	100,00	1.133.799.790,00	98,30	19.600.210,00	1,70
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	445.800.000,00	455.800.000,00	100,00	451.789.000,00	99,12	4.011.000,00	0,88
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.245.200.000,00	1.290.200.000,00	100,00	1.023.655.000,00	79,34	266.545.000,00	20,66
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	577.600.000,00	583.600.000,00	100,00	575.754.300,00	98,66	7.845.700,00	1,34
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	605.000.000,00	612.000.000,00	100,00	520.304.996,00	85,02	91.695.004,00	14,98
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	412.800.000,00	435.800.000,00	100,00	400.390.000,00	91,87	35.410.000,00	8,13
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	1.657.600.000,00	1.704.600.000,00	100,00	1.312.908.827,00	77,02	391.691.173,00	22,98
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	993.200.000,00	1.023.200.000,00	100,00	854.575.536,00	83,52	168.624.464,00	16,48
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.338.000.000,00	1.367.000.000,00	100,00	1.105.000.000,00	80,83	262.000.000,00	19,17
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	594.000.000,00	608.000.000,00	100,00	602.768.250,00	99,14	5.231.750,00	0,86
G	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	12.658.800.000,00	13.735.620.000,00	100,00	12.111.685.310,00	88,18	1.623.934.690,00	11,82
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	3.778.800.000,00	4.637.800.000,00	100,00	4.420.271.200,00	95,31	217.528.800,00	4,69
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	875.000.000,00	898.000.000,00	100,00	898.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	907.400.000,00	100,00	907.400.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	904.400.000,00	929.420.000,00	100,00	681.554.000,00	73,33	247.866.000,00	26,67
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	576.000.000,00	588.000.000,00	100,00	566.180.000,00	96,29	21.820.000,00	3,71
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	898.400.000,00	100,00	429.646.000,00	47,82	468.754.000,00	52,18
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	508.200.000,00	522.200.000,00	100,00	469.070.000,00	89,83	53.130.000,00	10,17
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	246.000.000,00	246.000.000,00	100,00	29.991.000,00	12,19	216.009.000,00	87,81
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	881.600.000,00	911.600.000,00	100,00	902.000.000,00	98,95	9.600.000,00	1,05
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.144.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	826.061.610,00	70,01	353.938.390,00	29,99
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.099.200.000,00	1.121.200.000,00	100,00	1.094.351.500,00	97,61	26.848.500,00	2,39
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	428.800.000,00	439.600.000,00	100,00	437.200.000,00	99,45	2.400.000,00	0,55
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	450.000.000,00	456.000.000,00	100,00	449.960.000,00	98,68	6.040.000,00	1,32

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	29.943.000.000,00	31.212.910.000,00	100,00	27.815.385.789,00	89,12	3.397.524.211,00	10,88
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	11.569.800.000,00	12.059.040.000,00	100,00	11.331.655.350,00	93,97	727.384.650,00	6,03
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	916.200.000,00	944.200.000,00	100,00	814.497.700,00	86,26	129.702.300,00	13,74
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	589.400.000,00	589.400.000,00	100,00	463.800.000,00	78,69	125.600.000,00	21,31
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	569.800.000,00	589.800.000,00	100,00	519.857.000,00	88,14	69.943.000,00	11,86
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	635.600.000,00	655.600.000,00	100,00	647.828.250,00	98,81	7.771.750,00	1,19
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	330.400.000,00	345.400.000,00	100,00	324.047.454,00	93,82	21.352.546,00	6,18
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	767.200.000,00	791.200.000,00	100,00	741.042.756,00	93,66	50.157.244,00	6,34
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	812.800.000,00	842.800.000,00	100,00	826.424.800,00	98,06	16.375.200,00	1,94
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.196.800.000,00	1.196.800.000,00	100,00	505.519.860,00	42,24	691.280.140,00	57,76
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.382.400.000,00	1.382.400.000,00	100,00	882.668.843,00	63,85	499.731.157,00	36,15
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	1.201.600.000,00	1.234.600.000,00	100,00	1.141.585.257,00	92,47	93.014.743,00	7,53
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	377.600.000,00	384.600.000,00	100,00	378.882.500,00	98,51	5.717.500,00	1,49
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	817.600.000,00	827.600.000,00	100,00	826.925.000,00	99,92	675.000,00	0,08
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	273.000.000,00	280.000.000,00	100,00	270.270.000,00	96,53	9.730.000,00	3,48
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	333.200.000,00	333.200.000,00	100,00	331.000.000,00	99,34	2.200.000,00	0,66
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	834.400.000,00	834.400.000,00	100,00	651.092.948,00	78,03	183.307.052,00	21,97
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	221.920.000,00	88,77	28.080.000,00	11,23
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	555.800.000,00	564.800.000,00	100,00	540.823.800,00	95,75	23.976.200,00	4,25
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	1.222.200.000,00	1.222.200.000,00	100,00	950.000.000,00	77,73	272.200.000,00	22,27
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	666.400.000,00	673.000.000,00	100,00	673.000.000,00	100,00	0,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	520.000.000,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	0,00	0,00
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	542.200.000,00	552.200.000,00	100,00	552.200.000,00	100,00	0,00	0,00
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	239.000.000,00	95,60	11.000.000,00	4,40
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	1.144.000.000,00	1.188.000.000,00	100,00	1.097.405.000,00	92,37	90.595.000,00	7,63
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	505.600.000,00	515.600.000,00	100,00	501.197.964,00	97,21	14.402.036,00	2,79
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	535.000.000,00	1.022.070.000,00	100,00	737.522.087,00	72,16	284.547.913,00	27,84
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	462.000.000,00	467.000.000,00	100,00	438.802.570,00	93,96	28.197.430,00	6,04
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	432.000.000,00	442.000.000,00	100,00	431.416.650,00	97,61	10.583.350,00	2,39
I	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	23.107.440.000,00	23.035.240.000,00	100,00	19.496.226.584,00	84,64	3.539.013.416,00	15,36
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	7.754.640.000,00	7.282.640.000,00	100,00	6.838.552.404,00	93,90	444.087.596,00	6,10
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	636.200.000,00	657.200.000,00	100,00	599.546.050,00	91,23	57.653.950,00	8,77
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	658.600.000,00	681.600.000,00	100,00	453.518.112,00	66,54	228.081.888,00	33,46
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	962.400.000,00	996.900.000,00	100,00	795.159.270,00	79,76	201.740.730,00	20,24
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.056.200.000,00	1.087.200.000,00	100,00	918.263.456,00	84,46	168.936.544,00	15,54
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	777.400.000,00	795.400.000,00	100,00	700.000.000,00	88,01	95.400.000,00	11,99
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	245.000.000,00	256.000.000,00	100,00	170.078.509,00	66,44	85.921.491,00	33,56
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.569.400.000,00	1.610.400.000,00	100,00	1.319.418.775,00	81,93	290.981.225,00	18,07
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.231.800.000,00	1.263.300.000,00	100,00	598.851.050,00	47,40	664.448.950,00	52,60
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	807.800.000,00	821.800.000,00	100,00	663.958.773,00	80,79	157.841.227,00	19,21
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung	453.600.000,00	464.600.000,00	100,00	364.814.099,00	78,52	99.785.901,00	21,48
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	873.600.000,00	873.600.000,00	100,00	576.753.856,00	66,02	296.846.144,00	33,98
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	602.000.000,00	629.800.000,00	100,00	473.600.550,00	75,20	156.199.450,00	24,80
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	929.600.000,00	968.600.000,00	100,00	875.475.739,00	90,39	93.124.261,00	9,61
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	638.400.000,00	658.400.000,00	100,00	601.406.577,00	91,34	56.993.423,00	8,66
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	828.000.000,00	828.000.000,00	100,00	564.954.500,00	68,23	263.045.500,00	31,77
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	799.800.000,00	824.800.000,00	100,00	681.623.364,00	82,64	143.176.636,00	17,36
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	982.400.000,00	1.009.400.000,00	100,00	1.007.312.500,00	99,79	2.087.500,00	0,21

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	300.600.000,00	300.600.000,00	100,00	294.099.500,00	97,84	6.500.500,00	2,16
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	436.000.000,00	447.000.000,00	100,00	428.037.000,00	95,76	18.963.000,00	4,24
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	564.000.000,00	578.000.000,00	100,00	570.802.500,00	98,75	7.197.500,00	1,25
J	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	57.864.700.000,00	65.476.087.397,00	100,00	57.956.825.613,00	88,52	7.519.261.784,00	11,48
1	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.213.800.000,00	1.376.027.586,00	100,00	1.213.800.000,00	88,21	162.227.586,00	11,79
2	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.073.800.000,00	1.090.800.466,00	100,00	1.073.800.000,00	98,44	17.000.466,00	1,56
3	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.180.200.000,00	1.461.202.832,00	100,00	1.114.230.000,00	76,25	346.972.832,00	23,75
4	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	882.000.000,00	884.831.521,00	100,00	880.800.000,00	99,54	4.031.521,00	0,46
5	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.190.000.000,00	1.618.307.149,00	100,00	1.618.307.149,00	100,00	-	0,00
6	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	2.202.200.000,00	2.705.336.861,00	100,00	2.179.800.000,00	80,57	525.536.861,00	19,43
7	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	987.000.000,00	1.198.263.464,00	100,00	1.183.096.464,00	98,73	15.167.000,00	1,27
8	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	847.986.614,00	100,00	767.200.000,00	90,47	80.786.614,00	9,53
9	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	473.200.000,00	567.218.962,00	100,00	468.160.000,00	82,54	99.058.962,00	17,46
10	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	319.200.000,00	367.433.900,00	100,00	319.200.000,00	86,87	48.233.900,00	13,13
11	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	729.400.000,00	729.492.105,00	100,00	729.400.000,00	99,99	92.105,00	0,01
12	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	295.400.000,00	344.315.119,00	100,00	295.400.000,00	85,79	48.915.119,00	14,21
13	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	677.600.000,00	762.658.035,00	100,00	656.040.000,00	86,02	106.618.035,00	13,98
14	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	134.400.000,00	147.684.959,00	100,00	134.400.000,00	91,00	13.284.959,00	9,00
15	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	704.200.000,00	849.291.152,00	100,00	677.200.000,00	79,74	172.091.152,00	20,26
16	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	581.000.000,00	705.333.991,00	100,00	581.000.000,00	82,37	124.333.991,00	17,63
17	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.118.600.000,00	1.342.207.637,00	100,00	1.118.600.000,00	83,34	223.607.637,00	16,66
18	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	450.800.000,00	522.522.905,00	100,00	450.800.000,00	86,27	71.722.905,00	13,73
19	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.250.200.000,00	1.296.610.966,00	100,00	1.250.200.000,00	96,42	46.410.966,00	3,58
20	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	504.000.000,00	504.124.576,00	100,00	485.800.000,00	96,37	18.324.576,00	3,63
21	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	532.000.000,00	703.614.043,00	100,00	532.000.000,00	75,61	171.614.043,00	24,39
22	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	359.800.000,00	359.967.424,00	100,00	359.800.000,00	99,95	167.424,00	0,05
23	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	1.450.400.000,00	1.721.090.511,00	100,00	1.450.400.000,00	84,27	270.690.511,00	15,73
24	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	872.200.000,00	1.050.798.019,00	100,00	872.200.000,00	83,00	178.598.019,00	17,00
25	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	874.085.298,00	100,00	873.600.000,00	99,94	485.298,00	0,06

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	880.600.000,00	881.636.770,00	100,00	869.960.000,00	98,68	11.676.770,00	1,32
27	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	903.000.000,00	1.220.286.033,00	100,00	903.000.000,00	74,00	317.286.033,00	26,00
28	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	567.000.000,00	700.764.621,00	100,00	567.000.000,00	80,91	133.764.621,00	19,09
29	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	879.200.000,00	1.019.551.647,00	100,00	849.240.000,00	83,30	170.311.647,00	16,70
30	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	508.200.000,00	556.476.915,00	100,00	508.200.000,00	91,32	48.276.915,00	8,68
31	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	770.000.000,00	803.007.434,00	100,00	766.060.000,00	95,40	36.947.434,00	4,60
32	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	1.002.400.000,00	1.240.261.192,00	100,00	1.002.400.000,00	80,82	237.861.192,00	19,18
33	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	960.400.000,00	1.114.505.677,00	100,00	960.400.000,00	86,17	154.105.677,00	13,83
34	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	375.200.000,00	375.557.138,00	100,00	375.200.000,00	99,90	357.138,00	0,10
35	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	919.800.000,00	1.031.243.721,00	100,00	919.800.000,00	89,19	111.443.721,00	10,81
36	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	588.000.000,00	728.405.048,00	100,00	588.000.000,00	80,72	140.405.048,00	19,28
37	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	569.800.000,00	667.455.641,00	100,00	569.800.000,00	85,37	97.655.641,00	14,63
38	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	645.400.000,00	678.641.363,00	100,00	645.400.000,00	95,10	33.241.363,00	4,90
39	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	330.400.000,00	419.543.298,00	100,00	330.400.000,00	78,75	89.143.298,00	21,25
40	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	768.691.366,00	100,00	767.200.000,00	99,81	1.491.366,00	0,19
41	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	764.252.050,00	100,00	691.880.000,00	90,53	72.372.050,00	9,47
42	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.050.000.000,00	1.486.386.446,00	100,00	1.050.000.000,00	70,64	436.386.446,00	29,36
43	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.209.600.000,00	1.543.001.420,00	100,00	1.186.640.000,00	76,90	356.361.420,00	23,10
44	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.051.400.000,00	1.215.447.433,00	100,00	1.040.840.000,00	85,63	174.607.433,00	14,37
45	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	330.400.000,00	351.676.040,00	100,00	330.400.000,00	93,95	21.276.040,00	6,05
46	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	817.500.000,00	904.005.610,00	100,00	817.500.000,00	90,43	86.505.610,00	9,57
47	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	273.000.000,00	286.260.000,00	100,00	253.991.000,00	88,73	32.269.000,00	11,27
48	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	333.200.000,00	333.471.368,00	100,00	333.200.000,00	99,92	271.368,00	0,08
49	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	833.000.000,00	871.906.374,00	100,00	833.000.000,00	95,54	38.906.374,00	4,46
50	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	203.000.000,00	203.293.727,00	100,00	203.000.000,00	99,86	293.727,00	0,14

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	554.400.000,00	554.843.718,00	100,00	554.400.000,00	99,92	443.718,00	0,08
52	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.222.200.000,00	1.236.206.241,00	100,00	1.222.200.000,00	98,87	14.006.241,00	1,13
53	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	666.400.000,00	768.314.988,00	100,00	666.400.000,00	86,74	101.914.988,00	13,26
54	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	455.000.000,00	455.078.017,00	100,00	446.074.000,00	98,02	9.004.017,00	1,98
55	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	478.800.000,00	491.256.763,00	100,00	478.800.000,00	97,46	12.456.763,00	2,54
56	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	214.200.000,00	214.200.000,00	100,00	210.000.000,00	98,04	4.200.000,00	1,96
57	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.001.000.000,00	1.007.038.396,00	100,00	1.001.000.000,00	99,40	6.038.396,00	0,60
58	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	442.400.000,00	461.778.061,00	100,00	412.580.000,00	89,35	49.198.061,00	10,65
59	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	124.600.000,00	155.945.500,00	100,00	124.600.000,00	79,90	31.345.500,00	20,10
60	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	641.200.000,00	647.883.045,00	100,00	641.200.000,00	98,97	6.683.045,00	1,03
61	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	663.600.000,00	677.382.793,00	100,00	663.600.000,00	97,97	13.782.793,00	2,03
62	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	967.400.000,00	1.047.268.259,00	100,00	967.400.000,00	92,37	79.868.259,00	7,63
63	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	1.061.200.000,00	1.074.441.690,00	100,00	1.050.280.000,00	97,75	24.161.690,00	2,25
64	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	684.600.000,00	693.327.638,00	100,00	670.040.000,00	96,64	23.287.638,00	3,36
65	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	210.000.000,00	255.828.323,00	100,00	210.000.000,00	82,09	45.828.323,00	17,91
66	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.377.600.000,00	1.489.048.606,00	100,00	1.350.440.000,00	90,69	138.608.606,00	9,31
67	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.082.200.000,00	1.180.074.695,00	100,00	1.082.200.000,00	91,71	97.874.695,00	8,29
68	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	852.965.160,00	100,00	692.685.000,00	81,21	160.280.160,00	18,79
69	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	453.600.000,00	481.622.917,00	100,00	453.040.000,00	94,07	28.582.917,00	5,93
70	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	880.304.148,00	100,00	873.600.000,00	99,24	6.704.148,00	0,76
71	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	602.000.000,00	651.004.712,00	100,00	577.920.000,00	88,77	73.084.712,00	11,23
72	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	928.200.000,00	929.801.958,00	100,00	885.192.000,00	95,20	44.609.958,00	4,80
73	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	639.800.000,00	762.801.393,00	100,00	632.800.000,00	82,96	130.001.393,00	17,04
74	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	193.200.000,00	316.381.053,00	100,00	181.440.000,00	57,35	134.941.053,00	42,65

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	704.200.000,00	1.319.666.507,00	100,00	669.390.000,00	50,72	650.276.507,00	49,28
76	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	859.600.000,00	863.692.423,00	100,00	859.600.000,00	99,53	4.092.423,00	0,47
77	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	267.400.000,00	267.547.488,00	100,00	250.600.000,00	93,67	16.947.488,00	6,33
78	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	446.000.000,00	483.135.439,00	100,00	446.000.000,00	92,31	37.135.439,00	7,69
79	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	198.000.000,00	199.694.000,00	100,00	198.000.000,00	99,15	1.694.000,00	0,85
80	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	150.000.000,00	150.085.000,00	100,00	147.600.000,00	98,34	2.485.000,00	1,66
81	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	144.132.132,00	100,00	144.000.000,00	99,91	132.132,00	0,09
82	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	157.567.627,00	100,00	144.000.000,00	91,39	13.567.627,00	8,61
83	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	220.000.000,00	226.735.781,00	100,00	220.000.000,00	97,03	6.735.781,00	2,97
84	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	182.000.000,00	182.098.499,00	100,00	182.000.000,00	99,95	98.499,00	0,05

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		58.839.230.494,00	52.334.778.323,00	98,60	46.214.838.494,16	88,31	6.119.939.828,84	11,69
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.788.136.486,00	14.356.741.031,00	100,00	13.762.947.254,00	95,86	593.793.777,00	4,14
a	Gaji dan Tunjangan	7.766.504.486,00	7.383.694.031,00	100,00	7.235.410.254,00	97,99	148.283.777,00	2,01
b	Tambahan Penghasilan PNS	7.021.632.000,00	6.973.047.000,00	100,00	6.527.537.000,00	93,61	445.510.000,00	6,39
II	BELANJA LANGSUNG	44.051.094.008,00	37.978.037.292,00	97,20	32.451.891.240,16	84,35	5.526.146.051,84	14,55
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.081.527.671,00	4.655.033.599,00	97,92	3.978.514.238,00	85,47	676.519.361,00	14,53
1	Pelayanan administrasi perkantoran	2.364.996.145,00	2.331.396.145,00	100,00	1.984.750.131,00	85,13	346.646.014,00	14,87
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	454.912.000,00	394.912.000,00	100,00	339.024.790,00	85,85	55.887.210,00	14,15
3	Peningkatan disiplin aparatur	155.460.000,00	155.460.000,00	100,00	154.460.000,00	99,36	1.000.000,00	0,64
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	187.603.330,00	169.078.330,00	100,00	89.743.726,00	53,08	79.334.604,00	46,92
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	349.778.620,00	282.316.000,00	100,00	221.341.678,00	78,40	60.974.322,00	21,60
6	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65.124.480,00	65.124.480,00	95,00	52.361.501,00	80,40	12.762.979,00	19,60
7	Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes	1.503.653.096,00	1.256.746.644,00	90,46	1.136.832.412,00	90,46	119.914.232,00	9,54
B	Program Kesehatan Masyarakat	8.714.855.570,00	6.233.035.570,00	95,20	4.871.707.419,00	78,16	1.361.328.151,00	21,84
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	767.409.180,00	366.004.180,00	90,00	263.746.600,00	72,06	102.257.580,00	27,94
2	Upaya peningkatan kesehatan keluarga	796.692.000,00	661.667.000,00	100,00	587.871.204,00	88,85	73.795.796,00	11,15
3	Penurunan kematian ibu	1.299.226.280,00	870.825.280,00	100,00	746.652.900,00	85,74	124.172.380,00	14,26
4	Penurunan angka kematian bayi	1.072.073.400,00	672.472.000,00	100,00	530.023.000,00	78,82	142.449.000,00	21,18
5	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	1.713.602.680,00	1.219.679.480,00	100,00	876.170.500,00	71,84	343.508.980,00	28,16
6	Peningkatan penyehatan lingkungan	982.864.730,00	500.758.630,00	95,24	367.018.190,00	79,71	133.740.440,00	26,71
7	Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	260.655.300,00	119.297.000,00	90,00	98.425.950,00	82,50	20.871.050,00	17,50
8	BOK provinsi (Dak non fisik)	1.822.332.000,00	1.822.332.000,00	86,36	1.401.799.075,00	76,92	420.532.925,00	23,08
C	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.783.341.300,00	3.944.108.600,00	97,89	3.152.191.325,16	79,92	791.917.274,84	20,08
1	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	188.353.800,00	188.353.800,00	100,00	151.152.200,00	80,25	37.201.600,00	19,75
2	Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	536.205.800,00	475.632.800,00	98,40	391.479.066,00	82,31	84.153.734,00	17,69
3	Peningkatan pengendalian penyakit malaria	186.889.500,00	186.889.500,00	100,00	169.440.520,00	90,66	17.448.980,00	9,34
4	Penanganan penyakit menular lainnya (hapatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	713.310.000,00	585.786.000,00	95,00	490.829.650,00	83,79	94.956.350,00	16,21
5	Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	85.835.000,00	80.218.000,00	100,00	75.029.600,00	93,53	5.188.400,00	6,47
6	Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas,	201.616.000,00	187.199.000,00	100,00	170.772.719,16	91,23	16.426.280,84	8,77
7	Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	672.171.000,00	416.796.100,00	100,00	339.943.371,00	81,56	76.852.729,00	18,44
8	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	2.198.960.200,00	1.823.233.400,00	89,68	1.363.544.199,00	74,79	459.689.201,00	25,21

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Pelayanan Kesehatan	20.377.246.333,00	18.669.348.588,00	96,07	16.662.075.472,00	89,25	2.007.273.116,00	10,75
1	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	1.193.496.673,00	858.387.800,00	92,26	639.982.894,00	74,56	218.404.906,00	25,44
2	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1.305.769.800,00	1.004.980.928,00	100,00	866.271.914,00	86,20	138.709.014,00	13,80
3	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	17.512.348.260,00	16.440.348.260,00	92,00	14.925.678.874,00	90,79	1.514.669.386,00	9,21
4	Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	365.631.600,00	365.631.600,00	100,00	230.141.790,00	62,94	135.489.810,00	37,06
E	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	3.885.536.434,00	3.297.924.235,00	96,11	2.715.336.145,00	82,33	582.588.090,00	17,67
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan/SDMK	1.611.109.200,00	1.595.149.200,00	90,00	1.188.112.600,00	74,48	407.036.600,00	25,52
2	Peningkatan pelayanan kefarmasian	1.203.595.234,00	855.494.400,00	94,44	753.365.221,00	88,06	102.129.179,00	11,94
3	Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	187.617.000,00	187.617.000,00	100,00	149.299.699,00	79,58	38.317.301,00	20,42
4	Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK fisik)	883.215.000,00	659.663.635,00	100,00	624.558.625,00	94,68	35.105.010,00	5,32
F	Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	1.208.586.700,00	1.178.586.700,00	100,00	1.072.066.641,00	90,96	106.520.059,00	9,04
1	Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis Laboratorium Kesehatan	1.046.856.700,00	1.016.856.700,00	100,00	933.873.180,00	91,84	82.983.520,00	8,16
2	Akreditasi Laboratorium (DAK non fisik)	161.730.000,00	161.730.000,00	100,00	138.193.461,00	85,45	23.536.539,00	14,55

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH: RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	63.289.219.538,90	63.942.919.111,90	99,35	53.356.282.906,92	83,44	10.586.636.204,98	16,56
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.604.392.888,90	26.877.057.605,90	100,00	25.474.531.488,00	94,78	1.402.526.117,90	5,22
a	Gaji dan Tunjangan	12.437.836.888,90	12.659.537.605,90	100,00	11.808.734.368,00	93,28	850.803.237,90	6,72
b	Tambahan Penghasilan PNS	13.166.556.000,00	14.217.520.000,00	100,00	13.665.797.120,00	96,12	551.722.880,00	3,88
II	BELANJA LANGSUNG	37.684.826.650,00	37.065.861.506,00	98,70	27.881.751.418,92	75,22	9.165.191.573,08	24,73
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.168.764.500,00	6.143.141.784,00	100,00	5.048.227.399,00	82,18	1.094.914.385,00	17,82
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.355.000,00	3.160.908.284,00	100,00	2.708.607.002,00	85,69	452.301.282,00	14,31
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.765.470.000,00	1.765.470.000,00	100,00	1.369.811.450,00	77,59	395.658.550,00	22,41
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	395.176.000,00	-	100,00	-	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.104.439.500,00	1.104.439.500,00	100,00	877.880.147,00	79,49	226.559.353,00	20,51
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	53.004.000,00	53.004.000,00	100,00	38.582.550,00	72,79	14.421.450,00	27,21
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.320.000,00	59.320.000,00	100,00	53.346.250,00	89,93	5.973.750,00	10,07
B	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	7.148.906.550,00	6.707.504.835,00	100,00	5.317.648.024,00	79,28	1.389.856.811,00	20,72
1	Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	199.454.300,00	150.772.585,00	100,00	129.665.657,00	86,00	21.106.928,00	14,00
2	Penjangkauan Bebas Pasung	121.764.250,00	121.764.250,00	100,00	93.640.317,00	-	28.123.933,00	-
3	Promosi Kesehatan Jiwa	112.450.000,00	112.450.000,00	100,00	65.425.700,00	58,18	47.024.300,00	41,82
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	6.678.320.000,00	6.285.600.000,00	100,00	5.003.866.350,00	79,61	1.281.733.650,00	20,39
5	Survey Kepuasan Masyarakat	36.918.000,00	36.918.000,00	100,00	25.050.000,00	67,85	11.868.000,00	32,15
C	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	966.203.283,00	766.203.283,00	96,00	692.664.452,00	90,40	54.620.317,00	7,13
1	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	563.967.500,00	363.967.500,00	80,00	325.821.390,00	89,52	38.146.110,00	10,48
2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homesivite	133.122.283,00	133.122.283,00	100,00	116.648.076,00	87,62	16.474.207,00	12,38
3	Penyusunan Panduan Praktik Klinis	27.462.500,00	27.462.500,00	100,00	25.540.616,00	93,00		

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	70.535.000,00	70.535.000,00	100,00	58.378.370,00	82,77	4.840.000,00	6,86
5	Penilaian Akreditasi	171.116.000,00	171.116.000,00	100,00	166.276.000,00	97,17	4.840.000,00	2,83
D	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	15.900.952.317,00	10.857.866.332,00	97,50	10.550.692.066,92	97,17	307.174.265,08	2,83
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	914.256.000,00	774.256.000,00	100,00	770.519.000,00	99,52	3.737.000,00	0,48
2	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	73.115.000,00	73.115.000,00	100,00	56.679.750,00	77,52	16.435.250,00	22,48
3	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	13.355.000,00	13.355.000,00	100,00	13.075.000,00	97,90	280.000,00	2,10
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II,dan III)	198.800.000,00	198.800.000,00	100,00	193.911.000,00	97,54	4.889.000,00	2,46
5	Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial	148.680.000,00	148.680.000,00	100,00	145.930.000,00	98,15	2.750.000,00	1,85
6	Rehabilitasi Dapur Gizi	198.680.000,00	198.680.000,00	100,00	197.527.000,00	99,42	1.153.000,00	0,58
7	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum	698.512.000,00	-	0,00	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	159.848.000,00	159.848.000,00	100,00	155.300.100,00	97,15	4.547.900,00	2,85
9	Rehabilitasi Gedung Laundry	235.318.285,00	206.208.000,00	100,00	199.256.000,00	96,63	6.952.000,00	3,37
10	Pembangunan Selasar	298.512.000,00	298.512.000,00	100,00	293.842.582,92	98,44	4.669.417,08	1,56
11	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	79.160.000,00	79.160.000,00	100,00	78.240.000,00	98,84	920.000,00	1,16
12	Pengujian dan Kalibrasi Rumah Sakit	93.880.000,00	93.880.000,00	100,00	91.796.480,00	97,78	2.083.520,00	2,22
13	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	923.116.000,00	923.116.000,00	100,00	920.541.000,00	99,72	2.575.000,00	0,28
14	Pengadaan Alat-Alat Laundry	2.736.921.200,00	-	0,00	-	-	-	-
15	Pengadaan PABX dan Jaringannya	149.400.000,00	149.400.000,00	100,00	147.458.500,00	98,70	1.941.500,00	1,30
16	Pengadaan Genset	488.852.000,00	488.852.000,00	100,00	480.240.478,00	98,24	8.611.522,00	1,76
17	Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	443.008.000,00	443.008.000,00	100,00	434.722.220,00	98,13	8.285.780,00	1,87
18	Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry, ruang tunggu dll)	178.080.000,00	178.080.000,00	100,00	175.593.800,00	98,60	2.486.200,00	1,40
19	Pengembangan SIMRS	170.899.900,00	100.899.900,00	50,00	11.145.080,00	11,05	89.754.820,00	88,95
20	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit	1.494.201.432,00	1.494.201.432,00	100,00	1.477.812.101,00	98,90	16.389.331,00	1,10
21	Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	1.368.542.500,00	-	0,00	-	-	-	-
22	Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00	3.709.680.000,00	97,62	90.320.000,00	2,38
23	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	1.035.815.000,00	1.035.815.000,00	100,00	997.421.975,00	96,29	38.393.025,00	3,71

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	7.500.000.000,00	12.591.145.272,00	100,00	6.272.519.477,00	49,82	6.318.625.795,00	100,74
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	7.500.000.000,00	12.591.145.272,00	100,00	6.272.519.477,00	49,82	6.318.625.795,00	50,18

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		155.665.485.650,00	153.230.498.345,00		139.554.093.703,72	91,07	13.676.404.641,28	9,80
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.349.911.596,00	31.649.306.291,00	100,00	28.627.525.226,00	90,45	3.021.781.065,00	10,56
	Gaji dan Tunjangan	12.504.863.596,00	12.511.510.691,00	100,00	12.093.845.176,00	96,66	417.665.515,00	3,45
	Tambahan Penghasilan PNS	19.845.048.000,00	19.137.795.600,00	100,00	16.533.680.050,00	86,39	2.604.115.550,00	15,75
II	BELANJA LANGSUNG	123.315.574.054,00	121.581.192.054,00		110.926.568.477,72	91,24	10.654.623.576,28	9,61
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	9.165.647.300,00	8.934.452.300,00	100,00	7.759.399.463,00	86,85	1.175.052.837,00	15,14
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.926.915.000,00	5.734.800.000,00	100,00	4.626.982.888,00	80,68	1.107.817.112,00	23,94
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.055.380.000,00	2.016.300.000,00	100,00	1.991.145.234,00	98,75	25.154.766,00	1,26
3	Penigkatan Disiplin Aparatur	402.180.000,00	402.180.000,00	100,00	379.052.000,00	94,25	23.128.000,00	6,10
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Dya Aparatur	754.819.800,00	754.819.800,00	100,00	748.094.341,00	99,11	6.725.459,00	0,90
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.352.500,00	26.352.500,00	100,00	14.125.000,00	53,60	12.227.500,00	86,57
B	Program Pelayanan Teknis Perawatan	3.396.455.600,00	3.311.070.600,00	100,00	1.974.089.816,00	59,62	1.336.980.784,00	67,73
1	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.396.455.600,00	3.211.070.600,00	100,00	1.881.819.816,00	58,60	1.329.250.784,00	70,64
2	Standar Operasional Prosedur Keperawatan	-	100.000.000,00		92.270.000,00	92,27	7.730.000,00	8,38
C	Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	15.063.587.000,00	14.993.913.000,00	100,00	14.335.167.617,00	95,61	658.745.383,00	4,60
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.622.443.000,00	5.622.443.000,00	100,00	5.236.451.617,00	93,13	385.991.383,00	7,37
2	Upaya Kesehatan Masyarakat	9.441.144.000,00	9.371.470.000,00		9.098.716.000,00	97,09	272.754.000,00	3,00
D	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	92.689.884.154,00	90.341.756.154,00	100,00	83.183.776.361,06	92,08	7.157.979.792,94	8,61
1	Promosi Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	188.145.000,00	188.145.000,00	100,00	183.163.050,00	97,35	4.981.950,00	2,72
2	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	886.110.440,00	866.110.440,00	-	640.170.934,00	73,91	225.939.506,00	35,29
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	5.508.732.714,00	5.508.732.714,00	100,00	4.434.197.019,00	80,49	1.074.535.695,00	
4	Pembangunan Gedung B Rumah Sakit	34.987.570.000,00	33.551.300.000,00	100,00	30.120.932.450,00	89,78	3.430.367.550,00	10,22
5	Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas 3 Rumah Sakit	4.468.468.000,00	4.468.468.000,00	100,00	4.347.067.000,00	97,28	121.401.000,00	2,72
6	Review DED dan Masterplan	1.998.408.000,00	1.800.000.000,00	100,00	1.769.033.500,00	98,28	30.966.500,00	1,72
7	Perluasan IPAL	693.450.000,00	-	-	-	-	-	-
8	Pengadaan Alat-alat Kesehatan(DAK)	43.959.000.000,00	43.959.000.000,00	100,00	41.689.212.408,06	94,84	2.269.787.591,94	5,16
E	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.674.135.220,66	91,85	325.864.779,34	8,15

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	3.674.135.220,66	91,85	325.864.779,34	8,15

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA	233.034.803.263,00	227.993.857.931,24	95,99	220.159.305.168,99	96,56	7.834.552.762,25	3,44
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.827.663.633,00	17.448.817.681,24	100,00	15.846.050.215,00	90,81	1.602.767.466,24	9,19
II	BELANJA LANGSUNG	216.207.139.630,00	210.545.040.250,00	91,99	204.313.254.953,99	97,04	6.231.785.296,01	2,96
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.120.049.254,00	4.120.049.254,00	100,00	3.262.725.561,00	79,19	857.323.693,00	20,81
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.478.689.000,00	2.478.689.000,00	100,00	1.969.466.531,00	79,46	509.222.469,00	20,54
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.147.543.254,00	1.147.543.254,00	100,00	851.630.942,00	74,21	295.912.312,00	25,79
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	230.950.000,00	230.950.000,00	100,00	228.360.000,00	98,88	2.590.000,00	1,12
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.000.000,00	122.000.000,00	100,00	106.325.444,00	87,15	15.674.556,00	12,85
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.312.000,00	73.312.000,00	100,00	45.045.644,00	61,44	28.266.356,00	38,56
6	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.555.000,00	67.555.000,00	100,00	61.897.000,00	91,62	5.658.000,00	8,38
B	Program Kebinamargaan	187.644.025.376,00	184.436.426.526,00	91,67	181.686.592.043,99	98,51	2.749.834.482,01	1,49
1	Perencanaan Pembangunan Jalan	2.426.950.000,00	1.305.809.000,00	100,00	1.264.611.000,00	96,85	41.198.000,00	3,15
2	Pembangunan Jalan	50.612.123.878,00	49.630.354.000,00	100,00	49.420.663.900,00	99,58	209.690.100,00	0,42
3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	801.690.000,00	62.860.000,00	8,40	5.280.000,00	8,40	57.580.000,00	91,60
4	Pembangunan Jembatan	3.539.200.000,00	3.467.242.000,00	100,00	3.462.525.500,00	99,86	4.716.500,00	0,14
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	46.320.442.931,00	45.818.668.931,00	100,00	44.964.694.401,99	98,14	853.974.529,01	1,86
6	Inspeksi Kondisi jalan	125.600.000,00	125.600.000,00	100,00	106.551.000,00	84,83	19.049.000,00	15,17
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.320.200.000,00	1.320.200.000,00	100,00	1.174.410.050,00	88,96	145.789.950,00	11,04
8	Inspeksi Kondisi jembatan	129.198.567,00	129.198.567,00	100,00	105.244.500,00	81,46	23.954.067,00	18,54
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II	2.211.220.000,00	2.211.220.000,00	100,00	1.710.263.530,00	77,34	500.956.470,00	22,66
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	82.400.000,00	82.400.000,00	100,00	79.845.500,00	96,90	2.554.500,00	3,10
11	Pembangunan Jalan (DAK)	80.075.000.000,00	80.075.000.000,00	100,00	79.392.502.662,00	99,15	682.497.338,00	0,85
12	Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2	-	103.937.014,00	-	-	-	103.937.014,00	100,00
13	Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka (Paket 1)	-	103.937.014,00	-	-	-	103.937.014,00	100,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Pengembangan Sumber Daya Air	17.190.830.000,00	15.468.247.000,00	100,00	14.499.789.281,00	93,74	968.457.719,00	6,26
1	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir	12.906.020.000,00	11.183.437.000,00	100,00	10.334.975.281,00	92,41	848.461.719,00	7,59
2	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	460.840.000,00	460.840.000,00	100,00	455.832.000,00	98,91	5.008.000,00	1,09
3	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	326.220.000,00	326.220.000,00	100,00	288.753.000,00	88,51	37.467.000,00	11,49
4	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	3.497.750.000,00	3.497.750.000,00	100,00	3.420.229.000,00	97,78	77.521.000,00	2,22
D	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	4.394.670.000,00	3.862.752.470,00	100,00	3.246.470.981,00	84,05	616.281.489,00	15,95
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	724.180.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.686.190.000,00	1.735.732.470,00	100,00	1.508.857.336,00	86,93	226.875.134,00	13,07
3	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.413.500.000,00	1.413.500.000,00	100,00	1.303.149.470,00	92,19	110.350.530,00	7,81
4	Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung	165.140.000,00	339.140.000,00	100,00	205.232.650,00	60,52	133.907.350,00	39,48
5	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	278.780.000,00	374.380.000,00	100,00	229.231.525,00	61,23	145.148.475,00	38,77
6	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	126.880.000,00	-	-	-	-	-	-
E	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.719.075.000,00	1.519.075.000,00	60,25	690.919.362,00	45,48	828.155.638,00	54,52
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	743.785.000,00	543.785.000,00	33,00	123.492.186,00	22,71	420.292.814,00	77,29
2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	975.290.000,00	975.290.000,00	87,50	567.427.176,00	58,18	407.862.824,00	41,82
F	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.138.490.000,00	1.138.490.000,00	100,00	926.757.725,00	81,40	211.732.275,00	18,60
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan	819.970.000,00	819.970.000,00	100,00	702.367.466,00	85,66	117.602.534,00	14,34
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	283.480.000,00	283.480.000,00	100,00	194.542.571,00	68,63	88.937.429,00	31,37
3	Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop	35.040.000,00	35.040.000,00	100,00	29.847.688,00	85,18	5.192.312,00	14,82

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1		3	4	5	6	7	8	9
	Total Belanja Dinas	30.005.279.554,52	25.671.005.371,81	99,31	25.165.381.059,00	98,03	505.624.312,81	1,28
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.120.030.554,52	5.330.801.101,56	100,00	5.037.374.985,00	94,50	293.426.116,56	5,50
a.	Gaji dan Tunjangan	2.590.766.554,52	2.746.321.101,56	100,00	2.652.306.985,00	96,58	94.014.116,56	3,42
b.	Tambahan Penghasilan PNS	2.529.264.000,00	2.584.480.000,00	100,00	2.385.068.000,00	92,28	199.412.000,00	7,72
II	BELANJA LANGSUNG	24.885.249.000,00	20.340.204.270,25	98,61	20.128.006.074,00	98,96	212.198.196,25	-0,35
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.470.341.000,00	2.207.837.700,00	95,83	2.073.547.037,00	93,92	134.290.663,00	1,92
1	Pelayanan Admistrasi Perkantoran	1.213.744.000,00	1.213.242.000,00	100,00	1.149.015.869,00	94,71	64.226.131,00	5,29
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	689.920.000,00	689.920.000,00	100,00	649.628.500,00	94,16	40.291.500,00	5,84
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	70.120.000,00	70.120.000,00	100,00	70.120.000,00	100,00	-	0,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	232.502.000,00	42.502.000,00	75,00	24.583.163,00	57,84	17.918.837,00	17,16
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	77.815.000,00	65.279.700,00	100,00	64.517.770,00	98,83	761.930,00	1,17
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186.240.000,00	126.774.000,00	100,00	115.681.735,00	91,25	11.092.265,00	8,75
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.924.398.000,00	2.406.632.870,00	100,00	2.332.864.400,00	96,93	73.768.470,00	3,07
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	430.682.000,00	279.450.070,00	100,00	230.932.000,00	82,64	48.518.070,00	17,36
2	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	1.459.570.000,00	226.940.000,00	100,00	219.793.900,00	96,85	7.146.100,00	3,15
3	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	455.750.000,00	440.750.000,00	100,00	435.193.000,00	98,74	5.557.000,00	1,26
4	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-Gorong di Kawasan Kumuh	1.035.500.000,00	996.030.000,00	100,00	988.385.500,00	99,23	7.644.500,00	0,77
5	Penyusunan DED Cluster Melayu	442.896.000,00	438.942.800,00	100,00	434.906.000,00	99,08	4.036.800,00	0,92
6	Pembanguna Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.100.000.000,00	24.520.000,00	100,00	23.654.000,00	96,47	866.000,00	3,53
C.	Program peningkatan Displin Aparatur	16.490.510.000,00	15.725.733.700,25	100,00	15.721.594.637,00	99,97	4.139.063,25	0,03
1	Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni	11.512.950.000,00	11.183.971.000,00	100,00	11.181.021.100,00	99,97	2.949.900,00	0,03
2	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	4.774.220.000,00	4.472.377.000,25	100,00	4.471.187.837,00	99,97	1.189.163,25	0,03
3	Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	69.600.000,00	69.385.700,00	100,00	69.385.700,00	100,00	-	0,00
4	Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten/Kota	73.580.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
5	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	60.160.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		10.012.767.517,11	9.394.584.060,11	100,00	8.662.036.468,00	92,20	732.547.592,11	7,80
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.036.794.397,11	5.308.351.860,11	100,00	4.836.960.127,00	91,12	471.391.733,11	8,17
a	Gaji dan Tunjangan	2.594.476.397,11	2.664.307.860,11	100,00	2.408.841.127,00	90,41	255.466.733,11	9,59
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.442.318.000,00	2.644.044.000,00	100,00	2.428.119.000,00	91,83	215.925.000,00	8,17
II	BELANJA LANGSUNG	4.975.973.120,00	4.086.232.200,00	100,00	3.825.076.341,00	93,61	261.155.859,00	6,83
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.924.823.740,00	1.924.487.600,00	100,00	1.813.313.511,00	94,22	111.174.089,00	5,78
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.510.622.000,00	1.381.634.840,00	100,00	1.319.313.224,00	95,49	62.321.616,00	4,51
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	232.780.000,00	207.780.000,00	100,00	201.938.050,00	97,19	5.841.950,00	2,81
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	63.450.000,00	65.550.000,00	100,00	65.549.500,00	100,00	500,00	0,00
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	63.194.240,00	153.194.240,00	100,00	148.798.337,00	97,13	4.395.903,00	2,87
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	54.777.500,00	116.328.520,00	100,00	77.714.400,00	66,81	38.614.120,00	33,19
B	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	363.158.040,00	336.701.040,00	100,00	316.049.170,00	93,87	20.651.870,00	6,13
1	Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial Dan Aksi Terorisme Di Bangka Belitung	28.402.880,00	28.402.880,00	100,00	21.189.000,00	74,60	7.213.880,00	25,40
2	Forum Komunikasi Dan Koordinasi Kominda	81.803.800,00	81.803.800,00	100,00	71.990.400,00	88,00	9.813.400,00	12,00
3	Penguatan Kewaspadaan Dan Deteksi Dini Serta Pengawasan Orang Asing Di Bangka Belitung	41.851.960,00	41.851.960,00	100,00	39.748.400,00	94,97	2.103.560,00	5,03
4	Penyelenggaraan Penanganan Konflik	211.099.400,00	184.642.400,00	100,00	183.121.370,00	99,18	1.521.030,00	0,82
C	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1.579.414.360,00	1.157.874.740,00	100,00	1.063.837.150,00	91,88	94.037.590,00	8,12
1	Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	52.346.340,00	52.346.340,00	100,00	46.066.800,00	88,00	6.279.540,00	12,00
2	Pembentukan, Pendidikan Dan Pelatihan Kader Bela Negara	127.096.620,00	-	100,00	-	-	-	-
3	Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan	227.568.000,00	-	100,00	-	-	-	-
4	Peningkatan Kecintaan Terhadap Nkri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.172.403.400,00	1.105.528.400,00	100,00	1.017.770.350,00	92,06	87.758.050,00	7,94
D	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	783.445.360,00	489.416.860,00	100,00	457.620.600,00	93,50	31.796.260,00	6,50
1	Monitoring Dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Di Daerah	89.950.880,00	89.950.880,00	100,00	82.624.100,00	91,85	7.326.780	8,15
2	Workshop Pendidikan Etika Dan Budaya Politik	168.121.980,00	168.121.980,00	100,00	159.941.900,00	-	8.180.080,00	-
3	Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	177.176.000,00	177.176.000,00	100,00	163.274.100,00	92,15	13.901.900,00	7,85
4	Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	54.168.000,00	54.168.000,00	100,00	51.780.500,00	95,59	2.387.500,00	4,41

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	294.028.500,00	-	-	-	-	-	-
E	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	325.131.620,00	177.751.960,00	100,00	174.255.910,00		3.496.050,00	1,97
1	Forum Komunikasi Dan Kerjasama Antar Umat Beragama	42.039.120,00	-	-	-	-	-	-
2	Penyuluhan Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika	48.997.500,00	43.261.960,00	100,00	43.261.960,00	100,00	-	-
3	Evaluasi Data Dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi Serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako Di Daerah	139.890.000,00	134.490.000,00	100,00	130.993.950,00	97,40	3.496.050,00	2,60
4	Penguatan Komunikasi Dan Kerjasama Antar Pemerintah Dan Ormas	94.205.000,00	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		17.932.058.294,00	18.055.895.385,00	99,82	17.334.519.488,00	96,00	721.375.897,00	4,00
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.504.824.054,00	9.926.861.495,00	100,00	9.562.008.954,00	96,32	364.852.541,00	3,68
a	Gaji dan Tunjangan	4.505.672.054,00	4.660.061.495	100,00	4.472.004.454,00	95,96	188.057.041,00	4,04
b	Tambahan Penghasilan PNS	4.999.152.000,00	5.266.800.000	100,00	5.090.004.500,00	96,64	176.795.500,00	3,36
II	BELANJA LANGSUNG	8.427.234.240,00	8.129.033.890,00	99,65	7.772.510.534,00	95,61	356.523.356,00	4,39
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	5.743.314.040,00	5.700.188.640,00	100,00	5.544.752.713,00	97,27	155.435.927,00	2,73
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.710.059.540,00	4.710.059.540,00	100,00	4.642.298.313,00	98,56	67.761.227,00	1,44
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	711.298.000,00	705.070.000,00	100,00	637.348.200,00	90,40	67.721.800,00	9,60
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	197.784.000,00	184.265.600,00	100,00	182.303.100,00	98,93	1.962.500,00	1,07
	4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	58.736.000,00	52.141.000,00	100,00	42.123.800,00	80,79	10.017.200,00	19,21
	5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.436.500,00	48.652.500,00	100,00	40.679.300,00	83,61	7.973.200,00	16,39
	B. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	317.113.000,00	258.541.000,00	100,00	241.838.101,00	93,54	16.702.899,00	6,46
	1. Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	95.360.000,00	60.236.000,00	100,00	59.922.101,00	99,48	313.899,00	0,52
	2. Pembinaan Peningkatan Personil Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	221.753.000,00	198.305.000,00	100,00	181.916.000,00	91,74	16.389.000,00	8,26
	C. Program Penegakkan Perda dan Perkada	301.522.600,00	194.128.600	100,00	154.888.700,00	79,79	39.239.900,00	20,21
	1. Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kep. Babel	16.940.000,00	4.235.000,00	100,00	3.747.500,00	88,49	487.500,00	11,51
	2. Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel	44.977.500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	3. Pemberdayaan Peran dan Tugas PTI (Petugas Tindak Internal)	14.907.500,00	14.907.500,00	100,00	11.692.500,00	78,43	3.215.000,00	21,57
	4. Penindakan Yustisial Terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	60.772.500,00	45.787.500,00	100,00	27.728.500,00	60,56	18.059.000,00	39,44
	5. Pembinaan dan Penindakan non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	163.925.100,00	129.198.600,00	100,00	111.720.200,00	86,47	17.478.400,00	13,53
	D. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.752.684.100,00	1.888.084.150,00	98,25	1.745.123.800,00	92,43	142.960.350,00	7,57
	1. Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan tibumtrannmas & linmas serta	123.904.500,00	95.404.500,00	100,00	87.627.500,00	91,85	7.777.000	8,15

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.628.779.600,00	1.792.679.650,00	96,49	1.657.496.300,00	92,46	135.183.350	7,54
	E. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	312.600.500,00	88.091.500	100,00	85.907.220,00	97,52	2.184.280	2,48
	1. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kantrantibmas bagi Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka	91.341.500,00	88.091.500,00	100,00	85.907.220,00	97,52	2.184.280	2,48
	2. Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Satpol PP	221.259.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		27.783.031.474,92	17.453.532.688,00	96,31	16.432.089.688,00	94,15	1.021.443.000,00	5,85
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.399.170.974,92	10.429.259.057,00	100,00	10.091.947.646,00	97,63	337.311.411,00	2,37
a.	Gaji dan Tunjangan	4.867.394.975	5.271.983.057	100,00	5.114.909.646	97,02	157.073.411,00	2,98
b.	Tambahan Penghasilan PNS	4.531.776.000	5.157.276.000	100,00	4.977.038.000	96,51	180.238.000,00	3,49
II	BELANJA LANGSUNG	18.383.860.500,00	7.024.273.631,00	92,62	6.340.142.042,00	91,40	684.131.589,00	8,60
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.574.973.000,00	3.062.576.131,00	100,00	2.895.160.285,00	92,53	167.415.846,00	7,47
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.301.568.000	2.174.868.000	100,00	2.078.015.115	95,55	96.852.885,00	33,20
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	276.862.000	256.862.000	100,00	222.126.000	86,48	34.736.000,00	26,84
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	218.000.000	218.000.000	100,00	213.304.300	97,85	4.695.700,00	13,67
4	Peningkatan dan Pengembangan perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan,	778.543.000	412.846.131	100,00	381.714.870	92,46	31.131.261,00	13,52
B	Program Pemberdayaan Sosial	817.471.000,00	467.471.000,00	100,00	444.669.120,00	93,37	22.801.880,00	6,63
1	Pemberdayaan Keluarga	50.432.550	50.432.550	100,00	43.336.000,00	85,93	7.096.550,00	25,29
2	Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP	244.424.000	94.424.000	100,00	87.154.120,00	92,30	7.269.880,00	5,62
3	Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	442.107.450	242.107.450	100,00	239.377.000,00	98,87	2.730.450,00	0,10
4	Penyuluhan Sosial	80.507.000	80.507.000	100,00	74.802.000,00	92,91	5.705.000,00	12,70
C	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	627.008.000,00	627.008.000,00	100,00	556.604.617,00	92,50	70.403.383,00	7,50
1	Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun	517.608.000	517.608.000	100,00	455.064.500	87,92	62.543.500,00	7,50
2	Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi	97.200.000	97.200.000	100,00	90.050.117	92,64	7.149.883,00	
3	Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	12.200.000	12.200.000	100,00	11.490.000	94,18	710.000,00	
D	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	1.236.490.000,00	1.196.550.000,00	98,00	1.029.577.112,00	75,01	166.972.888,00	24,99
1	Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	25.900.000	25.900.000	100,00	25.849.200	99,80	50.800,00	28,70
2	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti	49.750.000	49.750.000	90,00	18.457.000	37,10	31.293.000,00	
3	Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	658.400.000	658.400.000	100,00	552.803.450	83,96	105.596.550,00	
4	Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti	39.940.000	-	-	-		-	
5	Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	312.620.000	312.620.000	100,00	282.747.462	90,44	29.872.538,00	
6	Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti	149.880.000	149.880.000	100,00	149.720.000	99,89	160.000,00	

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Rehabilitasi Sosial	380.695.000,00	348.445.000,00	100,00	321.244.838,00	89,63	27.200.162,00	10,37
1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	87.895.000	77.445.000	100,00	74.015.589	95,57	3.429.411,00	22,63
2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	50.000.000	50.000.000	100,00	49.134.610	98,27	865.390,00	
3	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	150.000.000	128.200.000	100,00	108.785.500	84,86	19.414.500,00	
4	Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	43.000.000	43.000.000	100,00	42.363.700	98,52	636.300,00	
5	Pendampingan dan Advokasi Sosial Klien bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	49.800.000	49.800.000	100,00	46.945.439	94,27	2.854.561,00	9,10
F	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.025.666.000,00	1.000.666.000,00	100,00	908.165.470,00	90,97	92.500.530,00	9,03
1	Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	546.000.000	546.000.000	100,00	538.424.000	98,61	7.576.000,00	4,13
2	Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	233.520.000	208.520.000	100,00	167.005.370	80,09	41.514.630,00	
3	Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	246.146.000	246.146.000	100,00	202.736.100	82,36	43.409.900,00	
G	Program Penanganan Fakir Miskin	10.721.557.500,00	321.557.500,00	50,32	184.720.600,00	95,73	136.836.900,00	4,27
1	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	157.346.300	157.346.300	100,00	140.729.000	89,44	16.617.300,00	2,18
2	Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat	24.590.000	24.590.000	16,00	3.781.600	15,38	20.808.400,00	4,15
3	Pemberian bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis	10.539.621.200	139.621.200	34,96	40.210.000	28,80	99.411.200,00	15,89

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		11.976.831.141,00	11.305.986.490,00	100,00	10.009.035.636,00	88,53	1.296.950.854,00	11,47
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.203.466.361,00	4.356.974.560,00	100,00	4.128.782.289,00	94,76	228.192.271,00	5,24
a	Belanja Pegawai	4.203.466.361,00	4.356.974.560,00	100,00	4.128.782.289,00	94,76	228.192.271,00	5,24
II	BELANJA LANGSUNG	7.773.364.780,00	6.949.011.930,00	100,00	5.880.253.347,00	84,62	1.068.758.583,00	15,38
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	3.040.655.000,00	3.030.655.000,00	100,00	2.620.024.644,00	86,45	410.630.356,00	13,55
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.612.900.000,00	1.712.900.000,00	100,00	1.620.460.029,00	94,60	92.439.971,00	5,40
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	885.100.000,00	775.100.000,00	100,00	545.643.371,00	70,40	229.456.629,00	29,60
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	65.800.000,00	65.800.000,00	100,00	61.411.000,00	93,33	4.389.000,00	6,67
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.925.000,00	200.925.000,00	100,00	152.099.204,00	75,70	48.825.796,00	24,30
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	182.530.000,00	182.530.000,00	100,00	157.573.940,00	86,33	24.956.060,00	13,67
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	93.400.000,00	93.400.000,00	100,00	82.837.100,00	88,69	10.562.900,00	11,31
B	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.308.247.280,00	816.541.930,00	100,00	707.181.663,00	86,61	109.360.267,00	13,39
1	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan	394.214.850,00	0	-	0	-	-	-
2	Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	221.531.630,00	221.531.630,00	100,00	190.786.740,00	86,12	30.744.890,00	13,88
3	Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah,	162.793.800,00	162.793.800,00	100,00	146.091.300,00	89,74	16.702.500,00	10,26
4	Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	282.662.000,00	282.662.000,00	100,00	239.480.650,00	84,72	43.181.350,00	15,28
5	Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem	247.045.000,00	149.554.500,00	100,00	130.822.973,00	87,48	18.731.527,00	12,52
C	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	506.942.500,00	262.925.000,00	100,00	158.022.050,00	60,10	104.902.950,00	39,90
1	Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasca Bencana	85.032.500,00	0	-	0	-	-	-
2	Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Menangani	88.732.500,00	0	-	0	-	-	-
3	Pemeliharaan Jembatan Portable	105.565.000,00	105.565.000,00	100,00	61.382.000,00	58,15	44.183.000,00	41,85
4	Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable	70.190.000,00	70.190.000,00	100,00	25.190.500,00	35,89	44.999.500,00	64,11
5	Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota dan Provinsi	70.252.500,00	0	-	0	-	-	-
6	Monitoring dan Evaluasi Pascabencana ke Kabupaten/Kota	87.170.000,00	87.170.000,00	100,00	71.449.550,00	81,97	15.720.450,00	18,03

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	2.917.520.000,00	2.838.890.000,00	100,00	2.395.024.990,00		443.865.010,00	
1	Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.925.210.000,00	1.925.210.000,00	100,00	1.690.859.600,00	87,83	234.350.400,00	12,17
2	Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	171.160.000,00	171.160.000,00	100,00	108.525.000,00	63,41	62.635.000,00	36,59
3	Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	456.880.000,00	456.880.000,00	100,00	430.773.390,00	94,29	26.106.610,00	5,71
4	Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	285.640.000,00	285.640.000,00	100,00	164.867.000,00	57,72	120.773.000,00	42,28
5	Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	78.630.000,00	0	-	0	-	-	-

LAMPIRAN



REALISASI KEUANGAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		20.043.255.627,00	20.686.050.686,00	92,16	17.954.308.824,00	86,79	2.731.741.862,00	13,21
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.681.081.027,00	14.315.524.068,00	100,00	12.460.529.433,00	87,04	1.854.994.635,00	12,96
a	Belanja Tidak Langsung	13.681.081.027,00	14.315.524.068,00	100,00	12.460.529.433,00	87,04	1.854.994.635,00	12,96
II	BELANJA LANGSUNG	6.362.174.600,00	6.370.526.618,00	84,32	5.493.779.391,00	86,24	876.747.227,00	13,76
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.157.373.500,00	4.816.450.786,00	84,50	4.023.600.727,00	83,54	792.850.059,00	16,46
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.923.601.500,00	2.764.888.989,00	73,00	2.316.344.829,00	83,78	448.544.160,00	16,22
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	549.090.000,00	478.640.000,00	82,00	447.454.650,00	93,48	31.185.350,00	6,52
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	203.031.000,00	203.031.000,00	100,00	201.750.800,00	99,37	1.280.200,00	0,63
4	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	24.330.000,00	27.785.000,00	100,00	26.080.000,00	93,86	1.705.000,00	6,14
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.145.000,00	46.565.797,00	80,00	19.895.000,00	42,72	26.670.797,00	57,28
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	422.176.000,00	1.295.540.000,00	72,00	1.012.075.448,00	78,12	283.464.552,00	21,88
B	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	534.438.650,00	421.474.982,00	70,75	386.251.514,00	91,64	35.223.468,00	8,36
1	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	22.155.000,00	22.155.000,00	80,00	21.239.000,00	95,87	916.000,00	4,13
2	Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	183.103.850,00	167.643.850,00	3,00	155.200.482,00	92,58	12.443.368,00	7,42
3	Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	114.229.100,00	151.864.100,00	-	130.000.000,00	85,60	21.864.100,00	14,40
4	Peningkatan sarana Hubungan Industrial	58.585.350,00	18.160.000,00	100,00	18.160.000,00	100,00	-	-
5	Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	156.365.350,00	61.652.032,00	100,00	61.652.032,00	100,00	-	-
C	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	204.179.000,00	178.479.000,00	75,00	146.367.500,00	82,01	32.111.500,00	17,99
1	Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing)	53.820.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA	49.200.000,00	77.320.000,00	50,00	51.392.600,00	66,47	25.927.400,00	33,53
3	Bimtek Metologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	101.159.000,00	101.159.000,00	100,00	94.974.900,00	93,89	6.184.100,00	6,11
D	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	113.175.400,00	58.329.400,00	75,50	53.497.400,00	91,72	4.832.000,00	8,28

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja(UPTD Hyperkes)	30.823.150,00	30.823.150,00	65,00	26.288.150,00	85,29	4.535.000,00	14,71
2	Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan	54.846.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Pengujian Lingkungan Kerja	27.506.250,00	27.506.250,00	86,00	27.209.250,00	98,92	297.000,00	1,08
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	1.026.251.000,00	731.692.450,00	100,00	731.412.850,00	99,96	279.600,00	0,04
1	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	1.026.251.000,00	731.692.450,00	100,00	731.412.850,00	99,96	279.600,00	0,04
F	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	149.533.000,00	66.180.000,00	90,00	58.813.000,00	88,87	7.367.000,00	11,13
1	Pelayanan dan peningkatan produktivitas	149.533.000,00	66.180.000,00	90,00	58.813.000,00	88,87	7.367.000,00	11,13
G	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	177.224.050,00	97.920.000,00	94,50	93.836.400,00	95,83	4.083.600,00	4,17
1	Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	34.082.850,00	5.806.000,00	100,00	5.806.000,00	100,00	-	-
2	Gema Hari Bhakti Transmigrasi tingkat Provinsi Kep.Bangka Belitung	51.027.200,00	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan kapasitas SDM bidangTransmigrasi	92.114.000,00	92.114.000,00	89,00	88.030.400,00	95,57	4.083.600,00	4,43

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		12.115.646.460,00	12.963.867.607,00	100,00	11.774.607.391,00	90,83	1.189.260.216,00	9,17
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.479.485.443,00	6.311.010.745,00	100,00	5.716.437.389,00	90,58	594.573.356,00	9,42
a	Gaji dan Tunjangan	2.762.925.443,00	3.158.678.745,00	100,00	2.810.838.389,00	88,99	347.840.356,00	11,01
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.716.560.000,00	3.152.332.000,00	100,00	2.905.599.000,00	92,17	246.733.000,00	7,83
II	BELANJA LANGSUNG	6.636.161.017,00	6.652.856.862,00	100,00	6.058.170.002,00	91,06	594.686.860,00	8,94
A. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH		1.705.952.217,00	1.652.687.600,00	100,00	1.456.894.204,00	88,15	195.793.396,00	11,85
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.140.660.000,00	1.282.860.000,00	100,00	1.183.973.835,00	92,29	98.886.165,00	7,71
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147.972.000,00	162.972.000,00	100,00	106.035.416,00	65,06	56.936.584,00	34,94
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	68.500.000,00	58.500.000,00	100,00	56.150.000,00	95,98	2.350.000,00	4,02
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.322.400,00	41.998.100,00	100,00	22.674.953,00	53,99	19.323.147,00	46,01
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	102.803.500,00	21.197.500,00	100,00	15.960.000,00	75,29	5.237.500,00	24,71
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	204.694.317,00	85.160.000,00	100,00	72.100.000,00	84,66	13.060.000,00	15,34
B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN		534.610.500,00	462.910.500,00	100,00	431.231.470,00	93,16	31.679.030,00	6,84
	1. Pembinaan Organisasi Perempuan	214.832.000,00	143.132.000,00	100,00	131.512.770,00	91,88	11.619.230,00	8,12
	2. Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia	190.045.500,00	190.045.500,00	100,00	181.900.900,00	95,71	8.144.600,00	4,29
	3. Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	93.688.000,00	93.688.000,00	100,00	81.912.500,00	87,43	11.775.500,00	12,57
	4. Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumah Tangga Perempuan di Kab/Kota	36.045.000,00	36.045.000,00	100,00	35.905.300,00	99,61	139.700,00	0,39
C. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.478.753.450,00	1.488.146.850,00	100,00	1.378.623.982,00	92,64	109.522.868,00	7,36
	1. Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)	188.921.500,00	188.921.500,00	100,00	183.316.750,00	97,03	5.604.750,00	2,97
	2. Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel	183.621.000,00	238.071.000,00	100,00	204.184.000,00	85,77	33.887.000,00	14,23
	3. Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	172.840.000,00	172.840.000,00	100,00	144.675.800,00	83,71	28.164.200,00	16,29
	4. Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota	57.651.750,00	57.651.750,00	100,00	48.891.356,00	84,80	8.760.394,00	15,20
	5. Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	222.217.500,00	222.217.500,00	100,00	200.300.196,00	90,14	21.917.304,00	9,86
	6. Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	60.340.000,00	60.340.000,00	100,00	50.029.780,00	82,91	10.310.220,00	17,09
	7. Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	593.161.700,00	548.105.100,00	100,00	547.226.100,00	99,84	879.000,00	0,16

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.648.170.500,00	1.818.862.562,00	100,00	1.648.832.016,00	90,65	170.030.546,00	9,35
	1. Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.462.500,00	90.462.500,00	100,00	89.703.000,00	99,16	759.500,00	0,84
	2. Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.635.500,00	42.635.500,00	100,00	35.185.500,00	82,53	7.450.000,00	17,47
	3. Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan	78.381.500,00	62.473.562,00	100,00	58.926.084,00	94,32	3.547.478,00	5,68
	4. Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	360.796.000,00	360.796.000,00	100,00	344.362.165,00	95,45	16.433.835,00	4,55
	5. Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	239.975.000,00	239.975.000,00	100,00	193.673.167,00	80,71	46.301.833,00	19,29
	6. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	150.025.000,00	150.025.000,00	100,00	140.107.173,00	93,39	9.917.827,00	6,61
	7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparatur Kab/Kota (DAK)	485.895.000,00	485.895.000,00	100,00	422.994.059,00	87,05	62.900.941,00	12,95
	8. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	195.590.868,00	97,80	4.409.132,00	2,20
	9. Sosialisasi dan Penganangan Gerakan Nasional GISA Tingkat Provinsi	-	186.600.000,00	100,00	168.290.000,00	90,19	18.310.000,00	9,81
	E. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.268.674.350,00	1.230.249.350,00	100,00	1.142.588.330,00	92,87	87.661.020,00	7,13
	1. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)	112.136.850,00	112.136.850,00	100,00	107.816.000,00	96,15	4.320.850,00	3,85
	2. Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya 2018	799.962.600,00	761.537.600,00	100,00	694.993.486,00	91,26	66.544.114,00	8,74
	3. Advokasi dan KIE Program KKBPK	37.821.050,00	37.821.050,00	100,00	34.744.344,00	91,87	3.076.706,00	8,13
	4. Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	141.199.700,00	141.199.700,00	100,00	130.514.000,00	92,43	10.685.700,00	7,57
	5 Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	177.554.150,00	177.554.150,00	100,00	174.520.500,00	98,29	3.033.650,00	1,71

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		9.702.669.318,00	9.702.669.318,00	100,00	8.918.404.418,00	91,92	784.264.900,00	8,08
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.979.422.616,00	4.979.422.616,00	100,00	4.566.413.666,00	91,71	413.008.950,00	8,29
a	Gaji dan Tunjangan	2.532.674.616	2.532.674.616	100,00	2.277.373.578	89,92	255.301.038,00	10,08
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.446.748.000	2.446.748.000	100,00	2.289.040.088	93,55	157.707.912,00	6,45
II	BELANJA LANGSUNG	4.723.246.702,00	4.723.246.702,00	100,00	4.351.990.752,00	92,14	912.018.995,00	7,86
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1.717.593.747	1.717.593.747	100,00	1.527.678.805	88,94	189.914.942	11,06
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	965.516.747	965.516.747	100,00	924.602.020	95,76	40.914.727,00	4,24
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	363.282.000	363.282.000	100,00	301.312.785	82,94	61.969.215,00	17,06
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	54.523.000	54.523.000	100,00	54.523.000	100,00	0,00	0,00
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	80.000.000	100,00	58.161.800	72,70	21.838.200,00	27,30
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	214.232.000	214.232.000	100,00	170.479.200	79,58	43.752.800,00	20,42
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.040.000	40.040.000	100,00	18.600.000	46,45	21.440.000,00	53,55
B	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	1.357.747.000	1.357.747.000	100,00	1.321.851.450	97,36	35.895.550	2,64
	1. Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	585.045.000	585.045.000	100,00	569.716.200	97,38	15.328.800,00	2,62
	2. Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	35.640.000	35.640.000	100,00	32.200.000	90,35	3.440.000,00	9,65
	3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	137.262.000	137.262.000	100,00	134.565.250	98,04	2.696.750,00	1,96
	4. Penanganan Desa Rawan Pangan	249.960.000	249.960.000	100,00	246.627.200	98,67	3.332.800,00	1,33
	5. Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	159.080.000	159.080.000	100,00	153.418.000	96,44	5.662.000,00	3,56
	6. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	45.050.000	45.050.000	100,00	41.130.000	91,30	3.920.000,00	8,70
	7. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	122.730.000	122.730.000	100,00	122.186.800	99,56	543.200,00	0,44
	8. Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan	22.980.000	22.980.000	100,00	22.008.000	95,77	972.000,00	4,23
C	Program Pengembangan Distribusi Pangan	592.752.455	592.752.455	100,00	566.757.750	95,61	566.757.750	95,61
	1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	142.412.854	142.412.854	100,00	131.614.200	92,42	131.614.200	92,42
	2. Pengendalian Distribusi Pangan	104.529.601	104.529.601	100,00	103.468.900	98,99	103.468.900	98,99
	3. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	33.040.000	33.040.000	100,00	30.334.500	91,81	30.334.500	91,81
	4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	30.240.000	30.240.000	100,00	29.822.250	98,62	29.822.250	98,62
	5. Database Harga dan Stok Pangan di Tingkat Distributor	63.545.000	63.545.000	100,00	61.517.000	96,81	61.517.000	96,81
	6. Pengembangan Cadangan Pangan	218.985.000	218.985.000	100,00	210.000.900	95,90	210.000.900	95,90

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.055.153.500	1.055.153.500	100,00	935.702.747	88,68	119.450.753,00	11,32
	1. Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan Termasuk Gerakan Makan Sayur, Buah, Kacang-kacangan dan Ayam Merawang (GEMA SABUK AMANG)	114.100.000	114.100.000	100,00	105.037.000	92,06	9.063.000,00	7,94
	2. Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian	82.096.000	82.096.000	100,00	72.828.600	88,71	9.267.400,00	11,29
	3. Penilaian Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Sertifikasi Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2 dan No Registerasi PSAT)	173.720.000	173.720.000	100,00	170.384.100	98,08	3.335.900,00	1,92
	4. Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	233.518.000	233.518.000	100,00	212.320.547	90,92	21.197.453,00	9,08
	5. Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pada Kelompok Masyarakat	86.344.000	86.344.000	100,00	41.077.700	47,57	45.266.300,00	52,43
	6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahan dan Siap Saji Yang Beredar	170.460.000	170.460.000	100,00	154.363.000	90,56	16.097.000,00	9,44
	7. Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	87.669.500	87.669.500	100,00	86.070.000	98,18	1.599.500,00	1,82
	8. Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	107.246.000	107.246.000	100,00	93.621.800	87,30	13.624.200,00	12,70

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Belanja Dinas		14.653.655.812,00	14.758.174.576,00	99,28	12.522.277.977,00	84,85	2.235.896.599,00	14,43
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.431.859.812,00	8.068.944.560,00	100,00	6.778.763.813,00	84,01	1.290.180.747,00	15,99
	a. Gaji dan Tunjangan	4.012.939.812,00	3.907.240.560,00	100,00	3.509.461.613,00	89,82	397.778.947,00	10,18
	b. Tambahan Penghasilan PNS	3.418.920.000,00	4.161.704.000,00	100,00	3.269.302.200,00	78,56	892.401.800,00	21,44
II	BELANJA LANGSUNG	7.221.796.000,00	6.689.230.016,00	98,56	5.743.514.164,00	85,86	945.715.852,00	12,69
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.786.110.000,00	2.525.748.900,00	100,00	2.323.659.494,00	92,00	202.089.406,00	8,00
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.481.130.000,00	1.700.325.900,00	100,00	1.648.117.743,00	96,93	52.208.157,00	3,07
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	746.000.000,00	283.010.000,00	100,00	247.457.700,00	87,44	35.552.300,00	12,56
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	82.800.000,00	72.900.000,00	100,00	68.600.000,00	94,10	4.300.000,00	5,90
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	132.300.000,00	132.300.000,00	100,00	98.304.713,00	74,30	33.995.287,00	25,70
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	299.080.000,00	292.413.000,00	100,00	220.341.338,00	75,35	72.071.662,00	24,65
6.	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	40.838.000,00	91,16	3.962.000,00	8,84
B	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	1.383.820.000,00	1.323.820.000,00	100,00	1.263.273.529,00	95,43	60.546.471,00	4,57
1.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	926.425.000,00	926.425.000,00	100,00	914.585.500,00	98,72	11.839.500,00	1,28
2.	Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	187.860.000,00	187.860.000,00	100,00	139.623.029,00	74,32	48.236.971,00	25,68
3.	Sampling Parameter Kualitas Lingkungan	74.670.000,00	74.670.000,00	100,00	74.670.000,00	100,00	-	-
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	194.865.000,00	134.865.000,00	100,00	134.395.000,00	99,65	470.000,00	0,35
C	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	1.510.118.000,00	1.403.798.116,00	92,78	953.697.249,00	67,94	450.100.867,00	32,06
1.	Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	343.653.000,00	321.615.500,00	100,00	260.119.494,00	80,88	61.496.006,00	19,12
2.	Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	110.565.000,00	107.630.000,00	100,00	104.431.840,00	97,03	3.198.160,00	2,97
3.	Penyusunan Dokumen KLHS	789.825.000,00	734.150.000,00	56,70	353.956.899,00	48,21	380.193.101,00	51,79
4.	Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	95.600.000,00	73.563.585,00	100,00	71.988.585,00	97,86	1.575.000,00	2,14
5.	Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	99.800.000,00	98.854.000,00	100,00	96.718.400,00	97,84	2.135.600,00	2,16
6.	Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin	70.675.000,00	67.985.031,00	100,00	66.482.031,00	97,79	1.503.000,00	2,21

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup	553.940.000,00	534.465.000,00	100,00	480.023.302,00	89,81	54.441.698,00	10,19
1	Pengendalian Beban Pencemaran Air	125.000.000,00	122.800.000,00	100,00	121.232.150,00	98,72	1.567.850,00	1,28
2	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	117.520.000,00	113.670.000,00	100,00	111.179.870,00	97,81	2.490.130,00	2,19
3	Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106.060.000,00	106.060.000,00	100,00	56.776.600,00	53,53	49.283.400,00	46,47
4	Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.585.000,00	124.435.000,00	100,00	124.226.600,00	99,83	208.400,00	0,17
5	Penerimaan, Penelaahan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	74.775.000,00	67.500.000,00	100,00	66.608.082,00	98,68	891.918,00	1,32
E	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan peningkatan Kapasitas	987.808.000,00	901.398.000,00	100,00	722.860.590,00		178.537.410,00	100,00
1	Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura	34.865.000,00	34.865.000,00	100,00	16.386.600,00	47,00	18.478.400,00	53,00
2	Studi Manajemen dan Produksi Persampahan	349.650.000,00	332.650.000,00	100,00	231.305.300,00	69,53	101.344.700,00	30,47
3	Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional	249.610.000,00	186.110.000,00	100,00	161.007.590,00	86,51	25.102.410,00	13,49
4	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	34.608.000,00	34.608.000,00	100,00	30.093.100,00	86,95	4.514.900,00	13,05
5	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	225.863.000,00	219.953.000,00	100,00	209.518.500,00	95,26	10.434.500,00	4,74
6	Implementasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program Kampung Iklim (Proklam)	36.044.000,00	36.044.000,00	100,00	29.036.500,00	80,56	7.007.500,00	19,44
7	Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	57.168.000,00	57.168.000,00	100,00	45.513.000,00	79,61	11.655.000,00	20,39

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

RAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		12.565.076.998,00	12.189.519.538,00	100,00	11.842.596.251,00	97,15	346.923.287,00	2,85
I BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.440.309.318,00	5.713.509.758,00	100,00	5.627.733.298,00	98,50	85.776.460,00	1,50
a	Belanja Pegawai	5.440.309.318,00	5.713.509.758,00	100,00	5.627.733.298,00	98,50	85.776.460,00	1,50
II BELANJA LANGSUNG		7.124.767.680,00	6.476.009.780,00	100,00	6.214.862.953,00	95,97	967.904.600,00	14,95
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.035.097.023,00	1.993.097.023,00	100,00	1.959.752.147,00	98,33	127.562.429,00	6,40
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.532.488.000,00	1.502.488.000,00	100,00	1.484.806.947,00	98,82	110.798.606,00	7,37
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	201.620.000,00	193.620.000,00	100,00	181.965.700,00	93,98	11.654.300,00	6,02
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	76.100.000,00	76.100.000,00	100,00	75.800.000,00	99,61	300.000,00	0,39
4	Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah	224.889.023,00	220.889.023,00	100,00	217.179.500,00	98,32	4.809.523,00	2,18
B	Program Pembinaan Pemerintah Desa	991.660.500,00	829.902.600,00		814.307.620,00		31.798.100,00	
1	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	118.608.400,00	93.608.400,00	100,00	93.502.500,00	99,89	105.900,00	0,11
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	185.855.000,00	166.247.100,00	100,00	162.947.100,00	98,02	3.300.000,00	1,98
3	Penataan Kewenangan Desa	584.647.100,00	570.047.100,00	100,00	557.858.020,00	97,86	28.392.200,00	4,98
4	Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Melalui Sikeudes	102.550.000,00	-	-	-	-	-	-
C	Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	2.402.005.000,00	2.257.005.000,00	100,00	2.108.388.299,00	93,42	529.105.001,00	23,44
1	Pendampingan Kelembagaan Desa	778.800.000,00	778.800.000,00	100,00	723.163.475,00	92,86	177.927.425,00	22,85
2	Pemberdayaan Masyarakat	1.407.630.000,00	1.407.630.000,00	100,00	1.326.920.724,00	94,27	326.674.276,00	23,21
3	Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	215.575.000,00	70.575.000,00	100,00	58.304.100,00	82,61	24.503.300,00	34,72
D	Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	745.884.000,00	545.884.000,00	100,00	500.066.337,00	91,61	78.474.563,00	14,38
1	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	310.292.000,00	310.292.000,00	100,00	277.950.300,00	89,58	63.507.600,00	20,47
2	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	435.592.000,00	235.592.000,00	100,00	222.116.037,00	94,28	14.966.963,00	6,35
E	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	950.121.157,00	850.121.157,00	100,00	832.348.550,00	97,91	200.964.507,00	23,64
1	Pembangunan Kawasan Perdesaan	950.121.157,00	850.121.157,00	100,00	832.348.550,00	97,91	200.964.507,00	23,64

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		30.749.736.186,00	23.084.289.306,00	100,00	18.532.198.629,11	80,28	4.552.090.676,89	19,72
							-	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.212.314.686,00	6.485.620.606,00	100,00	5.946.160.216,00	91,68	539.460.390,00	8,32
II	BELANJA LANGSUNG	24.537.421.500,00	16.598.668.700,00	100,00	12.586.038.413,11	75,83	4.012.630.286,89	24,17
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.451.129.000,00	5.711.229.500,00	99,99	4.824.101.364,88	84,47	887.128.135,12	15,53
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.308.980.000,00	1.400.260.000,00	99,94	1.338.807.313,00	95,61	61.452.687,00	4,39
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.458.615.000,00	2.184.733.500,00	100,00	1.800.521.762,88	82,41	384.211.737,12	17,59
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	153.425.000,00	153.425.000,00	100,00	149.998.500,00	97,77	3.426.500,00	2,23
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	119.260.000,00	119.260.000,00	100,00	49.333.368,00	41,37	69.926.632,00	58,63
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	103.180.000,00	264.869.000,00	100,00	213.439.084,00	80,58	51.429.916,00	19,42
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.015.000,00	45.015.000,00	100,00	38.370.700,00	85,24	6.644.300,00	14,76
7	Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	52.600.000,00	52.600.000,00	100,00	28.500.000,00	54,18	24.100.000,00	45,82
8	Pengumpulan Data dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan	70.260.000,00	70.260.000,00	100,00	43.257.432,00	61,57	27.002.568,00	38,43
9	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah	1.788.389.000,00	1.371.717.000,00	100,00	1.115.177.618,00	81,30	256.539.382,00	18,70
10	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	49.090.000,00	49.090.000,00	100,00	46.695.587,00	95,12	2.394.413,00	4,88
11	Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	302.315.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
B	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	7.548.819.300,00	7.295.258.300,00	100,00	4.453.994.522,00	61,05	2.841.263.778,00	38,95
1	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.095.244.000,00	2.095.244.000,00	-	7.747.290,00	0,37	2.087.496.710,00	99,63
2	Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	45.826.800,00	45.826.800,00	100,00	43.096.815,00	94,04	2.729.985,00	5,96
3	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	764.100.000,00	664.020.000,00	100,00	498.263.354,00	75,04	165.756.646,00	24,96
4	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	2.594.696.800,00	2.594.696.800,00	100,00	2.506.475.000,00	96,60	88.221.800,00	3,40
5	Inspeksi/ Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan	47.590.000,00	47.590.000,00	100,00	37.411.800,00	78,61	10.178.200,00	21,39
6	Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	94.400.000,00	94.400.000,00	100,00	36.518.900,00	38,69	57.881.100,00	61,31
7	Review Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	947.802.000,00	919.851.000,00	100,00	908.944.117,00	98,81	10.906.883,00	1,19
8	Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka	625.530.000,00		-	-	0,00	-	0,00
9	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum	87.600.500,00	87.600.500,00	100,00	80.311.768,00	91,68	7.288.732,00	8,32
10	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	109.858.500,00	109.858.500,00	100,00	97.791.551,00	89,02	12.066.949,00	10,98
11	Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	136.170.700,00	136.170.700,00	100,00	134.620.700,00	98,86	1.550.000,00	1,14
12	Pengoperasian Bus Sekolah	-	500.000.000,00	100,00	102.813.227,00	20,56	397.186.773,00	79,44

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	2.994.865.200,00	1.095.967.200,00	100,00	1.010.430.204,00	92,20	85.536.996,00	7,80
1	Study Kelayakan Pengganti Pangkalbalam	792.985.200,00	792.985.200,00	100,00	729.175.604,00	91,95	63.809.596,00	8,05
2	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	1.902.000.000,00	3.102.000,00	-	3.102.000,00	100,00	-	0,00
3	Studi Kelayakan Dermaga/ Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung	299.880.000,00	299.880.000,00	100,00	278.152.600,00	92,75	21.727.400,00	7,25
D	Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan	8.542.608.000,00	2.496.213.700,00	100,00	2.297.512.322,23	92,04	198.701.377,77	7,96
1	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan	68.100.000,00	68.100.000,00	100,00	43.610.000,00	64,04	24.490.000,00	35,96
2	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	140.684.000,00	140.684.000,00	100,00	131.023.300,00	93,13	9.660.700,00	6,87
3	Pengadaan Road Barrier dan Taffic Cone	44.064.000,00	44.064.000,00	100,00	42.155.000,00	95,67	1.909.000,00	4,33
4	Pekerjaan Konsultasi Penilaian/ Appraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	205.575.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
5	Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	6.409.200.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Gardu Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir	646.150.000,00	646.150.000,00	100,00	627.892.000,00	97,17	18.258.000,00	2,83
7	Pengadaan Pagar Panel/ BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir	813.200.000,00	813.200.000,00	100,00	800.277.500,00	98,41	12.922.500,00	1,59
8	Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depat Amir	215.635.000,00	215.635.000,00	100,00	197.850.000,00	91,75	17.785.000,00	8,25
9	Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir (lanjutan)	-	568.380.700,00	100,00	454.704.522,23	80,00	113.676.177,77	20,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		20.439.928.325,00	17.422.668.613,00	96,77	15.855.994.077,00	91,01	1.566.674.536,00	8,99
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.637.155.057,00	6.439.895.345,00	100,00	5.579.717.916,00	86,64	860.177.429,00	13,36
a	Gaji dan Tunjangan	3.224.875.057	3.175.139.345	100,00	2.807.817.416	88,43	367.321.929,00	11,57
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.903.000.000	2.801.500.000	100,00	2.464.284.500	87,96	337.215.500,00	12,04
c	Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi	28.800.000	28.800.000	100,00	26.400.000	91,67	2.400.000,00	8,33
d	Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	480.480.000	434.456.000	100,00	281.216.000	64,73	153.240.000,00	35,27
II	BELANJA LANGSUNG	13.802.773.268,00	10.982.773.268,00	93,55	10.276.276.161,00	93,57	706.497.107,00	6,43
	I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.072.392.161	4.122.392.161	98,33	3.813.482.560	92,51%	308.909.601	99,07
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.556.539.114	1.556.539.114	100,00	1.403.061.463	90,14%	153.477.651	99,10
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	2.016.353.047	2.066.353.047	100,00	2.016.921.000	97,61%	49.432.047	99,02
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	90.600.000	90.600.000	100,00	81.900.000	90,40%	8.700.000	99,10
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	324.850.000	324.850.000	90,00	238.270.097	73,35%	86.579.903	99,27
	5. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan	42.300.000	26.700.000	100,00	20.770.000	77,79%	5.930.000	99,22
	6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja	41.750.000	57.350.000	100,00	52.560.000	91,65%	4.790.000	99,08
	II. PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.029.205.000	3.029.205.000	89,44	2.862.346.336	94,49	166.858.664	5,51
	1. Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah	1.534.780.000	1.534.780.000	100,00	1.465.305.926	95,47%	69.474.074	99,05
	2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.034.400.000	1.034.400.000	85,00	994.735.794	96,17%	39.664.206	99,04
	3. Pengelolaan Kemitraan	460.025.000	460.025.000	83,33	402.304.616	87,45%	57.720.384	99,13
	III. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI	6.166.250.000	3.296.250.000	94,75	3.103.130.045	94,14	193.119.955	5,86
	1. Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	4.680.960.000	1.860.960.000	100,00	1.847.313.000	99,27%	13.647.000	99,01
	2. Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Governement	1.278.690.000	1.228.690.000	89,00	1.059.308.045	86,21%	169.381.955	99,14
	3. Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah	169.000.000	169.000.000	90,00	159.400.000	94,32%	9.600.000	99,06
	4. Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi	37.600.000	37.600.000	100,00	37.109.000	98,69%	491.000	99,01
	IV. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	534.926.107	534.926.107	91,67	497.317.220	92,97	17.611.000	7,03
	1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral	152.720.000	152.720.000	100,00	135.109.000	88,47%	17.611.000	99,12
	2. Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	340.799.622	340.799.622	100,00	325.001.500	95,36%	15.798.122	99,05
	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	41.406.485	41.406.485	75,00	37.206.720	89,86%	4.199.765	99,10

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	27.118.880.846,00	17.763.527.460,00	100,00	16.849.063.196,00	94,85	914.464.264,00	5,15
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.451.651.800,00	6.361.904.764,00	100,00	5.751.901.626,00	90,41	610.003.138,00	9,59
a	Gaji dan Tunjangan	3.425.507.400,00	3.289.685.529,00	100,00	2.871.142.626,00	87,28	418.542.903,00	12,72
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.026.144.400,00	3.072.219.235,00	100,00	2.880.759.000,00	93,77	191.460.235,00	6,23
II	BELANJA LANGSUNG	20.667.229.046,00	11.401.622.696,00	100,00	11.097.161.570,00	97,33	304.461.126,00	2,67
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.919.290.036,00	3.313.388.036,00	100,00	3.218.763.750,00	97,14	94.624.286,00	2,86
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.146.535.000,00	2.515.103.000,00	100,00	2.472.697.350,00	98,31	42.405.650,00	1,69
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501.673.175,00	563.923.175,00	100,00	549.578.400,00	97,46	14.344.775,00	2,54
3	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	90.450.000,00	90.450.000,00	100,00	81.175.000,00	89,75	9.275.000,00	10,25
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.920.000,00	50.000.000,00	100,00	49.109.600,00	98,22	890.400,00	1,78
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	89.298.000,00	84.498.000,00	100,00	59.063.400,00	69,90	25.434.600,00	30,10
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.413.861,00	9.413.861,00	100,00	7.140.000,00	75,85	2.273.861,00	24,15
B	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	926.477.178,00	669.868.970,00	100,00	614.307.840,00	91,71	55.561.130,00	8,29
1	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	622.081.578,00	377.705.000,00	100,00	330.639.500,00	87,54	47.065.500,00	12,46
2	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	236.780.970,00	195.223.970,00	100,00	187.090.400,00	95,83	8.133.570,00	4,17
3	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	67.614.630,00	96.940.000,00	100,00	96.577.940,00	99,63	362.060,00	0,37
C	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	695.168.900,00	632.406.900,00	100,00	605.011.630,00	95,67	27.395.270,00	4,33
1	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	117.651.000,00	67.651.000,00	100,00	58.094.550,00	85,87	9.556.450,00	14,13
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	193.962.900,00	181.200.900,00	100,00	175.700.130,00	96,96	5.500.770,00	3,04
	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	383.555.000,00	383.555.000,00	100,00	371.216.950,00	96,78	12.338.050,00	3,22

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	12.588.078.444,00	3.761.482.045,00	100,00	3.680.045.900,00	97,83	81.436.145,00	2,17
1	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	928.990.000,00	1.319.639.000,00	100,00	1.284.876.000,00	97,37	34.763.000,00	2,63
2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	2.460.562.000,00	1.848.199.104,00	100,00	1.832.383.300,00	99,14	15.815.804,00	0,86
3	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	478.443.941,00	478.443.941,00	100,00	459.594.400,00	96,06	18.849.541,00	3,94
4	Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	8.720.082.503,00	115.200.000,00	100,00	103.192.200,00	89,58	12.007.800,00	10,42
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.947.276.745,00	2.947.276.745,00	100,00	2.907.202.350,00	98,64	40.074.395,00	1,36
1	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	447.276.745,00	447.276.745,00	100,00	408.440.150,00	91,32	38.836.595,00	8,68
2	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM (DAK)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.498.762.200,00	99,95	1.237.800,00	0,05
F	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	590.937.743,00	77.200.000,00	100,00	71.830.100,00	93,04	5.369.900,00	6,96
1	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	590.937.743,00	77.200.000,00	100,00	71.830.100,00	93,04	5.369.900,00	6,96

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		12.059.642.959,00	9.290.578.951,00	100,00	8.896.779.083,00	95,76	393.799.868,00	4,24
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.519.940.959,00	6.099.885.951,00	100,00	5.981.452.313,00	98,06	118.433.638,00	1,94
a	Gaji dan Tunjangan	2.844.296.959	3.085.049.951	100,00	2.992.684.813	97,01	92.365.138,00	2,99
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.675.644.000	3.014.836.000	100,00	2.988.767.500	99,14	26.068.500,00	0,86
II	BELANJA LANGSUNG	6.539.702.000,00	3.190.693.000,00	100,00	2.915.326.770,00	91,37	275.366.230,00	8,63
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.748.717.000	1.695.717.000	100,00	1.553.962.747	91,64	141.754.253,00	8,36
	1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.232.658.000	1.269.118.000	100,00	1.182.694.647	93,19	86.423.353,00	6,81
	2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	388.224.000	311.764.000	100,00	259.251.100	83,16	52.512.900,00	16,84
	3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	47.300.000	47.300.000	100,00	47.300.000	100,00	0,00	0,00
	4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	55.855.000	45.855.000	100,00	43.767.000	95,45	2.088.000,00	4,55
	5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.680.000	21.680.000	100,00	20.950.000	96,63	730.000,00	3,37
	6. Kegiatan Peningkatan Gedung Kantor	3.000.000.000	0			0,00	0,00	0,00
	B. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	337.595.000	264.546.000	100,00	247.038.221	93,38	17.507.779,00	6,62
	1. Kegiatan Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	264.546.000	264.546.000	100,00	247.038.221	93,38	17.507.779,00	0,00
	2. Kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	73.049.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	C. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	840.735.000	690.735.000	100,00	599.807.818	86,84	90.927.182,00	13,16
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	630.815.000	480.815.000	100,00	398.551.160	82,89	82.263.840,00	17,11
	2. Kegiatan Pembuatan Bahan Promosi	209.920.000	209.920.000	100,00	201.256.658	95,87	8.663.342,00	4,13
	D. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	72.960.000	0	100,00	0	0,00	0,00	0,00
	1. Kegiatan Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	72.960.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	E. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	539.695.000	539.695.000	100,00	514.517.984	95,33	25.177.016,00	4,67
	1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka	509.485.000	509.485.000	100,00	485.168.384	95,23	24.316.616,00	4,77
	2. Kegiatan Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan	30.210.000	30.210.000	100,00	29.349.600	97,15	860.400,00	2,85

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		17.410.637.966,00	17.035.980.881,00	100,00	16.096.849.364,00	94,49	939.131.517,00	5,51
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.048.870.833,00	5.869.276.248,00	100,00	5.722.882.970,00	97,51	146.393.278,00	2,49
a	Gaji dan Tunjangan	3.190.806.833,00	3.070.528.248,00	100,00	2.967.443.820,00	96,64	103.084.428,00	3,36
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.858.064.000,00	2.798.748.000,00	100,00	2.755.439.150,00	98,45	43.308.850,00	1,55
II	BELANJA LANGSUNG	11.361.767.133,00	11.166.704.633,00	100,00	10.373.966.394,00	92,90	792.738.239,00	7,10
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.052.688.583,00	3.095.883.583,00	100,00	2.964.464.813,00	95,76	131.418.770,00	4,24
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.371.529.000,00	2.378.024.000,00	100,00	2.334.053.258,00	98,15	43.970.742,00	1,85
2	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	335.600.000,00	349.800.000,00	100,00	297.444.273,00	85,03	52.355.727,00	14,97
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	113.540.000,00	113.540.000,00	100,00	105.643.409,00	93,05	7.896.591,00	6,95
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.785.485,00	76.085.485,00	100,00	51.701.900,00	67,95	24.383.585,00	32,05
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	99.446.758,00	112.646.758,00	100,00	110.927.680,00	98,47	1.719.078,00	1,53
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.787.340,00	65.787.340,00	100,00	64.694.293,00	98,34	1.093.047,00	1,66
B	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3.417.253.250,00	3.256.275.750,00	100,00	2.912.277.664,00	89,44	343.998.086,00	10,56
1	Pemberdayaan Peran Serta Pemuda	230.113.000,00	230.113.000,00	100,00	180.001.339,00	78,22	50.111.661,00	21,78
2	Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	276.966.500,00	244.966.500,00	100,00	173.629.631,00	70,88	71.336.869,00	29,12
3	Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	25.897.900,00	73,99	9.102.100,00	26,01
4	Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	2.676.170.750,00	2.547.193.250,00	100,00	2.350.841.600,00	92,29	196.351.650,00	7,71
5	Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	199.003.000,00	199.003.000,00	100,00	181.907.194,00	91,41	17.095.806,00	8,59
C	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	4.062.630.300,00	4.194.630.300,00	100,00	3.885.508.927,00	92,63	309.121.373,00	7,37
1	Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	597.708.300,00	597.708.300,00	100,00	517.164.500,00	86,52	80.543.800,00	13,48
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.149.700.000,00	1.121.700.000,00	100,00	1.105.011.990,00	98,51	16.688.010,00	1,49
3	Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	735.159.000,00	715.159.000,00	100,00	570.319.537,00	79,75	144.839.463,00	20,25
4	Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	1.269.810.000,00	1.469.810.000,00	100,00	1.444.863.950,00	98,30	24.946.050,00	1,70
5	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	310.253.000,00	290.253.000,00	100,00	248.148.950,00	85,49	42.104.050,00	14,51

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	829.195.000,00	619.915.000,00	100,00	611.714.990,00	98,68	8.200.010,00	1,32
1	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	-	122.658.000,00	100,00	118.846.400,00	96,89	3.811.600,00	3,11
2	Jasa Konsultasi dan Kostruksi Prasarana kepemudaan dan Olahraga	471.280.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	245.690.000,00	385.032.000,00	100,00	383.665.550,00	99,65	1.366.450,00	0,35
4	Srandarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga Standar Nasional	112.225.000,00	112.225.000,00	100,00	109.203.040,00	97,31	3.021.960,00	2,69

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		27.083.526.859,00	23.982.257.860,16	100,00	20.566.172.675,00	85,76	3.416.085.185,16	14,24
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.444.143.859,00	7.486.049.860,16	100,00	7.163.913.793,00	95,70	322.136.067,16	4,30
	Belanja Pegawai	6.444.143.859,00	7.486.049.860,16	100,00	7.163.913.793,00	95,70	322.136.067,16	4,30
II	BELANJA LANGSUNG	20.639.383.000,00	16.496.208.000,00	100,00	13.402.258.882,00	81,24	3.093.949.118,00	18,76
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.469.243.000,00	5.091.452.801,00	100,00	4.441.852.491,00	87,24	649.600.310,00	12,76
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.975.115.000,00	2.225.115.000,00	100,00	1.889.674.751,00	84,92	335.440.249,00	15,08
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	613.500.000,00	1.028.948.801,00	100,00	1.000.917.721,00	97,28	28.031.080,00	2,72
3	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	336.622.000,00	336.622.000,00	100,00	301.901.708,00	89,69	34.720.292,00	10,31
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.360.000,00	70.360.000,00	100,00	55.841.556,00	79,37	14.518.444,00	20,63
5	Penyusunan Buku Pariwisata Daerah	147.252.000,00	179.752.000,00	100,00	164.728.680,00	91,64	15.023.320,00	8,36
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	292.809.000,00	317.809.000,00	100,00	270.689.742,00	85,17	47.119.258,00	14,83
7	Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Ekonomi khusus pariwisata pada sekretariat Dewan Kawasan Provinsi Kep. Bangka Belitung	103.120.000,00	203.120.000,00	100,00	159.175.018,00	78,37	43.944.982,00	21,63
8	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang	487.565.000,00	286.826.000,00	100,00	285.188.500,00	99,43	1.637.500,00	0,57
9	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	442.900.000,00	442.900.000,00	100,00	313.734.815,00	70,84	129.165.185,00	29,16
B	Program Pelestarian Budaya	4.563.010.000,00	4.627.640.199,00	100,00	3.439.792.148,00	74,33	1.187.848.051,00	25,67
1	Kajian Tradisi Bangka Belitung	88.979.000,00	88.979.000,00	100,00	76.034.450,00	85,45	12.944.550,00	14,55
2	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	206.574.000,00	206.574.000,00	100,00	193.662.300,00	93,75	12.911.700,00	6,25
3	Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung	108.014.000,00	-	-	-	-	-	-
4	Partisipasi dan Penghargaan serta Kerjasama di bidang budaya	1.870.500.000,00	1.743.144.199,00	100,00	965.128.786,00	55,37	778.015.413,00	44,63
5	Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	378.901.000,00	378.901.000,00	100,00	354.068.000,00	93,45	24.833.000,00	6,55
6	Pengelolaan Cagar Budaya	83.885.000,00	83.885.000,00	100,00	74.840.000,00	89,22	9.045.000,00	10,78
7	Pendokumentasian dan Publikasi koleksi museum daerah	140.981.000,00	140.981.000,00	100,00	126.863.400,00	89,99	14.117.600,00	10,01
8	Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung	79.829.000,00	79.829.000,00	100,00	73.761.200,00	92,40	6.067.800,00	7,60
9	Festival Budaya Melayu	914.385.000,00	914.385.000,00	100,00	694.642.012,00	75,97	219.742.988,00	24,03
10	Pentas Seni Budaya	265.540.000,00	565.540.000,00	100,00	541.614.000,00	95,77	23.926.000,00	4,23
11	Pembinaan Drumband Serumpun Sebalai	425.422.000,00	425.422.000,00	100,00	339.178.000,00	79,73	86.244.000,00	20,27

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.848.597.000,00	1.488.330.000,00	100,00	1.107.039.842,00	74,38	381.290.158,00	
1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	92.118.000,00	92.118.000,00	100,00	66.747.200,00	72,46	25.370.800,00	27,54
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat	171.877.000,00	171.877.000,00	100,00	155.450.500,00	90,44	16.426.500,00	9,56
3	Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan sekitarnya	700.310.000,00	700.310.000,00	100,00	457.680.744,00	65,35	242.629.256,00	34,65
4	Penyusunan RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya	700.940.000,00	-	-	-			
5	Penyusunan RIRD KSPP Pangkalpinang-Mendobarat-Bangka Tengah dan sekitarnya	700.940.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Penyusunan RIRD KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya	303.722.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	148.118.000,00	-	-	-			
8	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	117.885.000,00	117.885.000,00	100,00	112.277.600,00	95,24	5.607.400,00	4,76
9	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	2.506.547.000,00	-	-	-	-	-	-
10	Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung	406.140.000,00	406.140.000,00	100,00	314.883.798,00	77,53	91.256.202,00	22,47
D	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.694.524.000,00	3.579.524.000,00	100,00	3.109.085.303,00	86,86	470.438.697,00	13,14
1	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (bahan promosi)	485.899.000,00	485.899.000,00	100,00	481.489.000,00	99,09	4.410.000,00	0,91
2	Pelayanan Informasi Pariwisata	120.990.000,00	120.990.000,00	100,00	104.856.120,00	86,67	16.133.880,00	13,33
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	118.920.000,00	118.920.000,00	100,00	50.528.260,00	42,49	68.391.740,00	57,51
4	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	245.630.000,00	245.630.000,00	100,00	242.157.500,00	98,59	3.472.500,00	1,41
5	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	2.436.415.000,00	2.321.415.000,00	100,00	1.955.258.623,00	84,23	366.156.377,00	15,77
6	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	286.670.000,00	286.670.000,00	100,00	274.795.800,00	95,86	11.874.200,00	4,14
E	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	2.064.009.000,00	1.709.261.000,00	100,00	1.304.489.098,00	76,32	404.771.902,00	23,68
1	Partisipasi Event Festival Nusantara	407.396.000,00	287.396.000,00	100,00	124.370.345,00	43,27	163.025.655,00	56,73
2	Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata	645.090.000,00	645.090.000,00	100,00	499.531.111,00	77,44	145.558.889,00	22,56
3	Penyelenggaraan Pemilihan Putra - Putri Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	464.010.000,00	464.010.000,00	100,00	421.177.246,00	90,77	42.832.754,00	9,23
4	Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Kuliner	159.065.000,00	159.065.000,00	100,00	123.611.360,00	77,71	35.453.640,00	22,29
5	Forum KomunikasiPemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah	153.700.000,00	153.700.000,00	100,00	135.799.036,00	88,35	17.900.964,00	11,65
6	Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif	234.748.000,00	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9,00
TOTAL BELANJA DINAS		11.661.864.297,41	11.759.484.800,44	99,42	10.511.840.990,00	89,39	1.247.643.810,44	0,11
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.511.585.917,41	7.558.426.320,44	100,00	7.040.762.619,00	93,15	517.663.701,44	0,08
a	Gaji dan Tunjangan	3.248.345.917,41	3.904.206.320,44	100,00	3.520.261.419,00	90,17	383.944.901,44	0,12
b	Tambahan Penghasilan PNS	3.263.240.000,00	3.654.220.000,00	100,00	3.520.501.200,00	96,34	133.718.800,00	0,04
II	BELANJA LANGSUNG	5.150.278.380	4.201.058.480	98,83	3.471.078.371	82,62	729.980.109	0,17
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	2.386.022.040	2.482.164.540	94,17	2.093.498.589	84,34	388.665.951	0,16
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1.851.280.000	1.929.329.840	100,00	1.798.728.985	93,23	2.640.650	0,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	281.831.100	343.161.000	65,00	129.777.563	37,82	47.912.297	0,17
3	Peningkatan disiplin aparatur	69.910.000	90.860.000	100,00	88.600.000	97,51	9.690.000	0,14
4	Peningkatan kapasitas sumber daya paratur	31.400.000	29.000.000	100,00	9.975.291	34,40	1.096.700	0,03
5	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	89.587.240	27.800.000	100,00	25.231.650	90,76	6.700.000	0,07
6	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	62.013.700	62.013.700	100,00	41.185.100	66,41	20.828.600	0,34
B	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	1.082.289.900	580.317.900	100,00	472.547.874	81,43	107.770.026	0,10
1	Penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah	52.527.500	52.527.500	100,00	39.504.510	75,21	13.022.990	0,25
2	Pelestarian dan pengelolaan bahan pustaka	28.580.000	28.580.000	100,00	20.584.000	72,02	7.996.000	0,28
3	Pengumpulan koleksi hasil terbitan daerah	37.544.000	37.544.000	100,00	32.762.000	0,00	4.782.000	0,13
4	Pelayanan perpustakaan keliling	117.547.400	117.547.400	100,00	72.732.349	0,00	44.815.051	0,38
5	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	79.800.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Pengembangan minat dan budaya baca	311.441.000	311.441.000	100,00	279.450.315	0,00	31.990.685	0,10
7	Pengelolaan layanan website	32.678.000	32.678.000	100,00	27.514.700	0,00	5.163.300	0,16
8	Penyediaan buku bacaan dan sekolah pada perpustakaan sekolah	422.172.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	598.070.540	360.585.140	100,00	234.761.740	65,11%	125.823.400	0,35
1	Lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi	67.699.100	67.699.100	100,00	37.571.600	55,50	30.127.500	0,45
2	Penilaian angka kredit pustakawan	22.623.100	22.623.100	100,00	19.198.250	84,86	3.424.850	0,15
3	Pendataan nomor pokok perpustakaan di Prov. Kep. Bangka Belitung	33.827.000	33.827.000	100,00	22.360.600	66,10	11.466.400	0,34
4	Lomba pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung	92.881.540	92.881.540	100,00	76.657.000	82,53	16.224.540	0,17
5	Pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah	47.191.700	47.191.700	100,00	35.239.690	74,67	11.952.010	0,25
6	Akreditasi perpustakaan sekolah	96.362.700	96.362.700	100,00	43.734.600	45,39	52.628.100	0,55
7	Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan	237.485.400	0	0,00	0	0,00	0	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9,00
D	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	583.246.000	487.103.500	100,00	421.410.968	86,51%	65.692.532	0,13
1	Lomba arsiparis teladan tingkat provinsi kepulauan bangka belitung	96.142.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Kegiatan lomba pengelolaan kearsipan desa/kelurahan, perangkat daerah, LKD kab/kota	81.302.500	81.302.500	100,00	67.365.800	82,86	13.936.700	0,17
3	Kegiatan penilaian angka kredit arsiparis	53.600.000	53.600.000	100,00	41.389.670	77,22	12.210.330	0,23
4	Kegiatan pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	117.325.000	117.325.000	100,00	99.053.978	84,43	18.271.022	0,16
5	Kegiatan pembinaan kearsipan di SMA/SMK dan SLB prov. Kep. Bangka belitung	113.083.500	113.083.500	100,00	106.132.010	93,85	6.951.490	0,06
6	Kegiatan arsip masuk desa	121.792.500	121.792.500	100,00	107.469.510	88,24	14.322.990	0,12
E	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	500.649.900	290.887.400	100,00	248.859.200	85,55	42.028.200	0,14
1	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	9.403.000	9.403.000	100,00	9.103.000	96,81	300.000	0,03
2	Kegiatan pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	66.024.000	66.024.000	100,00	59.030.000	89,41	6.994.000	0,11
3	Kegiatan pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Prov. Kep. Bangka Belitung	31.025.000	31.025.000	100,00	26.000.000	83,80	5.025.000	0,16
4	Kegiatan pendampingan dan pengelolaan arsip dinamis di kab/kota	110.697.400	110.697.400	100,00	100.375.000	90,68	10.322.400	0,09
5	Kegiatan pendataan arsip inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	32.322.000	32.322.000	100,00	25.092.000	77,63	7.230.000	0,22
6	Kegiatan pendampingan dan pendataan arsip statis kab/kota	41.416.000	41.416.000	100,00	29.259.200	70,65	12.156.800	0,29
7	Kegiatan penelusuran sejarah pembentukan Prov. Kep. Bangka Belitung	209.762.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00

LAMPIRAN



REALISASI KEUANGAN URUSAN PILIHAN

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	43.996.254.974	34.093.486.989	99,19	24.861.237.818	72,92	9.232.249.171	27,08
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.366.836.674	14.411.739.589	100,00	11.191.895.037	77,66	3.219.844.552	22,34
	a. Gaji dan Tunjangan	7.409.164.674	7.623.647.589	100,00	5.838.478.637	76,58	1.785.168.952	23,42
	b. Tambahan Penghasilan PNS	6.957.672.000	6.788.092.000	100,00	5.353.416.400	78,86	1.434.675.600	21,14
II	BELANJA LANGSUNG	29.629.418.300	19.681.747.400	98,38	13.669.342.781	0,69	6.012.404.619	30,55
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.818.987.000	4.121.613.000	100,00	3.344.080.515	0,81	777.532.485	18,86
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.830.020.000	2.129.181.000	100,00	1.834.733.826	86,17	294.447.174	13,83
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.200.140.000	1.014.140.000	100,00	765.151.832	75,45	248.988.168	24,55
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	175.200.000	175.200.000	100,00	151.570.000	86,51	23.630.000	13,49
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	346.880.000	346.880.000	100,00	165.205.100	47,63	181.674.900	52,37
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	160.368.000	349.833.000	100,00	324.270.657	92,69	25.562.343	7,31
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.379.000	106.379.000	100,00	103.149.100	96,96	3.229.900	3,04
	B. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	7.741.034.000	3.774.814.000	100,00	1.023.608.634	27,12	2.751.205.366	0,73
	1. Pembangunan Dermaga Jetty	5.100.000.000	-	-	-	-	-	0,00
	2. Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	141.506.000	141.506.000	100,00	105.714.400	74,71	35.791.600	25,29
	3. Pendampingan Teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	546.280.000	1.680.060.000	100,00	817.467.134	48,66	862.592.866	51,34
	4. Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	172.898.000	172.898.000	100,00	100.427.100	58,08	72.470.900	41,92
	5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Daerah (DAK)	1.780.350.000	1.780.350.000	100,00	0	-	1.780.350.000	100,00
	C. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8.052.255.900	5.323.540.000	100,00	3.816.775.846	71,70	1.506.764.154	28,30
	1. Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap	1.722.880.000	1.776.880.000	100,00	1.720.902.197	96,85	55.977.803	3,15
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.093.400.000	1.093.400.000	100,00	952.717.200	87,13	140.682.800	12,87
	3. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1.899.360.000	1.845.360.000	100,00	667.445.142	36,17	1.177.914.858	63,83
	4. Peningkatan dan Pengembangan PPI	3.158.715.900	430.000.000	100,00	339.112.222	78,86	90.887.778	21,14
	5. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap	112.650.000	112.650.000	100,00	106.280.196	94,35	6.369.804	5,65
	6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	65.250.000	65.250.000	100,00	30.318.889	46,47	34.931.111	53,53

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	3.016.263.000	2.506.175.000	100,00	2.277.617.150	90,88	228.557.850	9,12
	1. Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	181.568.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	433.845.000	433.845.000	100,00	367.035.100	84,60	66.809.900	15,40
	3. Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	36.010.000	36.010.000	100,00	34.555.000	95,96	1.455.000	4,04
	4. Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	229.175.000	229.175.000	100,00	218.907.900	95,52	10.267.100	4,48
	5. Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	75.500.000	75.500.000	100,00	65.319.000	86,52	10.181.000	13,48
	6. Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.731.645.000	1.731.645.000	100,00	1.591.800.150	91,92	139.844.850	8,08
	7. Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan	328.520.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.061.719.000	1.061.719.000	90,09	636.447.500	59,95	425.271.500	40,05
	1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan	770.190.000	770.190.000	80,00	407.907.400	52,96	362.282.600	47,04
	2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan	67.109.000	67.109.000	100,00	62.319.300	92,86	4.789.700	7,14
	3. Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	87.932.000	87.932.000	90,25	66.101.400	75,17	21.830.600	24,83
	4. Peningkatan Fungsi BOOST Center	136.488.000	136.488.000	90,10	100.119.400	73,35	36.368.600	26,65
	F. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	718.746.000	718.746.000	100,00	665.198.376	92,55	53.547.624	7,45
	1. Sebelumnya Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan menjadi Peningkatan Fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	718.746.000	718.746.000	100,00	665.198.376	92,55	53.547.624	7,45
	G. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	3.012.052.400	1.075.458.400	100,00	973.685.031	90,54	101.773.369	9,46
	1. Sebelumnya Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	801.986.400	801.986.400	100,00	714.710.531	89,12	87.275.869	10,88
	2. Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)	189.360.000	189.360.000	100,00	180.240.000	95,18	9.120.000	4,82
	3. Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	84.112.000	84.112.000	100,00	78.734.500	93,61	5.377.500	6,39
	4. Sebelumnya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK) menjadi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan	1.936.594.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	1.776.696.000	967.178.000	95,30	799.425.729	82,66	167.752.271	17,34
	1. Sebelumnya Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	744.316.000	744.316.000	90,60	593.166.729	79,69	151.149.271	20,31
	2. Sebelumnya Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa menjadi Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	222.862.000	222.862.000	100,00	206.259.000	92,55	16.603.000	7,45
	3. Sebelumnya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa (DAK) menjadi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) (DAK)	809.518.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	431.665.000	132.504.000	100,00	132.504.000	100,00	0	0,00
	1. Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	431.665.000	132.504.000	100,00	132.504.000	100,00	0	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	43.514.263.918,50	42.153.536.918,50	100,00	38.565.340.627,00	91,49	3.588.196.291,50	8,51
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.379.416.498,50	16.379.416.498,50	100,00	15.328.591.820,00	93,58	1.050.824.678,50	6,42
	a. Gaji dan Tunjangan	6.121.936.086,50	6.121.936.086,50	100,00	5.729.505.760,00	93,59	392.430.326,50	6,41
	b. Tambahan Penghasilan PNS	10.257.480.412,00	10.257.480.412,00	100,00	9.599.086.060,00	93,58	658.394.352,00	6,42
II	BELANJA LANGSUNG	27.134.847.420,00	25.774.120.420,00	100,00	23.236.748.807,00	90,16	2.537.371.613,00	9,84
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.194.525.000,00	7.144.525.000,00	100,00	6.501.677.609,00	91,00	642.847.391,00	9,00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.999.990.000,00	4.999.990.000,00	100,00	4.828.514.659,00	96,57	171.475.341,00	3,43
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.092.700.000,00	1.092.700.000,00	100,00	776.230.100,00	71,04	316.469.900,00	28,96
5	Peningkatan Disiplin Aparatur	257.915.000,00	207.915.000,00	100,00	207.915.000,00	100,00	0,00	-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	196.600.000,00	196.600.000,00	100,00	90.557.228,00	46,06	106.042.772,00	53,94
4	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	647.320.000,00	647.320.000,00	100,00	598.460.622,00	92,45	48.859.378,00	7,55
B	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultural	1.552.435.000,00	1.247.245.000,00	100,00	812.438.934,00	0,00	434.806.066,00	34,86
1	Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	642.670.000	642.670.000,00	100,00	297.137.834,00	46,23	345.532.166,00	53,77
2	Pengembangan Komoditi pangaan dengan penerapan GP PTT (padi dan jagung)	549.875.000	549.875.000,00	100,00	470.940.500,00	85,65	78.934.500,00	14,35
3	Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	54.700.000	54.700.000,00	100,00	44.360.600,00	81,10	10.339.400,00	18,90
4	Pengembangan komoditi hortikultura Lokal yang Unggul	305.190.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
C	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	4.551.447.720,00	3.924.447.720,00	100,00	3.253.533.991,00	82,90	670.913.729,00	17,10
1	Pembangunan jaringan irigasi tersier	774.890.000	147.890.000,00		125.602.821,00	84,93	22.287.179,00	15,07
2	Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	444.430.000	444.430.000,00	100,00	424.987.434,00	95,63	19.442.566,00	4,37
3	Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	1.157.915.000	1.157.915.000,00		723.710.700,00	62,50	434.204.300,00	37,50
4	Penyusunan Rencana Desain Kawasan,DED dan KLHS agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	742.800.000	742.800.000,00	100,00	660.070.394,00	88,86	82.729.606,00	11,14
5	Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	247.497.720	247.497.720,00		233.033.700,00	94,16	14.464.020,00	5,84
6	Rembuk Tani Nasional	1.183.915.000	1.183.915.000,00	100,00	1.086.128.942,00	91,74	97.786.058,00	8,26
D	Program Pengembangan Perkebunan	4.088.978.500,00	3.738.441.500,00	100,00	3.613.271.425,00	96,65	125.170.075,00	3,35
1	Intensifikasi tanaman perkebunan	2.213.962.500	2.213.962.500,00	100,00	2.152.625.425,00	97,23	61.337.075,00	2,77
2	Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	376.475.000	376.475.000,00	100,00	363.578.000,00	96,57	12.897.000,00	3,43
3	Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	257.584.000	257.584.000,00	100,00	249.248.000,00	96,76	8.336.000,00	3,24
4	Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan	350.537.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Ekstensifikasi/Perluasan Areal Tanaman Perkebunan	890.420.000	890.420.000,00	100,00	847.820.000,00	95,22	42.600.000,00	4,78

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.649.402.000,00	3.649.402.000,00	100,00	3.346.114.866,00	91,69	303.287.134,00	8,31
1	Peningkatan populasi ternak	2.308.422.000	2.308.422.000,00	100,00	2.097.044.560,00	90,84	211.377.440,00	9,16
2	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	173.345.000	173.345.000,00	100,00	164.376.463,00	94,83	8.968.537,00	5,17
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	387.695.000	387.695.000,00	100,00	385.111.978,00	99,33	2.583.022,00	0,67
4	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	274.920.000	274.920.000,00	100,00	235.932.300,00	85,82	38.987.700,00	14,18
5	Pemberian Asuransi Peternakan	194.800.000	194.800.000,00	100,00	188.519.197,00	96,78	6.280.803,00	3,22
6	Sosialisasi Pengawasan Mutu Hasil Ternak Sapi di RPH	58.010.000	58.010.000,00	100,00	56.111.000,00	96,73	1.899.000,00	3,27
7	Pengawalan dan Bimtek Pengolahan Limbah ternak Sapi/pupuk kompos/Organik	252.210.000	252.210.000,00	100,00	219.019.368,00	86,84	33.190.632,00	13,16
F	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	441.573.000,00	415.573.000,00	100,00	369.998.363,00	89,03	45.574.637,00	10,97
1	Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	113.425.000	113.425.000,00	100,00	106.373.300,00	93,78	7.051.700,00	6,22
2	Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	95.588.000	95.588.000,00	100,00	76.700.000,00	80,24	18.888.000,00	19,76
3	Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	87.955.000	61.955.000,00	100,00	54.677.400,00	88,25	7.277.600,00	11,75
4	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	144.605.000	144.605.000,00	100,00	132.247.663,00	91,45	12.357.337,00	8,55
G	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	368.380.000,00	368.380.000,00	100,00	355.521.863,00	96,51	12.858.137,00	3,49
1	Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	153.700.000	153.700.000,00	100,00	153.598.000,00	99,93	102.000,00	0,07
2	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	214.680.000	214.680.000,00	100,00	201.923.863,00	94,06	12.756.137,00	5,94
H	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian	5.288.106.200,00	5.286.106.200,00	100,00	4.984.191.756,00	94,29	301.914.444,00	5,71
1	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	450.400.000	450.400.000,00	100,00	405.413.422,00	90,01	44.986.578,00	9,99
2	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	778.420.000	778.420.000,00	100,00	639.310.396,00	82,13	139.109.604,00	17,87
3	Integrasi Jagung dan Sapi	86.296.400	86.296.400,00	100,00	86.195.000,00	99,88	101.400,00	0,12
4	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Prasarana Penunjang	1.676.100.000	1.676.100.000,00	100,00	1.649.269.000,00	98,40	26.831.000,00	1,60
5	Pembangunan Gudang Pakan Ternak Silase	166.829.800	166.829.800,00	100,00	166.629.800,00	99,88	200.000,00	0,12
6	Pembangunan Kandang Ternak beserta Sarana dan Prasarananya	2.130.060.000	2.128.060.000,00	100,00	2.037.374.138,00	95,74	90.685.862,00	4,26

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		30.399.868.002,00	35.225.716.241,00	95,03	28.234.837.018,00	80,15	6.990.879.223,00	19,85
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.623.071.289,00	21.866.226.678,00	100,00	19.327.019.495,00	88,39	2.539.207.183,00	11,61
a	Gaji dan Tunjangan	9.800.831.289,00	11.309.610.678,00	100,00	10.165.226.495,00	89,88	1.144.384.183,00	10,12
b	Tambahan Penghasilan PNS	7.822.240.000,00	10.556.616.000,00	100,00	9.161.793.000,00	86,79	1.394.823.000,00	13,21
II	BELANJA LANGSUNG	12.776.796.713,00	13.359.489.563,00	90,06	8.907.817.523,00	66,68	4.451.672.040,00	33,32
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.567.482.900,00	3.539.410.100,00	92,50	2.940.595.709,00	83,08	598.814.391,00	16,92
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.839.240.000,00	1.762.240.000,00	90,00	1.446.705.280,00	82,09	315.534.720,00	17,91
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.771.330.000,00	1.038.330.000,00	90,00	852.742.700,00	82,13	185.587.300,00	17,87
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	345.195.000,00	345.195.000,00	90,00	291.285.440,00	84,38	53.909.560,00	15,62
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278.053.200,00	278.053.200,00	95,00	247.439.313,00	88,99	30.613.887,00	11,01
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	80.186.900,00	80.186.900,00	95,00	71.168.976,00	88,75	9.017.924,00	11,25
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.405.000,00	35.405.000,00	95,00	31.254.000,00	88,28	4.151.000,00	11,72
7	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	218.072.800,00	-	-	-	-	-	-
B	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1.493.071.813,00	3.341.750.313,00	89,29	1.530.886.554,00	45,81	1.810.863.759,00	54,19
1	Pemanfaatan Kawasan Hutan	193.900.150,00	187.496.150,00	100,00	180.976.190,00	96,52	6.519.960,00	3,48
2	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	307.321.500,00	6.404.000,00	100,00	6.404.000,00	100,00	-	-
3	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan	223.280.000,00	223.280.000,00	100,00	210.817.000,00	94,42	12.463.000,00	5,58
4	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	219.990.163,00	189.990.163,00	95,00	169.836.100,00	89,39	20.154.063,00	10,61
5	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	431.280.000,00	431.280.000,00	100,00	419.149.564,00	97,19	12.130.436,00	2,81
6	Penyelesaian Usulan Perubahan Status Perubahan Kawasan Hutan / TORA	117.300.000,00	117.300.000,00	100,00	102.031.300,00	86,98	15.268.700,00	13,02
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana KPH (DAK)	-	2.186.000.000,00	30,00	441.672.400,00	20,20	1.744.327.600,00	79,80
C	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.992.122.000,00	1.768.852.150,00	93,00	1.462.545.640,00	82,68	306.306.510,00	17,32
1	Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan	212.400.000,00	212.400.000,00	100,00	200.553.360,00	94,42	11.846.640,00	5,58
2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	299.925.000,00	299.925.000,00	65,00	165.147.200,00	55,06	134.777.800,00	44,94
3	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	480.570.000,00	480.570.000,00	100,00	456.972.050,00	95,09	23.597.950,00	4,91

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Penyelenggaraaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	349.870.000,00	-	-		-	-	-
5	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	487.400.000,00	487.400.000,00	100,00	478.916.030,00	98,26	8.483.970,00	1,74
6	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	161.957.000,00	161.957.000,00	100,00	160.957.000,00		1.000.000,00	
7	Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH)	-	126.600.150,00	-	-	-	126.600.150,00	100,00
D	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	2.856.998.000,00	2.842.355.000,00	84,29	1.388.597.287,00	48,85	1.453.757.713,00	51,15
1	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	199.670.000,00	199.670.000,00	85,00	156.187.930,00	78,22	43.482.070	21,78
2	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	129.517.500,00	129.517.500,00	100,00	126.506.780,00	97,68	3.010.720	2,32
3	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan	171.015.000,00	171.015.000,00	70,00	108.998.190,00	63,74	62.016.810	36,26
4	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	334.875.000,00	334.875.000,00	85,00	258.608.502,00	77,23	76.266.498	22,77
5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	850.893.000,00	257.275.000,00	95,00	229.703.296,00		27.571.704	
6	Pengembangan Perhutanan Sosial	498.712.500,00	498.712.500,00	80,00	349.971.722,00	70,18	148.740.778	29,82
7	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Pecinta Alam/ Pramuka/Siswa Sekolah	241.290.000,00	241.290.000,00	75,00	158.620.867,00	65,74	82.669.133	34,26
8	Pembangunan Sumber Benih dan Konservasi ex situ Gaharu dan Pelawan	431.025.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	-	410.000.000,00	-	-	-	410.000.000	100,00
10	Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (DBH Kehutanan)	-	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000	100,00
E	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	1.867.122.000,00	1.867.122.000,00	91,25	1.585.192.333,00	84,90	281.929.667,00	15,10
1	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	212.200.000,00	212.200.000,00	95,00	185.044.003,00	87,20	27.155.997,00	12,80
2	Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	210.568.000,00	210.568.000,00	75,00	141.172.198,00	67,04	69.395.802,00	32,96
3	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	213.708.000,00	213.708.000,00	90,00	178.544.550,00	83,55	35.163.450,00	16,45
4	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	270.510.000,00	270.510.000,00	100,00	253.806.839,00	93,83	16.703.161,00	6,17
5	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	211.168.000,00	211.168.000,00	80,00	153.610.700,00	72,74	57.557.300,00	27,26
6	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan	208.568.000,00	208.568.000,00	90,00	170.135.245,00	81,57	38.432.755,00	18,43
7	Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	270.200.000,00	270.200.000,00	100,00	259.094.060,00	95,89	11.105.940,00	4,11
8	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	270.200.000,00	270.200.000,00	100,00	243.784.738,00	90,22	26.415.262,00	9,78

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		36.444.599.000,00	29.083.958.045,00	97,67	25.087.944.937,40	86,26	3.996.013.107,60	13,74
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.505.141.000,00	14.699.547.545,00	100,00	13.033.182.153,00	88,66	1.666.365.392,00	11,34
a	Gaji dan Tunjangan	6.935.461.000,00	7.372.747.545,00	100,00	6.622.998.453,00	89,83	749.749.092,00	10,17
b	Tambahan Penghasilan PNS	5.569.680.000,00	7.326.800.000,00	100,00	6.410.183.700,00	87,49	916.616.300,00	12,51
II	BELANJA LANGSUNG	23.939.458.000,00	14.384.410.500,00	95,33	12.054.762.784,40	83,80	2.329.647.715,60	16,20
A	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	5.195.881.000,00	5.770.103.500,00	76,67	4.481.688.591,00	77,67	1.288.414.909,00	22,33
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.613.720.000,00	1.813.720.000,00	100,00	1.719.207.876,00	94,79	94.512.124,00	5,21
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.294.875.000,00	1.387.097.500,00	100,00	1.273.914.964,00	91,84	113.182.536,00	8,16
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	148.080.000,00	148.080.000,00	100,00	146.605.000,00	99,00	1.475.000,00	1,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.040.000,00	58.040.000,00	100,00	51.207.210,00	88,23	6.832.790,00	11,77
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.720.000,00	88.720.000,00	100,00	72.092.300,00	81,26	16.627.700,00	18,74
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.646.000,00	43.646.000,00	100,00	39.487.956,00	90,47	4.158.044,00	9,53
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan	495.200.000,00	400.000.000,00	50,00	189.926.030,00	47,48	210.073.970,00	52,52
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Barat	495.200.000,00	400.000.000,00	55,00	201.078.567,00	50,27	198.921.433,00	49,73
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Pulau Belitung	495.200.000,00	400.000.000,00	85,00	317.829.528,00	79,46	82.170.472,00	20,54
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka	495.200.000,00	400.000.000,00	70,00	260.719.434,00	65,18	139.280.566,00	34,82
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Belitung Timur	0,00	380.800.000,00	60,00	209.619.726,00	55,05	171.180.274,00	44,95
12	DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	0,00	250.000.000,00	0,00	-	0,00	250.000.000,00	100,00
B	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	2.832.610.000,00	1.121.750.000,00	100,00	1.043.867.495,00	0,93	77.882.505,00	6,94
1	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.836.000,00	92.836.000,00	100,00	82.372.742,00	88,73	10.463.258,00	11,27
2	DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah	1.669.344.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
3	Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	781.540.000,00	740.024.000,00	100,00	673.612.253,00	91,03	66.411.747,00	8,97
4	Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah	288.890.000,00	288.890.000,00	100,00	287.882.500,00	99,65	1.007.500,00	0,35

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	1.262.441.000,00	346.381.000,00	100,00	342.630.766,00	0,99	3.750.234,00	1,08
1	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	214.240.000,00	214.240.000,00	100,00	211.909.621,00	98,91	2.330.379,00	1,09
	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	67.844.000,00	67.844.000,00	100,00	67.072.745,00	98,86	771.255,00	1,14
	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	64.297.000,00	64.297.000,00	100,00	63.648.400,00	98,99	648.600,00	1,01
	Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu Oleh Aktivitas Pertambangan di Dalam dan Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	916.060.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
D	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	287.426.000,00	785.076.000,00	100,00	736.774.773,00	93,85	48.301.227,00	6,15
1	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mieral Bukan Logam dan Batuan	138.956.000,00	288.956.000,00	100,00	Rp 283.368.527,00	98,07	5.587.473,00	1,93
2	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.120.000,00	50.120.000,00	100,00	Rp 42.920.000,00	85,63	7.200.000,00	14,37
3	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.350.000,00	98.350.000,00	100,00	Rp 75.885.850,00	77,16	22.464.150,00	22,84
4	Penyusunan Blueprint Pengembangan dan Pernerdayaan Masyarakat	0,00	347.650.000,00	100,00	Rp 334.600.396,00	96,25	13.049.604,00	3,75
E	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	14.361.100.000,00	6.361.100.000,00	100,00	5.449.801.159,40	85,67	911.298.840,60	14,33
1	Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.981.988.000,00	3.981.988.000,00	100,00	3.308.395.011,40	83,08	673.592.988,60	16,92
2	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.108.000,00	94.108.000,00	100,00	89.991.600,00	95,63	4.116.400,00	4,37
3	Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	93.510.000,00	93.510.000,00	100,00	87.692.280,00	93,78	5.817.720,00	6,22
4	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	92.760.000,00	92.760.000,00	100,00	88.982.458,00	95,93	3.777.542,00	4,07
5	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	233.184.000,00	233.184.000,00	100,00	224.672.450,00	96,35	8.511.550,00	3,65
6	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	289.050.000,00	289.050.000,00	100,00	234.482.900,00	81,12	54.567.100,00	18,88
7	Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Provinsi Kepulaun Bangka Belitung (DAK)	1.576.500.000,00	1.576.500.000,00	100,00	1.415.584.460,00	89,79	160.915.540,00	10,21

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		27.770.293.464,00	23.332.174.040,00	96,17	21.793.924.905,00	93,41	1.538.249.135,00	6,59
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.640.113.464,00	11.296.620.830,00	100,00	10.750.499.242,00	95,17	546.121.588,00	5,08
	a. Gaji dan Tunjangan	5.614.681.464,00	5.809.974.830,00	100	5.585.199.242,00	96,13	224.775.588,00	3,87
	b. Tambahan Penghasilan PNS	5.025.432.000,00	5.486.646.000,00	100	5.165.300.000,00	94,14	321.346.000,00	5,86
II	BELANJA LANGSUNG	17.130.180.000,00	12.035.553.210,00	92,34	11.043.425.663,00	91,76	992.127.547,00	8,24
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.609.910.000,00	3.392.130.250,00	98,72	3.210.400.498,00	94,64	181.729.752,00	5,36
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.135.000,00	434.135.000,00	100	411.923.100,00	94,88	22.211.900,00	5,12
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.644.180.000,00	2.579.180.000,00	92,31	2.471.268.898,00	95,82	107.911.102,00	4,18
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.500.000,00	78.500.000,00	100	62.177.600,00	79,21	16.322.400,00	20,79
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	124.920.000,00	108.690.250,00	100	86.076.100,00	79,19	22.614.150,00	20,81
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.775.000,00	45.225.000,00	99,99	36.695.800,00	81,14	8.529.200,00	18,86
6	Peningkatan Disiplin Aparatur	146.400.000,00	146.400.000,00	99,99	142.259.000,00	97,17	4.141.000,00	2,83
B	Program Pengembangan Perdagangan	6.474.577.500,00	2.282.875.500,00	78,52	2.047.403.519,00	89,69	235.471.981,00	11,50
1	Pelaksanaan Pasar Murah	300.192.000,00	300.192.000,00	100	282.206.600,00	94,01	17.985.400,00	5,99
2	Operasi Pasar Murah	3.741.462.000,00	-	100	-	0,00	-	0,00
3	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	207.539.500,00	207.539.500,00	100	147.969.122,00	71,30	59.570.378,00	28,70
5	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	1.570.770.000,00	1.165.770.000,00	100	1.102.121.827,00	94,54	63.648.173,00	5,46
6	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	80.260.000,00	80.260.000,00	100	58.353.000,00	72,70	21.907.000,00	27,30
7	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	45.240.000,00	-	100	-	0,00	-	0,00
8	Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	129.778.000,00	129.778.000,00	0	120.834.700,00	93,11	8.943.300,00	0,00
10	Partisipasi Papper Day	346.526.000,00	346.526.000,00	6,71	294.802.870,00	85,07	51.723.130,00	14,93
12	Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Sektor Perikanan	52.810.000,00	52.810.000,00	100	41.115.400,00	77,86	11.694.600,00	22,14
C	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	791.388.000,00	507.450.960,00	100,00	410.696.620,00	80,93	96.754.340,00	23,56
1	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	59.877.000,00	49.419.960,00	100	48.748.960,00	98,64	671.000,00	1,36
2	Pengembangan Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra	273.480.000,00	-	100	-	0,00	-	0,00
3	Finalisasi RPIP	216.234.000,00	216.234.000,00	100	177.133.901,00	81,92	39.100.099,00	18,08
4	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	125.235.000,00	125.235.000,00	100	80.761.700,00	64,49	44.473.300,00	35,51
5	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	45.300.000,00	45.300.000,00	100	33.336.342,00	73,59	11.963.658,00	26,41
6	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	71.262.000,00	71.262.000,00	100	70.715.717,00	99,23	546.283,00	0,77

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	4.205.920.500,00	4.001.160.500,00	100,00	3.670.077.370,00	91,73	331.083.130,00	9,02
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	592.564.000,00	576.344.000,00	100	532.369.310,00	92,37	43.974.690,00	7,63
2	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	669.109.000,00	669.109.000,00	100	585.721.580,00	87,54	83.387.420,00	12,46
3	Inkubator Wirausaha Baru	88.540.000,00	-	100	-	0,00	-	0,00
4	Pemberdayaan Dekranasda	739.785.000,00	739.785.000,00	100	711.829.081,00	96,22	27.955.919,00	3,78
5	Rumah Pengembangan Produk	190.124.000,00	190.124.000,00	100	188.563.800,00	99,18	1.560.200,00	0,82
6	Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	143.165.000,00	143.165.000,00	100	136.521.100,00	95,36	6.643.900,00	4,64
7	Seminar Halal Internasional	156.595.000,00	156.595.000,00	100	115.072.454,00	73,48	41.522.546,00	26,52
8	Lomba Industri Kreatif	81.633.500,00	81.633.500,00	100	54.743.200,00	67,06	26.890.300,00	32,94
9	Promosi/Gelar Produk Industri	1.489.264.000,00	1.389.264.000,00	100	1.292.815.845,00	93,06	96.448.155,00	6,94
10	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	55.141.000,00	55.141.000,00	100	52.441.000,00	95,10	2.700.000,00	4,90
E	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrollogian	1.186.872.000,00	1.040.424.000,00	80,00	1.012.690.088,00	97,33	27.733.912,00	2,74
1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	278.193.000,00	258.193.000,00	100	249.095.740,00	96,48	9.097.260,00	3,52
2	Peringatan Hari Konsumen Nasional	647.572.000,00	640.072.000,00	100	621.867.658,00	97,16	18.204.342,00	2,84
3	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	118.948.000,00	-	100	-	0,00	-	0,00
5	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	84.588.000,00	84.588.000,00	100	84.333.690,00	99,70	254.310,00	0,30
8	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	57.571.000,00	57.571.000,00	0	57.393.000,00	99,69	178.000,00	0,00
F	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	861.512.000,00	811.512.000,00	96,82	692.157.568,00	85,29	119.354.432,00	17,24
1	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	643.259.000,00	593.259.000,00	100	490.692.038,00	82,71	102.566.962,00	17,29
2	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	74.580.000,00	74.580.000,00	89,09	66.654.410,00	89,37	7.925.590,00	10,63
3	Monitoring Mutu Pengujian	94.803.000,00	94.803.000,00	98,2	87.672.720,00	92,48	7.130.280,00	7,52
4	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	48.870.000,00	48.870.000,00	100	47.138.400,00	96,46	1.731.600,00	3,54

LAMPIRAN



REALISASI KEUANGAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	19.460.679.246,00	19.299.832.479,00	100,00	15.887.337.930,00	82,32	3.412.494.549,00	17,68
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.946.749.216,00	12.471.042.449,00	100,00	11.174.525.994,00	94,04	1.296.516.455,00	10,58
a	Gaji, Tunjangan dan Iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan	5.473.337.216	5.434.642.449	100,00	4.780.539.394	95,93	654.103.055	12,04
b	Tambahan Penghasilan PNS	6.473.412.000	7.036.400.000	100,00	6.393.986.600	92,14	642.413.400	9,13
II	BELANJA LANGSUNG	7.513.930.030,00	6.828.790.030,00	100,00	4.712.811.936,00	69,01	2.115.978.094,00	30,99
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.720.872.030,00	2.573.742.030,00	100,00	811.590.825,00	31,53	1.762.151.205,00	68,47
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.500.074.030	1.684.032.030	100,00	-	-	1.684.032.030,00	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	592.460.000	321.372.000	100,00	310.828.025	96,72	10.543.975,00	3,28
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	123.540.000	123.540.000	100,00	102.029.600	82,59	21.510.400,00	17,41
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	440.813.000	380.813.000	100,00	347.935.150	91,37	32.877.850,00	8,63
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	19.462.000	19.462.000	100,00	13.625.000	70,01	5.837.000,00	29,99
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.523.000	44.523.000	100,00	37.173.050	83,49	7.349.950,00	16,51
B	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah dan Aparatur	264.170.000	153.860.000	100,00	140.542.230	91,34	13.317.770	8,66
1	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	203.920.000	153.860.000	100,00	140.542.230	91,34	13.317.770,00	8,66
2	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.250.000	-	0,00	-	-	-	0,00
C	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	4.135.488.000,00	3.907.408.000,00	100,00	3.607.349.771,00	92,32	300.058.229,00	7,68
1	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	380.774.000	315.304.000	100,00	284.954.000	90,37	30.350.000,00	9,63
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.779.720.000	2.579.720.000	100,00	2.357.875.050	91,40	221.844.950,00	8,60
3	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	153.719.000	172.919.000	100,00	161.953.178	93,66	10.965.822,00	6,34
4	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	441.624.000	506.624.000	100,00	503.761.184	99,43	2.862.816,00	0,57
5	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	203.076.000	161.226.000	100,00	140.510.000	87,15	20.716.000,00	12,85
6	Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	81.200.000	26.240.000	100,00	25.456.459	97,01	783.541,00	2,99
7	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	95.375.000	145.375.000	100,00	132.839.900	91,38	12.535.100,00	8,62

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	393.400.000,00	193.780.000,00	100,00	153.329.110,00	79,13	40.450.890,00	20,87
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	246.780.000	193.780.000	100,00	153.329.110	79,13	40.450.890,00	20,87
2	Konsultasi Audit	146.620.000	-	0,00	-	-	-	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	34.403.956.963,00	33.913.899.288,00	92,45	30.976.749.935,00	91,44	2.937.149.353,00	8,56
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.173.463.253,00	12.979.556.778,00	100,00	11.927.359.764,00	91,89	2.942.650.512,00	22,67
a	Belanja Pegawai	12.173.463.253,00	12.979.556.778,00	100,00	11.927.359.764,00	91,89	2.942.650.512,00	22,67
b								
II	BELANJA LANGSUNG	22.230.493.710,00	20.934.342.510,00	84,91	19.049.390.171,00	91,00	1.884.952.339,00	9,00
	A. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	9.966.208.880,00	9.676.024.880,00	100,00	9.091.039.578,00	93,95	584.985.302,00	6,05
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.895.136.000,00	4.958.673.394,00	100,00	4.715.403.053,00	95,09	243.270.341,00	4,91
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.528.789.580,00	3.463.605.580,00	100,00	3.234.163.050,00	93,38	229.442.530,00	6,62
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.819.660,00	115.419.660,00	100,00	108.811.701,00	94,27	6.607.959,00	5,73
	4. Penguatan Kelembagaan / Organisasi	157.855.700,00	157.855.700,00	100,00	142.046.694,00	89,99	15.809.006,00	10,01
	5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	876.507.920,00	594.370.526,00	100,00	556.933.130,00	100,00	37.437.396,00	6,30
	6. Peningkatan Disiplin Aparatur	298.251.000,00	298.251.000,00	100,00	259.869.250,00	87,13	38.381.750,00	12,87
	7. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	87.849.020,00	87.849.020,00	100,00	73.812.700,00	84,02	14.036.320,00	15,98
	B. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi dan Kepangkatan	2.105.411.100,00	2.105.411.100,00	96,67	1.673.987.159,00	79,51	431.423.941,00	20,49
	1. Perencanaan dan Pengadaan ASN	684.440.500,00	684.440.500,00	100,00	571.804.759,00	83,54	112.635.741,00	16,46
	2. Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	146.829.600,00	146.829.600,00	100,00	140.216.382,00	95,50	6.613.218,00	4,50
	3. Promosi dan Mutasi ASN	1.274.141.000,00	1.274.141.000,00	90,00	961.966.018,00	75,50	312.174.982,00	24,50
	C. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesenjangan ASN	1.781.824.050,00	1.949.545.050,00	97,20	1.715.410.070,00	87,99	234.134.980,00	12,01
	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	28.596.680,00	317.146.680,00	99,33	254.575.610,00	80,27	62.571.070,00	19,73
	2. Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	750.095.920,00	519.266.920,00	100,00	391.656.964,00	75,42	127.609.956,00	24,58
	3. Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	402.876.650,00	452.876.650,00	100,00	426.956.506,00	94,28	25.920.144,00	5,72
	4. Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	600.254.800,00	660.254.800,00	89,45	642.220.990,00	97,27	18.033.810,00	2,73

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	6.970.478.360,00	6.346.790.160,00	100,00	6.048.950.152,00	95,31	297.840.008,00	4,69
	Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	1.790.339.000,00	1.643.939.800	100,00	1.585.118.850,00	96,42	58.820.950,00	3,58
	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	2.919.777.660,00	2.442.488.660,00	100,00	2.318.086.479,00	94,91	124.402.181,00	5,09
	Peningkatan Pendidikan Formal	2.068.929.200,00	2.068.929.200	100,00	1.958.782.677,00	94,68	110.146.523,00	5,32
	Peningkatan Mutu Kediklatan	191.432.500,00	191.432.500,00	100,00	186.962.146,00	97,66	4.470.354,00	2,34
	E. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.406.571.320,00	856.571.320,00	30,68	520.003.212,00	60,71	336.568.108,00	39,29
	1. Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	1.406.571.320,00	856.571.320,00	30,68	520.003.212,00	60,71	336.568.108,00	39,29

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		75.098.894.962,00	76.070.546.237,00	100,00	70.111.412.743,62	90,94	4.788.394.828,38	6,29
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.010.796.303,00	49.807.274.439,00	100,00	47.271.625.664,62	94,91	2.535.648.774,38	5,09
	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.090.122.375,00	16.391.401.405,00	100,00	15.040.833.705,00	91,76	1.350.567.700,00	8,24
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.544.960.000,00	15.153.232.000,00	100,00	14.137.180.900,00	93,29	1.016.051.100,00	6,71
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	18.575.713.928,00	17.863.850.089,00	100,00	17.854.547.288,16	0,00	9.302.800,84	0,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	800.000.000,00	398.790.945,00	100,00	239.063.771,46	59,95	159.727.173,54	40,05
II	BELANJA LANGSUNG	25.088.098.659,00	26.263.271.798,00	100,00	22.839.787.079,00	86,96	2.252.746.054,00	8,58
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	12.841.233.203,00	14.301.830.942,00	100,00	13.160.433.765,00	92,02	1.141.397.177,00	7,98
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.712.650.000,00	8.912.650.000,00	100,00	8.393.500.396,00	94,18	519.149.604,00	5,82
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.388.610.219,00	4.649.207.958,00	100,00	4.097.151.780,00	88,13	552.056.178,00	11,87
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	147.720.000,00	147.720.000,00	100,00	119.352.489,00	80,80	28.367.511,00	19,20
4	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	29.395.242,00	29.395.242,00	100,00	28.036.400,00	95,38	1.358.842,00	4,62
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.832.742,00	29.832.742,00	100,00	24.359.000,00	81,65	5.473.742,00	18,35
6	Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	58.697.000,00	58.697.000,00	100,00	53.754.000,00	91,58	4.943.000,00	8,42
7	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	474.328.000,00	474.328.000,00	100,00	444.279.700,00	93,67	30.048.300,00	6,33
B	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	5.513.854.514,00	5.155.672.514,00	100%	4.186.678.164,00	81,21	968.994.350,00	18,79
1	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	568.799.000,00	568.799.000,00	100,00	269.054.969,00	47,30	299.744.031,00	52,70
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	563.585.000,00	563.585.000,00	100,00	399.746.618,00	70,93	163.838.382,00	29,07
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	376.106.000,00	376.106.000,00	100,00	259.549.800,00	69,01	116.556.200,00	30,99
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	85.965.000,00	85.965.000,00	100,00	64.573.336,00	75,12	21.391.664,00	24,88
5	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	45.944.000,00	-	0,00	-	-	-	-
6	Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	59.803.500,00	59.803.500,00	100,00	39.281.210,00	65,68	20.522.290,00	34,32
7	Sosialisasi Pajak Daerah	312.238.000,00	-	0,00	-	-	-	-
8	Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	567.936.000,00	567.936.000,00	100,00	544.921.815,00	95,95	23.014.185,00	4,05
9	Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	532.959.750,00	532.959.750,00	100,00	497.060.943,00	93,26	35.898.807,00	6,74

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	610.686.000,00	610.686.000,00	100,00	579.397.066,00	94,88	31.288.934,00	5,12
11	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	390.753.264,00	390.753.264,00	100,00	369.603.221,00	94,59	21.150.043,00	5,41
12	Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	530.916.500,00	530.916.500,00	100,00	421.809.555,00	79,45	109.106.945,00	20,55
13	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	410.812.500,00	410.812.500,00	100,00	346.181.104,00	84,27	64.631.396,00	15,73
14	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	457.350.000,00	457.350.000,00	100,00	395.498.527,00	86,48	61.851.473,00	13,52
C	Program Peningkatan Tata Kelolah Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	587.572.600,00	539.812.100,00	100,00	476.881.634,00	88,34	62.930.466,00	11,66
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	182.167.000,00	182.167.000,00	100,00	170.603.505,00	93,65	11.563.495,00	6,35
2	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	86.400.100,00	86.400.100,00	100,00	70.908.729,00	82,07	15.491.371,00	17,93
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	47.760.500,00	-	0,00	-	-	-	-
4	Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	48.943.000,00	48.943.000,00	100,00	39.102.250,00	79,89	9.840.750,00	20,11
5	Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	222.302.000,00	222.302.000,00	100,00	196.267.150,00	88,29	26.034.850,00	11,71
D	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	3.288.755.400,00	3.411.730.800,00	100,00	2.862.138.573,00	83,89	549.592.227,00	16,11
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	1.315.227.000,00	1.626.982.000,00	100,00	1.521.500.454,00	93,52	105.481.546,00	6,48
2	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	215.480.000,00	165.480.000,00	100,00	152.432.652,00	92,12	13.047.348,00	7,88
3	Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (PPRG)	153.587.500,00	153.587.500,00	100,00	138.612.785,00	90,25	14.974.715,00	9,75
4	Penyusunan Analisa Standar Belanja	180.769.000,00	180.769.000,00	100,00	165.218.600,00	91,40	15.550.400,00	8,60
5	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	445.596.400,00	445.596.400,00	100,00	320.610.800,00	71,95	124.985.600,00	28,05
6	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	181.715.000,00	181.715.000,00	100,00	125.182.690,00	68,89	56.532.310,00	31,11
7	Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	190.440.500,00	143.615.500,00	100,00	134.199.795,00	93,44	9.415.705,00	6,56
8	Penyusunan KUA dan PPAS	605.940.000,00	513.985.400,00	100,00	304.380.797,00	59,22	209.604.603,00	40,78
E	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	1.107.655.142,00	1.105.197.642,00	100,00	865.196.565,00	78,28	240.001.077,00	21,72
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	286.076.000,00	286.076.000,00	100,00	264.434.417,00	92,44	21.641.583,00	7,56
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA keuangan	499.075.000,00	499.075.000,00	100,00	429.965.048,00	86,15	69.109.952,00	13,85
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	98.920.000,00	98.920.000,00	100,00	41.517.100,00	41,97	57.402.900,00	58,03
4	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	108.500.000,00	108.500.000,00	100,00	77.436.000,00	71,37	31.064.000,00	28,63
5	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	115.084.142,00	112.626.642,00	100,00	51.844.000,00	46,03	60.782.642,00	53,97
F	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	1.441.326.800,00	1.441.326.800,00	100,00	1.062.476.268,00	73,72	378.850.532,00	26,28
1	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	162.898.000,00	162.898.000,00	100,00	131.734.200,00	80,87	31.163.800,00	19,13
2	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.998.000,00	48.998.000,00	100,00	26.883.000,00	54,87	22.115.000,00	45,13
3	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	136.960.000,00	136.960.000,00	100,00	126.058.875,00	92,04	10.901.125,00	7,96
4	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139.118.800,00	139.118.800,00	100,00	131.839.200,00	94,77	7.279.600,00	5,23
5	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	114.200.000,00	114.200.000,00	100,00	113.108.166,00	99,04	1.091.834,00	0,96
6	Penyusunan laporan barang milik daerah	119.180.000,00	119.180.000,00	100,00	92.979.300,00	78,02	26.200.700,00	21,98
7	Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	138.380.000,00	138.380.000,00	100,00	57.255.500,00	41,38	81.124.500,00	58,62

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	49.010.000,00	49.010.000,00	100,00	25.200.000,00	51,42	23.810.000,00	48,58
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	244.592.000,00	244.592.000,00	100,00	161.275.600,00	65,94	83.316.400,00	34,06
10	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	156.150.000,00	156.150.000,00	100,00	130.197.027,00	83,38	25.952.973,00	16,62
11	Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	131.840.000,00	131.840.000,00	100,00	65.945.400,00	50,02	65.894.600,00	49,98
G.	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	307.701.000,00	307.701.000,00	100,00	225.982.110,00	73,44	81.718.890,00	26,56
1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	129.074.000,00	129.074.000,00	100,00	94.911.900,00	73,53	34.162.100,00	26,47
2	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	94.720.000,00	94.720.000,00	100,00	68.902.370,00	72,74	25.817.630,00	27,26
3	Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83.907.000,00	83.907.000,00	100,00	62.167.840,00	74,09	21.739.160,00	74,09
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	507.560.000,00	451.800.000,00	100,00	387.748.335,00	85,82	64.051.665,00	14,18
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	495.110.000,00	440.040.000,00	100,00	428.928.700,00	97,47	11.111.300,00	2,53
4	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansi terkait	89.570.000,00	61.940.000,00	100,00	47.383.400,00	76,50	14.556.600,00	23,50
5	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	88.200.000,00	88.200.000,00	100,00	79.393.540,00	90,02	8.806.460,00	9,98
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	305.570.000,00	288.170.000,00	100,00	260.967.558,00	90,56	27.202.442,00	9,44
7	Rapat Kerja retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	45.770.000,00	19.770.000,00	100,00	18.950.000,00	95,85	820.000,00	4,15

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		19.964.216.440,00	20.489.887.059,00	99,17	17.043.459.079,00	83,18	3.446.427.980,00	16,82
I,	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.164.219.540,00	9.575.263.550,00	100,00	8.224.468.198,00	85,89	1.350.795.352,00	14,11
a	Gaji dan Tunjangan	4.801.115.540,00	4.902.159.550,00	100,00	4.232.752.598,00	86,34	669.406.952,00	13,66
b	Tambahan Penghasilan PNS	4.363.104.000,00	4.673.104.000,00	100,00	3.991.715.600,00	85,42	681.388.400,00	14,58
II	BELANJA LANGSUNG	10.799.996.900,00	10.914.623.509,00	98,33	8.818.990.881,00	80,80	2.095.632.628,00	19,20
A.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	5.416.042.650,00	5.929.796.259,00	100,00	5.210.176.219,00	87,86	719.620.040,00	12,14
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.249.821.000,00	2.800.021.000,00	100,00	2.530.980.692,00	90,39	269.040.308,00	9,61
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.034.121.650,00	1.842.121.650,00	100,00	1.567.256.500,00	85,08	274.865.150,00	14,92
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	115.480.000,00	115.480.000,00	100,00	115.167.800,00	99,73	312.200,00	0,27
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	234.336.000,00	314.336.000,00	100,00	240.521.883,00	76,52	73.814.117,00	23,48
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	99.740.000,00	119.740.000,00	100,00	99.698.942,00	83,26	20.041.058,00	16,74
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.250.000,00	99.250.000,00	100,00	68.666.992,00	69,19	30.583.008,00	30,81
7	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	603.294.000,00	638.847.609,00	100,00	587.883.410,00	92,02	50.964.199,00	7,98
B	Program Perencanaan,Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	2.692.375.500,00	2.613.011.500,00	100,00	1.778.538.953,00	68,06	834.472.547,00	31,94
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	812.649.000,00	844.649.000,00	100,00	821.562.024,00	97,27	23.086.976,00	2,73
10	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	85.993.000,00	160.993.000,00	100,00	132.750.060,00	82,46	28.242.940,00	17,54
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	331.361.500,00	346.361.500,00	100,00	216.287.265,00	62,45	130.074.235,00	37,55
12	Pengembangan sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	107.310.000,00	107.310.000,00	100,00	68.382.344,00	63,72	38.927.656,00	36,28
13	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	991.469.000,00	324.195.000,00	100,00	236.607.163,00	72,98	87.587.837,00	27,02
14	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	363.593.000,00	829.503.000,00	100,00	302.950.097,00	36,52	526.552.903,00	63,48
C	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	393.056.000,00	413.056.000,00	100,00	341.052.387,00		72.003.613,00	17,43
1	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	259.342.000,00	274.342.000,00	100,00	224.159.954,00	81,71	50.182.046,00	18,29
2	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	133.714.000,00	138.714.000,00	100,00	116.892.433,00	84,27	21.821.567,00	15,73
D	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	647.212.000,00	307.449.000,00	100,00	266.559.095,00	86,70	40.889.905,00	13,30
1	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA I	102.570.000,00	117.570.000,00	100,00	96.162.207,00	81,79	21.407.793,00	18,21
2	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan SDA II	184.879.000,00	189.879.000,00	100,00	170.396.888,00	89,74	19.482.112,00	10,26
3	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	359.763.000,00	-	100,00	-	0,00	0,00	0,00
E	Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan	457.307.750,00	457.307.750,00	100,00	369.019.018,00	80,69	88.288.732,00	19,31
1	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	178.145.750,00	178.145.750,00	100,00	152.175.335,00	85,42	25.970.415,00	14,58
2	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	111.940.000,00	111.940.000,00	100,00	86.714.167,00	77,46	25.225.833,00	22,54
3	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	167.222.000,00	167.222.000,00	100,00	130.129.516,00	77,82	37.092.484,00	22,18
F	Program Penelitian dan Pengembangan	1.194.003.000,00	1.194.003.000,00	90,00	853.645.209,00	71,49	340.357.791,00	28,51
1	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	266.498.000,00	266.498.000,00	100,00	197.399.900,00	74,07	69.098.100,00	25,93

2	Penguatan Jaringan Kelitbangan	201.164.000,00	201.164.000,00	100,00	167.147.800,00	83,09	34.016.200,00	16,91
3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	182.844.000,00	182.844.000,00	100,00	167.581.438,00	91,65	15.262.562,00	8,35
4	Kajian Science Technology Park	223.932.000,00	223.932.000,00	100,00	195.083.677,00	87,12	28.848.323,00	12,88
5	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	319.565.000	319.565.000	50,00	126.432.394	39,56	193.132.606,00	60,44

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		105.457.979.640,20	104.260.179.765,65	96,61	85.620.836.956,00	85,02	18.639.342.809,65	17,88
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.645.003.730,20	8.955.003.355,65	100,00	7.697.459.428,00	85,96	1.257.543.927,65	14,04
	a. Gaji dan Tunjangan	4.878.011.730,20	5.014.275.355,65	100,00	4.210.256.415,00	83,97	804.018.940,65	16,03
	b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.181.200.000,00	3.319.800.000,00	100,00	3.130.207.013,00	94,29	189.592.987,00	5,71
	c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	585.792.000,00	620.928.000,00	100,00	356.996.000,00	57,49	263.932.000,00	42,51
II	BELANJA LANGSUNG	96.812.975.910,00	95.305.176.410,00	93,21	77.923.377.528,00	85,02	32.855.712.270,00	34,47
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	10.602.793.000,00	10.176.790.497,00	96,43	9.388.784.739,00	92,26	788.005.758,00	7,74
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.435.673.000,00	9.042.740.497,00	97,80	8.314.212.770,00	91,94	728.527.727,00	8,06
	2. Peningkatan Disiplin Aparatur	771.490.000,00	738.420.000,00	100,00	713.370.000,00	96,61	25.050.000,00	3,39
	3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	355.780.000,00	355.780.000,00	100,00	330.009.169,00	92,76	25.770.831,00	7,24
	4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	21.450.000,00	21.450.000,00	88,95	14.842.800,00	69,20	6.607.200,00	30,80
	5. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.400.000,00	18.400.000,00	95,41	16.350.000,00	88,86	2.050.000,00	11,14
B	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	79.251.111.410,00	78.085.172.513,00	86,71	62.114.812.949,00	71,64	31.444.272.952,00	
	6. Rapat-rapat paripurna	323.641.000,00	351.870.000,00	97,09	313.192.704,00	89,01	15.121.338.788,00	4297,42
	7. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel	230.252.000,00	230.252.000,00	93,49	190.316.904,00	82,66	39.935.096,00	17,34
	8. Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	19.007.280.000,00	17.232.806.250,00	97,00	11.414.823.530,00	66,24	5.817.982.720,00	33,76
	9. Reses	6.748.819.750,00	4.889.259.500,00	99,38	3.483.119.800,00	71,24	1.406.139.700,00	28,76
	10. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.424.304.000,00	824.304.000,00	100,00	617.164.101,00	74,87	207.139.899,00	25,13
	11. Rapat koordinasi asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia (ASPSI)	380.258.000,00	380.258.000,00	71,07	186.633.700,00	49,08	193.624.300,00	50,92
	12. Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	728.970.000,00	728.970.000,00	98,64	576.777.100,00	79,12	152.192.900,00	20,88
	13. Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	148.448.000,00	148.448.000,00	0,45	800.000,00	0,54	147.648.000,00	99,46
	14. Kunjungan Kerja Komisi	45.531.854.000,00	48.822.470.000,00	86,06	41.901.132.810,00	85,82	6.921.337.190,00	14,18
	15. Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	771.420.600,00	1.072.320.000,00	72,71	836.981.017,00	78,05	235.338.983,00	21,95
	16. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	1.461.184.000,00	1.461.184.000,00	98,11	1.375.754.634,00	94,15	85.429.366,00	5,85
	17. Kunjungan Kerja badan legislasi/pembentukan perda	1.889.624.560,00	1.351.924.560,00	100,00	759.719.416,00	56,20	983.457.040,00	72,74
	18. Kunjungan Kerja Kehormatan	552.618.000,00	552.618.000,00	100,00	419.909.030,00	75,99	132.708.970,00	24,01

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19. Fit and proper Test tentang pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	52.437.500,00	38.488.203,00	100,00	38.488.203,00	100,00	-	0,00
C	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	6.959.071.500,00	7.043.213.400,00	96,49	6.419.779.840,00	91,15	623.433.560,00	8,85
	20. Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	2.202.550.000,00	2.202.550.000,00	97,43	1.975.235.490,00	89,68	227.314.510,00	10,32
	21. Forum Komunikasi Sekwan se-Indonesia	493.997.500,00	459.777.400,00	100,00	459.777.400,00	100,00	-	0,00
	22. Peningkatan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat	4.262.524.000,00	4.380.886.000,00	92,03	3.984.766.950,00	90,96	396.119.050,00	9,04

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	24.315.960.500,00	12.958.727.860,00	82,23	10.218.325.825,00	81,17	2.740.402.035,00	1,06
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.363.699.700,00	3.581.982.920,00	100,00	3.058.842.457,00	85,40	523.140.463,00	14,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.836.627.700,00	1.893.806.920,00	100,00	1.624.986.457,00	85,81	268.820.463,00	14,19
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.527.072.000,00	1.688.176.000,00	100,00	1.433.856.000,00	84,94	254.320.000,00	15,06
II	BELANJA LANGSUNG	20.952.260.800,00	9.376.744.940,00	82,23	7.159.483.368,00	76,35	2.217.261.572,00	23,65
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	11.513.512.800,00	5.889.493.800,00	85,44	4.780.737.236,00	81,17	1.108.756.564,00	18,83
1	Keg. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.035.854.800,00	4.936.774.800,00	85,37	4.034.968.027,00	81,73	901.806.773,00	18,27
2	Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.909.000,00	550.909.000,00	88,92	439.219.000,00	79,73	111.690.000,00	20,27
3	Keg. Peningkatan Disiplin Aparatur	72.830.000,00	72.830.000,00	99,04	62.123.930,00	85,30	10.706.070,00	14,70
4	Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	267.710.000,00	267.710.000,00	77,97	196.798.279,00	73,51	70.911.721,00	26,49
5	Keg. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	23.045.000,00	23.045.000,00	76,40	17.360.500,00	75,33	5.684.500,00	24,67
6	Keg. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.225.000,00	38.225.000,00	76,98	30.267.500,00	79,18	7.957.500,00	20,82
7	Keg. Pembelian Lahan Untuk Asrama Mahasiswa Bangka Belitung	6.524.939.000,00	-	-	-	-	-	-
B	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	9.438.748.000,00	3.487.251.140,00	76,80	2.378.746.132,00	68,21	1.108.505.008,00	31,79
1	Keg. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah	821.376.000,00	821.376.000,00	72,69	599.913.700,00	73,04	221.462.300,00	26,96
2	Keg. Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan	142.452.500,00	121.320.140,00	96,35	121.320.140,00	100,00	-	-
3	Keg. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	206.524.000,00	206.524.000,00	51,40	134.866.183,00	65,30	71.657.817,00	34,70
4	Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	972.967.000,00	1.162.277.000,00	72,73	601.980.200,00	51,79	560.296.800,00	48,21
5	Keg. Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	42.935.000,00	42.935.000,00	94,96	40.810.000,00	95,05	2.125.000,00	4,95
6	Keg. Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	2.995.100.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Keg. Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.494.594.000,00	209.141.000,00	97,10	201.050.000,00	96,13	8.091.000,00	3,87
8	Keg. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	482.598.000,00	656.841.000,00	76,85	414.385.909,00	63,09	242.455.091,00	36,91
9	Keg. Expo dan Forum Serumpun Sebalai	280.201.500,00	266.837.000,00	98,97	264.420.000,00	99,09	2.417.000,00	0,91

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMERINTAHAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		8.383.281.984,00	3.627.993.805,00	88,89	3.162.617.944,00	87,17	465.375.861,00	12,83
II	BELANJA LANGSUNG	8.383.281.984,00	3.627.993.805,00	88,89	3.162.617.944,00	87,17	465.375.861,00	12,83
A	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	5.300.244.450,00	625.821.975,00	66,67	279.036.511,00	44,59	346.785.464,00	55,41
1	Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	108.400.000,00	108.400.000,00	100,00	107.444.000	99,12	956.000,00	0,88
2	Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.213.700,00	39.213.700,00	100,00	38.275.950	97,61	937.750,00	2,39
3	Inventarisasi Pendataan. Penamaan. dan Pembakuan Unsur Rupabumi (Unsur Buatan)	100.341.100,00	100.341.100,00	100,00	96.380.086	96,05	3.961.014,00	3,95
4	Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	37.587.175,00	37.587.175,00	100,00	36.596.475	97,36	990.700,00	2,64
5	Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.762.475,00	340.000,00	-	340.000	100,00	-	0,00
6	Pengadaan Lahan	4.919.940.000,00	339.940.000,00	-	-	-	339.940.000,00	100,00
B	Program Pengembangan Otonomi Daerah	1.448.352.830,00	1.448.352.830,00	100,00	1.413.000.098,00	291,89	35.352.732,00	2,44
1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	165.653.745,00	145.384.945,00	100,00	140.541.200	96,67	4.843.745,00	3,33
2	Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah	351.810.000,00	372.078.800,00	100,00	366.541.760	98,51	5.537.040,00	1,49
3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	276.971.408,00	276.971.408,00	100,00	270.029.102	97,49	6.942.306,00	2,51
4	Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	143.257.000,00	143.257.000,00	100,00	139.929.889	97,68	3.327.111,00	2,32
5	Peresmian Pemberhentian dan Peresemian Peningkatan KDH dan WKDH	116.415.704,00	116.415.704,00	100,00	108.585.850	93,27	7.829.854,00	6,73
6	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov.Kep. Bangka Belitung	74.753.565,00	74.753.565,00	100,00	71.195.000	95,24	3.558.565,00	4,76
7	Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	116.015.704,00	116.015.704,00	100,00	115.537.239	99,59	478.465,00	0,41
8	Koordinasi Penerapan Pelaksanaan NSPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	101.165.704,00	101.165.704,00	100,00	99.056.702	97,92	2.109.002,00	2,08
9	Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102.310.000,00	102.310.000,00	100,00	101.583.356	99,29	726.644,00	0,71
C	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	1.634.684.704,00	1.553.819.000,00	100,00	1.470.581.335,00	587,26	83.237.665,00	5,36
1	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	216.349.000,00	108.249.000,00	100,00	108.146.940	99,91	102.060,00	0,09
2	Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	101.320.000,00	116.320.000,00	100,00	115.197.110	99,03	1.122.890,00	0,97
3	Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	137.765.704,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000	100,00	-	0,00
4	Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	197.400.000,00	197.400.000,00	100,00	196.445.495	99,52	954.505,00	0,48

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kegiatan Inventarisasi Potensi Kerjasama	93.150.000,00	93.150.000,00	100,00	90.986.722	97,68	2.163.278,00	2,32
6	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat	888.700.000,00	888.700.000,00	100,00	809.805.068	91,12	78.894.932,00	8,88

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUKUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		3.598.227.726,00	3.370.927.726,00	100,00	3.027.916.159,00	89,82	343.011.567,00	10,18
II	BELANJA LANGSUNG	3.598.227.726,00	3.370.927.726,00	100,00	3.027.916.159,00	89,82	343.011.567,00	10,18
A	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	1.892.029.600,00	1.809.529.600,00	100,00	1.711.488.044,00	94,58	98.041.556,00	5,42
1	Penyusunan Produk Hukum Daerah	564.660.000	564.660.000	100	526.255.384	93,20	38.404.616,00	6,80
2	penyusunan Naskah Hukum Lainnya	65.940.000	65.940.000	100	65.753.457	99,72	186.543,00	0,28
3	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	305.686.000	265.686.000	100	223.470.429	84,11	42.215.571,00	15,89
4	Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah	955.743.600	913.243.600	100	896.008.774	98,11	17.234.826,00	1,89
B	Program Pengembangan Otonomi Daerah	955.806.626,00	936.663.626,00	100,00	728.136.127,00	77,74	208.527.499,00	22,26
1	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	170.370.000	155.570.000	100	126.469.039	81,29	29.100.961,00	18,71
2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	191.528.000	207.185.000	100	125.137.088	60,40	82.047.912,00	39,60
3	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93.865.626	93.865.626	100	85.266.600	90,84	8.599.026,00	9,16
4	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.444.000	94.444.000	100	86.619.800	91,72	7.824.200,00	8,28
5	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	156.966.000	146.966.000	100	106.676.700	72,59	40.289.300,00	27,41
6	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	248.633.000	238.633.000	100	197.966.900	82,96	40.666.100,00	17,04
C	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	750.391.500,00	624.734.500,00	100,00	588.291.988,00	94,17	36.442.512,00	5,83
1	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	482.138.000	382.138.000	100	364.166.560	95,30	17.971.440,00	4,70
2	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum	61.658.000	36.001.000	100	35.978.890	99,94	22.110,00	0,06
3	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 - 2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017	69.125.500	69.125.500	100	67.179.113	97,18	1.946.387,00	2,82
4	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.470.000	137.470.000	100	120.967.425	88,00	16.502.575,00	12,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO UMUM

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	92.602.637.933,00	96.852.080.449,00	100,00	89.580.343.850,00	91,42	7.271.736.599,00	7,51
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.074.931.033,00	47.785.574.149,00	100,00	44.722.708.387,00	93,59	3.062.865.762,00	6,41
a	Belanja Tidak Langsung KDH/WKDH	1.250.778.653,00	1.261.933.491,00	100,00	1.245.672.640,00	98,71	16.260.851,00	1,29
b	Belanja Pegawai / PNS Setda (gaji, tunjangan, TPP)	44.824.152.380,00	46.523.640.658,00	100,00	43.477.035.747,00	93,45	3.046.604.911,00	6,55
II	BELANJA LANGSUNG	46.527.706.900,00	49.066.506.300,00	100,00	44.857.635.463,00	91,42	4.208.870.837,00	8,58
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	46.527.706.900,00	49.066.506.300,00	100,00	44.857.635.463,00	91,42	4.208.870.837,00	8,58
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	24.334.790.000,00	28.409.020.191,00	100,00	27.231.925.246,00	95,86	1.177.094.945,00	4,14
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.611.420.900,00	16.923.954.109,00	100,00	14.122.244.847,00	83,45	2.801.709.262,00	16,55
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	980.008.000,00	1.052.044.000,00	100,00	998.064.000,00	78,09	53.980.000,00	21,91
4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	2.601.488.000,00	2.681.488.000,00	100,00	2.505.401.370,00	93,43	176.086.630,00	6,57

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	3.318.327.439,00	3.183.242.699,00	81,01	2.997.918.158,00	94,18	185.324.541,00	5,82
II	BELANJA LANGSUNG	3.318.327.439,00	3.183.242.699,00	81,01	2.997.918.158,00	94,18	151.047.925,00	4,75
A	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	2.076.969.864	2.040.607.314	88,67	1.889.559.389	92,60	151.047.925,00	7,40
1	Publikasi Media Massa / Cetak	1.391.757.900	1.412.757.900	99,86	1.409.825.139	99,79	2.932.761,00	0,21
2	Publikasi Media Elektronik/IT	289.532.000	289.532.000	64,46	184.990.000	63,89	104.542.000,00	36,11
3	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	151.012.914	151.012.914	82,52	123.760.750	81,95	27.252.164,00	18,05
4	Penerbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi	225.361.000	176.273.500	96,51	159.952.500	90,74	16.321.000,00	9,26
5	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	19.306.050	11.031.000	100,00	11.031.000	100,00	-	0,00
B	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	160.798.250	65.612.500	74,48	48.870.000	74,48	35.068.232	53,45
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.612.500	65.612.500	74,48	48.870.000	74,48	35.068.232,00	53,45
2	Workshop Bidang Keprotokolan	95.185.750	-	0,00	-	-	-	0,00
C	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	1.080.559.325	1.077.022.885	79,88	1.059.488.769	98,37	17.534.116,00	1,63
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	183.042.200	183.042.200	100,00	171.205.000	93,53	11.837.200,00	6,47
2	Pengumpulan, Penyaringan Informasi dan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah	157.952.650	157.952.650	99,72	156.625.159	99,16	1.327.491,00	0,84
3	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	194.266.550	148.493.960	99,66	144.718.910	97,46	3.775.050,00	2,54
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	529.549.375	578.749.375	100,00	578.155.000	99,90	594.375,00	0,10
5	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	15.748.550	8.784.700	100,00	8.784.700	100,00	-	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO ORGANISASI

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.874.291.732,00	1.540.575.882,00	83,97	1.263.721.633,00	85,77	276.854.249,00	17,97
II	BELANJA LANGSUNG	1.874.291.732,00	1.540.575.882,00	83,97	1.263.721.633,00	85,77	276.854.249,00	17,97
A	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	570.892.445,00	508.614.445,00	77,37	388.834.028,00	85,55	119.780.417,00	23,55
1	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.860.100,00	60.855.600,00	82,91	51.978.830,00	85,41	8.876.770,00	14,59
2	Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	58.084.200,00	58.084.200,00	81,92	49.076.700,00	84,49	9.007.500,00	15,51
3	Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	73.230.000,00	11.582.000,00	64,00	11.582.000,00	100,00	-	0,00
4	Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69.247.500,00	100.122.000,00	80,16	72.772.468,00	72,68	27.349.532,00	27,32
5	Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106.063.145,00	106.063.145,00	82,41	81.816.000,00	100,00	24.247.145,00	22,86
6	Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja	189.407.500,00	171.907.500,00	72,84	121.608.030,00	70,74	50.299.470,00	29,26
B	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	577.661.672,00	450.700.872,00	86,02	375.650.482,00	84,69	75.050.390,00	16,65
1	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	38.995.997,00	38.995.997,00	75,33	29.347.500,00	75,26	9.648.497,00	24,74
2	Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov babel	23.303.375,00	23.303.375,00	97,63	22.764.000,00	97,69	539.375,00	2,31
3	Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dan perjanjian kinerja tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66.776.500,00	66.776.500,00	83,09	62.002.677,00	92,85	4.773.823,00	7,15
4	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	50.663.500,00	50.663.500,00	95,38	47.065.785,00	92,90	3.597.715,00	7,10
5	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	42.068.500,00	-	0,00	-	-	-	0,00
6	Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	84.892.300,00	-	0,00	-	-	-	0,00
7	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66.802.000,00	66.802.000,00	69,57	46.092.540,00	69,00	20.709.460,00	31,00
8	Bimbingan teknis E-LHKPN	100.041.000,00	100.041.000,00	84,33	87.578.650,00	87,54	12.462.350,00	12,46
9	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	104.118.500,00	104.118.500,00	96,84	80.799.330,00	77,60	23.319.170,00	22,40
C	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	725.737.615,00	581.260.565,00	88,52	499.237.123,00	87,08	82.023.442,00	14,11
1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.115.500,00	74.115.500,00	91,76	66.988.810,00	90,38	7.126.690,00	9,62
2	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.449.325,00	62.449.325,00	95,97	61.050.090,00	97,76	1.399.235,00	2,24

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.354.750,00	59.354.750,00	85,49	50.659.480,00	85,35	8.695.270,00	14,65
4	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.402.500,00	30.402.500,00	92,79	28.105.100,00	92,44	2.297.400,00	7,56
5	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	91.831.775,00	91.831.775,00	88,15	79.743.279,00	86,84	12.088.496,00	13,16
6	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	144.477.050,00	-	0,00	-	-	-	0,00
7	Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.035.365,00	88.035.365,00	96,88	77.883.764,00	88,47	10.151.601,00	11,53
8	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104.047.825,00	104.047.825,00	76,16	77.026.700,00	74,03	27.021.125,00	25,97
9	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	71.023.525,00	71.023.525,00	80,93	57.779.900,00	81,35	13.243.625,00	18,65

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO PEMBANGUNAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.696.582.643,00	1.342.032.643,00	100,00	1.203.285.842,00	89,66	138.746.801,00	10,34
II	BELANJA LANGSUNG	1.696.582.643,00	1.342.032.643,00	100,00	1.203.285.842,00	89,66	138.746.801,00	10,34
A	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	358.008.000,00	328.318.000,00	100,00	303.465.842,00	92,43	24.852.158,00	7,57
1	Koordinasi Kebijakan APBN	47.887.500,00	40.387.500,00	100,00	30.608.784,00	75,79	9.778.716,00	24,21
2	Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	204.780.500,00	182.590.500,00	100,00	173.158.600,00	94,83	9.431.900,00	5,17
3	Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan APBN	105.340.000,00	105.340.000,00	100,00	99.698.458,00	94,64	5.641.542,00	5,36
B	Program Pengembangan Otonomi Daerah	255.994.900,00	187.943.030,00	100,00	160.507.629,00	85,40	27.435.401,00	14,60
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.369.950,00	87.094.950,00	100,00	70.064.930,00	80,45	17.030.020,00	19,55
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	129.624.950,00	100.848.080,00	100,00	90.442.699,00	89,68	10.405.381,00	10,32
C	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	783.231.343,00	629.758.213,00	100,00	604.834.881,00	96,04	24.923.332,00	3,96
1	Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	460.288.493,00	400.288.493,00	100,00	381.482.888,00	95,30	18.805.605,00	4,70
2	Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	86.725.500,00	81.779.500,00	100,00	79.192.073,00	96,84	2.587.427,00	3,16
3	Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi, Kabupaten/Kota	176.917.350,00	88.390.220,00	100,00	87.364.420,00	98,84	1.025.800,00	1,16
4	Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.300.000,00	59.300.000,00	100,00	56.795.500,00	95,78	2.504.500,00	4,22
D	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	299.348.400,00	196.013.400,00	100,00	134.477.490,00	68,61	61.535.910,00	31,39
1	1. Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-Monev APBD	226.796.400,00	149.396.400,00	100,00	94.091.990,00	62,98	55.304.410,00	37,02
2	2. Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	72.552.000,00	46.617.000,00	100,00	40.385.500,00	86,63	6.231.500,00	13,37

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL BELANJA DINAS	9.736.618.500,00	9.646.617.100,00	100,00	8.715.852.769,00	90,35	930.764.331,00	9,65
II	BELANJA LANGSUNG	9.736.618.500,00	9.646.617.100,00	100,00	8.715.852.769,00	90,35	930.764.331,00	9,65
A	Program Peningkatan Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama	8.196.096.400,00	8.250.095.000,00	100,00	7.429.257.519,00	90,05	820.837.481,00	9,95
1	Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan	580.456.500,00	580.456.500,00	98,32	524.025.500,00	90,28	56.431.000,00	8,04
2	Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ Provinsi Kep Bangka Belitung	1.364.060.000,00	1.364.060.000,00	97,07	1.155.004.436,00	84,67	209.055.564,00	12,40
3	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	900.645.000,00	900.645.000,00	99,81	703.356.171,00	78,09	197.288.829,00	21,72
4	Pendampingan Jemaah Haji Provinsi Kep.Bangka Belitung	480.680.500,00	480.680.500,00	99,84	477.761.010,00	99,39	2.919.490,00	0,45
5	Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.204.880.800,00	1.374.880.000,00	96,01	1.311.814.146,00	95,41	63.065.854,00	0,60
6	Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	3.168.736.000,00	3.149.236.000,00	100,00	2.912.188.990,00	92,47	237.047.010,00	7,53
7	Musabaqoh Hafis Qur'an	496.637.600,00	400.137.000,00	91,38	345.107.266,00	86,25	55.029.734,00	5,13
							-	
B	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, dan Pemuda	1.189.854.500,00	1.065.854.500,00	100,00	969.398.600,00	90,95	96.455.900,00	9,05
1	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	224.120.500,00	220.120.500,00	100,00	220.120.500,00	100,00	-	0,00
2	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	965.734.000,00	845.734.000,00	96,00	749.278.100,00	88,60	96.455.900,00	7,40
C	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.667.600,00	330.667.600,00	100,00	317.196.650,00	95,93	13.470.950,00	4,07
1	Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	138.172.600,00	138.172.600,00	100,00	128.611.050,00	93,08	9.561.550,00	6,92
2	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial dan Hibah	212.495.000,00	192.495.000,00	99,36	188.585.600,00	97,97	3.909.400,00	1,39

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO EKONOMI

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		1.712.670.399,00	1.435.155.354,00	100,00	1.032.616.362,00	71,95	402.538.992,00	28,05
II	BELANJA LANGSUNG	1.712.670.399,00	1.435.155.354,00	100,00	1.032.616.362,00	71,95	402.538.992,00	28,05
A	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	451.210.114,00	451.210.114,00	100,00	385.876.240,00	85,52	65.333.874,00	14,48
1	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	136.095.800	136.095.800	100,00	112.151.410	82,41	23.944.390,00	17,59
2	Koordinasi, Monev Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71.679.384	71.679.384	100,00	65.843.612	91,86	5.835.772,00	8,14
3	Monev Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73.095.630	73.095.630	100,00	62.321.600	85,26	10.774.030,00	14,74
4	Monev Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	96.357.800	96.357.800	100,00	80.128.920	83,16	16.228.880,00	16,84
5	Forum Pengembangan Ekonomi	73.981.500	73.981.500	100,00	65.430.698	100,00	8.550.802,00	11,56
B	Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	946.070.362,00	811.270.362,00	100,00	481.432.826,00	140,03	329.837.536,00	40,66
1	Monitoring dan evaluasi penyertaan modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.814.100	43.014.100	100,00	40.645.741	94,49	2.368.359,00	5,51
2	Koordinasi Program Corporate Social Responsibility di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66.794.482	66.794.482	100,00	61.594.482	92,21	5.200.000,00	7,79
3	Forum Koordinasi Pembentukan Bank Umum syariah Bangka Belitung	702.700.840	582.700.840	100,00	267.932.428	45,98	314.768.412,00	54,02
4	Kajian Strategis Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.206.000	59.206.000	100,00	57.730.235	97,51	1.475.765,00	2,49
5	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59.554.940	59.554.940	100,00	53.529.940	89,88	6.025.000,00	10,12
C	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	315.389.923,00	172.674.878,00	100,00	165.307.296,00	191,41	7.367.582,00	4,27
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di 7 Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	91.208.400	91.208.400	100,00	87.750.221	96,21	3.458.179,00	3,79
2	Monitoring dan Evaluasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81.466.478	81.466.478	100,00	77.557.075	95,20	3.909.403,00	4,80
3	Koordinasi dan Pengaturan Tata kelolaTimah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	142.715.045	-	0,00	-	-	-	0,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH - BIRO LAYANAN PENGADAAN

No	Program dan Kegiatan	APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA DINAS		4.675.570.700,00	4.245.431.700,00	100,00	3.945.180.635,00	92,93	300.251.065,00	7,07
II	BELANJA LANGSUNG	4.675.570.700,00	4.245.431.700,00	100,00	3.945.180.635,00	92,93	300.251.065,00	7,07
A	Program Pengembangan Data Informasi Layanan	469.099.700,00	384.319.700,00	100,00	323.373.394,00	84,14	60.946.306,00	15,86
1	Peningkatan Penetapan Data dan Informasi Layanan	188.306.000,00	132.306.000,00	100,00	119.594.454,00	90,39	12.711.546,00	9,61
2	Peningkatan Pelayanan Publik	84.036.500,00	84.036.500,00	100,00	71.708.770,00	85,33	12.327.730,00	14,67
3	Pengelola Data dan Informasi	110.413.000,00	110.413.000,00	100,00	85.209.220,00	77,17	25.203.780,00	22,83
4	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	86.344.200,00	57.564.200,00	100,00	46.860.950,00	81,41	10.703.250,00	18,59
B	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.056.931.500,00	1.904.231.500,00	100,00	1.806.991.211,00	94,89	97.240.289,00	5,11
1	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	64.028.000,00	56.828.000,00	100,00	45.669.800,00	80,36	11.158.200,00	19,64
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	1.792.430.000,00	1.646.930.000,00	100,00	1.602.033.069,00	97,27	44.896.931,00	2,73
3	Peningkatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	127.678.000,00	127.678.000,00	100,00	98.654.959,00	77,27	29.023.041,00	22,73
4	Pencegahan dan Penangan Pengaduan	72.795.500,00	72.795.500,00	100,00	60.633.383,00	83,29	12.162.117,00	16,71
C	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.149.539.500,00	1.956.880.500,00	100,00	1.814.816.030,00	92,74	142.064.470,00	7,26
1	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.193.217.000,00	1.109.319.500,00	100,00	1.058.917.331,00	95,46	50.402.169,00	4,54
2	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan secara elektronik	306.943.000,00	280.843.000,00	100,00	256.749.433,00	91,42	24.093.567,00	8,58
3	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	161.179.000,00	103.517.500,00	100,00	94.816.455,00	91,59	8.701.045,00	8,41
4	Pengelolaan Sistem pengadaan Secara Elektronik	488.200.500,00	463.200.500,00	100,00	404.332.811,00	87,29	58.867.689,00	12,71

LAMPIRAN



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

KOMISI I

Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Melakukan dengan cermat dan teliti pemeliharaan dan penatakelolaan asset-aset yang diusahakan oleh Biro Umum untuk menjaga nilai dan manfaat yang paling maksimal.	Akan mengajukan usulan pengalihan status penggunaan barang milik daerah yang selama ini tercatat di Organisasi Perangkat Daerah lain, namun pelaksanaan pemeliharaannya dilakukan oleh Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Menindaklanjuti setiap temuan BPK terhadap asset yang masih terkendala sehingga berkontribusi pada predikat opini BPK di Tahun 2018 ini yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).	Segara menindaklanjuti setiap temuan tentang pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Biro Umum dengan berkoordinasi dengan Bidang Aset Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Organisasi Perangkat Daerah pembantu pengelola barang.
3.	Segara mengusulkan perubahan struktur organisasi dan pengalihan aset Mess Bougenville Belitung kepada Kantor Badan Penghubung Provinsi Bangka Belitung.	Akan segera dikonsultasikan untuk dilakukan kajian oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap usulan perubahan struktur organisasi Mess Bougenville Belitung kepada kantor Badan Penghubung dimana Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan salah satu tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi fasilitasi pembinaan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung di Jabodetabek dan di luar daerah, sedangkan keberadaan Mess Bougenville berada di dalam daerah, asset Mess Bougenville dapat dilakukan pengalihan apabila struktur organisasi telah beralih ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Selektif dalam memilih dan melaksanakan kegiatan pelatihan SDM aparatur dengan memprioritaskan pelatihan yang lebih bersifat produktif dan terukur, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi hasil pelatihan di OPD-OPD bagi peningkatan kinerja serta pengembangan kualitas SDM aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 2017 telah menjadi bahan evaluasi di tahun 2018 ini. Untuk itu, Program Diklat tahun 2018 kami laksanakan sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat. 2. Usulan Peserta Diklat berdasarkan Kebutuhan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat di tahun 2016. 3. Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah tentang calon peserta Diklat yang akan mengikuti Diklat sesuai tupoksi dari ASN. 4. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi hasil pelatihan di OPD-OPD, selama ini yang dilaksanakan adalah evaluasi pasca diklat manajerial, dan belum dianggarkan evaluasi pasca diklat teknis dan fungsional
2.	Penempatan Pejabat Eselon ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus sesuai dengan keahlian/kompetensi dan tepat sasaran dengan mempedomani hasil penelusuran keahlian melalui metode assesment yang jujur dan terukur.	<p>Perlu diketahui bahwa metode assesment yang dipakai adalah metode Assesment Centers adalah metode yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang akan dipromosikan pada jabatan tertentu dan dapat juga menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menilai pekerjaan yang sedang dijabatnya atau yang akan dijabatnya nanti.</p> <p>Manfaat yang diperoleh dari Assesment Centers tersebut dapat dipergunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir PNS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi disesuaikan dengan mengutamakan pada hasil test assesment sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial untuk jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pengumuman tahapan Pelaksanaan

		<p>Assesment melalui website BKPSDM.</p> <p>3. Pada setiap pelaksanaan rapat Baperjakat, pihak BKPSD terlebih dahulu mempresentasikan hasil assesment beserta pemetaan jabatan sebagai bahan pertimbangan Baperjakat.</p> <p>Hasil siding Baperjakat dilaporkan kepada Gubernur berupa pertimbangan PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas disertai notulen sidang untuk mendapatkan keputusan.</p>
--	--	--

Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	<p>Segera menyelesaikan batas wilayah untuk Pemerintah Kota Pangkalpinang – Kabupaten Bangka – Kabupaten Bangka Tengah agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan administrasi di kemudian hari</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat fasilitasi dengan mengundang para pimpinan daerah yang berbatasan secara tertutup; 2. Menawarkan opsi tim Pembinaan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diputuskan oleh Gubernur; 3. Apabila belum juga tercapai kesepakatan antara para pihak yang berselisih, sesuai dengan kewenangan Gubernur berhak memutuskan penyelesaian perselisihan masalah batas daerah. Putusan Gubernur tersebut selanjutnya akan di usulkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah; 4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah) atau Gubernur tidak mau memutuskan, maka penyelesaian permasalahan sengketa batas daerah akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan bisa juga tanpa harus ada penyerahan dari Pemerintah Provinsi langsung diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri (Batas waktu 60 hari Kelender).

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Proaktif dalam menyusun dan merencanakan pemberdayaan masyarakat dan desa agar hasilnya dapat langsung diterima masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui mata anggaran Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat, kami melakukan pendataan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga muncul kebutuhan konkrit yang ada dilingkup desa. 2. Menyusun perencanaan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan ekonomi. 3. Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi PPM (Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat) untuk mengetahui potensi desa dalam pemetaan pemberdayaan masyarakat dan desa. 4. Dengan adanya kode anggaran Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat kami melakukan pendataan di desa terhadap kader pemberdayaan masyarakat desa dan pelaku kewirausahaan yang dalam hal ini Bumdes. 5. Menyelenggarakan pelatihan untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaku Kewirausahaan (BUMDES) untuk memberi pelatihan kepada masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa.

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Agar perizinan yang dikeluarkan harus benar-benar dikaji dan berdasarkan undang-undang agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun

		<p>2014 tentang Penyelenggaraan PTSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP - Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <p>2. Rencana Aksi Pelayanan Perizinan</p> <p>3. SK Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha</p>
--	--	--

Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan yang matang dalam pengembangan dan pembangunan Gedung Depo Arsip Bangka Belitung agar data serta arsip sejarah dan arsip data lainnya dapat tersimpan dengan rapi	<p>1. Sudah mengusulkan kembali kegiatan Pembangunan Gedung Depo Arsip Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2019 dengan perencanaan yang lebih matang, dan berkonsultasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk merevisi RAB</p> <p>2. Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan pendataan arsip inaktif di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tahun 2019 direncanakan kegiatan pengelolaan arsip inaktif, dan kegiatan penerapan e-arsip.</p>

KOMISI II

Perangkat Daerah : Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Mengingat sifat Pemerintah Provinsi adalah koordinator, maka program dan kegiatan biro perekonomian harus sinkron dan berkoordinasi dengan data perekonomian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota..	<p>Program dan kegiatan yang ada di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini berjalan dengan baik dan telah sejalan dengan Program dan Kegiatan yang ada di Kabupaten/ Kota diantaranya yaitu :</p> <p>1. Kegiatan Forum Koordinasi TPID</p>

		<p>2. Koordinasi Program CSR, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi pemanfaatan dana yang berasal dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal.</p> <p>Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap melakukan koordinasi lebih lanjut ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mensinkronkan program dan kegiatan yang ada.</p>
--	--	--

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Melaksanakan kegiatan Samsat Keliling untuk mendukung peningkatan PAD.	<p>1. Sebelum melakukan operasional Samsat Keliling, untuk jadwal, tempat dan waktu yang dituju sudah disampaikan ke Kecamatan masing-masing untuk disebarkan ke masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan Samsat Keliling sudah dilaksanakan ke Kecamatan-Kecamatan melalui Mobil Samsat Keliling yang ada disetiap UPT/Samsat.</p> <p>3. Kecamatan-kecamatan yang dituju kendaraan operasional Samsat Keliling sudah sesuai dengan Wajib Pajak.</p> <p>4. Untuk Tahun Anggaran 2018 kuantitas pelaksanaan Samsat Keliling lebih sedikit dari tahun sebelumnya dikarenakan anggaran operasional Samsat Keliling tidak memadai untuk melakukan kegiatan sebanyak tahun sebelumnya.</p> <p>5. Selain berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, operasional Samsat Keliling juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti ikut dengan pameran-pameran, expo, pengobatan gratis dan lain-lain, untuk lebih mendekati/memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p>

2.	<p>Mengupayakan strategi dan inovasi serta bekerjasama dengan para pihak seperti Polda dan Dinas Perhubungan guna meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>Strategi dan Inovasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkasikan pelaksanaan Samsat Keliling dengan menginformasikan setiap jadwal pelaksanaan Samsat Keliling kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan setempat. 2. Mengintensifkan pelaksanaan Samsat Corner di Pusat Perbelanjaan Bangka Trade Center (BTC) Pangkalpinang dan Loker Khusus di Samsat Pangkalpinang untuk melayani pembayaran teliti ulang kendaraan bermotor. 3. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait di Lingkungan Samsat (Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Sumsel Babel) untuk penyelesaian berkas pendaftaran ulang dan pengantian STNK dalam waktu seminimal mungkin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembayaran Pajak. 4. Akan melaksanakan Sistem Informasi Pajak Online (SIJALI) yang terintegrasi dengan sistem perbankan untuk melayani pembayaran teliti ulang kendaraan bermotor. 5. Akan melaksanakan “SETEMPO”, yaitu untuk melayani pembayaran teliti ulang kendaraan bermotor dengan metode jemput bola ke Wajib Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan permintaan Wajib Pajak. 6. Akan melaksanakan <i>Tax Clearence</i> yang bekerjasama dengan PTSP Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mewajibkan para pengusaha dalam mengajukan/ memperpanjang perizinan, harus lunas Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 4 dan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 4 dan Alat-Alat Berat/Alat-Alat Besar dan Pajak
----	---	---

		Air Permukaan terlebih dahulu, sesuai dengan Intruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.54/0332/BAKUDA/2018 tentang Kewajiban Melampirkan Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah pada Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--	--

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Mengoptimalkan pengelolaan TPI dan PPI yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.	Sisi Kelembagaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Personil Pengelola PPI <ul style="list-style-type: none"> - PPI Kurau Kab. Bangka Tengah sebanyak 5 orang tenaga Honorer dengan kualifikasi 1 orang Pramuka bakti, 2 orang Pramuka kebersihan, 2 orang Satuan Pengamanan dan belum ada ASN DKP Prov.Babel sebagai Koordinator Lapangan - PPI Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Sebanyak 1 orang Tenaga Honorer dengan kualifikasi 1 orang Satuan Keamanan dan 1 orang ASN DKP Prov.Babel sebagai Koordinator Lapangan - PPI Sadai Kab. Bangka Selatan sebanyak 3 orang Tenaga Honorer dengan kualifikasi 2 orang Satuan Pengamanan, 1 orang Pramuka Kebersihan dan belum ada ASN DKP Prov.Babel sebagai Koordinator Lapangan - PPI Muara Sungai Batu Rusa Kota Pangkalpinang Sebanyak 1 orang Tenaga Honorer dengan kualifikasi 1 orang sebagai Pramuka Bakti dan 1 orang ASN DKP Prov.Babel sebagai Koordinator Lapangan (on proses) - PPI Selat Nasik Kab. Belitung sebanyak 2 orang Tenaga Honorer dengan kualifikasi 2 orang Satuan Pengamanan dan 1 orang ASN DKP Prov.Babel

		<p>sebagai Koordinator Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPI Manggar Kab. Belitung Timur belum ada penempatan tenaga Honorer maupun ASN <p>Walaupun telah disiapkan jumlah SDM tetapi masih terbatas yang sebagian besar adalah tenaga honorer, sehingga perlu dibutuhkan personil secara bertahap sampai terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana di 6 PPI sudah dianggarkan melalui APBD 2018 dan DAK 2019 - Pengelola asset yang ada di PPI diupayakan menghasilkan PAD sesuai dengan aturan yang berlaku - Biro Pemerintahan, Inspektorat, Bakuda dan DKP melakukan Rapat untuk melakukan verifikasi dan validasi aset dimulai pada bulan mei 2018 guna memperoleh hasil audit yang benar. <p>3. Operasional PPI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Operasional, sarana dan prasarana sudah dianggarkan melalui APBD induk 2018 dan Renja 2019
2.	Mempercepat proses penyusunan Raperda RZWP3K.	<p>1. Sesuai dengan Permen KP No. 23 Tahun 2016 tahapan penyusunan RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dilakukan Konsultasi Publik Dokumen Antara (Pasal 31) pada tanggal 29 Desember 2018 guna menyiapkan dokumen akhir (Pasal 32), tetapi pada saat konsultasi publik tersebut belum adanya kesepakatan atas alokasi ruang kegiatan pertambangan di zona 0-2 mil.</p> <p>2. Dalam rangka memperoleh kesepakatan alokasi ruang terutama di zona 0-2 mil, beberapa tindak lanjut yang akan dan dilaksanakan, antara lain:</p> <p>a. Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, tanggal 24 April 2018, dalam rangka memfasilitasi</p>

		<p>upaya penyelesaian permasalahan tambang di 0-2 mil laut, agar percepatan penyusunan dokumen RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan.</p> <p>b. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada poin 2.a, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan bersurat ke Kementerian ESDM RI agar memfasilitasi pertemuan antara Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, PT.Timah dan Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota se-Kepulauan Bangka Belitung guna memutuskan keberadaan IUP Pertambangan PT.Timah di posisi 0-2 mil laut.</p> <p>c. Setelah poin b selesai akan ditindaklanjuti hasil rapat dengan Tim Pokja RZWP-3-K Provinsi Kep.Bangka Belitung untuk menetapkan pola ruang serta Draft Ranperda RZW-3-K (Dokumen Final).</p> <p>d. Setelah poin c dilanjutkan kembali melakukan Konsultasi Publik, untuk memperoleh kesepakatan dengan Stakeholders (Dibuat Berita Acara).</p> <p>e. Atas kesepakatan Konsultasi Publik Tim Pokja merapungkan berkas-berkas dokumen final, untuk selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penilaian kebenaran dokumen.</p> <p>f. Atas dasar surat tersebut pada poin e Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Pra Uji Klinis melalui Tim KPD Dirjen Pengeloaan Ruang Laut antara lain menyangkut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ BA Konsultasi Teknis Peta Dasar dan Peta Tematik. ✓ BA Konsultasi Teknis Dokumen Awal ✓ Dokomen Awal. ✓ BA Konsultasi Teknis Dokumen Antara. ✓ Rancangan Peraturan Daerah
--	--	--

		<p>(Ranperda)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen Antara. ✓ BA Konsultasi Publik Dokumen Antara ✓ Dokumen Final. <p>g. Setelah <i>Pra Uji Klinis</i> oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selesai, maka kekurangan akan diperbaiki , sesuai hasil pra uji klinis. Hasilnya selanjutnya kana dikirim ke Menteri Kelautan dan Perikanan guna mendapatkan tanggapan dan saran.</p> <p>h. Setelah poin g selesai, disempurnakan atas dasar tanggapan saran, maka dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen Pembangunan Daerah oleh Tim Pokja RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>i. Setelah poin h selesai dan saran-saran Kemendagri diakomodir, maka hasilnya berupa Draft Final Ranperda, dilampiri dengan Dokumen RZWP-3-K (Lengkap), disampaikan ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Rapat Paripurna.</p> <p>j. Setelah selesai pembahasan oleh Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang RZWP-3-K dan diperoleh kesepakatan, maka Perda RZWP-3-K disahkan dalam paripurna.</p> <p>k. Setelah poin j, Perda RZWP-3-K dikirimkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.</p> <p>l. Hasil evaluasi dari Kemendagri dilakukan perbaikan.</p> <p>m. Dilakukan penetapan nomor badan hukum Perda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
--	--	---

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Program-program yang lebih inovatif dalam penyelenggaraan event-event pariwisata sehingga dampak yang dihasilkan lebih luas.	<p>Dinas kebudayaan dan pariwisata telah melakukan event-event pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga melaksanakan event-event pariwisata yang didukung langsung oleh pemerintah provinsi seperti Bangka Culture Wave, Toboali City of Fire, Festipal Tanjung Kelayang, Festipal Geopark, Toboali Tempo Doeloe dan lain-lain.</p> <p>Program atau kegiatan potensial tersebut telah direncanakan sebelum tahun berjalan. Pada pelaksanaannya, kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah (PD) atau organisasi terkait dan diinisiasi oleh asosiasi atau komunitas bidang olahraga. Selain penyelenggaraan event-event pariwisata dan budaya yang tidak kurang dari 127 event pada tahun 2018. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melaksanakan dukungan untuk event-event bersifat <i>sport tourism</i> yang biasa mendatangkan wisatawan secara missal. Kegiatan yang dilakukan antara lain memiliki tema <i>sport tourism</i> seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungailiat Triathlon; 2. Audax (diinisiasi oleh komunitas sepeda dan ISSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 3. Indo MXGP; 4. Babel Run 10k 2018 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 5. Kayak Marathon International. <p>Disamping itu, event-event yang diselenggarakan disesuaikan dengan arahan melaui rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan lebih</p>

		<p>meningkatkan kegiatan di tahun-tahun mendatang yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Berikut disampaikan beberapa dampak event olahraga bagi sektor pariwisata, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi Promosi <i>Sport Tourism</i> efektif, karena media value atau media brandingnya tinggi. Media value yang diperoleh minimal biasa dua kali lipat dari <i>direct impact</i> turis yang datang, karena dipromosikan oleh media nasional dan internasional sebelum, sesaat, dan sesudah penyelenggaraan acara. Event olahraga berskala internasional dan nasional mendapat perhatian dari media tv, cetak, radio, online. Di era digital sekarang, penayangan berita berlangsung setiap detik, hadirnya media online membuat distribusi informasi berjalan sangat cepat. Kantor media tidak jarang menitipkan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan daerah itu, seperti liputan kuliner, pariwisata, budaya, dan lain-lain. 2. Perputaran Uang Dalam Jumlah Besar Melaui <i>Sport Tourism</i>, ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi meningkat. Dampak dari <i>sport tourism</i> dapat langsung dirasakan oleh masyarakat mengingat banyak kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan. Baik peserta, panitia maupun penonton yang hadir pasti membutuhkan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Menumbuhkan Pasar Wisata Baru Pada waktu luang, peserta, official dan panitia <i>Sport Tourism</i> akan menghabiskan waktu dengan berwisata dan menikmati kuliner khas Kepulauan
--	--	---

		Bangka Belitung, sehingga hal tersebut menjadi promosi pariwisata tidak langsung bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--	---

Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pengembangan Potensi hutan melalui program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi hutan melalui Program Perhutanan Sosial, yaitu pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk izin usaha pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Desa Hutan Adat Kemitraan Capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan Bulan April 2018 seluas 26.070,49 Ha dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 6.271,24 Ha Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 17.585 Ha Hutan Desa (HD) seluas 2.214 Ha Hutan Adat belum ada realisasi Kemitraan dalam wilayah KPHP belum ada realisasi. Untuk percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/1350/Dishut/2017, tanggal 18 Desember 2017. Pada tanggal 20 Maret 2018 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1204/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang

		<p>IUPHHK-HTR Koperasi Bina Bumi Sejahtera seluas 2.405 Ha di Kabupaten Bangka Selatan.</p> <p>5. Pada tanggal 4 – 7 April 2018 telah dilakukan verifikasi teknis oleh Tim POKJA PPS dari Badan PSKL Wilayah Sumatera Medan dan Direktorat PKPS Ditjen PSKL pada 6 (enam) KTH yaitu 1 (satu) KTH di Kabupaten Bangka Tengah, 5 (lima) KTH di Kabupaten Bangka seluas 550,49 Ha.</p> <p>6. Melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) pemegang izin IUPHKm, HPHD, IUPHHK-HTR dalam Penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membentuk Kelompok Tani Hutan dan mengusulkan untuk mengelola hutan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.</p>
--	--	---

Perangkat Daerah : Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Bekerjasama dengan dinas/instansi lain dalam pengendalian kestabilan harga beras dan bahan pokok lainnya.	<p>1. Melaksanakan Rapat berkala bersama Tim TPID Provinsi, Tim Satgas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan terhadap para pelaku usaha pangan, distributor, pedagang grosir dan eceran bersama-sama Tim Satgas Pangan, Tim TPID dan Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>3. Menindak para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap usaha penimbunan dan menaikkan harga diatas harga ketentuan pemerintah.</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan pasar murah yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.</p> <p>5. Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melakukan sidak lapangan baik pasar tradisional maupun modern yang berkoordinasi dengan Satgas Pangan OPD terkait, BPOM maupun PPNS.</p>

2.	Pengembangan diversifikasi pangan pokok masyarakat selain beras.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali serta mengangkat potensi produk pangan pokok lokal masyarakat yang bersumber dan berbahan baku lokal (spesifik wilayah) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa pangan pokok lokal masyarakat yang dapat menggantikan beras seperti aruk yang berbahan baku ubi kayu (singkong) dan pangan pokok lokal masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti (substitusi) tepung terigu seperti tepung lengkir dan sorgum; 2. Membuat payung hukum, seperti Peraturan Gubernur di tingkat Provinsi diikuti Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati untuk mengangkat produk pangan lokal yang ada. Yang sedang dilakukan saat ini membuat Pergub Gema Sabuk Amang (Gerakan Makan Sayur, Buah-buahan, Kacang-kacangan dan Ayam Merawang), dan terus mensosialisasikan payung hukum diversifikasi pangan yang sudah ada, yakni Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang diikuti dengan Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang diversifikasi pangan yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai kegiatan; 3. Memperkenalkan atau mempromosikan aruk dan lengkir kepada masyarakat, baik lokal, nasional ataupun internasional melalui berbagai ajang sosialisasi, promosi dan kampanye diversifikasi; 4. Memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pendampingan, yakni pembinaan yang sifatnya bimbingan teknis khususnya pengolahan pangan lokal masyarakat disamping bantuan-bantuan fisik dalam rangka upaya meningkatkan produksi pangan lokal seperti alat/teknologi pengolahan mulai dari mekanisme sampai rumah produksi, serta bantuan uji
----	--	---

		kandungan, kemasan dan pelabelan produk.
--	--	--

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kegiatan PENAS agar dapat dialihkan ke kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat karena dinilai kegiatan ini tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Kegiatan Event PENAS merupakan kegiatan Event Nasional yang sudah ada setiap 4 tahun sekali, yang dianggarkan dari Pemerintah Pusat dan KTNA sendiri melalui dana APBN sedangkan APBD sebagai pendamping kegiatan tersebut. Kegiatan PENAS merupakan wahana bagi para petani seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar menukar informasi apresiasi, kemintraan dan promosi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan. Bahkan tahun ini, pada bulan September 2018, Bangka Belitung terpilih menjadi tuan rumah untuk kegiatan REMBUG TANI NASIONAL, yang diharapkan mampu menarik peserta dari seluruh Indonesia sebanyak 2.500 - 3.000 orang, yang secara langsung memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Babel. Hal ini merupakan cikal bakal (embrio) sebagai tolak ukur kelayakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi tuan rumah PENAS berikutnya tahun 2022 yakni PENAS XVII, dimana kehadiran peserta diharapkan mencapai 10.000 orang.
2.	Revitalisasi potensi lada putih Bangka Belitung yang semakin redup.	Pada dasarnya Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya selalu melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah kepada Revitalisasi Potensi Lada Putih Bangka Belitung. Hal ini didukung oleh Kementerian Pertanian mencanangkan program mengembalikan kejayaan rempah mulai di tahun 2017. Salah satu yang menjadi fokus pengembangan yaitu komoditas lada. Pada 2017, total pengembangan komoditas lada seluas

		1.800 Ha, melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi lada, meningkat dari tahun 2016 yaitu 900 Ha melalui program intensifikasi. Untuk tahun 2018 total pengembangan komoditas lada yaitu sebesar 2.150 Ha. Kesimpulannya pengembangan potensi lada putih selalu meningkat setiap tahunnya.
--	--	---

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1	Dapat menciptakan koperasi dan UKM yang memiliki program-program unggulan sehingga UMKM dan Koperasi memiliki produk unggulan yang dapat dikembangkan secara baik.	<p>Untuk Tahun Anggaran 2018, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dana APBD 2018 sedang melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil dalam rangka menciptakan produk-produk unggulan yang dapat dikembangkan secara baik, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pendampingan perizinan bagi 2.500 pelaku usaha dalam membuat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), sehingga produk-produk unggulan di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat legalitas dalam usaha mereka. - Memfasilitasi pelaku UKM dalam mengakses promosi dan pemasaran melalui Web Online produk-produk unggulan daerah yang ada di setiap Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 100 konten. Dan fasilitasi promosi dan pemasaran melalui web online ini dapat di akses di <i>kukm.babelprov.go.id</i> - Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM di 6 Kabupaten dan tujuan dari Sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada para peserta dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk unggulan daerah melalui sebuah aplikasi online.

		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengadakan akses promosi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah melalui PRJ kepada 20 UKM yang memenuhi persyaratan. - Memfasilitasi sertifikasi halal sebanyak 400 sertifikat halal kepada para pelaku UKM. - Melaksanakan gelar produk halal untuk kurang lebih 10 UKM di Jakarta. - Melaksanakan kerjasama 7 pelaku usaha antar daerah di Jakarta.
2	Optimalisasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan Sosialisasi ke Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga telah menginformasikan mengenai Program sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui radio dan baleho. - Untuk Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memfasilitasi sertifikasi halal sebanyak 400 sertifikat halal Kepada para pelaku UKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pengkajian ulang terhadap Sistem Resi Gudang yang belum maksimal dan banyak keluhan dari kalangan masyarakat.	a. Memperbanyak Gudang : <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini ketersediaan gudang sangat sedikit baru ada di dua tempat Puding Besar Kabupaten Bangka kapasitas 200 ton dan Desa Mangkol Kabupaten Bangka Tengah kapasitas 300 ton. - Dengan memperbanyak gudang dapat mendekatkan petani lada dengan gudang yang akan mengurangi biaya

		<p>angkut dari petani ke gudang untuk itu akan dibangun gudang di setiap kabupaten/kota.</p> <p>b. Menyiapkan Pengelola Gudang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan gudang saat ini dilakukan oleh PT.BGR yang merupakan perusahaan pemerintah, di dalam pengelolaan gudang dilakukan pendamping SDM dari Koperasi Lada Bangka Belitung yang nantinya SDM tersebut akan diberdayakan sebagai pengelola gudang setelah masa kontrak dengan PT. BGR berakhir. - Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM pengelola gudang dari Koperasi Lada Bangka Belitung akan mendapatkan pelatihan pengelola gudang dari BAPPEBTI di Jakarta. <p>c. Meningkatkan Sosialisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menyampaikan resi gudang ke masyarakat khususnya petani lada diperlukan upaya tatap muka dalam bentuk pertemuan di desa-desa kabupaten/kota oleh para penyuluh sistem resi gudang, karena masyarakat belum mengerti apa itu resi gudang. - Kegiatan sosialisasi ini membutuhkan anggaran tersendiri terlaksana kegiatan sosialisasi tersebut, di mana pada kegiatan tahun 2018 belum di anggarkan. - Upaya yang akan dilakukan memasukkan anggaran sosialisasi pada anggaran perubahan 2018. <p>d. Membuka peluang pasar baru buat lada baik dalam negeri dan luar negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan nilai jual lada petani yang baik Disperindag bekerjasama dengan Koperasi Lada Bangka Belitung untuk melakukan promosi, pertemuan usaha dengan perusahaan dan industry pengguna
--	--	--

		<p>lada nasional di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 di kantor Kementerian Perdagangan RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan MOU ekspor lada ke luar negeri dengan beberapa perusahaan, pada saat ini baru ada satu perusahaan internasional yang melakukan MOU PT.MTN dibawah induk perusahaan NAZAH HOLDING. <p>e. Memberikan Subsidi untuk Biaya Penitipan Gudang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penitipan lada di gudang di kenakan biaya simpan atas beberapa komponen biaya antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Uji Mutu; 2. Biaya PUSREG; 3. Biaya Asuransi; 4. Biaya Operasional Gudang. - Dengan diberikan subsidi diharapkan dapat meringankan biaya petani lada dalam proses tunda jual. <p>f. Meningkatkan Senergisitas antara OPD terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disperindag sebagai liding sektor senergisitas antara OPD untuk melakukan kegiatan Hulu dan Hilir dalam melaksanakan Sistem Resi Gudang, antara lain Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UKM. <p>g. Pemantau, Koordinasi da Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim koordinasi yang melibatkan semua lembaga yang terkait dalam system resi gudang antara lain: Pengelola Koperasi, PT.BGR, Lembaga Uju Mutu, Bank, Asuransi, OPD terkait, PT.KBI (PUSREG) dan BAPPEBTI.
2.	Pengembangan industri-industri hilir yang bahan baku nya sudah tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar didapatkan nilai tambah yang lebih tinggi.	<p>Pengembangan Industri sesuai dengan Indikator Sasaran pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, antara lain sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Sektor Pertanian dan Kehutanan. Bahan Baku yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

		<ul style="list-style-type: none"> - Lada; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Minyak Lada (Minyak Atsiri Lada): Penyulingan: Balsem Lada, ParfumLada 2. Diversifikasi Produk Olahan Lada: Ekstraksi: Permen Lada, Bahan Obat, Bahan Kosmetik - Kelapa Sawit; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. PKO (Palm Kernel oil) 2. CPKO (Crude Palm Kernel Oil) 3. Crude Olefin 4. Crude Palm Stearin - Karet; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Crumb Rubber (karetkering): Ban 2. Konvensional: Vulkanisir, Barang teknik dari karet, Alat rumah tangga dan Olahraga, Alas kaki dari karet 3. Lateks Pekat: Sarung tangan karet, DOT, Benang karet, Kondom. 4. Sawin Timber - Cengkeh; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. MinyakAtsiri Cengkeh: Kosmetika - Nanas; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk Olahan Nanas - Coklat (Kakao); Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Produk setengah jadi kakao (Intermediate Goods): Liqueur 2. Diversifikasi Produk hilir berbasis coklat: Malt Extract - Kelapa; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi Produk Olahan Kelapa: Anyaman Lidi, Kerajinan dari Batok
--	--	---

		<p>Kelapa.</p> <p>2. Furniture dari pohon kelapa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serai: Industri hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk olahan serai: Minyak Atsiri Serai - Gaharu: Industri hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk olahan Gaharu: Minyak Atsiri Gaharu, The Gaharu, KerajinanGaharu - Hasil Hutan; <ul style="list-style-type: none"> o Madu Alam; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk Olahan dari Madu Alam o Diversifikasi Produk Olahan Buah-buahan o Rotan; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Industri Kerajinan dari rotan 2. Industri Furniture dari rotan o Kayu 1. Diversifikasi Produk Olahan Limbah Kayu 2. Produk Furniture dari Kayu <p>2. Pengembangan Industri Sektor Kelautan dan Perikanan. Bahan Baku yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi Pengolahan HasilLaut; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi Produk Olahan Ikan 2. Cold Storage 3. Industri Pengalengan 4. Industri Penggaraman 5. Industri Pengasapan
--	--	--

		<p>6. Industri Pemindangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumput Laut Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk olahan rumput laut - Diversifikasi Produk Kerajinan Limbah Laut: Produk Kerajinan Limbah Kerang, Pengolahan Pakan Ternak dari Limbah Ikan. - Diversifikasi produk Kerajinan Akar Bahar <p>3. Pengembangan Industri Turunan Sumber Daya Mineral. Bahan Baku yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timah; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi Produk KerajinanTimah: Pewter 2. Tin Chemical 3. Kawat Solder - Kaolin; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Diversifikasi produk olahan keramik 2. Kerajinan Keramik: Souvernir, Interior Design 3. Industri Bata tahanapi 4. IndustriUbin 5. Industri Gerabah Hias - Granit; Industri Hilir yang bisa dikembangkan: 1. Industri pembuatan bahan lantai 2. Industri ornament
--	--	---

KOMISI III

Perangkat Daerah : Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Agar pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program melalui e-Monev harus didukung oleh terintergrasinya aplikasi SIMDA atau aplikasi-aplikasi perencanaan, perbendaharaan, asset dan evaluasi lainnya, sehingga memudahkan system pelaporan dan evaluasi kinerja.	<p>Integrasi e-monev online dengan SIMDA dan E-Planning masih menghadapi hambatan Database yang dikembangkan pihak pengembang sistem (system developer) seperti SIMDA (BPKP), e-Monev (Pemprov Gorontalo) dan e- Planning belum sama.</p> <p>Mengatasi hal tersebut, Biro Pembangunan telah berkoordinasi dengan Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo (selaku pengembang e-monev), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selaku penanggung jawab pengembangan Aplikasi Pemprov Kep. Bangka Belitung), BPKP Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung (SIMDA) dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (e-planning). Saat ini sedang diwacanakan pengembangan integrasi database yang memungkinkan sistem data dapat terkoneksi satu sama lain sesuai keperluan melalui integrasi aplikasi (<i>aplication integration</i>).</p> <p>Melalui integrasi aplikasi diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data dan pelaporan, validasi data secara akurat, mempermudah monitoring dan evaluasi, serta evaluasi kinerja anggaran.</p>

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Penguatan forum data provinsi dan pengembangan aplikasi babel satu data untuk meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan.	Pada Tahun 2017 tugas dan fungsi statistik untuk penguatan data di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun berdasarkan Pergub nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tugas dan fungsi statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Forum Data dilaksanakan oleh Diskominfo dan bekerjasama dengan BPS dalam pengelolaan Babel Satu Data.
2.	Penguatan kompetensi SDM Aparatur Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.	Untuk penguatan kompetensi SDM Aparatur Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah pada Tahun Anggaran 2017, sudah dilakukan melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana. Namun karena keterbatasan anggaran Tahun 2017 Bappeda hanya bisa mengirimkan sebanyak 6 (enam) orang ASN Fungsional Perencana untuk mengikuti diklat dalam rangka penguatan kompetensi SDM Perencana. Selanjutnya dalam penguatan kompetensi SDM Aparatur Perencana, Bappeda akan berupaya mengikutsertakan lebih banyak lagi Aparatur dalam diklat, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat/Kementerian

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Penguatan pembinaan dan pengawasan kelistrikan Bangka Belitung melalui adanya Inspektur Ketenagalistrikan yang handal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keahlian Inspektur Ketenagalistrikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 2. Peningkatan Dana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan. 3. Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan. 4. Penyediaan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan, seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. APD b. Alat ukur c. Kendaraan operasional
2.	Melakukan koordinasi yang intens dengan para pihak dalam Penentuan HPS Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik dan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multifungsi Energi.	Telah dilakukan konsultasi ke Direktorat Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, hasil analisa yang menyatakan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan terlampir.
3	Mengupayakan adanya Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Pulau Belitung.	Membuat Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri ESDM di Jakarta terkait usulan Pembangunan SPBE di Pulau Belitung, mengingat tahun 2018 ini sudah dilakukan konversi minyak tanah (mitan) ke LPG 3 kg.

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Agar di masa yang akan datang, lebih selektif dalam memilih kelompok masyarakat yang akan diberi pelatihan dan bantuan komposter. Diprioritaskan Kelompok masyarakat kelompok tani atau masyarakat yang mempunyai kebun/tanaman di sekitar rumah.	1. Untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (pelatihan pengelolaan sampah organik rumah tangga) di tahun berikutnya, khususnya tahun 2018 dipilih kelompok masyarakat yang akan diberi pelatihan dan bantuan komposter adalah masyarakat yang mempunyai kebun/tanaman disekitar rumah (khususnya ibu PKK atau kader kelurahan/desa).
2.	Memaksimalkan pengawasan Self Assesment bagi usaha/kegiatan yang	

<p>belum terjadwalkan dalam kegiatan pengawasan, meningkatkan kapasitas SDM pengawas di bidang lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas SDM perusahaan yang membidangi K3LH, serta tegas dalam melaksanakan sanksi bagi perusahaan/masyarakat yang tidak taat.</p> <p>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan Pengawasan self Assesment bagi usaha / kegiatan. Dengan melakukan evakuasi pasif terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup melalui laporan dokumen RKL – RPL yang disampaikan oleh perusahaan sesuai kewajiban izin yang dimiliki srtiap 6 (enam) bulan sekali. Menyusun jadwal pengawasan terhadap izin yang belum dilakukan pengawasan secara langsung kelapangan. ➤ Meningkatkan Kapasitas SDM Pengawas dibidang Lingkungan Hidup. <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan secara reguler peningkatan kapasitas dengan mengirim dan mengikuti pelatihan dan pendidikan secara rutin untuk meng- up date informasi terhadap peraturan – peraturan Lingkungan Hidup terbaru dan teknik – teknik pengawasan lingkungan hidup seperti penyusunan Berita Acara, Penyusunan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut berupa rekomendasi dan sanksi Administratif. ➤ Meningkatkan kapasitas SDM Perusahaan yang dibidangi K3LH. <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada SDM Perusahaan yang membidangi K3LH untuk meng-up date peraturan dan informasi Lingkungan Hidup terbaru. ➤ Tegas dalam pelaksanaan sanksi bagi perusahaan / masyarakat yang tidak taat terhadap semua hasil pengawasan kepada usaha /kegiatan yang ditemukan tidak taat dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap semua aspek (Aspek perizinan, Aspek Pengendalian Pencemaran Air, Aspek Pengendalian
---	--

		Pencemaran Udara, Aspek Pengelolaan LB3) akan diberikan sanksi administrative.
--	--	--

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Koordinasi yang intens antara PU, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KSOP Pangkalbalam, distrik navigasi kelas II Palembang, Pelindo II Pangkalbalam dan pihak terkait lainnya agar operasional Jembatan Batu Rusa II dilengkapi dengan pemasangan rambu buka tutup berupa lampu lalu lintas di beberapa titik menuju Jembatan Batu Rusa II.	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu melakukan koordinasi yang intens dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KSOP Pangkalbalam, Distrik Navigasi Kelas II Palembang, Pelindo II Pangkalbalam dan Pihak-pihak lainnya yang terkait dengan operasional Jembatan Batu Rusa II.</p> <p>Untuk Tahun 2018 tersedia anggaran pemasangan rambu informasi buka tutup jembatan berupa lampu lalu lintas di 3 (tiga) titik yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persimpangan Empat Dona Kembara - Persimpangan Tiga Lingkar Timur, dan - Simpang Tiga Selindung <p>Progres saat ini sedang dalam proses persiapan pengadaan barang.</p>
2.	Intens dalam pendampingan konsultan dalam rapat asisitensi untuk memberikan rekomendasi dari BIG di Cibinong.	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu melakukan pedampingan konsultan dalam melakukan kegiatan pekerjaan yang terkait dengan Bidang Ketataruangan selama ini, baik memberikan rekomendasi maupun konsultasi ke BIG di Cibinong.

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Program dan kegiatan yang penting namun belum terlaksana di Tahun Anggaran 2017 agar dapat diusulkan kembali pada Tahun Anggaran selanjutnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang dianggap prioritas dan akan diusulkan kembali pada Tahun Anggaran selanjutnya 2. Meriview dan melakukan pergeseran tahun pelaksanaan Program dan Kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022 3. Mencari alternative sumber pembiayaan melalui dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

KOMISI IV

Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Lebih cermat dan profesional dalam Penyaluran dan Pencairan Dana Hibah pada masyarakat, dimana terdapat beberapa Penerima Bantuan yang sudah lulus Verifikasi namun pada saat pencairan tidak bisa dicairkan karena alasan persyaratan administrasi yang belum lengkap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan lebih selektif dalam memilih proposal hibah dari masyarakat/ormas /lembaga/yayasan untuk diajukan mendapatkan alokasi dana hibah sesuai aturan Permendagri dan Peraturan Gubernur yang berlaku. 2. Akan lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan proposal hibah yang diajukan sehingga dapat diproses untuk dicairkan. 3. Akan lebih intensif melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi ke lokasi calon penerima hibah agar calon penerima hibah betul-betul paham akan persyaratan yang harus dilengkapi sesuai aturan Permendagri dan Peraturan Gubernur yang berlaku. 4. Jika anggaran tersedia, Biro Kesejahteraan Rakyat akan melaksanakan pertemuan dengan seluruh penerima hibah tahun berjalan (awal, tengah dan akhir) tahun anggaran untuk menginventarisir keadaan dilapangan. 5. Biro Kesejahteraan Rakyat tidak

		mencairkan dana hibah yang sudah ada di DPA dikarenakan antara pengurus Yayasan atau Lembaga bermasalah dan pada tahun 2017 ditemui pengurus yang bermasalah.
--	--	---

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Memberikan informasi yang baik serta jaminan kesehatan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.	1. Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan telah dianggarkan melalui kegiatan Sosialisasi Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan pada Tahun 2018 melalui Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.02.1.02.01.05.01
2.	Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan BPSDMK Pusat terkait pelatihan Tim Akreditasi dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Fungsional Perawat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	1. Tim Akreditasi pelatihan Nakes Fungsional Perawat telah dianggarkan pada APBD 2018 melalui Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan / SDMK. 2. Penguatan Advokasi ke BPPSDM pusat untuk penyediaan tenaga pelatih pada kegiatan pelatihan tingkat provinsi.

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan kualitas even-even olahraga tingkat nasional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat.	1. Mengklasifikasikan event-event olahraga tingkat nasional berdasarkan : a. Sumber dana penyelenggaraan 1) event olahraga yang diselenggarakan dan dibiayai dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2) event olahraga yang diselenggarakan dan dibiayai dari bukan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) event olahraga yang diselenggarakan dan dibiayai dari APBD Kabupaten/ Kota di Provinsi

		<p>Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>b. jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan</p> <p>1) single event olahraga</p> <p>2) multi event olahraga</p> <p>c. ruang lingkup olahraga meliputi :</p> <p>1) olahraga pendidikan</p> <p>2) olahraga rekreasi</p> <p>3) olahraga prestasi</p> <p>4) olahraga amatir</p> <p>5) olahraga profesional</p> <p>6) olahraga penyandang cacat</p> <p>2. Meningkatkan fungsi, tugas dan tanggungjawab Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bersinergi dengan pengurus provinsi induk organisasi cabang olahraga sehingga perencanaan, penyelenggaraan dan kesinambungan pelaksanaan event olahraga tingkat nasional.</p> <p>3. Melakukan pemutakhiran data pemetaan cabang olahraga yang berpotensi menyelenggarakan event nasional dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Ketersediaan atlet, pelatih, prasarana pendukung latihan dan perlombaan atau pertandingan.</p> <p>b. Terbentuknya pengurus induk organisasi cabang olahraga di kabupaten/kota.</p> <p>c. Kesinambungan penyelenggaraan event daerah ke event nasional maupun internasional.</p> <p>d. Merupakan cabang olahraga unggulan dan cabang olahraga berpotensi menjadi unggulan yang berpotensi mendulang medali.</p> <p>4. Perumusan peraturan terkait Petunjuk Teknis Pengajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tuan rumah event.</p> <p>5. Melibatkan peran serta masyarakat khususnya tokoh masyarakat/agama yang memiliki pengaruh di masyarakat dalam</p>
--	--	---

	<p>proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan event.</p> <p>6. Memberikan kesempatan masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan event, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Toko, distributor peralatan dan perlengkapan olahraga b. Jasa percetakan, advertising atau event organizer c. Media cetak/online, radio dan televisi pemerintah maupun swasta d. Jasa transportasi, perhotelan, dan restoran/ rumah makan <p>7. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi informasi dan telekomunikasi, kebudayaan dan pariwisata, koperasi dan UMKM di provinsi, kabupaten maupun kota.</p> <p>8. Menjalin komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif dalam rangka menjamin sumber pendanaan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan sesuai amanat pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</p> <p>9. Menyusun rencana sumber pendanaan lainnya, antara lain bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. kerja sama yang saling menguntungkan; c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>10. Berkaitan dengan huruf d angka 8, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri</p>
--	--

		<p>Pemuda dan Olahraga Nomor : 22/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan dengan membentuk Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) LPDUK juga menjalankan fungsi sebagai perencana kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga, serta pelaksanaan dan pengembangan event dan industri olahraga sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyusun rencana sumber pendanaan.</p>
--	--	--

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	<p>Segera menyelesaikan permasalahan di SMU/SMK dengan serapan anggaran yang rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan bagi pengelola keuangan di sekolah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. • Memonitoring realisasi keuangan sekolah melalui rapat rutin bulanan. • Memaksimalkan peran Kacabdin dalam pertanggungjawaban anggaran di Satuan Pendidikan. • Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas.
2.	<p>Segera mengisi jabatan-jabatan Kepala Tata Usaha di sekolah-sekolah yang masih kosong sehingga pelayanan administrasi sekolah dapat terlaksana dengan baik.</p>	<p>Membuat usulan jabatan Kepala TU Sekolah dan menyampaikannya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengisian jabatan Kepala TU sehingga pelayanan administrasi sekolah dapat terlaksana dengan baik.</p>

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan pemberian bantuan usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu untuk ikut membantu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah peraturan dan arah kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saling bersinergi, sehingga efektifitas, efisiensi dan manfaat pelaksanaan program benar-benar dapat dinikmati oleh segenap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Lebih meningkatkan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang kurang mampu dan melakukan sinkronisasi data terpadu penanganan fakir miskin dengan data sektoral penerima bantuan dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 3. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara efektif antara pusat dan daerah serta lintas sektoral sehingga prioritas pembangunan tercapai bukan kepentingan daerah tertentu secara terintegrasi dan berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Penambahan tenaga medis yang memiliki kualifikasi spesifik, seperti tenaga elektromedis.	1. RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengusulkan penambahan anggaran untuk beberapa tenaga medis spesifik di tahun 2018 diantaranya adalah tenaga perawat, tenaga dokter, tenaga teknis elektromedis.
2.	Mengupayakan penambahan alat-alat kesehatan penunjang Operasional RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan serta dapat mengupayakannya melalui dana Non APBD yang tidak bertentangan	2. RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 telah mengusulkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan.

	dengan peraturan dan perundangan.	
--	-----------------------------------	--

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Memperjelas fungsi dan tugas koordinator wilayah pengawasan tenaga kerja sebagai konsekuensi peralihan SDM Aparatur pengawas tenaga kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi untuk memperjelas fungsi dan tugas koordinator wilayah pengawasan unit kerja dinas tenaga kerja provinsi kepulauan Bangka Belitung
2.	Optimalisasi pegawai yang sudah memiliki SK Hyperkes dalam struktur kerja dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Untuk pegawai yang sudah memiliki SK HYPERKES sedang diproses untuk dialih tugaskan ke Bidang yang menangani program dan kegiatan Hyperkes sekarang yaitu bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial dan Jaminan Sosial
3.	Diversifikasi program-program pada bidang transmigrasi. Program kerja bidang transmigrasi hendaknya inovatif dan menyentuh masyarakat.	Untuk Diversifikasi program pada bidang Transmigrasi akan ditinjau kembali supaya program dan kegiatan pada bidang tersebut bisa lebih inovatif dan menyentuh langsung kepada masyarakat

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Pengadaan untuk penambahan Jembatan Bailey dan perlengkapan pendukungnya mengingat begitu pentingnya Jembatan itu apabila terjadi Bencana Alam.	1. Bahwa Penambahan Jembatan Portable Bailey tersebut sudah kita akomodir/tindak lanjuti dalam Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 s.d 2022. Tahun Anggaran 2019 Rencana Kegiatan Pengadaan Penambahan Jembatan Portable Bailey 1 (satu) unit dari sumber dana APBD Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlampir.
2.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi Koordinator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan	2. Pembentukan TRC menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk TRC

	Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah, agar evakuasi dan pertolongan saat bencana jauh lebih cepat, efektif dan efisien.	Kabupaten/Kota.
--	---	-----------------

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
No	Rekomendasi DPRD	Rencana Tindak Lanjut
1.	Penambahan tenaga Dokter Jiwa dan Dokter Sub Ahli Jiwa mengingat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya RSJ sebagai Rumah Sakit yang khusus menangani pasien kejiwaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan proses rekrutmen untuk tenaga kontrak dokter spesialis jiwa dan dokter sub spesialis jiwa pada bulan Februari 2018 melalui BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan diri. 2. Akan dilakukan penjajagan untuk kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan. 3. Akan dikonsultasikan ke Kementerian Kesehatan RI tentang kemungkinan untuk penugasan pengabdian bagi dokter spesialis jiwa dan dokter sub spesialis jiwa. <p><u>Keterangan :</u> Berdasarkan Permenkes Nomor 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memiliki 5 dokter spesialis jiwa dan 1 dokter sub spesialis jiwa. Jadi masih kurang 2 dokter spesialis jiwa dan 1 dokter sub spesialis jiwa.</p>